



LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA BONTANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dapat tersusun sebagai implementasi amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan dokumen LKPJ ini dapat menjadi salah satu media yang mampu memberikan informasi secara transparan dan komprehensif terkait pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 kepada DPRD Kota Bontang. Berbagai informasi tentang pencapaian keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dan positif untuk penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan penyajian LKPJ ini dapat menjadi cermin bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Kota Bontang untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lebih produktif, inovatif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas partisipasi aktif dan dukungannya dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang.



Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan bathin kepada kita untuk melaksanakan bagian dari pengabdian serta tanggungjawab yang baik kepada Kota Bontang yang kita cintai ini menuju terwujudnya Bontang yang Smart, Green dan Creative.

Bontang, 18 Maret 2019

Wali Kota Bontang,

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG



Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	I – 1
A. Dasar Hukum	I – 1
B. Gambaran Umum Daerah	I – 4
C. Sistematika Penulisan	I - 24
Bab II. Kebijakan Pemerintahan Daerah	II – 1
A. Visi dan Misi	II – 1
B. Strategi dan Arah Pembangunan Kota Bontang	II – 5
C. Prioritas Daerah	II - 18
Bab III. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	III – 1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	III – 1
B. Pengelolaan Belanja Daerah	III – 18
C. Pembiayaan Daerah	III – 37
D. Permasalahan dan Solusi	III - 42
Bab IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV – 1
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	IV – 3
B. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan.....	IV – 71
C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	IV – 90
Bab V. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	V – 1
A. Dasar Hukum	V – 2
B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Bantuan langsung	V – 3
C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan langsung...	V – 3
D. Permasalahan dan Solusi	V - 5
Bab VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	VI – 1
A. Kerjasama Antar Daerah	VI – 1
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI – 3
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	VI – 39
D. Pembinaan Batas Wilayah	VI – 42
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI - 43
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI - 48
Bab VII. Penutup	VII – 1
Lampiran	



Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1	Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)	I-7
Tabel 1.2	Penggunaan Tanah di Kota Bontang	I-13
Tabel 1.3	Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang	I-14
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	I-14
Tabel 1.5	Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2017	I-15
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018	I-16
Tabel 1.7	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2017	I-17
Tabel 1.9	PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2018	I-22
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang	II-4
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1	II-7
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2	II-12
Tabel 2.4	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3	II-15
Tabel 2.5	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018.....	II-18
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 dan 2017	III-10
Tabel 3.2.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2018.....	III-15
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.....	III-32
Tabel 3.4.	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017	III-33
Tabel 4.1.	Urusan Pemerintah Daerah.....	IV-1
Tabel 4.2.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2018.....	IV-5
Tabel 4.3.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2018.....	IV-10
Tabel 4.4.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018.....	IV-17
Tabel 4.5.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018	IV-22
Tabel 4.6.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018.....	IV-25
Tabel 4.7.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2018	IV-28



Tabel 4.8.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018.....	IV-30
Tabel 4.9	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018	IV-32
Tabel 4.10.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2018.....	IV-34
Tabel 4.11.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2018.....	IV-36
Tabel 4.12.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018.....	IV-39
Tabel 4.13.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.....	IV-42
Tabel 4.14.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018.....	IV-45
Tabel 4.15.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018.....	IV-47
Tabel 4.16.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2018.....	IV-49
Tabel 4.17.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2018	IV-52
Tabel 4.18.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2018	IV-55
Tabel 4.19.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal Tahun 2018.....	IV-58
Tabel 4.20.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.....	IV-60
Tabel 4.21.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2018.....	IV-63
Tabel 4.22.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2018.....	IV-65
Tabel 4.23.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2018.....	IV-70
Tabel 4.24.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanagn Tahun 2018	IV-73
Tabel 4.25.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018	IV-77
Tabel 4.26.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tahun 2018.....	IV-80
Tabel 4.27.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dan Sekretariat KORPRI Tahun 2018.....	IV-81



Tabel 4.28.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Fungsi Pendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Tahun 2018	IV-82
Tabel 4.29.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2018	IV-84
Tabel 4.30.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2018.....	IV-89
Tabel 4.31.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2018.....	IV-91
Tabel 4.32.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2018.....	IV- 92
Tabel 4.33.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2018.....	IV-95
Tabel 4.34.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2018.....	IV-97
Tabel 6.1.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Nitrate Indonesia	VI-6
Tabel 6.2.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Industrial Estate.....	VI-8
Tabel 6.3.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Parna Industri	VI-8
Tabel 6.4.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pertamina Gas.....	VI-11
Tabel 6.5.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Indominco Mandiri	VI-12
Tabel 6.6.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Black Bear Resources Indonesia.....	VI-15
Tabel 6.7.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Bontang Migas dan Energi..	VI-17
Tabel 6.8.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak NGL.....	VI-17
Tabel 6.9.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim	VI-24
Tabel 6.10.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Daya Mandiri	VI-29
Tabel 6.11.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. PLN	VI-30
Tabel 6.12.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Methanol Industri...	VI-31
Tabel 6.13.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pamapersada Nusantara	VI-33
Tabel 6.14.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Bankaltimtara	VI-36
Tabel 6.15.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KMU (Rumah Sakit PKT)	VI-37
Tabel 6.16.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. United Tractors	VI-38
Tabel 6.17	Jenis dan jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2018	VI-44
Tabel 6.18	Potensi Bencana, Penyebab dan Solusi Penanganan Bencana di Kota Bontang Tahun 2018	VI-48
Tabel 6.19	Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Bontang Tahun 2016-2018.....	VI-50



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang.....	I-4
Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang	I-5
Gambar 1.3. Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.....	I-6
Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang	I-7
Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang	I-9
Gambar 1.6 Peta Jenis Tanah Kota Bontang	I-10
Gambar 1.7 Persentase Penduduk Kota Bontang menurut Kelompok Umur Tahun 2018.....	I-16
Gambar 1.8 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bontang Tahun 2018.....	I-16
Gambar 1.9 Perkembangan IPM Kota Bontang.....	I-18
Gambar 1.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2011-2018	I-23
Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018.....	III-9
Gambar 3.2. Komposisi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2017 dan 2018 (%)	III-11
Gambar 3.3. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan 2018.....	III-33
Gambar 3.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2017 dan 2018.....	III-35



BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam seluruh rangkaian proses, dari perencanaan sampai pelaporan atas kinerja pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, ditegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2018 sebagai sebuah laporan tahunan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat laporan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2018.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat



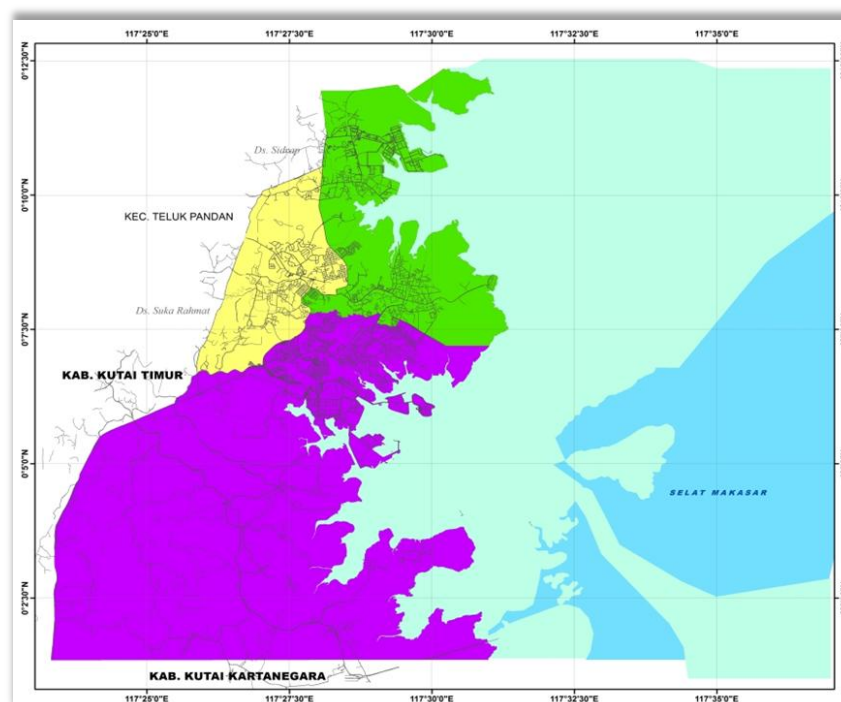
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2018;
 18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2018;
 19. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2018;
 20. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bontang Tahun 2018.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang–Undang Nomor 47 tahun 1999, bersama–sama dengan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Dengan luas wilayah sekitar 497,57 km2, Kota Bontang merupakan daerah otonomi dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur, berbatasan dengan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.

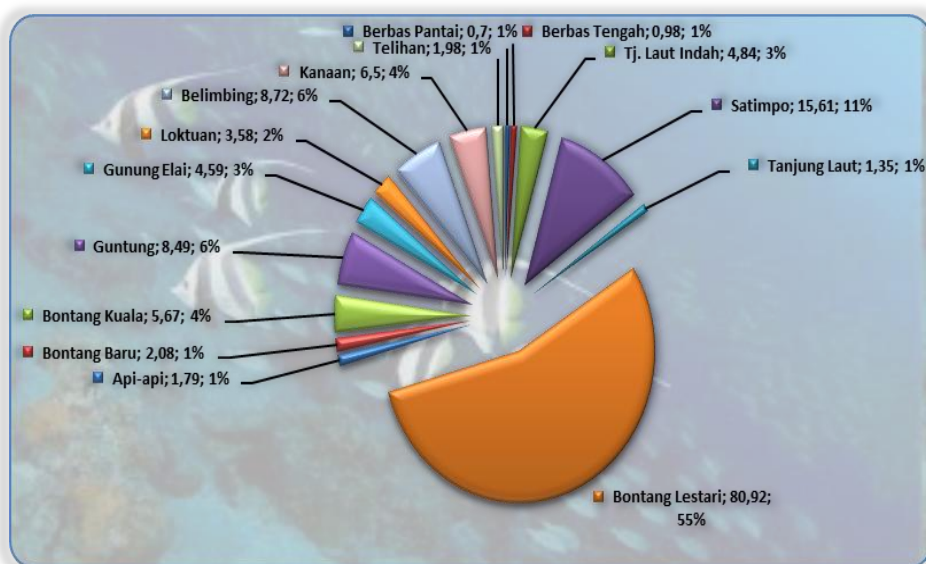


Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang

Luas wilayah Kota Bontang adalah 497,57 km2 terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km2 (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km2 (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan,

Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km², Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km², dan Bontang Barat seluas 17,20 km². Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km².

Adapun gambaran luas wilayah administrasi masing-masing kelurahan dapat disajikan pada gambar 1.2.



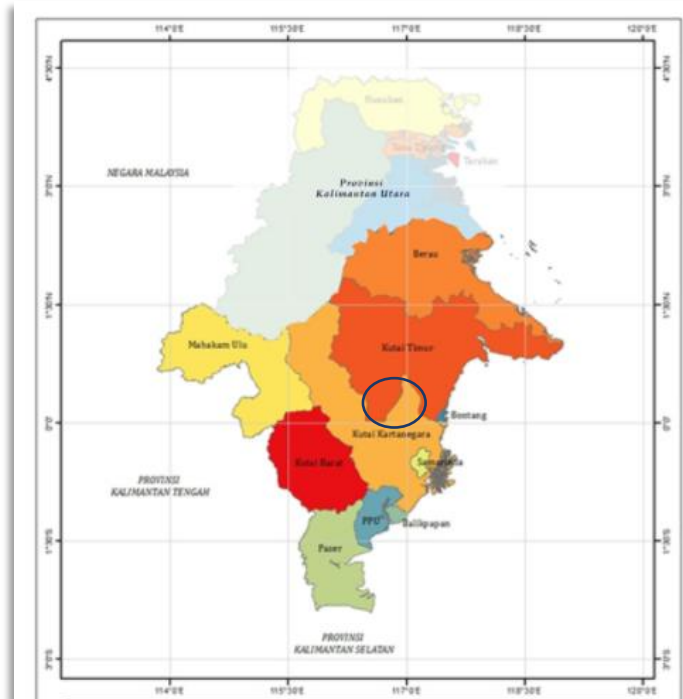
Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomi terletak di antara 117⁰23' – 117⁰38' Bujur Timur dan antara 0⁰01' – 0⁰12' Lintang Utara. Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat Makassar yang dengan panjang pantai ± 24,4 km. Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya membangun pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum.



Gambar 1.3.Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.

c. Topografi

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 106 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (48%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1.1
Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)
1.	0 – 15	5.415
2.	15 – 25	3.622
3.	25 – 100	5.723
4.	Diatas 100	20
Jumlah		14.780

Sumber: BPS Kota Bontang, 2015



Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang

d. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

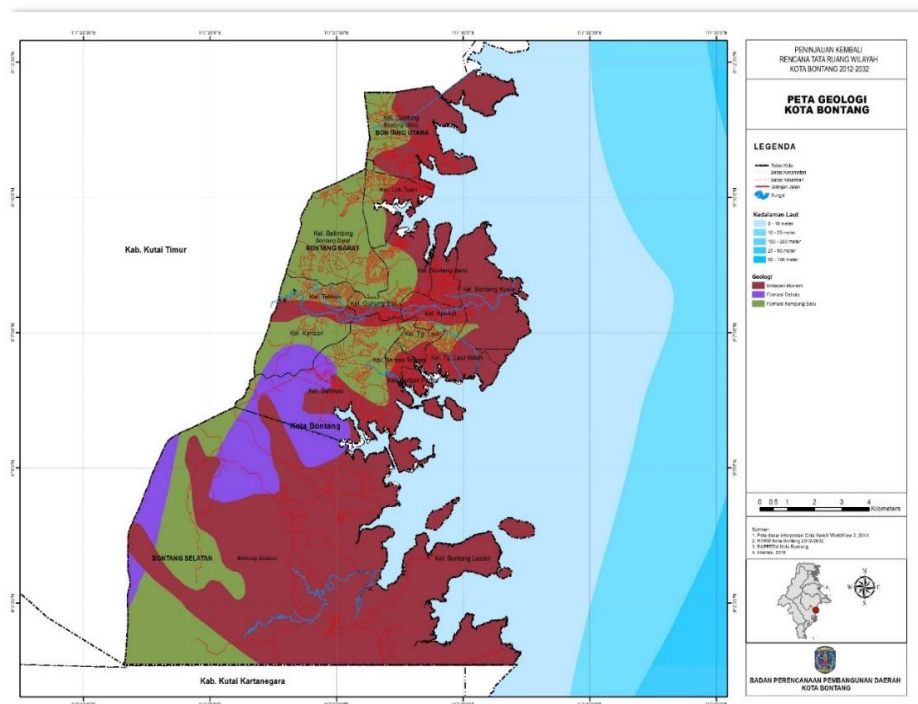
1. Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
2. Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung.
3. Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
4. Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
5. Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
6. Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan

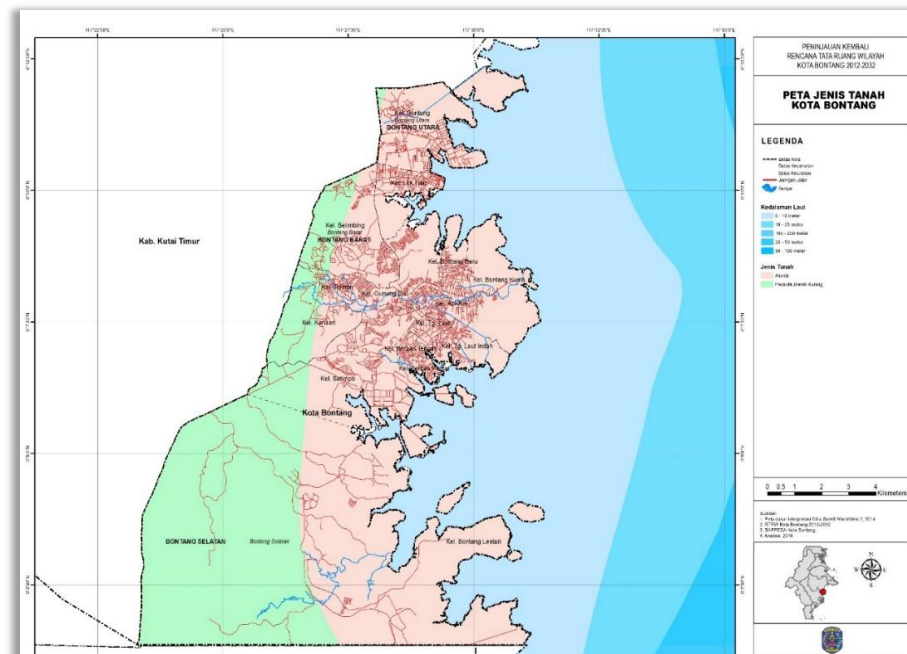
pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.

Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan antiklin dan sinklin serta sesar dan kekar. Struktur batuan tersebut terjadi pada umur Tersier awal sampai Tersier akhir, yang terlihat oleh bentuk bentang alamnya pada beberapa lokasi, tapi di tempat lain hanya dapat diketahui dari pola sebaran batuan atau dari hasil penafsiran pengukuran bidang perlapisannya.

Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. Antiklin Api-api pada Formasi Pulau Balang melandai kearah barat dan timur, dengan kemiringan lapisan berkisar dari 5-200, mendekati puncak antiklin kemiringan lapisan mencapai 500. Struktur sesar berupa patahan naik dan sesar geser jurus. Sesar naik terdapat di bagian barat berarah barat daya–timur laut melewati Gunung Lobang batik. Sesar naik ini diduga merupakan kelanjutan proses dari pembentukan antiklin. Pada peta geologi (GTL Bandung, 1990), maka pelurusan sesar naik masih diduga sebagai kelurusan sumbu antiklin.



Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang



Gambar 1.6. Peta Jenis Tanah Kota Bontang

Formasi batuan bagian barat relatif naik terhadap formasi batuan bagian timur sehingga formasi batuan tua naik terhadap yang muda. Pada beberapa tempat, terdapat formasi batuan tergeserkan oleh patahan geser (sesar mendatar), patahan ini memotong antiklin, salah satu bukti dapat dilihat adanya pergeseran dari batu gamping dengan bidang geser yang nyata di dekat S. Santan (tepi Jalan Bontang-Samarinda). Zona kelurusan patahan dapat menjadi idang lemah yang mengarahkan aliran air tanah. Strike (jurus) sesar geser jurus umumnya berarah utara-selatan atau hampir berarah barat laut-tenggara, dengan posisi memotong struktur antiklin dan sinklin dengan arah barat laut-tenggara, utara-selatan dan timur laut-barat daya.

Sesar geser diduga terjadi setelah perlipatan struktur kekar terutama dijumpai pada batu gamping dari formasi bebulu dengan arah tidak beraturan. Struktur geologi ini aktif setelah semua formasi batuan diendapkan. kegiatan tektonik diperkirakan dimulai pada Umur Pleistosen, dengan Wilayah Bontang

mengalami perlipatan dengan arah gaya lipatan dari barat dan timur, ditandai dengan adanya punggung antiklin Api-api yang letaknya memanjang dari utara ke selatan. Pada puncak antiklin tersingkap formasi batuan tertua, yang berturut-turut ke arah yang lebih muda, dimulai dari Formasi pamaluan (Tomp), Formasi Bebulu (Tmb), Formasi Pulubalang (Tmpb), Formasi Balikpapan (Tmbp), dan Formasi Kampungbaru adalah formasi batuan Tersier termuda, juga mengalami pengangkatan pada saat terbentuk antiklin, lapisan relatif miring kearah timur. Dengan adanya kemiringan yang paralel dari formasi diatas, secara hidrogeologi aliran air tanah mengikuti arah kemiringan lapisan. Setelah terjadi pengangkatan, terjadi pengendapan hasil proses geologi seperti pelapukan, erosi dan transportasi. Hal ini ditandai oleh adanya endapan kolovium disebelah barat daya Bontang dan aluvium di daerah datarannya.

e. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang merupakan bagian dari Sub DAS Santan Iilir. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang semuanya bermuara di Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut berhulu di bagian barat wilayah Kota Bontang atau di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.

Secara administratif DAS Bontang terletak di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur (DAS Bontang hulu), Kecamatan Bontang Barat (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Selatan (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Utara (DAS Bontang Tengah) dan Kecamatan Bontang Baru (DAS Bontang Hilir). DAS Bontang memiliki luas 59,710 Km² dan panjang sungai utama 41,173 Km dengan alur berkelok-kelok (meandering). DAS Bontang yang

melintasi Kota Bontang memiliki luas kurang lebih 300 Km² dan panjang sungai utama 17 Km.

f. Klimatologi

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun.

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00°C. Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th. sehingga Kota Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19%), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas 1.355,56 ha (9,170%) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Penggunaan Tanah di Kota Bontang

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
1	Permukiman		
	a. Rumah/Bangunan Gedung	1.355,56	9,17
	b. Pekarangan	972,87	6,58
	c. Fasilitas Sosial	29,76	0,20
	d. Fasilitas Umum	462,43	3,13
	e. Permukiman Atas Air	53,94	0,36
	f. Jasa	69,52	0,47
2	Tambak	323,18	2,19
3	Kawasan Industri/Pabrik		
	a. PT. Pupuk Kaltim	192,46	1,30
	b. PT. Badak NGL	278,07	1,88
	c. Industri terbatas	7,77	0,05
4	Rawa	53,54	0,36
5	Danau/Waduk/Situ	15,11	0,10
6	Hutan Kota	196,98	1,33
7	Hutan Sejenis	2.764,48	18,70
8	Bakau	1.115,51	7,55
9	Belukar	6.870,98	46,49
10	Tanah Terbuka	17,83	0,12
Jumlah		14.780,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat maupun swasta yang menjadikan potensi pengembangan wilayah lautnya sangat sempit. Penggunaan ruang laut yang terbesar adalah untuk alur pelayaran. Gambaran pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang

No	Penggunaan	Luas (Ha)	%
A	Flat		
	- Gosong karang	940	2,69
	- Pasir	158	0,45
	- Pasir lumpur	100	0,29
B	Terumbu karang	2.799	8,00
C	Alur pelayaran		
	- PT. Badak NGL	1.311	3,75
	- PT.PKT	3.464	9,90
D	Area efektif untuk kegiatan perikanan	9.384	26,83
E	Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung laut,	16.821,0	48,092
	Luas Total Wilayah Laut	34.977,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 sebanyak 170.611 jiwa, terdiri dari 89.280 jiwa penduduk laki-laki dan 81.331 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,82% atau berkurang 3.159 jiwa jika dibandingkan penduduk tahun 2017. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu 76.358 jiwa atau sebesar 45% dari jumlah penduduk Kota Bontang, sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Rasio Jenis Kelamin
1	Bontang Utara	40.000	36.358	76.358	45	110
2	Bontang Selatan	34.430	31.333	65.763	39	110
3	Bontang Barat	14.850	13.639	28.489	17	109
	Total	89.280	81.331	170.611	100	110

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

b. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Bontang tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan sebagai akibat kelahiran alami dan migrasi. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,07% dengan kepadatan penduduk tahun 2018 yaitu 1.154 jiwa/km². Adapun penyebaran penduduk secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Bontang Utara	26,20	71.106	73.284	77.772	76.358	2.714	2.797	2.968	2.914
2	Bontang Selatan	104,40	62.990	63.542	66.981	65.764	603	609	642	630
3	Bontang Barat	17,20	27.317	27.432	29.017	28.489	1.588	1.595	1.687	1.656
Jumlah		147,80	161.413	164.258	173.770	170.611	1.092	1.111	1.176	1.154

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2017 masih berada di Kecamatan Bontang Utara yakni sebesar 2.914 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan yaitu 630 jiwa/km².

c. Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur terbanyak pada umur 0-4 tahun sebanyak 17.537 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil pada umur 75 tahun keatas sebanyak 609 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut umur sesuai Tabel 1.6.

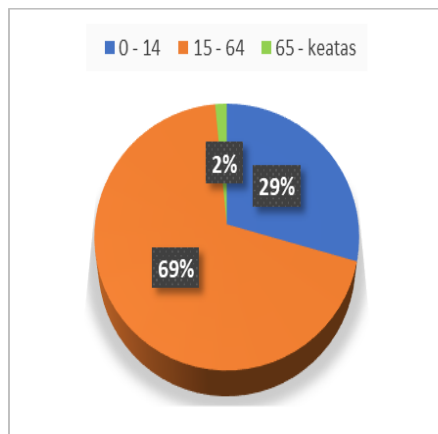
Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Kelompok Umur	2017
0 - 4	17.537
5 - 9	16.866
10 - 14	15.770
15 - 19	14.886
20 - 24	13.782
25 - 29	15.002
30 - 34	15.022
35 - 39	14.650
40 - 44	14.770
45 - 49	13.167
50 - 54	8.922
55 - 59	5.014
60 - 64	2.576
65 - 69	1.346
70 - 74	692
75+	609
Jumlah	170.611

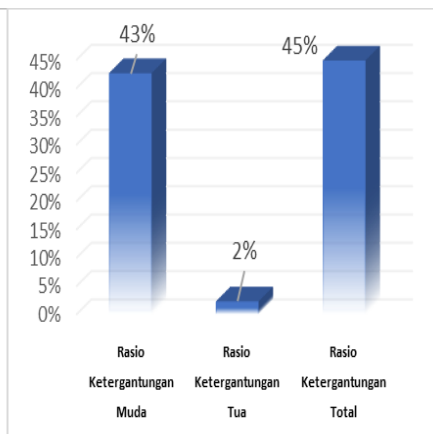
Sumber : BPS Kota Bontang, 2018

Dari tabel 1.6 terlihat bahwa kondisi struktur umur penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 yang telah dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan, penduduk Kota Bontang tergolong penduduk transisi, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69% (Gambar 1.7). Besarnya penduduk usia produktif ini perlu diantisipasi dengan kebijakan dan program pemerintah pro-job. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Gambar 1.7

Persentase Penduduk Kota Bontang menurut Kelompok Umur Tahun 2018



Gambar 1.8

Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bontang Tahun 2018

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Bontang dapat diukur dengan rasio ketergantungan, yakni membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) (Gambar 1.8). Rasio ketergantungan penduduk tahun 2018 sebesar 45%, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 43% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 2%. Dari gambaran tersebut juga terlihat bahwa pada tahun 2018 penduduk usia kerja di Kota Bontang masih dibebani tanggung jawab akan penduduk usia muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua. Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan dimana penduduk merupakan sasaran utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas hidupnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang diukur dengan menggunakan indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) dimensi parameter, yaitu:

- 1) Derajat kesehatan dan usia hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup.
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan kombinasi antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.
- 3) Standar hidup layak penduduk yang dilihat dari paritas daya beli masyarakat.

Tabel 1.7

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2017

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,67	73,68	73,69	73,71	73,72
Harapan Lama Sekolah (HLS) Usia 7 Tahun Keatas (Tahun)	12,50	12,68	12,77	12,79	12,88
Rata-rata lama bersekolah usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	10,34	10,35	10,38	10,39	10,70
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta rupiah)	15,82	15,88	15,98	16,16	16,27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,34	78,58	78,78	78,92	79,47

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama periode 2013-2018 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2017, pencapaian IPM Kota Bontang sebesar 79,47 atau mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin dari tahun 2016.



Gambar 1.9. Perkembangan IPM Kota Bontang

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kehadiran PT. Badak NGL sebagai industri pengilangan gas alam cair dan PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk. sebagai industri pupuk menjadikan Bontang

cukup dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga dengan kehadiran perusahaan PT. Black Bear dan PT. Kaltim Nitrat Indonesia yang merupakan industri pembuat bahan amonium nitrat yang bertaraf internasional, akan menjadi potensi unggulan daerah karena mampu memberikan income besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di Bontang, Kalimantan Timur dan Nasional. Potensi lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi potensi unggulan serta dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi Kota Bontang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jasa Kelautan

Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa kelautan yang dapat dikembangkan berupa jasa transportasi laut. Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan lokal, regional dan internasional. Dengan kedalaman alur yang berkisar antara 17 – 20 m, perairan Kota Bontang dapat dilayari kapal-kapal besar dengan kapasitas 20.000-40.000DWT serta dapat melakukan bongkar muat. Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat umum, antara lain pelabuhan khusus yang berjumlah 3 buah (PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, dan PT. Indominco Mandiri), pelabuhan Umum di Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah dan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjung Limau.

2. Perikanan

Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 ha atau 70,30% dari luas Kota Bontang maka perikanan dan kelautan sangat potensial dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Potensi perikanan yang menjadi unggulan saat ini adalah kepiting, ikan kerapu, kakap, lobster, teripang dan rumput laut. Jenis-jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan pasar internasional. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi kebutuhan lokal sedangkan kebutuhan pasar regional dan

internasional hanya dapat dipenuhi dalam jumlah kecil. Dengan demikian pengembangan kegiatan perikanan mempunyai peluang yang sangat besar mengingat kebutuhan konsumsi ikan baik dalam negeri maupun luar negeri terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan rumput laut yang sangat menjanjikan karena mempunyai kualitas terbaik ditingkat nasional.

3. Pariwisata

Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi wisata yang layak untuk dikembangkan seperti: pemukiman di atas air, wisata kuliner, hutan mangrove dan terumbu karang. Objek wisata pemukiman di atas air dapat dipadukan dengan hiburan, tempat bersantai dan industri pengolahan perikanan skala rumah tangga. Terdapat pula pesta laut sebagai acara tahunan untuk masyarakat pesisir seperti di Bontang Kuala yang diisi dengan acara adat disertai hiburan rakyat. Selain itu, Kota Bontang juga mengadakan acara pesta adat Erau Pelas Benua yang dilaksanakan di Kelurahan Guntung. Berdasarkan kepercayaan warga setempat, bahwa acara pesta adat Erau Pelas Benua dilaksanakan sebagai ritual tolak bala. Acara ini dirangkai dengan olahraga tradisional antara lain berupa permainan sumpit dan gassing. Wisata kuliner yang sudah eksis terdapat di Bontang Kuala serta di Selangan. Komoditas yang ditawarkan berupa masakan khas Bontang dan ikan bakar segar dengan suasana pemandangan laut. Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 ha. Kawasan tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi ekowisata karena beberapa faktor pendukung antara lain: mudah dijangkau, memiliki struktur tegakan yang sempurna, serta spesies penyusun tegakannya beraneka ragam. Hutan mangrove Kota Bontang tersebar di sepanjang pesisir pantai yang membentang mulai dari Guntung, Gunung Elai, Bontang Kuala, Rawa Indah, Teluk Kadere dan Manuk-manukan. Ketebalannya dari garis pantai ke arah darat bervariasi antara 50 – 710 M. Terumbu karang potensial untuk wisata snorkeling dan diving. Lokasinya berada di Karang Kiampau, Karang Segajah, Agar-agar, Melahing,

Kedindingan, Beras Basah dan Tihik-tihik. Terumbu karang dapat dijumpai sampai kedalaman 15 m dan dihuni oleh ikan-ikan hias maupun komersil.

b. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di Kota Bontang dalam periode satu tahun. Nilai PDRB tersebut sekaligus menggambarkan pula kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kota Bontang yang dicerminkan dengan PDRB yang dinilai harga berlaku mengalami kenaikan, namun yang dihitung dalam harga konstan mengalami penurunan. PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.41,54 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -3,41%. Dengan demikian nilai PDRB tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi negatif ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai yang dihasilkan sektor industri pengolahan yang selama ini mendominasi PDRB Kota Bontang dengan migas, dimana pada tahun 2014 kontribusinya mencapai 83,93%.

Nilai PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010 masih mengalami penurunan hingga tahun 2018 dengan kisaran tahun 2017 adalah Rp.38,54 triliyun dan tahun 2018 Rp.37,19 triliyun.

Namun demikian jika nilai PDRB dihitung dengan mengeluarkan unsur dari hasil pengolahan minyak dan gas, maka nilai PDRB mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp.19,59 triliyun dan mencapai Rp.20,95 triliyun pada tahun 2018.

**Tabel 1.9**

PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha
(ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2017

No.	Lapangan Usaha/Industri	2014*	2015**	2016***	2017***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	353.995,35	399.921,72	451.747,08	510.400,67
2	Pertambangan dan Penggalian	587.774,81	512.691,69	254.329,74	234.736,30
3	Industri Pengolahan	4.869.242,97	33.470.041,62	31.641.500,45	29.942.468,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.432,90	9.404,20	10.113,03	11.285,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.480,24	7.758,20	8.113,03	8.410,41
6	Konstruksi	1.991.244,34	2.025.801,35	2.075.265,50	2.145.791,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.039.278,32	1.075.545,56	1.112.719,68	1.163.515,04
8	Transportasi dan Pergudangan	516.466,81	532.218,65	554.642,41	578.210,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155.377,73	159.524,27	164.773,58	174.367,46
10	Informasi dan Komunikasi	339.822,49	342.409,75	385.599,28	418.306,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	305.999,72	317.187,77	308.034,14	312.782,87
12	Real Estat	175.203,28	179.439,64	180.312,67	183.355,47
13	Jasa Perusahaan	192.842,58	210.432,72	223.877,81	245.497,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428.262,12	434.737,91	469.981,58	492.776,70
15	Jasa Pendidikan	277.125,45	270.789,97	354.225,52	398.628,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.058,97	188.877,63	231.582,21	252.141,09
17	Jasa lainnya	100.834,28	106.379,52	115.182,39	121.856,16
Produk Domestik Regional Bruto		41.544.442,36	40.246.162,17	38.542.000,09	37.194.530,66
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product @		17.190.924,14	18.521.965,50	19.587.169,90	20.956.326,00

* : angka sangat sementara

** : angka sangat sementara

*** : angka proyeksi

Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

Proyeksi PDRB pada tabel 1.9 dilakukan dengan mengacu pada tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2017, dimana berdasarkan perhitungan angka sangat sementara BPS, pertumbuhan ekonomi dengan migas masih mengalami pertumbuhan negatif mencapai -3,13%, meskipun jika dibanding tahun 2014 dimana pertumbuhan ekonomi tercatat -3,41%, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kota Bontang tahun 2016 dan tahun 2017 diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran -3 s.d -4%. Situasi ekonomi nasional dan masih belum pulihnya harga komoditas utamanya minyak dunia diperkirakan akan

memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan PDRB Kota Bontang yang masih sangat didominasi sektor migas. Disamping itu tren penurunan produksi migas diperkirakan masih akan berlanjut.

Dengan perhitungan PDRB tanpa unsur Migas, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2015 mencapai 7,74% meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum pola pertumbuhan ekonomi tanpa migas menunjukkan bahwa pertumbuhannya akan mengalami kenaikan pada saat pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami tekanan dan sebaliknya. Meskipun secara keseluruhan perekonomian Kota Bontang tanpa migas terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya sangat fluktuatif dan terlihat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan migas. Peran sektor-sektor ekonomi tanpa migas meningkat jika sektor ekonomi dengan migas mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.10.

Gambar 1.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bontang 2011-2017



Sumber: SIPD Tahun 2018 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021



C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII : PENUTUP



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

A.1. Visi

Visi Pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021 adalah “**Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**”. Rumusan Visi tersebut mengandung elemen pokok pembangunan yaitu Menguatkan Bontang sebagai **Kota Maritim Berkebudayaan Industri** yang Bertumpu pada **Kualitas Sumber Daya Manusia** dan **Lingkungan Hidup** untuk **Kesejahteraan Masyarakat**. Secara filosofis masing-masing elemen pembangunan tersebut mengandung makna yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut:

a. Kota Maritim

Kota Bontang sebagai entitas wilayah administratif dan ekologis didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Mewujudkan Bontang sebagai kota maritim pada prinsipnya merupakan keyakinan akan potensi utama kewilayahan yang memang sangat didominasi oleh pesisir dan laut. Dimensi kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore). Fokus pengembangan potensi maritim ini juga sejalan dengan RPJMN 2015-2019 khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan yang salah satu fokusnya adalah kemaritiman dan kelautan.



b. Berkebudayaan Industri

Sektor Industri merupakan sektor utama yang telah menjadi cikal-bakal tumbuh dan terbentuknya Kota Bontang sebagai daerah otonom. Oleh karena itu budaya industri telah sangat mewarnai dinamika pembangunan daerah Kota Bontang. Dalam konteks pembangunan Bontang sebagai sebuah kota, pengembangan sektor industri merupakan keniscayaan dan pilihan rasional mengingat berkembangnya industri merupakan salah satu indikator utama kemajuan. Budaya industri yang sangat dinamis mewakili sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya. Sebagai elemen visi yang secara filosofis menggambarkan cita-cita pembangunan ekonomi daerah masa depan, berkebudayaan industri bermakna bahwa industri baik industri maritim maupun industri petrokimia akan berkembang dan semakin mapan dalam perannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia yang ingin diwujudkan dalam pernyataan visi RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi untuk masa depan yang akan menjadi salah satu pemicu efektifnya pencapaian dimensi pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai elemen utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan baik dari sisi akses maupun kualitasnya. Sejalan dengan visi untuk mewujudkan kota berkebudayaan industri, pengembangan SDM tentu akan diarahkan pada penguatan dan penguasaan bidang industri sehingga pada gilirannya akan siap bersaing dan siap mengisi kebutuhan tenaga kerja baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.



d. Kualitas lingkungan hidup

Kota Bontang adalah kota dengan struktur industri yang sangat kuat, disamping menjadi sektor utama penopang perekonomian kota, keberadaan industri tersebut juga berimplikasi pada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan pencemaran. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keseimbangan antara pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Elemen kualitas lingkungan hidup dalam struktur visi pembangunan RPJMD merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai elemen utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

e. Kesejahteraan Masyarakat

Elemen kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin diwujudkan melalui implementasi berbagai program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan industri yang produktif dan berkeadilan, dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya elemen-elemen pembangunan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik untuk saat ini maupun masa datang.

A.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:



1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

A.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang

Misi I : Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia			
Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua
		2.	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua
2.	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3.	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama
		4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Misi II: Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup			
Tujuan		Sasaran	
1.	Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1.	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi
		2.	Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan
		3.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau



		4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
		5.	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6.	Meningkatnya akses pelayanan air minum
		7.	Terlaksananya konservasi sumber daya air
3.	Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
		9.	Terselesaikannya permasalahan banjir
Misi III : Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim			
Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
		2.	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
		3.	Meningkatnya Perdagangan dan industri
2.	Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	4.	Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota
		5.	Meningkatnya usaha mikro kecil

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Bontang, maka telah ditetapkan strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran pembangunan. Tabel berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Bontang tahun 2016-2021.



Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan kualitas Pendidikan untuk semua	1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan status lembaga pendidikan.	1.1.	Peningkatan persentase tingkat kelulusan
				1.2.	Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan sekolah rujukan
				1.3.	Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan Anak Usia Dini
				1.4.	Mendorong status STITEK Bontang menjadi Perguruan Tinggi Negeri
			2. Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.	2.1.	Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas dan aksesibilitas perpustakaan bagi masyarakat. Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat.	3.1.	Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah
				3.2.	Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan.
			4. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung peningkatan prestasi siswa yang berahlak mulia dan berwawasan lingkungan	4.1.	Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting
				4.2.	Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalui pendidikan agama



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan untuk semua		4.3.	Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (<i>Eco School</i>)
				4.4.	Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa.
			1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan	1.1.	Peningkatan jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
				1.2.	Memberikan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan	2.1.	Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
				2.2.	Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu
				2.3.	Peningkatan mutu pelayanan, sarana dan prasarana RSUD
			3. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan	3.1.	Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan
			4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan perbaikan gizi masyarakat	4.1.	Mendorong peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam upaya penerapan PHBS
				4.2.	Melakukan perbaikan gizi masyarakat
				4.3.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
				4.4.	Program pengembangan model operasional BKB Pos Yandu PADU
				4.5.	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			5. Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyebaran penyakit menular dan pencegahan penyakit tidak menular	5.1.	Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular
				5.2.	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
			6. Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya aktifitas kreatif dan olahraga yang kompetitif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasi	6.1.	Pengembangan event kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga
				6.2.	Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga
				6.3.	Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi Anak dengan Disabilitas (ADD)
2.	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	1. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama	1. Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, remaja dan perempuan.	1.1.	Pengembangan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
			2. Meningkatkan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang mengalami permasalahan sosial penyandang cacat.	2.1.	Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) baik kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			3. Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparaturnya pemerintah daerah	3.1.	Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat
			4. Pemerataan guru dan penyuluh agama serta mengedepankan	4.1.	Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			inovasi metode pembelajaran dalam rangka menjawab tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat	4.2.	Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan
				4.3.	Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar
			5. Membangun dan mengembangkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dalam keberagaman.	5.1.	Mengoptimalkan Peran lembaga politik, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan organisasi keagamaan.
				5.2.	Pengembangan pusat-pusat kegiatan keagamaan
				5.3.	Penguatan dan Internalisasi ideologi Pancasila dan Nilai-nilai kebangsaan
				5.4.	Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik
				5.5.	Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik
				5.6.	Peningkatan peran ormas
		2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	1. Penguatan kelembagaan perangkat daerah dilakukan selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur para aparat, juga dengan penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi	1.1.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan Kelurahan
				1.2.	Penguatan data basis RT dan RW
				1.3.	Penguatan kelembagaan masyarakat
			2. Penguatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	2.1.	Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalui musrenbang yang direalisasikan dalam RPJM



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			pembangunan.	2.2.	Pemetaan <i>stakeholder</i> potensial di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten
			3. Mendorong penegakan hukum menjalankan perundangan daerah, Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat memberikan kepastian realisasi program-program pembangunan	3.1.	Penegakan peraturan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terutama untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan kenyamanan
				3.2.	Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4. Meningkatkan implementasi <i>e-government</i> disertai pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah	4.1.	Implementasi <i>e-Government</i>
				4.2.	Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan elektronik
				4.3.	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
			5. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah disertai Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	5.1.	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan
				5.2.	Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pengawas
				5.3.	Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.
			6. Mengoptimalkan keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi	6.1.	Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif
				6.2.	Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Bontang



Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

Misi 2 Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1	Membangun Kota yang Ramah Lingkungan	1. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	1. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>)	1.1.	Peningkatan Penanganan Sampah
				1.2.	Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Daerah
				1.3.	Pemanfaatan gas methan di TPA Sampah
			2. Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)	2.1.	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan
				2.2.	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak
				2.3.	Pembentukan unit pengelolaan limbah perkotaan
		2. Meningkatnya Pengelolaan limbah	1. Pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur pengolahan limbah usaha dan kegiatan	1.1.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan
				1.2.	Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
		3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Mengoptimalkan fungsi RTH eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempadan sungai	1.1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
			2. Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya peyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon	2.1.	Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon dilingkungan perkotaan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas	1.1.	Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA), Rumah Susun Milik (RUSUNAMI) dan Rumah Swadaya serta peningkatan kualitas hunian sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh
				1.2.	Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh
		5. Menurunnya laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	1. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1.1.	Pemanfaatan teknologi penerangan hemat energi listrik dan ramah lingkungan.
			2. Meningkatkan bangunan gedung/fasilitas umum berwawasan lingkungan	2.1.	Pelaksanaan audit energi untuk gedung-gedung pemerintahan
			3. Mengurangi polusi udara	3.1.	Pengurangan polusi udara dari emisi kendaraan bermotor
				3.2.	Peningkatan perilaku budaya bersepeda
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Air Minum	1. Meningkatnya akses pelayanan air bersih	1. Meningkatkan kapasitas pelayanan air minum	1.1.	Pengembangan sumber air baku air minum
				1.2.	Peningkatan cakupan pelayanan air minum
		2. Terlaksananya konservasi sumber air	1. Menjaga ketersediaan air baku dan air minum	1.1.	Pengendalian dan pemantauan kedudukan air tanah
3	Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi informasi	1.1.	Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)
				1.2.	Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			2. Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak	2.1.	Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove
				2.2.	Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir
		2. Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana	1. Mitigasi dan Penanganan Bencana melalui pemetaan potensi bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, penyuluhan dan pelatihan	1.1.	Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)
				1.2.	Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan
			2. Menata kawasan rawan bencana	2.1.	Penataan Kawasan Rawan Banjir



Tabel 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

Misi 3. Menjadikan Kota Bontang Sebagai *Creative City* Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	1. Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi penerimaan PAD dan investasi	1.1.	Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan pro rakyat
				1.2.	Peningkatan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di semua sektor
				1.3.	Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi
		2. Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	1. Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut	1.1.	Membangun satu perusahaan industri pengolahan rumput laut
				1.2.	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
				1.3.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya
			2. Mengembangkan kegiatan pariwisata pesisir dan modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi wisata unggulan	2.1.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata
				2.2.	Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya
				2.3.	Penetapan dan pelestarian situs cagar budaya
				2.4.	Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan.
			3. Mengembangkan sarana prasarana wisata serta promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata	3.1.	Penciptaan produk-produk yang mempunyai kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata
				3.2.	Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan budaya
				3.3.	Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
		4. Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi hanya 3 hari		4.1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu (PTSP)
				4.2.	Menciptakan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan
		3. Meningkatnya perdagangan dan industri	1. Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada	1.1.	Peningkatan kualitas pasar tradisional
				1.2.	Pembangunan pasar tradisional
			2. Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah	2.1.	Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
				2.2.	Penataan data base koperasi dan UMKM yang valid
				2.3.	Pengembangan SDM gerakan koperasi
				2.4.	Pendampingan pelaku usaha mikro
				2.5.	Fasilitasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan eskpor
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kota Bontang	1. Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat	1.1.	Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah tangga di setiap kelurahan
			2. Membangun sarana dan prasarana transportasi publik yang berorientasi pada kenyamanan dan ramah lingkungan.	2.1.	Peningkatan kualitas transportasi massal.
				2.2.	Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar daerah.
		2. Meningkatnya pembangunan berbasis partisipasi	1. Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.	Mendorong perkembangan koperasi produsen unggulan berbasis SDA unggulan daerah
				1.2.	Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
		masyarakat			mikro kecil
				1.3.	Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro
				1.4.	Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha baru kreatif
				1.5.	Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil
			2. Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan	2.1.	Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap kelurahan (<i>One Village One Product</i>)
			3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas untuk mendukung ketahanan pangan daerah	3.1.	Peningkatan produksi hasil pertanian dalam arti luas
				3.2.	Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat

C. Prioritas Daerah

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah maka arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2018 yakni: "Penguatan sektor-sektor pembangunan daerah menuju pengembangan sektor ekonomi maritim untuk perekonomian daerah yang berdaya saing". Berdasarkan arah kebijakan di atas maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Prioritas	Sasaran Pembangunan
Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan
	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat
	Angka putus sekolah menurun
Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat
	Angka kesakitan (Morbiditas) menurun
	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat
Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin
	Menurunkan angka pengangguran
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
	Angka kriminalitas menurun
Penataan pemukiman dan infrastruktur wilayah	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni
	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh
	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat
Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun
Penghijauan	Kawasan RTH meningkat
Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang dikelola dengan baik meningkat
Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan	Meningkatnya masyarakat nelayan yang ramah terhadap ekosistem laut dan pesisir
	Jumlah objek wisata laut dan pesisir bertambah
Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun
	Kualitas air sungai dan danau meningkat
Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air
Polusi dan Emisi	Meningkatnya kualitas udara
Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang
Daya saing ekonomi - Iklim Usaha dan Investasi - Infrastruktur	Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif
Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim
Perdagangan dan industri	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat.



Penetapan prioritas pembangunan tersebut menjadi rujukan dalam menentukan program-program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018. Implementasi program-program pembangunan secara operasional dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah melalui belanja langsung.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa termasuk didalamnya daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber peningkatan daya saing bangsa pada lingkup regional Asia maupun internasional.

Kota Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kemajuan kesejahteraan rakyat dengan upaya pelaksanaan sistem pelayanan pemerintah daerah yang responsif, efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah dan salah satu mesin pendorong yang digunakan Pemerintah Kota Bontang dalam menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah berusaha difungsikan secara optimal sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, alat untuk memotivasi aparatur dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kota Bontang terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang

disebabkan tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sedangkan kemampuan daerah atau kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2018 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut:

A. 1. Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target



pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 4) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 5) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum



menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

- 7) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya serta memperhatikan realisasi pendapatan DBH-Pajak 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.
- 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN



Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 serta memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-SDA 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018.

- 3) Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan;
- c. Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari



Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018.
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 3) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.
- 5) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.
- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 7) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun

perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

- 8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan-penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Secara umum **arah kebijakan pendapatan daerah**, adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
3. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.

A. 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

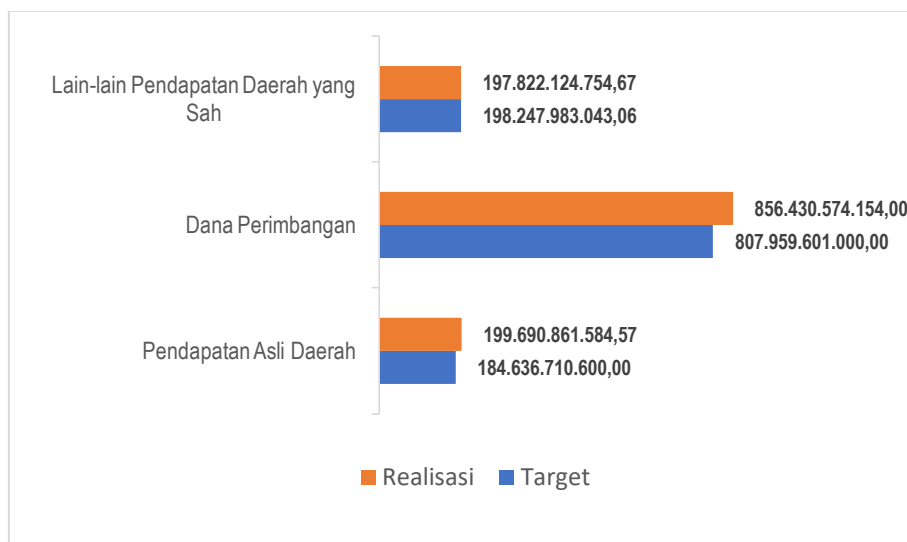
Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam upaya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah melakukan upaya antara lain:



1. Melakukan intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara penyederhanaan administrasi dan restrukturisasi kelembagaan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah;
 - c. Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan agar proses pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien, validasi dan updating data, serta melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;
 - e. Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target pajak dan retribusi;
 - g. Pengawasan penyetoran untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah melalui pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses penyetoran PAD, dan melakukan evaluasi.
2. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataan penerimaan.

A. 3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp.1.190.844.294.643,06 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.184.636.710.600,00, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.807.959.601.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.198.247.983.043,06. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.253.943.560.493,24 atau 105,30 persen dari target yang ditetapkan, terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 199.690.861.584,57 atau 108,15 persen dari target. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 856.430.574.154,00 atau 106,00 persen dari target, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 197.822.124.754,67 atau 99,79 persen dari target.



Gambar 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, sedangkan untuk penerimaan Dana Perimbangan mengalami



penurunan cukup signifikan. Perkembangan realisasi pendapatan Kota Bontang Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

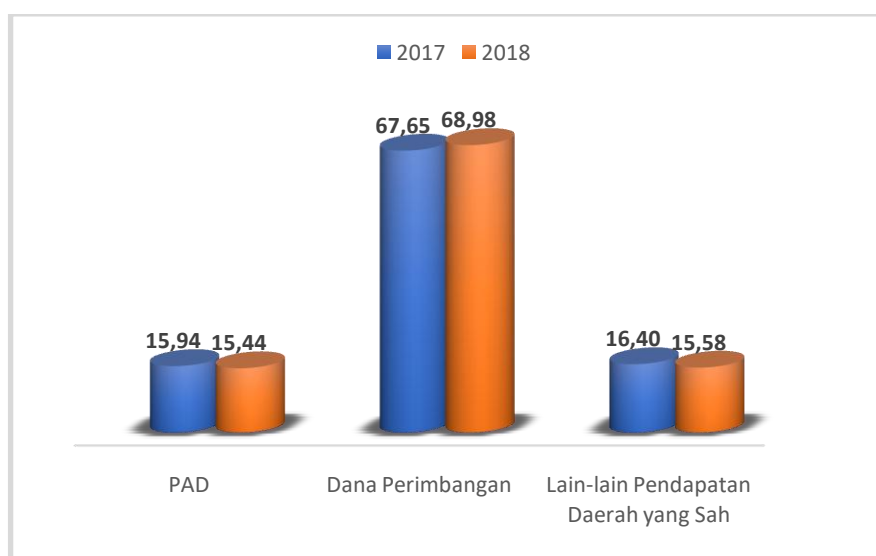
URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.241.484.432.872,07	1.060.383.984.060,76	14,59
1. Pendapatan Asli Daerah	191.626.529.239,07	169.076.698.653,40	11,77
- Hasil Pajak Daerah	112.116.275.421,00	82.122.896.197,00	26,75
- Hasil Retribusi Daerah	3.980.779.127,75	4.596.396.523,51	-15,46
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.779.545.627,92	6.014.543.695,44	-25,84
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.749.929.062,40	76.342.862.237,45	-7,91
2. Dana Perimbangan	856.430.574.154,00	717.385.768.954,00	16,24
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	564.531.184.160,00	411.561.773.702,00	27,10
- Dana Alokasi Umum	215.830.009.000,00	203.310.751.000,00	5,80
- Dana Alokasi Khusus	76.069.380.994,00	102.513.244.252,00	-34,76
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	193.427.329.479,00	173.921.516.453,36	10,08
- Pendapatan Hibah	10.441.460.000,00	-	100,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	151.655.373.000,00	128.188.899.000,00	15,47
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24.750.000.000,00	7.500.000.000,00	69,70
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.769.154.000,00	33.990.463.000,00	-489,18
- Penerimaan Lain-Lain	811.342.479,00	4.242.154.453,36	-422,86

Sumber: BPKD Kota Bontang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa secara umum realisasi pendapatan Kota Bontang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dari Rp. 717.385.768.954,00 pada tahun 2017 menjadi Rp.856.430.574.154,00 pada tahun 2018. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, namun karena masih besarnya proporsi komponen Dana Perimbangan terhadap

pendapatan Kota Bontang, mengakibatkan perkembangan pendapatan daerah mengalami tren penurunan. Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah menunjukkan kontribusi komponen pendapatan pada pendapatan agregat Kota Bontang. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Bontang tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Komposisi Pendapatan Kota Bontang
Tahun 2017 dan 2018 (%)



Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 masih sedikit menurun mencapai 15,94 persen tahun 2017 menjadi 15,44 persen dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah menurun dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang.

A.3.1. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp. 184.636.710.600,00 , dengan realisasi mencapai Rp. 199.690.861.584,57 atau 108,15 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:



a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 109.655.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 119.410.487.414,00 atau 108,90 persen dari target yang ditetapkan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 4.183.078.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.980.779.127,75 atau 95,16 persen dari target yang direncanakan.

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2018 secara keseluruhan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp. 5.265.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 4.779.545.627,92 atau 90,78 persen dari target yang direncanakan. PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada BPD KALTIM, Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BME dan PT. Bontang Transport.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan

Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya, Pendapatan dari BLUD, Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Dana BOS.

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 65.533.632.600,00 dengan realisasi mencapai Rp. 71.520.049.414,90 atau 109,13 persen dari target yang direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat pendapatan dari RSUD Kota Bontang selaku BLUD sebesar Rp. 54.799.741.182,96 yang dikelola/ digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Bontang.

A.3.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp. 807.959.601.000,00, dengan realisasi mencapai Rp. 856.430.574.154,00 atau 106 persen dari target yang direncanakan, terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp. 511.610.646.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 564.531.184.160,00 atau 110,34 persen dari target yang direncanakan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp. 215.830.009.000,00 dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp. 80.518.946.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 76.069.380.994,00 atau 94,47 persen dari target yang direncanakan.

A.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Provinsi serta Penerimaan Lain-Lain Yang Sah. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 197.822.124.754,67 atau 99,79 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp. 198.247.983.043,06, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 153.795.069.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 153.320.961.000,00 atau 99,69 persen dari target yang direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

b. Dana Penyesuaian

Realisasi Pendapatan dari Dana Penyesuaian pada tahun 2018 merupakan pendapatan dana insentif daerah sebesar Rp. 24.750.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan.

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur dianggarkan sebesar Rp. 5.750.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 5.769.154.000,00 atau 100,33 persen dari target yang dianggarkan.

d. Penerimaan Lain-Lain

Penerimaan Lain-Lain Yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp. 799.113.385,00 atau 1.598,23 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00.



Pada tabel dibawah ini diuraikan besaran target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Anggaran 2018

Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	1.190.844.294.643,06	1.241.484.432.872,07	104,25
1. Pendapatan Asli Daerah	184.636.710.600,00	191.626.529.239,07	103,79
1.1 Hasil Pajak Daerah	109.655.000.000,00	119.410.487.414,00	108,90
Pajak Hotel	715.000.000,00	1.026.044.132,00	143,50
Pajak Restoran	6.375.000.000,00	9.064.805.169,00	142,19
Pajak Hiburan	535.000.000,00	686.761.179,00	128,37
Pajak Reklame	450.000.000,00	527.215.539,00	117,16
Pajak Penerangan Jalan	59.000.000.000,00	61.227.043.323,00	103,77
Pajak Parkir	80.000.000,00	118.991.200,00	148,74
Pajak Air Tanah	5.500.000.000,00	5.507.923.302,00	100,14
Pajak Sarang Burung Walet	0	6.570.000,00	0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.500.000.000,00	34.193.259.636,00	102,07
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.500.000.000,00	7.051.873.934,00	201,48
1.2 Hasil Retribusi Daerah	4.183.078.000,00	3.980.779.127,75	95,16
Retribusi Jasa Umum	1.576.250.000,00	1.521.448.320,00	96,52
Retribusi Jasa Usaha	823.200.000,00	851.329.904,00	103,42
Retribusi Perijinan Tertentu	1.783.628.000,00	1.608.000.903,75	90,15
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.265.000.000,00	4.779.545.627,92	90,78
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.265.000.000,00	4.779.545.627,92	90,78
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.533.632.600,00	71.520.049.414,90	109,13
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	106.300.000,00	428.970.049,00	403,55
Penerimaan Jasa Giro	2.914.000.000,00	5.275.901.719,18	181,05
Pendapatan Bunga Deposito	0	0	



	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	440.000.000,00	1.212.408.594,00	275,55
	Pendapatan Denda Pajak	210.000.000,00	254.698.819,62	121,29
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0
	Pendapatan dari Pengembalian	213.500.000,00	645.437.482,14	302,31
	Pendapatan dari BLUD	53.250.130.000,00	54.799.741.182,96	102,91
	Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.894.962.600,00	7.183.928.450,00	104,19
	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.504.740.000,00	1.718.963.118,00	114,24
	Pendapatan Dana BOS	0,00	13.182.896.369,67	#DIV/0!
2.	Dana Perimbangan	807.959.601.000,00	856.430.574.154,00	106,00
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	511.610.646.000,00	564.531.184.160,00	110,34
	Bagi Hasil Pajak	145.115.859.000,00	88.073.151.363,00	60,69
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	366.494.787.000,00	476.458.032.797,00	130,00
2.2	Dana Alokasi Umum	215.830.009.000,00	215.830.009.000,00	100,00
	Dana Alokasi Umum	215.830.009.000,00	215.830.009.000,00	100,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	80.518.946.000,00	76.069.380.994,00	94,47
	Dana Alokasi Khusus Fisik	43.968.574.000,00	42.816.559.303,00	97,38
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	36.550.372.000,00	33.252.821.691,00	90,98
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	184.345.069.000,00	184.639.228.385,00	100,16
3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	153.795.069.000,00	153.320.961.000,00	99,69
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	153.795.069.000,00	153.320.961.000,00	99,69
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24.750.000.000,00	24.750.000.000,00	100,00
	Dana Penyesuaian	24.750.000.000,00	24.750.000.000,00	100,00
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.750.000.000,00	5.769.154.000,00	100,33
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.750.000.000,00	5.769.154.000,00	100,33
3.4	Penerimaan Lain-Lain	50.000.000,00	799.113.385,00	1598,23
	Penerimaan Lain-Lain	50.000.000,00	799.113.385,00	1598,23

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2018

A. 4. Permasalahan dan Solusi

Tantangan Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan otonomi daerah dan implementasi Desentralisasi fiskal tentu tidak sedikit terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan fiskal yang ada, dalam hal ini upaya pengelolaan pendapatan daerah harus mendapat perhatian agar mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, beberapa permasalahan masih dialami oleh Pemerintah Kota Bontang, antara lain:

a) Permasalahan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas teknologi sistem informasi dan SDM Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Masih kurangnya partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak dan retribusi.
3. Belum optimalnya alokasi, transfer dan petunjuk teknis pelaksanaan dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat.
4. Lemahnya manajemen dan pengelolaan pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD khususnya dari sisi administrasi dan pengawasan.
5. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah.

b) Solusi

1. Penerapan informasi teknologi (IT) dan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Mendorong partisipasi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah dengan melakukan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Memberikan dukungan data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat sehingga dalam formulasi penghitungan penetapan alokasi dana perimbangan bersesuaian dengan realitas kondisi daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
4. Melakukan perbaikan dan tertib administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat tercatat dan

terdokumentasi dengan baik. Serta melakukan pengawasan dan evaluasi berjangka mulai dari aparat pelaksana maupun wajib pajak dan wajib retribusi.

5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan peraturan daerah misalnya pengadaan mobil operasional.
6. Peningkatan SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.
7. Sosialisasi peraturan daerah melalui berbagai media.
8. Pemberian *reward* dan *punishment* untuk membangkitkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perlu dilakukannya penyesuaian yang sangat signifikan khususnya menyangkut manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan merumuskan arah kebijakan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2018 secara umum diarahkan:



1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2018 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2018 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan yang harus dialokasikan pada tahun 2018.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada dasarnya belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas

pelayanan publik. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja/pengeluaran diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan daerah.
2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi perangkat pengelola keuangan daerah, serta penerapan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian pembangunan daerah.
3. Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah melalui penanaman modal maupun pelayanan publik.

Belanja daerah tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.380.195.674.446,00 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 471.810.607.954,00 atau sebesar 34,18% dan belanja langsung sebesar Rp. 908.385.066.492,00 atau sebesar 65,82%. Hal ini memperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan.

B.1.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.



- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam



Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.



- d) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
- f) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- g) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- h) Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

- i) Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2014 tentang Perubahan kedua dan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B.1.2. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), standar satuan harga, RKBUs serta RKPBU.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Penganggaran Honorarium PNSD pada prinsipnya tidak dianggarkan dalam RKA SKPD, kecuali untuk yang diperbolehkan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang mengenai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan performance kinerja.

Penganggaran honorarium Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang memperhatikan:
 1. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
 2. Untuk belanja hadiah/souvenir/piala dalam bentuk barang menggunakan rekening belanja hadiah/souvenir/piala.



- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri



Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing perangkat daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah.
- h) Penganggaran belanja bahan bakar kendaraan bermotor hanya dianggarkan untuk kendaraan operasional sebanyak unit kendaraan operasional yang ada dan rencana pengadaan kendaraan yang baru.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja hibah dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.



k) Penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penganggaran belanja ini hanya dialokasikan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Rekening transport akomodasi untuk narasumber/tenaga ahli menggunakan rekening perjalanan dinas untuk non PNSD.

m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat



penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan daerah, mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.



Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk Pengadaan belanja modal yang berbeda rekening rincian objeknya dan tidak dapat disatukan paket pengadaannya maka belanja terkait pengadaan dianggarkan dalam masing-masing rekening rincian objek.

B. 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Bontang untuk tahun 2018 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	1.380.195.674.446,00	1.186.216.563.514,00	85,95
1.	Belanja Tidak Langsung	471.810.607.954,00	403.557.528.203,00	85,53
	- Belanja Pegawai	446.240.734.954,00	380.902.959.074,00	85,36
	- Belanja Hibah	14.902.600.000,00	13.872.808.640,00	93,09
	- Belanja Bantuan Sosial	1.164.500.000,00	901.717.379,00	77,43



	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	6.431.100.000,00	6.388.299.110,00	99,33
	- Belanja Tidak Terduga	3.071.673.000,00	1.491.744.000,00	48,56
2	Belanja Langsung	908.385.066.492,00	782.659.035.311,00	86,16
	- Belanja Pegawai	57.901.700.162,00	44.356.716.825,00	76,61
	- Belanja Barang dan Jasa	458.943.749.145,00	404.571.948.432,00	88,15
	- Belanja Modal	391.539.617.185,00	333.730.370.054,00	85,24

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2019

Dari tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat serapan belanja APBD Tahun 2018 sebesar 85,95% dari total anggaran, mengalami penurunan sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan tingkat serapan belanja pada tahun 2017 sebesar 86,22%. Realisasi belanja daerah pada tahun 2018 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 403.557.528.203,00 atau 85,53% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 782.659.035.311,00 atau 86,16 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, secara umum realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	URAIAN BELANJA	REALISASI		Perubahan (%)
		2017	2018	
	BELANJA DAERAH	945.166.142.323,00	1.186.216.563.514,00	20,32
1.	Belanja Tidak Langsung	305.175.409.853,00	403.557.528.203,00	24,38
	- Belanja Pegawai	281.386.137.326,00	380.902.959.074,00	26,13
	- Belanja Hibah	9.540.913.309,00	13.872.808.640,00	31,23
	- Belanja Bantuan Sosial	897.579.508,00	901.717.379,00	0,46
	- Belanja Bantuan Keuangan	3.706.499.110,00	6.388.299.110,00	41,98
	- Belanja Tidak Terduga	9.644.280.600,00	1.491.744.000,00	-546,51
2	Belanja Langsung	639.990.732.470,00	782.659.035.311,00	18,23
	- Belanja Pegawai	74.327.206.935,00	44.356.716.825,00	-67,57
	- Belanja Barang dan Jasa	344.175.470.611,00	404.571.948.432,00	14,93
	- Belanja Modal	221.488.054.924,00	333.730.370.054,00	33,63

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2019

B.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam APBD kota Bontang Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 471.810.607.954,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Belanja Tak Terduga. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp. 403.557.528.203,00 dengan persentase pencapaian sebesar 85,53 persen dari target yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Belanja Pegawai;** Realisasi belanja pegawai hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp. 380.904.957.074,00 atau 85,36 persen dari target anggaran sebesar Rp. 446.240.734.954,00
- b) **Belanja Hibah;** Rencana belanja pada pos belanja hibah dialokasikan sebesar Rp. 14.902.600.000,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp. 13.872.808.640,00 dengan persentase pencapaian sebesar 93,09 persen dari anggaran yang ditetapkan.
- c) **Belanja Bantuan Sosial;** Rencana belanja pada pos belanja bantuan sosial ditetapkan dengan plafon sebesar Rp. 1.164.500.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp. 901.717.379,00 atau 77,43 persen.
- d) **Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik;** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.431.100.000,00, pada tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.388.299.110,00 atau 99,33 persen.
- e) **Belanja Tak Terduga;** Alokasi anggaran belanja pada pos belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp. 3.071.673.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.491.744.000,00 dengan persentase pencapaian sebesar 48,56 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Secara grafis perkembangan realisasi komponen Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:



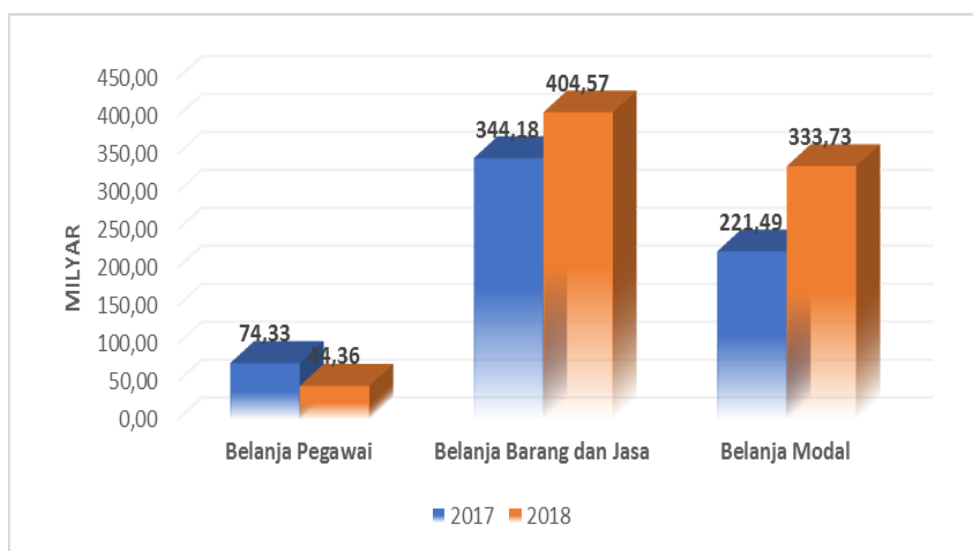
B.2.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung

Rencana Belanja Langsung dalam APBD Kota Bontang Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 908.385.066.492,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp. 782.659.035.311,00 atau sebesar 86,16 persen yang meliputi:

- a. **Belanja Pegawai;** rencana belanja pegawai ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 57.901.700.162,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 44.356.716.825,00 atau sebesar 76,61 persen.
- b. **Belanja Barang dan Jasa;** rencana belanja barang dan jasa ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 458.943.749.145,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 404.571.948.432,00 atau sebesar 88,15 persen.

- c. **Belanja Modal**; rencana belanja modal ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 391.539.617.185,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 333.730.370.054,00 atau sebesar 85,24 persen.

Secara grafis perkembangan realisasi komponen Belanja Langsung pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2017 dan 2018

B.3. Surplus/Defisit APBD

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester tahun anggaran berjalan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2018, APBD Kota Bontang mengalami surplus sebesar Rp. 67.726.996.979,24 yang merupakan selisih positif antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Kondisi ini disebabkan antara lain karena capaian realisasi beberapa komponen pendapatan daerah melampaui target yang ditetapkan.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017.



- b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.



- c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal's (MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- f) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan

yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- g) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

C.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

C.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2018 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SILPA tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja. Total penerimaan pembiayaan pada tahun 2018

sebesar Rp.189.863.234.999,94 atau sebesar SILPA Tahun Anggaran 2017.

C.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Bontang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan mengingat realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan belanja program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018.

C.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.189.863.234.999,94 yang seluruhnya merupakan penerimaan SiLPA tahun 2017 dengan realisasinya mencapai 100% dari anggaran. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2018 tidak dialokasikan anggaran mengingat realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta belanja program/kegiatan pada tahun 2018.

C.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pada akhir Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Bontang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.238.194.966.212,77. SiLPA tersebut terdiri dari surplus APBD sebesar Rp. 67.726.996.979,24 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 170.467.969.233,53.

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi permasalahan utama. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
2. Regulasi sering mengalami perubahan sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di atas, beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan alokasi dana perimbangan.
3. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal.
4. Mendorong peran serta dan partisipasi aktif pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
5. Melakukan penyesuaian dan sosialisasi terhadap perubahan regulasi.
6. Restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangan daerah.
7. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan perangkat daerah melalui bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang dikalsifikasikan ke dalam 24 urusan wajib dan 4 urusan pilihan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi misi pembangunan daerah.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Urusan Pemerintahan Daerah

No. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
URUSAN WAJIB	1.	PENDIDIKAN
	2.	KESEHATAN
	3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	6.	SOSIAL
	7.	TENAGA KERJA
	8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	9.	PANGAN
	10.	PERTANAHAN



No.		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN WAJIB	11.	LINGKUNGAN HIDUP
	12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	15.	PERHUBUNGAN
	16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	18.	PENANAMAN MODAL
	19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	20.	STATISTIK
	21.	KEBUDAYAAN
	22.	PERPUSTAKAAN
	23.	KEARSIPAN
	24.	PENUNJANG
URUSAN PILIHAN	25.	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	26.	PARIWISATA
	27.	PERTANIAN
	28.	PERDAGANGAN



A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 23 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pendidikan antara lain: meningkatkan akses pemerataan pendidikan sehingga kemudahan akses memperoleh pendidikan dan kesenjangan mutu antar sekolah dan antar wilayah kecamatan dapat diseimbangkan secara proporsional, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif, berkarakter serta mempunyai daya saing yang dilandasi dengan akhlak mulia dan meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga, Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pengadaan Sarana dan Prasarana Belajar PAUD serta Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pengadaan Meubelair Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, Penyelenggaraan Paket A Setara SD, Penyelenggaraan Paket B Setara SMP, Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa, Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar, Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah, Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD) serta beberapa kegiatan lainnya.



- 3) Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah
- 4) Program Pendidikan Non Formal, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi, Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik serta Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan, Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) APBN serta Penyediaan Dana Pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) APBN
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang, Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang, dan beberapa kegiatan lainnya.
- 8) Program Peningkatan Manajemen Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya
- 9) Program Pendidikan Inklusif, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre serta Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pendidikan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 9 program pokok dan 5 program penunjang serta 135 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.111.020.992.873



dengan realisasi keuangan sebesar Rp.91.689.152.072 atau 82,59% dan realisasi fisik sebesar 90,46%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2017	2018	
			Target	Realisasi
1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,79	12,77	12,88
2 Angka rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,39	10,40	10,70
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)				
- SD/MI/Paket A (%)	Persentase	106,07	109,63	101,07
- SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	106,99	108,94	108,26
4 Angka Pendidikan yang ditamatkan				
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	2,02	1,87	1,95
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	1,88	1,76	1,77
5 Angka Partisipasi Murni (APM)				
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	98,53	98,79	92,50
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	80,19	80,50	81,36
6 Pendidikan Sekolah Dasar				
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	970,89	1055,10	925,01
b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	Rasio	31,08	33,89	30,44
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	507,92	542,91	535,15
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	Rasio	50,79	55,49	53,52
7 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	740,58	804,80	813,57
b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	Rasio	37,25	30,32	38,36
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	647,40	732,00	638,79
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	Rasio	64,74	73,84	73,88
8 Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	Persentase	99,78	99,83	99,92
9 Fasilitas Pendidikan				
a. Sekolah / Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persentase	95,00	95,00	95,08
b. Sekolah / Pendidikan SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik	Persentase	91,18	95,00	91,43



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2017	2018	
			Target	Realisasi
10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persentase	99,68	93,82	96,40
11 Angka Putus Sekolah				
a) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase	0,00	0,01	0,00
b) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	Persentase	0,00	0,02	0,00

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 antara lain; indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di tahun 2018 adalah 12,88, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, Angka Rata-Rata Lama Bersekolah di tahun 2018 adalah 10,70 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2018 dari jenjang SD hingga SMP mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena menurunnya jumlah penduduk usia sekolah, Angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2018 dari jenjang SD hingga SMP mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2017, Angka Partisipasi Murni jenjang SMP tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan untuk jenjang SD mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh adanya anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

Indikator yang digunakan pada pendidikan sekolah dasar berupa angka partisipasi sekolah mengalami penurunan yang semula 970,89 menjadi 925,01. Rasio guru dan murid mengalami peningkatan yang semula 50,79 menjadi 53,52. Hal ini disebabkan oleh jumlah murid SD yang mengalami penurunan tetapi jumlah tenaga pendidik tidak mengalami perubahan yang signifikan. Indikator pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berupa angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah juga rasio guru dan murid perkelas mengalami peningkatan.



Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di tahun 2018 telah tercapai sebesar 99,92% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatannya dalam bidang pendidikan non formal sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kota Bontang.

Pada indikator fasilitas pendidikan, Bangunan SD/MI dalam kondisi baik sebesar 95,08% sama dengan kondisi tahun 2017 sedangkan Bangunan SMP/MTS dalam kondisi baik sebesar 91,43 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yaitu 91,18%. Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami penurunan yang semula 99,68% menjadi 96,40%. Dinas Pendidikan Kota Bontang telah melaksanakan program 1 PAUD 1 RT sangat membantu peningkatan nilai APK PAUD, dengan pendidikan sejak dini diharapkan dapat terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi syarat mutlak kemajuan bangsa ini di masa datang.

Dari total siswa SD/ MI dan SMP/ MTs kota Bontang, tidak terdapat anak putus sekolah sehingga persentasi putus sekolah tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 0 . Angka putus sekolah yang telah sesuai dengan target yaitu 0. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah Kota Bontang seperti pemberian bantuan alat sekolah berupa seragam, tas dan sepatu tentu sangat membantu meringankan biaya pendidikan bagi para orang tua siswa. Selain itu, pemberian dana BOSTK bagi seluruh sekolah di Kota Bontang juga membuat sekolah negeri tidak lagi memungut bayaran, hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan orang tua.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1.	Tidak maksimalnya penyerapan anggaran dana BOS dan BOSTK karena proses SPJ dilakukan oleh guru di setiap sekolah yang tugas utamanya adalah mengajar.	Menambah bendahara pembantu di tiap sekolah untuk menangani pencairan BOS dan BOSTK
2.	Pengadaan lahan untuk gedung sekolah tidak dapat dilaksanakan karena tingkat kecuraman lahan di atas 40% padahal menurut Peraturan, tingkat kecuraman lahan maksimal 15%.	Melakukan perencanaan ulang dan peninjauan kembali lahan yang cocok untuk pembangunan sekolah
3.	Terhambatnya pemberian seragam siswa karena adanya Perwali hibah dimana pemberian bantuan tidak boleh berulang.	Pemberian seragam dilakukan berdasarkan nama siswa
4.	Masih terdapat guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 yang terkendala oleh pembatasan usia untuk Tugas Belajar sesuai dengan Perwali No.6 Tahun 2016	Mendorong para guru untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Terbuka (UT)

2. Urusan Wajib Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah.

a) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DKKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Kota Bontang yakni Peningkatan Kualitas Kesehatan untuk semua. Pelaksanaan urusan ini diharapkan Pemerintah Kota Bontang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh masyarakat melalui program-program prioritas bidang kesehatan yang



telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasab Obat dan Makanan
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Perogram Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak
12. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
14. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Masalah Kejiwaan
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
16. Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana
17. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan
18. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata
19. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata
20. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kesehatan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang melalui 20 program pokok dan 9 program penunjang serta 161 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.174.811.863.593,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.146.537.852.516,00 atau 83,83 % dan realisasi fisik sebesar 94,55%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Persentase Rumah tangga ber-PHBS	Prosentase	81,3	96,78
Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Prosentase	90	90
Persentase TTU yang memenuhi syarat	Prosentase	95	95
Persentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat)	Prosentase	30,2	32,4
Angka Harapan Hidup	Prosentase	73,69	73,69
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	131,6	77
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	7,6	10
Prevalensi Balita Gizi Kurang/Underweight (BB/U)	Prosentase	0,17	0,4
Insiden Rate DBD	Rasio	77,95	157

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui capaian Realisasi Indikator Persentase Rumah Tangga ber-PHBS mengalami peningkatan capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 15,75 persen menjadi 96,78 persen. Adapun penyebab dari keberhasilan itu dikarenakan sebagian besar kualitas hidup masyarakat sudah memenuhi seluruh indikator melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yaitu cuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, menggunakan air bersih, memberikan ASI Eksklusif, Aktifitas Fisik, tidak merokok dan makan sayur dan buah setiap hari.



Persentase sarana air yang dilakukan pengawasan dan pembinaan memiliki realisasi capaian sebesar 90 persen. Dimana rumah tangga memiliki sarana air minum sudah memenuhi syarat untuk layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat memiliki realisasi 95 persen, dimana masyarakat memiliki sarana umum yang dilakukan pengawasan sudah memenuhi syarat untuk layak digunakan. Hal tersebut dikarenakan adanya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan tempat-tempat umum sehat terhadap dampak kesehatan masyarakat

Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diperiksa memenuhi syarat memiliki mengalami peningkatan sebesar 2,2% dari tahun sebelumnya. Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dimaksud adalah TPM yang bersertifikat kesehatan, bukan hanya yang memenuhi syarat kesehatan.

Angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan dari 131,6 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018. Sedangkan untuk indikator Angka kematian bayi (AKB) mengalami peningkatan yang semula 7,6 menjadi 10 yang menunjukkan bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 10 bayi yang meninggal. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko tinggi kematian ibu dan bayi.

Insiden Rate DBD pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang semula 77,95 pada tahun 2017 menjadi 157. Hal ini menunjukkan bahwa Bontang menjadi kota endemis demam berdarah. Puncak terjadinya demam berdarah terjadi menjelang akhir tahun saat curah hujan meningkat. Sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan secara maksimal juga melakukan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Meningkatnya Insiden Rate DBD	Melakukan sosialisasi pencegahan DBD dan sosialisasi pola hidup sehat
	Memutus siklus hidup perkembangan biakan nyamuk dengan melakukan fogging dan segera memberantas titik-titik jentik nyamuk

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi, meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanggulangan bencana, dan tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 15 (lima belas) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan Satya Lencana, Pembangunan Jembatan Kelurahan Gunung Telihan, dan Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 1 Kel. Gunung Telihan.
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Pembangunan Saluran Drainase di Perbatasan Wilayah PT. Badak NGL, Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang



Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru (Bantuan Keuangan Provinsi), Pembangunan Saluran Drainase Jl. Arief Rahman Hakim Kecamatan Bontang Barat, Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-Api, dan Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo.

3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dilaksanakan melalui kegiatan Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan, Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta, Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang, Penurapan Sungai Bontang di RT. 8, 22, 28, 29 dan 35 Kelurahan Api-Api, Penurapan Sungai Bontang di RT. 09 Kelurahan Kanaan, Penurapan Sungai di Kota Bontang, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Guntung, dan Pembangunan Turap RT. 37 Kelurahan Api-Api.
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat, Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert Jalan HM. Ardans, dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari.
5. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri (DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Pendukung Kedaulatan Pangan), dan Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Pendukung Kedaulatan Pangan Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri.



6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dilaksanakan melalui kegiatan Normalisasi Danau Kanaan.
7. Program Pengendalian Banjir, dilaksanakan melalui kegiatan Normalisasi Sungai Bontang, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat, Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru, Pembangunan Instalasi Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Bontang Kuala, Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Gunung Telihan, Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Gunung Elai, Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Kanaan, Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Api-API, dan Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Satimpo.
8. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ithid Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan), Rehabilitasi Masjid Nurul Hikmah (Lanjutan), dan Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan.
9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan, dan Revitalisasi Asrama Putri Mahasiswa Kota Bontang.
10. Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Mulawarman, Peningkatan Jalan KS. Tubun, Peningkatan Jalan Menuju Mangrove BSD, Peningkatan Jalan Menuju Kantor Kelurahan Bontang Kuala, Peningkatan Jalan Habibon (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas), Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan Habibon, Peningkatan Jalan BSD (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung



Konektivitas), Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan BSD, Peningkatan Jalan HOP (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas), Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan HOP, Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas), Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan Soekarno Hatta, Peningkatan Jalan Awang Long, Peningkatan Jalan Kartini, Peningkatan Jalan Otto Iskandar Dinata, Peningkatan Jalan Cut Nyak Dien, Peningkatan Jalan Dewi Sartika, Peningkatan Jalan Paus, Peningkatan Jalan Jet Ski, Peningkatan Kakap Merah, Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo, Peningkatan Jalan Madura Kelurahan Api-Api, dan Peningkatan Jalan Anggar Kelurahan Api-Api.

11. Program Perencanaan Tata Ruang, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota Bontang, dan Penyusunan Raperda Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang.
12. Program Pemanfaatan Ruang, dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang, dan Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang.
13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan IMB.
14. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar



Permukiman Kelurahan Gunung Elai, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-API, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Utara, Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Selatan, dan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Barat.

15. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala PLTS Komunal Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan melalui 16 program pokok dan 5 program penunjang melalui 133 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.200.800.588.182,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.167.016.055.325,00 atau 83,18% dan realisasi fisik sebesar 90,43%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi dari sisa lelang, paket pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2018 dan adanya paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	97,38	99,51
Persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum	%	98,74	99,52
Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	%	-	48
Prosentase bangunan yang taat terhadap perizinan bangunan	%	54	35
Luas wilayah banjir / tergenang	ha	29,81	29,19
Jalan dalam kondisi baik	%	97,64	97,84
Jumlah gedung/kantor yang terbangun	unit	-	5



Indikator kinerja persentase rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan dari 97,38% pada tahun 2017 menjadi 99,51% pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 2,13%. Kenaikan ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sanitasi dan masyarakat berakses sanitasi mengalami peningkatan. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga bersanitasi yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah.

Untuk indikator kinerja luas wilayah banjir/tergenang juga mengalami tren yang positif dimana capaian pada tahun 2017 sebesar 29,81 ha berkurang menjadi 29,19 ha pada tahun 2018 yang berarti luas wilayah banjir/genangan di Kota Bontang mengalami penurunan luasan sebesar 0,62 ha. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja luas wilayah banjir/tergenang yaitu Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dan Program Pengendalian Banjir.

Sedangkan untuk indikator kinerja jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 0,20% dari 97,64% pada tahun 2017 menjadi 97,84% pada tahun 2018. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja jalan dalam kondisi baik yaitu Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Program pengendalian banjir yang belum optimal karena alokasi anggaran yang terbatas	Penambahan anggaran untuk program pengendalian banjir yang karena merupakan program prioritas yang harus ditangani
2. Ada beberapa kegiatan yang tidak selesai tepat waktu	Percepatan proses lelang di awal tahun dan pengawasan yang lebih optimal
3. Kelangkaan material bangunan khususnya pasir dan batu koral dari Kota Palu	Mencari sumber material selain dari kota Palu sambil menunggu kondisi Kota Palu stabil sehingga bisa menyediakan pasir dan batu koral kembali
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat IMB	- Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB - Perlu aturan tegas bisa berupa insentif/disinsentif agar masyarakat mempunyai kemauan untuk mengurus IMB
5. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016 – 2036	- Peninjauan kembali rencana tata ruang kota dan menyusun kebijakan serta strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan rencana struktur dan pola ruang; - Dilakukan sosialisasi peraturan penataan ruang kepada masyarakat, kelurahan dan kecamatan

d) Penghargaan

Adapun penghargaan yang diraih dalam urusan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1.	Panji Keberhasilan Pembangunan	Terbaik III Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Smart Sanitation Award	Kategori Keaktifan Anggota Terbaik

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan, Tercapainya Waktu Tanggap Penanganan Bencana Kebakaran, Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum, dan Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3. Program Penataan Permukiman Lingkungan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa, Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Kumuh Loktuan Kelurahan Loktuan serta Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Eks Kebakaran Kelurahan Berbas Pantai.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Kelistrikan WTP Kelurahan Guntung, Optimalisasi IPAL Bontang Kuala, Optimalisasi IPAL Guntung, Optimalisasi IPAL Loktuan, Optimalisasi IPAL Berbas Pantai, Pendampingan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Kelurahan Berbas Tengah, Operasional dan Perawatan IPAL Kota Bontang, Penambahan Jaringan IPAL dan SR Kelurahan Api-Api, Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 09 Kelurahan Kanaan, Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 17, 18, dan 20 Kelurahan Loktuan,



Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum), Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal, Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum), Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal, Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi), Perbaikan Instalasi Jaringan Pipa Asrama Rudal, Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang, Pembangunan Sumur Bor LAPAS Kota Bontang, Pembuatan Sumur Dalam (Deep Well) Kapasitas 40 Liter/detik Kelurahan Gunung Telihan Pengadaan dan Pemasangan Reverse Osmosis (RO) di Pulau Gusung.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 5 program penunjang serta 42 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.25.511.956.300,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.23.280.141.159,00 atau 91,25% dan realisasi fisik sebesar 98,43%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Jumlah RUSUNAWA yang terbangun	Unit	2	0
Jumlah rumah khusus yang terbangun	Rumah	50	0
Berkurangnya luas kawasan kumuh	ha	73,56	26,13
Terbangunnya infrastruktur di 15 Kelurahan	Kelurahan	15	15

Indikator kinerja jumlah Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) pada tahun 2018 tidak ada pembangunan dikarenakan anggaran dialokasikan untuk pemulihan di daerah yang terkena bencana alam (Lombok dan Palu). Untuk Rumah Khusus (Rusus) juga tidak ada pembangunan di tahun 2018 dikarenakan harus menunggu dihunikan kemudian dapat menjadi pertimbangan oleh Pemerintah Pusat untuk dihunikan kembali. Untuk indikator berkurangnya kawasan kumuh terdapat penurunan luas kawasan dari tahun sebelumnya karena minimnya dana APBD untuk program penuntasan kawasan kumuh di tahun 2018. Capaian indikator terbangunnya infrastruktur di 15 kelurahan mencapai 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Sebagian besar pelaksanaan pekerjaan fisik tidak dilaksanakan di anggaran perubahan hanya dilaksanakan perencanaan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi	Pekerjaan fisik yang perencanaannya telah selesai, dilaksanakan pada anggaran murni tahun berikutnya.
2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.	Perlu penambahan sumberdaya aparatur dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal.

Permasalahan	Solusi
3 Masih banyaknya infrastruktur yang perlu dilengkapi dan ditingkatkan kualitasnya.	Perlu melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur selanjutnya dengan mengalokasikan dana APBD dan mengusulkan mendapatkan dana APBN di tahun berikutnya.

5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana dan sub unsur kebakaran dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat serta Kecamatan Bontang Selatan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diarahkan untuk mencapai sasaran strategis "Penegakan Hukum Menjalankan Perundangan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Terutama Untuk Menjaga Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Kenyamanan, Terwujudnya Kesiapsiagaan Tanggap Bencana, Dan Terproteksinya Lingkungan Masyarakat Dari Bahaya Kebakaran. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA, Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Perayaan Hari-Hari Besar Nasional serta Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) melalui kegiatan Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik, Verifikasi Data Orkemas, Desk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Bantuan Keuangan Provinsi), Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat, Fasilitasi Pendidikan Politik dan Capacity Buliding Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Selatan.
4. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah dan Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan Monitoring Wilayah, Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pelatihan Dasar Satpol PP yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 20 program penunjang serta 96 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.15.329.010.535,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.040.923.784,00 atau 89,50% dan realisasi fisik sebesar 99,45%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketentraman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideology radikal, isu separatisme, isu separatism, isu SARA dan sumber daya ekonomi	Peristiwa	2	0
Jumlah Forum dialog publik	kegiatan	40	159
Jumlah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Persen	0	57,1
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Indeks	57	30
Prosentases jumlah peralatan dan peralatan yang mendukung kinerja pelayanan	Persen	117,65	100
Prosentase respontime tanggap darurat	Persen	113,33	100
Prosentse tingkat kesadaran masyarkat dalam mengantisipasi bencana	Persen	142,86	100
Jumlah kelompok relawan yang sudah dilatih	Persen	142,86	100
Prosentase Tingkat Waktu Tanggap Sesuai (SPM) bahaya kebakaran	Persen	125	96

Terlihat pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana pada tahun 2018 secara umum mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukan bahwa penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana telah dilakukan dengan sangat baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, juga Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan Kecamatan Bontang Barat. Indikator berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideology radikal, isu separatisme, isu separatism, isu SARA dan sumber daya ekonomi pada tahun 2018 berjumlah 0 yang berarti tidak ada peristiwa gangguan keamanan. Untuk indikator jumlah forum dialog publik mengalami peningkatan

sebanyak 119 peristiwa dari tahun 2017, ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Bontang terhadap politik semakin bertambah. Hal ini juga diperkuat dengan bertambahnya jumlah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang bertambah sebesar 57,1% karena pada tahun 2019 ini diadakan pemilihan umum.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Jadwal atau rencana kerja kegiatan Patroli Wiyah belum maksimal.	1. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan kegiatan dengan menyesuaikan jadwal yang sudah dibuat.
2. Data-data daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban yang disampaikan Kecamatan dan Kelurahan belum valid.	2. Melakukan kegiatan rutin patrol wilayah dengan pihak kecamatan dan kelurahan.
3. Kurang koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan patrol wilayah.	3. Aktif melakukan koordinasi dengan cara melaksanakan patrol gabungan dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang valid.
4. Keterbatasan alat transportasi untuk kegiatan patrol wilayah.	4. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana transportasi.
5. SDM Kurang memadai dikarenakan luas wilayah dengan jumlah personil tidak sesuai	5. Mengusulkan penambahan jumlah pegawai.
6. Ada beberapa Perda yang perlu revisi	6. Melakukan revisi Perda dengan OPD terkait.
7. Kurangnya tenaga PPNS	7. Mengusulkan pengukuhan PPNS
8. Anggaran kegiatan yang terbatas	8. Mengusulkan penambahan anggaran.
9. Belum tersedianya pos-pos pembantu pemadam kebakaran dan penyelamatan pada beberapa titik daerah wilayah manajemen kebakaran	9. Untuk tercapainya waktu tanggap penanganan bencana kebakaran maka diperlukan pengadaan lahan dan bangunan pos-pos pemadam kebakaran pada beberapa titik daerah wilayah manajemen kebakaran antara lain : Loktuan, Berbas Pantai, Telihan/Kanaan dan Bontang Lestari.

Permasalahan	Solusi
10. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memadai.	10. Dalam rangka optimalisasi penanggulangan kebakaran maka diperlukan pengadaan : 12 unit mobil pemadam kebakaran, 24 unit mobil tangki suplai air, 12 Ploating pump untuk daerah pesisir, 1 unit mobil Rescue, 1 mobil ambulance, 50 buah APD lengkap, 3 unit mobil tangga dan 6 unit mobil pompa portable.
11. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi permasalahan bahaya kebakaran.	11. Perlu dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.
12. Ketersediaan SDM yang masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.	12. Perlu penambahan SDM aparatur dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal.
13. Ketersediaan sumber air sebagai media pemadam kebakaran belum memadai.	13. Perlu dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemilik/pengelola sumber air dan atau pengadaan sumber air sendiri dengan pengadaan sumur bor dan kolam air.

6. Urusan Wajib Sosial

Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M).

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara bermartabat dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS, Penanganan Korban Bencana, Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang, Operasional Rumah Singgah, dan Penyaluran Beras Rastra.
- 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan: Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan.
- 3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan Sosialisasi dan Fasilitas Pencegahan Bencana Sosial.
- 4) Program Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin, dan Verifikasi Data Terpadu Program Kemiskinan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Sosial pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 5 program penunjang serta 26 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp5.193.125.740,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.556.072.316,00 atau 87,73% dan realisasi fisik sebesar 99,25%. Capaian realisasi anggaran 87,73% karena efisiensi pada kegiatan-kegiatan di program penunjang dan kendala teknis pada kegiatan Penyediaan Raskas terkait adanya pergantian Kepala Bulog. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan Penanganan Korban Bencana bersifat insidental.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	76,10	85,89

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama urusan Sosial telah cukup baik. Berdasarkan basis data PMKS Kota Bontang Tahun 2018, jumlah PMKS sebanyak 30.705 jiwa yang terbagi dalam 26 jenis/kategori. PMKS terbesar berasal dari kategori fakir miskin 38.202 jiwa dan korban bencana alam 6.591 jiwa.

Dari total jumlah PMKS, sebanyak 28.732 (75,21) telah ditangani dan sejumlah 27.683 (72,46) telah mendapatkan bantuan. Bantuan terbesar diberikan kepada kelompok fakir miskin melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah), bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dan bantuan pendidikan. Selain itu, sejumlah besar bantuan berikutnya diberikan untuk kelompok Anak dengan Kedisabilitas (ADK).

Penanganan PMKS tidak hanya dari segi fisik namun secara holistik dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual. Pendekatan biopsikososial melibatkan suatu konsep hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam upaya mengerti dan memahami kondisi PMKS, sehingga penanganannya dapat paripurna.

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Makin kompleksnya dinamika permasalahan sosial	Penanganan PMKS yang berkelanjutan hingga tuntas
2	Kurang aktifnya PSKS terhadap permasalahan sosial	Pembinaan nmental/capacity building terhadap PSKS
3	Belum adanya SOP penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Diperlukan penyamaan persepsi antar stakeholder

7. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Urusan Wajib Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP).

a) Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui

peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.
2. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.484.037.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.442.354.636,00 atau 91,39% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Persentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	4,19	6,34
Pencari kerja yang ditempatkan	%	15,6	15,31
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	%	70	55,56

Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja Kota Bontang yang terdaftar adalah 10.602 orang. Jumlah pencari kerja yang dilatih mencapai 672 orang (6,34%) dari yang ditargetkan sebesar 5,26%. Penyebab tidak tercapainya target ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Namun demikian telah dilakukan upaya-

upaya untuk mengatasi hal tersebut, misalnya melalui pendanaan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2018 terdapat 37 paket pelatihan dengan sumber dana APBD, dan APBD Provinsi.

Target pencari kerja yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 25,53% dan terealisasi sebesar 15,61% (1.623 orang). Regulasi daerah telah mengatur agar rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal. Namun adanya kesenjangan antara kemampuan dan keahlian pencari kerja dengan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan mengakibatkan penempatan tenaga kerja lokal menjadi tidak maksimal.

Pada tahun 2018 terdapat 18 kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Seluruh kasus perselisihan tersebut telah diselesaikan. Sebanyak 10 kasus telah diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dan sisanya 8 kasus diselesaikan melalui anjuran.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Anggaran APBD yang kurang mendukung pelaksanaan rencana kegiatan bidang	Alokasi APBD untuk menunjang kegiatan bidang khususnya berkenaan dengan urusan wajib pemerintah serta mengupayakan sumber pendanaan lain misalnya APBN dan APBD Provinsi
2. Minimnya kuantitas tenaga teknis untuk mediator	Penambahan tenaga teknis untuk mediator dan pengantar kerja

8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta meningkatnya perlindungan

anak dan perempuan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak, dan Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang.
- 4) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan melalui 4 program pokok serta 5 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.838.904.560,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.763.777.948,00 atau 91,04% dan realisasi fisik sebesar 98,96%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Prosentase	12,43	13,87
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Prosentase	87,57	89,61
Ratio KDRT	Prosentase	0,039	0,099
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Prosentase	53,54	49,87

Capaian Indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 13,87 %. Berdasarkan data tahun 2018, hanya terdapat 3.940 pekerja perempuan di lembaga pemerintah. Sementara indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu 85% dan terealisasi sebesar 89,61%. Pada tahun 2018, terdapat 22.181 pekerja perempuan di lembaga swasta. Berdasarkan data tersebut, capaian Indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah berbanding terbalik dengan indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta hal ini disebabkan data yang dipergunakan pada Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta pada tahun 2018 merupakan data hasil validasi antara DPMTKPTSP (Bidang Tenaga Kerja) dan BPS Kota Bontang. Sedangkan pada penetapan target awal data tersebut menggunakan angka pencari kerja (Jumlah Kartu Kuning yang diterbitkan) dari Dissosnaker pada tahun 2017, sehingga perlu adanya validasi dan sinkronisasi data antar Perangkat Daerah terkait.

Capaian indikator Ratio KDRT cenderung mengalami penurunan dari target yang ditetapkan yaitu 0,1% dan terealisasi sebesar 0,099%. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menurunkan rasio KDRT melalui berbagai upaya pencegahan KDRT dan sosialisasi serta pelatihan sampai ke tingkat RT dengan melibatkan PATBM-3PANG LAUT.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Belum tersedianya vocal point pada setiap perangkat daerah	Pelatihan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG) pada perangkat daerah
2. Kurangnya komitmen pemangku kebijakan terhadap PUG	Revitalisasi Tim Pokja PUG
3. Kurangnya sosialisasi caleg perempuan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan	Sosialisasi terhadap calon pemilih terhadap peran perempuan dalam pembangunan dan pembinaan terhadap caleg perempuan

9. Urusan Wajib Pangan

Urusan Wajib Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pangan antara lain: meningkatkannya ketersediaan pangan, distribusi, akses, diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat serta Meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH).

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pangan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.279.439.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27.613.4374,00 atau 98,82% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
PPH Ketersediaan	Skor	90,84	91,5
Cadangan Pangan Pemerintah	%	0	0
Penanganan Rawan Pangan	%	0	0
% Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	94,34	100
% Ketersediaan informasi harga pangan pokok	%	91,67	100
% Pangan Aman di konsumsi	%	87,5	100
Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor (0-100)	84,4	86,8

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 antara lain; Pola Pangan Harapan (PPH) di tahun 2018 adalah 91,5

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, Stabilitas harga dan pasokan pangan mengalami peningkatan hingga 100%, Ketersediaan informasi harga pangan pokok mencapai 100%, Pangan aman dikonsumsi juga mengalami peningkatan termasuk Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai skor angka 86,8.

Indikator yang digunakan pada urusan pangan berupa skor angka pada Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 86,8 meningkat dari tahun sebelumnya, Pangan Aman dikonsumsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 87,5% menjadi 100%. Ketersediaan Informasi Harga Pangan Pokok meningkat menjadi 100% termasuk Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan meningkat menjadi 100% dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,34%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Realisasi IKU pada Cadangan Pangan Pemerintah 0% karena tidak tersedianya dana untuk pengadaan CPP	Perlu adanya Kajian Perda sebagai payung hukum dalam penyediaan/pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
2 Berdasarkan surat dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian nomor 063/K.N.030/I.2/01/2018 bahwa perlu dilaporkan kondisi stok cadangan pangan pemerintah setiap minggu	Perlu adanya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota minimal 100 Ton per tahun, hal tersebut berdasarkan pada PP No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3 Realisasi IKU pada Penanganan Rawan Pangan dengan realisasi 0% karena tidak tersedianya dana untuk penyediaan Penanganan Rawan Pangan yang didalamnya termasuk kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Perlu adanya penyediaan bahan untuk pelaksanaan SKPG serta pembuatan Peta Kerawanan Pangan

10. Urusan Wajib Pertanahan

Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yakni: Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan publik, dengan indikator kinerja utama berupa tersedianya lahan untuk sarana dan prasarana publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan lahan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik; dan Inventarisasi permasalahan pertanahan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pertanahan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 2 program penunjang dan 3 kegiatan. Alokasi dana pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.5.097.834.186,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.588.505.719,00 atau hanya 70,39%, sedangkan realisasi fisik sebesar 97,59%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan publik	Ha	0	1,1

Pada tahun 2018, Indikator capaian Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan publik terealisasi sebesar 1,1 Ha yang diperuntukkan Pemakaman Muslim di Guntung. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1.	Sulitnya persyaratan pengadaan lahan pemerintah.	Perlunya kajian akademik tentang pengadaan lahan pemerintah.
2.	Ketersediaan SDM yang masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.	Perlu penambahan SDM aparatur dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal.

11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Kecamatan Bontang Utara.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

Penyelenggaraan urusan Lingkungan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih, Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
3. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam melalui kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air.
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam melalui kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup.
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi melalui kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang dapat Menimbulkan Polusi (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui kegiatan Penataan RTH dan Pemeliharaan RTH.
8. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum dan Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum.
9. Program Pengelolaan Areal Pemakaman melalui kegiatan Penataan Areal Pemakaman dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
10. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran melalui kegiatan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pembinaan Kesiapsiagaan Linmas dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Kebakaran.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan lingkungan hidup pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 10 program pokok dan 4 program penunjang serta 43 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.39.833.353.533,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.36.900.131.175,00 atau 92,64% dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian realisasi anggaran 92,64% karena terdapat efisiensi dari proses pengadaan serta beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
Indeks Pencemaran Air	-	70,00	84,44
Indeks Pencemaran Udara	-	79,11	85,32
Persentase pelayanan persampahan	Persen	94,87	95

Indeks Pencemaran Air (IPA) adalah indeks yang digunakan menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Obyek pengukuran IPA adalah kualitas air sungai. Untuk menghitung IPA maka harus diketahui dulu indeks pencemaran di beberapa lokasi pemantauan . Jumlah titik sampling adalah 9 titik, yaitu S. Bontang 4 titik, S. Guntung 3 titik dan S. Nyerakat 2 titik. Penentuan titik pantau sungai tahun 2018 berdasarkan data dari Bapelitbang bahwa sungai pada Kota Bontang adalah: Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat dari hasil perhitungan tidak ada sampel yang masuk kategori sedang dan berat.

Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Udara mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development. Data diperoleh dari hasil pengukuran parameter gas NO₂ dan SO₂ dengan menggunakan alat Passive Sampler selama 3 periode di 4 lokasi sampling yang berbeda yang mewakili kawasan transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran.

Persentase pelayanan persampahan ,meskipun tidak signifikan tetapi mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa sampah di Kota Bontang sudah dilayani dan ditangani dengan baik.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Kondisi armada pengangkut sampah yang kurang memadai	Melakukan peremajaan atau pengadaan armada pengangkut sampah yang baru
Masyarakat membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan	Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kondisi sungai yang tercemar oleh sampah	Melakukan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) secara berkala dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
Kondisi armada truk hidrolik yang tidak optimal	Melakukan peremajaan atau pengadaan armada truk hidrolik
Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya yang kurang memadai	LPJU tenaga surya yang biaya pemeliharaannya tinggi dan rawan akan tindak pencurian sehingga perlu dilakukannya migrasi dari tenaga surya ke listrik PLN serta melakukan penggantian lampu yang hemat energi

d) Penghargaan

No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Adipura	Kategori Kota Sedang
2	Proper Nasional (Emas)	PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kaltim
3	Proper Nasional (Biru)	PT. Kaltim Methanol Industri, PT. Kaltim Nitrate Industri, PT. Kaltim Parna Industri, PT. Kaltim Industrial Estate, PT. Pertamina Gas Area Bontang
4	Proper Daerah (Emas)	PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kaltim, Rumah Sakit Pupuk Kaltim
5	Proper Daerah (Hijau)	PT. Kaltim Methanol Industri, PT. Kaltim Parna Industri, RS Islam Yabis, RSUD Taman Husada
6	Proper Daerah (Biru)	PLTMG, PT. Kaltim Daya Mandiri, RS Amalia
7	Nirwasintra Tantra	Pemerintah Kota Bontang mendapatkan Juara I (Kategori Kota Kecil)
8	Sekolah Adiwiyata Tk. Nasional	SMP YPVDP, SMA YPVDP
9	Sekolah Adiwiyata Tk. Provinsi	SD Alam Baiturrahman, SD Yabis

12. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) serta Koordinasi dan

Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 4 program penunjang serta 20 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.3.253.540.878,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.034.949.855,00 atau 93,28% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,96	0,97
Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Rasio	0,68	0,69
Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,46	0,47
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	96	99
Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	59	63

Pada tahun 2018 seluruh capaian indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami peningkatan. Untuk capaian cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan sebesar 3% dan untuk capaian cakupan penerbitan akta kelahiran meningkat sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Masih banyak anak yang belum memiliki Akta Kelahiran terutama yang berusia 10 Tahun	Mengirimkan data ke masing-masing kelurahan untuk dilakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan, agar segera membuat akta kelahiran. Bagi yang sudah punya tetapi diterbitkan dari daerah lain, agar mengirim fotocopy akta tersebut ke disdukcapil untuk dientry dalam aplikasi
	Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mendapatkan data.
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian) sebesar Rp. 50.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena jenis barang tersebut sudah tidak diproduksi lagi dan dana dikembalikan ke Kas Daerah.	Kebutuhan terhadap peralatan tersebut sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-
3. Jaringan internet tidak maksimal	Sekretariat mengusulkan dalam anggaran perubahan TA 2019 untuk pemasangan jaringan internet, sehingga tidak mengganggu pelayanan adminduk
4. Belum ada perangkat pendukung untuk penyajian data kependudukan bagi perangkat daerah	Menyiapkan perangkat hardware dan software
	Menambah Jaringan Internet

d) Penghargaan

Adapun penghargaan yang diraih dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1.	Panji Keberhasilan Pembangunan	Terbaik III Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Smart Sanitation Award	Kategori Keaktifan Anggota Terbaik

13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M).

a) Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK).
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 2 program pokok yang terdiri dari 2 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.741.100.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.602.776.400,00 atau 81,34% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
LPM aktif (%)	%	100	100
PKK Aktif (%)	%	100	100
Posyandu Aktif (%)	%	100	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	5,16

Capaian indikator LPM aktif, PKK aktif dan Posyandu aktif tidak mengalami penurunan yang berarti bahwa tingginya komitmen dari pengurus LPM, PKK dan Posyandu untuk mempertahankan kinerja. Serta dukungan penuh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M) dalam menggandeng masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Rendahnya pemahaman/peran aktif masyarakat terhadap pembangunan wilayah	Perlunya program/kegiatan pembangunan wilayah yang berbasis padat karya

14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan sebagai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pengendalian keluarga berencana dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada



masyarakat secara lengkap, benar dan akurat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana. Peningkatan program keluarga berencana Dilaksanakan melalui kegiatan Harganas Tingkat Kota, Sosialisasi KB serta Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS, Pembangunan Balai Penyuluh KKB Tingkat Kecamatan (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana), Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB), Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana).
2. Program Pelayanan Kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB, Penyediaan Pelayanan KB Mobile, Pelayanan KB Medis Operasi dan Pelayanan Manunggal KB KES.
3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB, Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana, Pengelolaan Data dan Informasi Program KB, Pembinaan IMP KB, Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga dan Pengembangan Program SIDUGA.
4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Dan Informasi Dan Konseling KRR dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Informasi TRIAD KRR dan Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja.
5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dilaksanakan melalui kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui 6 program pokok dan 20 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.2.372.945.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.025.485.774,00 atau 85,36% dan realisasi fisik sebesar 99,12%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Cakupan Peserta KB Aktif	Prosentase	70,7	69,9

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi sasaran cakupan peserta KB Aktif bagi masyarakat pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tidak signifikan. Penurunan ini dikarenakan jangka waktu beberapa jenis KB yang relatif panjang sehingga peserta KB tidak perlu melakukan penggantian dalam waktu dekat. Meskipun angka cakupan KB menurun, masyarakat Kota Bontang telah menyadari pentingnya penggunaan KB dalam mengatur jarak kelahiran. Penyuluhan program KB di Kota Bontang terlaksana secara sistematis melalui penggerakan dan pemberdayaan masyarakat sebagai penyuluh aktif KB di masyarakat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Pencapaian peserta KB baru non hormonal masih relatif rendah	Meningkatkan gerak kader, dalam rangka mencari akseptor baru.
Masih rendahnya tingkat pengetahuan & pemahaman remaja tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Memantapkan Operasional konseling bagi Konselor dan Pelatihan bagi Konselor, serta melakukan pembinaan secara rutin kepada kelompok-kelompok PIKKRR yang ada.

Kurangnya Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) seperti booklet, leaflet, brosur dan poster	Memperbanyak media komunikasi, informasi dan edukasi (booklet, leaflet, brosur, poster tentang KRR)

15. Urusan Wajib Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya keselamatan dan ketertiban pengguna jasa perhubungan serta Terwujudnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa di bidang perhubungan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 penunjang dan 4 program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana penunjang terminal pelabuhan, ganti rugi bangunan di area pelabuhan loktuan, pengadaan fasilitas pelabuhan loktuan dan pembangunan landasan dermaga kapal RO-RO.
- 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas LLAJ, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan.
- 3) Program peningkatan pelayanan angkutan, dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, pelaksanaan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) & dukungan lomba wahana tata nagraha (WTN), serta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas, pengamanan dan pengendalian emberkasi dan debarkasikapal penumpang pelabuhan umum loktuan, studi evaluasi penyelenggaraan transportasi berbasis jalan (angkutan orang dan kendaraan umum), pengamanan dan pengendalian angkutan natal 2018 dan tahun baru 2019, pengawasan keselamatan pelayaran kapal penyebrangan.

- 4) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi pembukaan rute penerbangan perintis, dan kegiatan pembangunan jalan menuju bandara bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan perhubungan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 5 program penunjang dan 4 program pokok serta 32 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan perhubungan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp. 12.742.804.100,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.323.845.117,00 atau 73,17% dan realisasi fisik 81,17%. Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib dinas perhubungan adalah sebagai berikut:

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
Prosentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan	%	100	100
Penilaian tertib berlalu lintas	piala	WTN	WTN
Prosentasi rekomendasi/pertimbangan yang disetujui	%	-	80
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum	%	95	96
Rasio kendaraan bermotor laik jalan	%	44	83

Prosentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan pada tahun 2018 tercapai 100%. Prosentase ini diperoleh dari pegawai/anggota Dinas Perhubungan yang telah bekerja keras untuk menjaga ketertiban jalan, yang mana terdapat 6 titik lokasi penjagaan yaitu di simpang 4 Bontang Baru, jalan



MT.Haryono (SD 002 Bontang Utara), SMP Bahrul Ulum, jalan A.Yani (SD 02 Bontang Selatan), Terminal Kilo 6 dan Jalan Sultan Syahrir (SD 01 Bontang Selatan).

Keikutsertaan Dinas Perhubungan Kota Bontang dalam mengikuti lomba tertib berlalu lintas yang di adakan setiap tahun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur merupakan konsistensi Dinas Perhubungan untuk terus menjaga ketertiban lalu lintas di Kota Bontang. Target Dinas Perhubungan tahun 2018 untuk mendapatkan dan terus mempertahankan piala WTN telah tercapai berkat kerja keras Dinas Perhubungan untuk terus menjaga ketertiban lalu lintas di Kota Bontang.

Kelengkapan administrasi dalam operasional kendaraan umum sangat diperlukan, dengan bertambahnya angkutan barang dan kelengkapan administrasi angkutan umum di Kota Bontang, sehingga dalam mengeluarkan rekomendasi / persetujuan, Dinas Perhubungan memasukkan dalam indikator kinerja pada sasaran 1 (satu). Adapun target rekomendasi yang di keluarkan / di setuju yaitu 80% dengan realisasi 80% sehingga capaian indikator ke 3 (tiga) ini 100%.

Kepuasan Masyarakat merupakan tujuan utama dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini Dinas Perhubungan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat Kota Bontang.

Realisasi Indikator kinerja Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum tahun 2017 sebesar 95% dan mengalami kenaikan 1% pada tahun 2018 sehingga untuk tahun 2018 terealisasi sebesar 96%. Hal ini tidak lepas dari kerja keras Dinas Perhubungan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bontang

Capaian Rasio kendaraan bermotor laik jalan tahun 2017 sebesar 44% dengan target tahun 2018 sebesar 100% dan capaiannya sebesar 83%. Adapun

jumlah kendaraan yang belum melakukan uji KIR di tahun 2017 yaitu sebanyak 2.310 kendaraan, sedangkan di tahun 2018 terdapat 4.619 kendaraan. Penurunan jumlah kendaraan ini disebabkan karena pengujian KIR dilakukan 2 kali dalam setahun dan adanya pemutihan serta masih ada penggabungan data-data kendaraan dari Kutai Kartanegara.

Disamping pencapaian indikator kinerja urusan perhubungan sebagaimana di atas, dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, pada tahun 2018 Kota Bontang mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik pada peringkat III (tiga) terbaik Nasional.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Tahap penilaian apresial sudah selesai dilaksanakan, sedangkan pembayaran untuk ganti rugi bangunan tahun ini tidak dapat direalisasikan karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan	Agar dianggarkan pada tahun berikutnya (tahun anggaran 2019)

16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik dan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi , Informatika dan Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi, pengelolaan Informasi dan Dokumentasi , Sosialisasi pejabat

- pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM), Pengelola Media Center, Kemitraan dengan Media Massa.
- 2) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui kegiatan penyediaan jasa layanan internet, pelaksanaan e-Procurement, Pengembangan e-Government, pemeliharaan jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan domain pemerintah Kota Bontang, pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi, uji keamanan informasi (penetration test), pemeliharaan data center, pengembangan versi sistem, pelaksanaan Self-Assesment RKCI (Rating Kota Cerdas Indonesia).
 - 3) Program diseminasi informasi dan komunikasi publik melalui kegiatan diseminasi informasi melalui media elektronik dan diseminasi informasi melalui media cetak.
 - 4) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 6 (enam) program penunjang dan 4 (empat) program pokok serta 43 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan komunikasi dan informatika tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.10.158.097.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.897.704.065,00 atau 97,44% dan realisasi fisik sebesar 99,20%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)	Skor	3,20	3,68

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2017 dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,48 maka dapat dikatakan bahwa pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah BAIK SEKALI. Secara umum Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bontang dan akan dilakukan review apabila tidak meunjang target yang telah ditetapkan.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya SDM bidang jaringan TIK	1. Merekrut tenaga <i>Outsourcing</i> 2. Bimtek terkait TIK yang bersertifikasi
2	Minimnya kuantitas sarana prasarana pendukung jaringan TIK	Penambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana TIK

d) Penghargaan

Pada tahun 2018 Kota Bontang mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, sebagaimana tabel berikut:

No	Prestasi/Penghargaan
1	Peringkat 3 Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur
2	Peringkat 2 Pada Pemeringkatan Informasi Publik Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur
3	Peringkat 3 Kategori Organisasi Peringkat Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur
4	Badan Publik Inovatif Kategori Penghargaan Khusus Kepada Pemerintah Kota Bontang (e-arsip.bontangkota.go.id)



17. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif; dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi IUMK dan Penyusunan Kajian Penyertaan Modal Dana Bergulir.
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda.
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir, Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Dana Bergulir, dan Fasilitasi Pengadaan Sarana Pemasaran Produk UMKM.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi, Revitalisasi Koperasi dan Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi.
- 5) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan, Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM, Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang, Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM, Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM), Pembuatan Buku Profil IKM dan Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran IKM.

- 6) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dilaksanakan melalui kegiatan, Fasilitas Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan, dan Fasilitas Pengembangan Industri Rumput Laut.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah ini terdiri dari 6 program pokok dan 5 program penunjang yang diimplementasikan dalam 32 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.7.665.946.600,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.7.114.758.469,00 atau 92,81% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 97,62%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	%	70.43	100
Persentase pertumbuhan IKM	%	10.35	100
Persentase Koperasi Aktif	%	50.00	61.82
Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro	%	99.74	125.5
Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi untuk mendapatkan modal	Pelaku UMKM	178	338

Persentase pertumbuhan IKM pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,11% atau 110 IKM apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah IKM di Kota Bontang tahun 2017 sebanyak 1.258 IKM sedangkan jumlah IKM tahun 2016 sebanyak 1140 IKM (sesuai pendataan dan monitoring seksi ILMEA & IKAHH). Bertambahnya jumlah IKM ini diharapkan memunculkan produk

produk industri yang dapat berdaya saing baik di Kota Bontang ataupun diluar Kota Bontang. Namun dari jumlah 1.258 IKM belum seluruhnya terbina mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Namun ke depan akan dicarikan solusi mengingat jumlah IKM yang banyak merupakan lahan pembinaan yang kontinu dan konsisten dilanjutkan sehingga menciptakan produk yang dapat berdaya saing.

Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dapat diukur dengan indikator persentase koperasi aktif. Indikator persentase koperasi aktif ini adalah persentase jumlah koperasi aktif tahun 2017 dibagi dengan jumlah seluruh koperasi tahun 2017. Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator ini tidak mencapai target, sehingga capaiannya dibawah 100. Hal ini karena perbedaan regulasi pendataan koperasi. Jika tahun 2016 dan tahun tahun sebelumnya pendataan koperasi belum berbasis Online sehingga koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 3 tahun berturut turut masih dimasukkan kategori koperasi aktif. Sedangkan tahun 2017 sesuai Permen KUKM No.10 tahun 2016 Pendataan koperasi dan UKM melalui sistim Online Data System (ODS), jika koperasi tidak melakukan RAT 2 tahun berturut turut otomatis dinyatakan tidak aktif.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1	Realisasi pelaku usaha yang menjual produk di dalam/luar tidak sesuai target karena keterbatasan anggaran	Kedepannya perlu dianggarkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2.	Jumlah bantuan yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah PKL yang ada di Kota Bontang	Pemberian bantuan dilakukan secara bertahap sehingga bantuan untuk seluruh PKL dapat terakomodir
3.	Kurangnya lahan industry yang disertai fasilitas, sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas perindustrian	Percepatan pembentukan kelembagaan pengelola kawasan industry Bontang sehingga dapat dibangun suatu kawasan terpadu untuk kawasan perindustrian

18. Urusan Wajib Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Urusan Penanaman Modal dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perizinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan.
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Promosi Potensi Daerah, Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Urusan Penanaman Modal ini terdiri dari 3 program pokok dan 5 program penunjang yang diimplementasikan dalam 18 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.4.541.947.550,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.4.403.448.443,00 atau 96,95% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19.Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Penanaman Modal Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	Investor	11	6
Jumlah Investor berskala nasional (PMA)	Investor	12	5
Jumlah Nilai berskala nasional (PMDN) Rp.x(000.000,-)	Rupiah	5,111,733	4,747,346
Jumlah Nilai berskala nasional (PMA) \$.x(000,-)	\$	531,468	226,414
Jumlah peraturan yang mendukung iklim investasi	perda	3	-
Peningkatan PAD dari retribusi perijinan Rp. (000.000,-)	Rupiah	1,985	1,605
Nilai IKM	%	79.97	81,40

Pada 2018 beberapa realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal mengalami penurunan seperti jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) serta Jumlah nilai berskala nasional (PMDN dan PMA). Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan pusat tentang SPIPISE yang mengharuskan para investor untuk melakukan pelaporan setiap 3 bulan yang memberatkan pelaku investor. Sehingga, dengan adanya peraturan itu jumlah pelaporan semakin menurun.

Untuk indikator PAD dari retribusi perijinan mengalami penurunan sebesar Rp.380.000.00,00. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa peraturan baru seperti Ijin Gangguan (HO) dicabut per bulan Maret, padahal retribusi dari ijin ini merupakan salah satu penyumbang retribusi terbesar. Kemudian, adanya perubahan tariff ijin trayek yang semula Rp.750.000,00 per tahun menjadi Rp.250.000,00 per 5 tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 81,40% berkategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami peningkatan dan selalu mengedepankan pelayanan yang prima.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	
1.	Penanam modal yang telah mempunyai Izin Prinsip Penanaman Modal belum semua melaksanakan realisasi investasi	1.1	Monitoring dan koordinasi pelaksanaan dengan penanam modal
2.	Anggaran yang tidak mendukung pelaksanaan rencana kegiatan	2.1	Alokasi APBD untuk menunjang kegiatan bidang
3.	Minimnya kuantitas tenaga teknis	3.1	Penambahan tenaga teknis untuk monitoring realisasi investasi dan memiliki pengetahuan dasar terkait perizinan
4.	Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung percepatan perizinan	4.1	Alokasi APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, Meningkatnya Sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan khususnya milik daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dilaksanakan melalui kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra serta Seleksi Paskibraka Kota Bontang.

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dilaksanakan melalui kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) Kalimantan Timur serta Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14.
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta, Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta, Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Berbas Pantai serta Revitalisasi Stadion Bessai Berinta.

b) Realisasi Pelaksanaan dan Program dan Kegiatan

Urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 5 program penunjang serta 34 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.18.789.358.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.073.795.633,00 atau 90,87% dan realisasi fisik sebesar 97,02%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	Presentase	5	3
Persentase pelaku olahraga, pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi	Presentase	13	80
Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga	Rasio	0,66	0,87

Terjadi penurunan jumlah prosentase pemuda dan pramuka yang mengikuti kegiatan Kepemudaan dan Kepramukaan yang memperoleh peningkatan SDM dengan capaian realisasi sebesar 2% dari tahun sebelumnya.

Adapun Indikator Kinerja pada prosentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi pada tahun 2018 telah mencapai kenaikan senilai yang signifikan sebesar 67%. Penyebab dari keberhasilan ini dikarenakan oleh Kompetisi dan kejuaraan olahraga tingkat klub khususnya sepakbola yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk ikut ambil bagian dengan membentuk klub sepakbola dan juga Sarana Olahraga berupa kompleks stadion besai berinta cukup representatif dengan arena olahraga sepakbola, volley, basket, jogging track, panjat tebing dan roller coaster yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan klub olahraga secara gratis dan bertanggung jawab.

Adapun untuk realisasi capaian kinerja Tahun 2018 pada jumlah sarana dan prasarana olahraga mengalami kenaikan menjadi 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Tingginya kecintaan masyarakat terhadap olahraga hal ini dapat dilihat dari berkembang pesatnya jumlah klub olahraga di Kota Bontang,

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Pengadaan Lahan di Stadion Bessai Berinta	Diusulkan Kegiatan yang sesuai untuk pengadaan lahan

20. Urusan Wajib Statistik

Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel

dan Partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok Pengembangan Data/Informasi dan Statistik.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan statistik terdiri dari 1 program pokok yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.277.425.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.277.160.280,00 atau 99,90% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Belum adanya penyelenggaraan statistik sektoral Kota Bontang.	1. Penyusunan perwali penyelenggaraan data dan statistik terpadu 2019.
2. Belum adanya MOU penyelenggaraan urusan statistik dengan BPS sebagai pembina data dan statistik.	1. Membuat MOU dengan BPS 2019.
3. Belum adanya Jabatan Fungsional Statistisi	1. Pengadaan Jabatan Fungsional Statistisi pada tahun 2019 melalui inpassing dan rekrutmen CPNS.
4. Belum sinerginya penyelenggaraan pengelolaan data dan statistik dalam rangka memenuhi kebutuhan satu data dalam tataran perencanaan pembangunan daerah	1. Membentuk Forum/Tim penyelenggaraan data dan statistik terpadu 2019. 2. Membangun S1 pengelolaan data dan statistik terpadu 2019. 3. Dukungan anggaran belum optimal

21. Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas, perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan warisan budaya. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya, Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Festival Seni Budaya dan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 4 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.732.350.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.959.714.871,00 atau 55,40% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Rendahnya capaian anggaran 2018 disebabkan oleh pembatalan perayaan malam tahun baru 2019 yang semula direncanakan mendatangkan artis ibukota, diganti dengan kegiatan dzikir bersama.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	2	103
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	5
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	3	19
Jumlah Grup Kesenian	Unit	22	51
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	0	5

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, yang semula 2 unit menjadi 103

unit. Begitupun dengan indikator lainnya seperti jumlah gedung kesenian yang juga mengalami peningkatan menjadi 5 unit dari yang semula 1 unit. Salah satu gedung kesenian tersebut adalah gedung MTQ yang sering digunakan untuk kegiatan masyarakat berupa pertemuan kelompok atau komunitas budaya yang ada di Kota Bontang.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan yang cukup banyak yaitu sebanyak 19 kegiatan. Peningkatan jumlah grup kesenian dan sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang semakin peduli terhadap kebudayaan yang ada di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum adanya kelembagaan yang berfungsi untuk memastikan keberadaan dan keberlanjutan kelompok seni daerah	Membentuk Dewan Kesenian Daerah
2	Masih belum optimalnya kuantitas SDM bidang kebudayaan	SDM bidang kebudayaan. Penambahan personil bidang kebudayaan.
3	Masih minimnya sarana prasarana informasi Promosi Seni dan Budaya	Meningkatkan jumlah sarana promosi seni dan budaya (baliho, dll).

22. Urusan Wajib Perpustakaan

Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis: berkembangnya pelayanan & aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat; meningkatnya kecukupan koleksi buku (bahan pustaka); meningkatnya kualitas perpustakaan daerah, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan swasta; dan pemenuhan informasi bahan pustaka pada sarana layanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar; Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah; Pengadaan buku-buku Perpustakaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perpustakaan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 4 program penunjang serta 20 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.3.769.688.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.609.900.070,- atau 95,76% dan realisasi fisik sebesar 99,84%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun (Presentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk)	Orang	463.875	1.188.140
Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah judul buku	883.575	364.300
Jumlah perpustakaan	Perpustakaan	352	306
Jumlah perpustakaan taman baca dan pojok baca	Taman Baca/Pojok Baca	38	9

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama urusan Perpustakaan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sangat

signifikan pada indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, namun mengalami penurunan pada 3 indikator lainnya.

Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 156% pada tahun 2018 merupakan hasil dari upaya-upaya yaitu Adanya layanan di luar jam kerja yaitu hari Sabtu dan Minggu (pada tahun 2017 layanan ini dihentikan karena keterbatasan anggaran), Fasilitas untuk pemustaka/pengunjung mengalami penambahan, Penambahan jumlah titik layanan perpustakaan keliling, Penambahan kegiatan layanan di perpustakaan daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang) terutama untuk kegiatan layanan kunjungan sekolah atau wisata literasi, Bertambahnya prasarana perpustakaan (bertambahnya gedung perpustakaan) oleh Pemerintah Kota Bontang di beberapa kelurahan dan sekolah, Peran serta perpustakaan kelurahan dalam meningkatkan minat membaca masyarakat di sekitarnya dengan adanya kegiatan-kegiatan di perpustakaan mereka.

Capaian indikator jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah perpustakaan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah perpustakaan berkorelasi secara langsung dengan jumlah buku yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh hal yang sama, yaitu:

- ✓ Adanya beberapa perpustakaan khusus yang tidak aktif lagi sehingga tidak bisa diperoleh datanya lagi.
- ✓ Ada beberapa perpustakaan yang berbeda tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA) namun karena berada di bawah naungan satu yayasan, mereka menggunakan satu perpustakaan yang sama (satu perpustakaan saja).
- ✓ SDM pengelola perpustakaan masih kurang, sehingga banyak perpustakaan yang tidak aktif bahkan tutup karena tidak ada pengelolanya sehingga tidak bisa diperoleh datanya lagi.



Sedangkan penurunan capaian indikator jumlah perpustakaan taman baca dan pojok baca pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya regulasi sebagai berikut:

- ✓ Sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan, yang menyatakan bahwa perpustakaan kecamatan merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum sehingga perpustakaan kecamatan termasuk dalam perpustakaan umum.
- ✓ Sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, menyatakan bahwa perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa/kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum sehingga perpustakaan desa/kelurahan masuk kategori perpustakaan umum.
- ✓ Sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, yang menyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Lembaga pemerintah, Lembaga masyarakat, Lembaga Pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.

Dengan adanya peraturan tersebut di atas maka setelah dipilah sesuai dengan kriterianya akhirnya diperoleh jumlah pojok baca pada tahun 2018 sebanyak 9 pojok baca/taman baca yaitu Pojok baca RT. 04 Bontang Lestari, Pojok baca RT 50 BelimbinG, Pojok baca RT 35 Gunung Elai, Pojok baca RT 12 Belimbing, Pojok baca RT 46 Belimbing (gg. Swakarya), Pojok baca RT 21

Bontang Baru, Pojok Baca RT 18 Tanjung Laut Indah, Pojok baca stand ojek, Komunitas rumah kreatif.

Dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan, pada tahun 2018 Kota Bontang meraih Penghargaan Panji Keberhasilan Bidang Pembangunan Perpustakaan Tahun 2018 sebagai Pemenang II.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum memadai Sumber Daya Manusia dalam hal tata pengelolaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Jabatan fungsional Pustakawan, Pengelola Perpustakaan, dan Jabatan perpustakaan lainnya). Belum ada keseimbangan antara Analisis Beban Kerja dengan fakta SDM yang tersedia	Penambahan SDM Pengelola Perpustakaan
2	Kurangnya bimtek/pelatihan peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan	Peningkatan SDM melalui Bimtek/pelatihan
3	Terbatasnya koleksi bahan pustaka	Penambahan koleksi bahan pustaka
4	Wilayah jangkauan perpustakaan keliling di titik pelayanan tidak seimbang dengan mobilitas yang ada, sehingga pelayanan kurang maksimal	Penambahan mobilitas untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan
5	Sarana penunjang pengembangan pojok baca belum tersedia secara maksimal sehingga pengembangan perpustakaan (sesuai jenisnya berdasarkan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan), di lingkungan Pemerintah Kota Bontang belum memenuhi standar	Penambahan sarana penunjang pengembangan pojok baca
6	Sarana pelayanan perpustakaan daerah belum memenuhi standar	Penambahan sarana pelayanan perpustakaan daerah
7	Belum tersedianya perangkat pengembangan perpustakaan digital (Informasi Teknologi)s	Perlunya perangkat lunak untuk pengembangan perpustakaan digital (Informasi Teknologi)

23. Urusan Wajib Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis: meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya arsip/dokumen daerah dan meningkatnya pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok yaitu:

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta;
- 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen, dilaksanakan melalui kegiatan: Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah, dan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika; dan
- 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kearsipan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 program pokok serta 6 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.206.093.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.159.615.000,00 atau 77,45% dan realisasi fisik sebesar 85,09%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian	
			2017	2018
1	Jumlah (persentase) SKPD yang menerapkan arsip secara baku	Persentase	79,31	79,31
2	Jumlah peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	4	5

Jumlah (persentase) Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku pada tahun 2018 sebesar 79,31%, di mana PD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 23 PD dari jumlah PD yang ada sebanyak 29 PD. Tahun 2018 telah dilakukan monitoring sebanyak 10 PD tetapi hasil penilaiannya tidak mencukupi standar penilaian arsip baku. Oleh karena itu, data tahun 2018 disamakan dengan data tahun sebelumnya 2017.

Jumlah peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2018 sebanyak 5 kegiatan. Pada tahun 2018 untuk kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan yang ada di APBD 2018 sebanyak 6 kegiatan namun ada 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pengaruh inflasi sehingga berdampak pada naiknya harga bahan/material fumigasi.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum memadai Sumber Daya Manusia dalam hal tata pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Jabatan fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip). Belum ada keseimbangan antara Analisis Beban Kerja dengan fakta SDM yang tersedia	Penambahan SDM Pengelola Kearsipan
2	Kurangnya bimtek/pelatihan peningkatan SDM Pengelola Arsip	Peningkatan SDM melalui Bimtek/pelatihan
3	Belum tersedianya Depo arsip	Pengadaan Depo Arsip



4	Belum terpenuhinya <i>Record Center</i> oleh perangkat daerah	Pengadaan <i>Record Center</i>
5	Penyimpanan arsip yang belum representatif	Panambahan sarana berupa lemari penyimpanan arsip

B. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Bontang juga melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi beberapa Fungsi Penunjang antara lain Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Fungsi Keuangan; Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Fungsi Pengawasan, Fungsi Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta Fungsi Pendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis: terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas; terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan; meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan optimalisasi penelitian dan pengembangan.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Koordinasi Penelitian dan



Pengembangan, Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Review RPJMD, Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi, Koordinasi Multi Stake Holder CSR Perusahaan, Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang, dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi.
4. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang.
5. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Koordinasi TEPPA Kota Bontang.
6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial dan Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah.
7. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam melalui kegiatan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum,

Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 7 program pokok dan 5 program penunjang serta 44 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp5.940.157.470,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.339.964.547,- atau 89,90% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel.4.24.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
1 Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	Persen	96	94,67
2 Persentase akurasi data SIPD	Persen	-	100
3 Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	Persen	65,84	75,47
4 Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	-	100
5 Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	Persen	15,5	23,25
6 Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	Persen	100	100
7 Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	Persen	63	95,54
8 Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja $\geq$ 76%)	Persen	89,66	100

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan pada beberapa indikator, terutama indikator yang terkait dengan fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Indikator Persentase akurasi data SIPD dan Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD merupakan indikator baru sesuai Perubahan Indikator Kinerja Utama Bapelitbang 2016-2021 yang ditetapkan pada tahun 2018.

Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 seiring peningkatan anggaran belanja pada APBD 2018. Namun, capaian ini masih belum ideal. Hal ini disebabkan adanya program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 tetapi dipandang tidak/kurang efektif sehingga tidak dilaksanakan. Program-program ini direncanakan untuk diperbaiki dalam Reviu RPJMD Kota Bontang 2016-2021.

Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah masih belum optimal karena fokus penelitian dan pengembangan merupakan hal baru (dimulai pada tahun 2017). Setelah identifikasi dan inventarisasi pada tahun 2017, kebijakan bidang penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menyiapkan kerangka dasar berupa penyusunan dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada 2018 dan rencana penyusunan Rencana Induk Kelitbangan pada tahun 2019. Selain itu, sesuai Peraturan Wali Kota Bontang nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Penelitian Masyarakat, Bapelitbang giat mendorong kegiatan inovasi, penelitian, dan pengembangan di masyarakat dan Perangkat Daerah sehingga dapat berfungsi sebagai daya ungkit dan pendorong kemajuan daerah.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Bapelitbang	Mengikutsertakan pegawai pada diklat substantif yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas
		Mendorong pengangkatan pegawai pada Jabatan Fungsional Perencana
		Mereviu dan memperbaiki SOP kegiatan Bapelitbang
2	Adanya kesulitan mendapatkan data yang berkualitas (akurat, valid, dan terkini)	Merancang suatu mekanisme pengelolaan data informasi pembangunan (oleh Subbid Data dan Litbang) yang mencakup seluruh data-data yang diperlukan dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
		Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan penyedia data
3	Proses perencanaan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis. Banyaknya unsur yang terlibat dalam perencanaan memerlukan strategi yang tepat agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik	Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan (pimpinan daerah, perangkat daerah, DPRD, masyarakat, dan stakeholder)
		Penggunaan teknologi informasi (aplikasi e-planning) yang menyajikan data perencanaan termasuk hasil Musrenbang
4	Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memberikan umpan balik maksimal yang dapat digunakan oleh perangkat daerah untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya. Selain itu, aplikasi pengendalian yang ada (e-controlling) belum sepenuhnya mengukur kinerja	Mengikutsertakan pegawai pada Diklat Monitoring dan Evaluasi dari Pusbindiklatren Bappenas
		Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi
		Mengembangkan aplikasi pengendalian TEPR <i>online</i>
5	Penelitian dan pengembangan belum optimal	Menyusun Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
		Mengagendakan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan inovasi yang melibatkan masyarakat dan Perangkat Daerah
		Merencanakan penyusunan Rencana Induk Kelitbang dalam Renja Bapelitbang 2019

2. Keuangan Daerah

Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mencapai sasaran strategis Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta Tercapainya optimalisasi pendayagunaan kekayaan/Aset Daerah.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui 26 (dua puluh enam) kegiatan antara lain Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan, Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.
2. Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA), Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Pemeliharaan SISMIOP PBB dan Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
3. Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah melalui kegiatan Sensus Barang Milik Daerah, Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD), Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus, Pendampingan

Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akruai, Pengembangan Aplikasi Aset/Barang Daerah yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance serta Pengembangan Aplikasi Persediaan Barang yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 5 program penunjang serta 68 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Keuangan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.22.167.719.311,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.796.555.733,00 atau 84,82% dan realisasi fisik sebesar 84,79%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan daerah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	*WTP
Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	155.101.868.653	199.690.865.584
Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan	Prosentase	100	100

Indikator kinerja pada sasaran 1 adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan satuan WTP dengan Target Akhir Renstra 2017 WTP, Realisasi di tahun 2017 adalah *WTP (masih menunggu audit dari BPK) dengan titik pencapaian *WTP.

Indikator kinerja untuk Opini BPK terhadap laporan keuangan ditargetkan memperoleh WTP seperti realisasi pada tahun 2017, dimana hingga saat ini hasilnya masih menunggu audit dari BPK. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli

Daerah pada tahun 2018 mencapai Rp.199.690.865.584, berhasil melebihi target yang hanya sekitar Rp.184.636.710.600.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Untuk mempertahankan opini WTP, diperlukan langkah nyata dalam menentukan langkah strategis dan kegiatan nyata lintas sektor.	Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
2 Kurangnya Sumber daya Manusia yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pendapatan daerah, anggaran, belanja, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan kekayaan/asset milik daerah	Mengikutsertakan pegawai pada Diklat terkait hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi
3 Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait penertiban kekayaan/ asset milik daerah	Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penertiban kekayaan/ asset milik daerah

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a) Program dan Kegiatan

Fungsi Kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mencapai sasaran strategis tersedianya sistem perencanaan ASN yang tersistem dengan baik serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan



Jabatan Fungsional, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Pendidikan dan pelatihan Character Building, Kajian Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASD Daerah, dan Diklat Perhitungan Angka Kredit. Sedangkan Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya, Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural, Pengusulan Kartu Status Pegawai, Pelaksanaan Ujian Dinas, Pengusulan Pemberhentian PNS, Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai serta Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 4 program penunjang serta 42 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp 6.512.837.006,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.114.396.734,00 atau 78,53% dan realisasi fisik sebesar 96,43%.

Pada tahun 2018 ini ada 2 kegiatan yang capaian realisasinya di bawah 50%, yaitu kegiatan Kajian Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan kegiatan Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS. Kegiatan Kajian Kebutuhan Diklat dengan pagu anggaran Rp.143.860.000,- hanya terealisasi Rp.960.000,- dengan capaian fisik kegiatan 50%. Kegiatan ini dilaksanakan berkerjasama dengan PKP2A III LAN Samarinda. Rendahnya capaian kegiatan ini disebabkan oleh terbitnya regulasi baru terkait pengembangan kompetensi PNS sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dimana di dalam peraturan tersebut diatur mengenai tata cara penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS

(Analisa Kebutuhan Diklat). Dengan adanya peraturan baru tersebut, maka pihak PKP2A III LAN pun perlu mempelajari terlebih dahulu, sedangkan sosialisasi kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada akhir Oktober 2018. Sehingga untuk dapat dilaksanakan memerlukan instrument baru sebagaimana yang diatur di dalam peraturan tersebut.

Sedangkan kegiatan Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan Desember 2018, proses pengadaan seleksi CPNS baru sampai tahap Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Pengusulan NIP baru dapat dilaksanakan jika Pemerintah Kota Bontang atas persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan CPNS secara keseluruhan.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Persentase OPD yang sudah menyusun formasi kebutuhan pegawai	Persen	100	100
Persentase kelulusan peserta diklat	Persen	100	76,16

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka pada pertengahan tahun 2018, Sekretariat KORPRI kelembagaannya dihapuskan dan tugas dan fungsinya KORPRI sebagai organisasi profesi ASN masuk di dalam tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Fungsi Sekeretariat KORPRI dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 2 program penunjang serta 7 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan KORPRI pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp 178.705.173,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 178.653.273,00 atau 99,97% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 4.27.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Sekretariat KORPRI Pelatihan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Jumlah Laporan tepat waktu	laporan	60	60
Jumlah Anggota Korpri yang aktif berpartisipasi di bidang olah raga, seni budaya, mental dan rohani	orang	515	800
Persentase Anggota KORPRI yang mendapat pendampingan dari LKBH Korpri	%	100	100

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1	Merit System belum digunakan secara maksimal.	Perlu diadakan kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang workshop Merit System dan pendampingan pelaksanaannya.

4. Fungsi Pendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik kota, Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah, Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan Perekonomian Daerah serta Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.

a) Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah pada tahun 2018 dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah melalui 14 program pokok dan 6 program penunjang yang dilaksanakan dalam 97 kegiatan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.27.498.621.550,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.968.686.705,00 atau 86,52% dan realisasi fisik sebesar 98,50%.

Realisasi indikator kinerja utama Sekretariat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Fungsi Pendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Nilai SKM Kota Bontang	Skor	80,23	81,48
Nilai LPPD	Nilai	ST	ST
Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	B
Persentase Target Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang Harmonis	Persen	100	260
Prosentase Kebijakan Perekonomian Daerah yang Adaptif sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100
Prentase sanggahan terhadap jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilelang	Persen	100	100

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Pemerintah Kota Bontang semakin meningkat. Jika dilihat dari tabel diatas bahwa nilai LPPD Tahun 2018 adalah ST (Sangat Tinggi). Demi memaksimalkan penyusunan LPPD solusi yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan koordinasi dengan SKPD,

melaksanakan workshop penyusunan LPPD, serta melaksanakan Orientasi Lapangan Penyusunan LPPD.

Prosentase Kebijakan Perekonomian Daerah yang Adaptif sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Prosentase sanggahan terhadap jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilelang terealisasi sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Kuantitas Sumber Daya Manusia tidak memadai dibandingkan dengan jumlah pekerjaan	Melakukan penambahan pegawai

5. Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

a) Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan menunjang pelaksanaan tugas DPRD, Fasilitasi pembentukan produk hukum serta Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat melalui 16 (enam belas) kegiatan antara lain Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah serta Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 5 program penunjang serta 41 kegiatan. Alokasi

dana untuk Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.50.548.857.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.42.700.458.804,00 atau 80,66% dan realisasi fisik sebesar 94,80%.

Realisasi indikator kinerja utama Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Persentase pencapaian prolegda	Persen	100	100
Persentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100
Jumlah Raperda yang dibahas	Jumlah	10	15
Jumlah Rapat Paripurna	Kali	39	39
Jumlah Reses	Kali	3	3
Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	Orang	16	16

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Bontang konsisten. Contohnya untuk Indikator persentase pencapaian program legislasi daerah dari tahun 2017 dan 2018 tidak mengalami perubahan yang berarti dapat memenuhi target yang ditentukan. Begitu pula dengan presentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 100% memenuhi target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD secara tidak langsung telah mendorong produktivitas DPRD dalam menjalankan fungsinya. Hal ini tercermin dari jumlah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yakni sebanyak 15 (lima belas) Peraturan Daerah, meningkat jumlahnya dari tahun 2017 yang menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) peraturan daerah.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Sumber Daya Manusia PNS terbatas	Mengajukan Permintaan Pegawai PNS ke BKPP
Penempatan SDM yang tidak sesuai kompetensi	Menempatkan SDM sesuai kompetensi / Keahliannya

6. Fungsi Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat serta Kecamatan Bontang Selatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan Meningkatkan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan melalui kegiatan antara lain Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan, Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan serta Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan.
2. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan antara lain Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan.
3. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

4. Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh tiga Kecamatan melalui kegiatan antara lain Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Api-Api, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Baru, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Kuala serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Guntung.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 7 program penunjang serta 695 kegiatan yang tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.37.258.352.643,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.35.505.618.529,00 atau 96,66% dan realisasi fisik sebesar 99,13%.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pada tahun 2017 berbagai penghargaan telah diraih Kota Bontang, antara lain sebagai berikut:

No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Juara kedua Lomba PHBS Tingkat Nasional	diwakili Kel Berbas Tengah
2	Juara Pertama Lomba PHBS Tingkat Propinsi Kalimantan Timur	diwakili Kel Berbas Tengah
3	Juara ketiga Lomba Posyandu Tingkat Propinsi Kal-Tim	Diwakili Posyandu Pasir Putih IX Bontang Lestari
4	Juara I Lurah Berprestasi Tk. Provinsi	Lurah Belimbing
5	Juara I Perpustakaan Tk. Provinsi	diwakili Kel. Belimbing
6	Juara I Lomba Kelurahan Tk. Provinsi	diwakili Kel. Belimbing
7	Juara 3 UP2K Tingkat Provinsi	Kec.Bontang Barat
8	Juara Pertama Lomba Administrasi PKK tingkat Kota Bontang	PKK Kecamatan Bontang Selatan



9	Juara Kedua Lomba LBSI kategori Balita tingkat Kota Bontang	Kelurahan Tanjung Laut
10	Juara Kedua Lomba LBSI kategori Bayi tingkat Kota Bontang	Kelurahan Berbas Tengah
11	Juara Harapan I Lomba Mobil Hias kegiatan Bontang City Carnival	Kecamatan Bontang Selatan
12	Juara I Lomba Balita Sehat Tk. Kota	Kec. Bontang Barat
13	Juara I Paduan Suara Tk. Kota	Kec. Bontang Barat
14	Juara I Lomba Pidato Ketua PKK Tk. Kota	Kec. Bontang Barat
15	Juara I Lomba PKDRT Tingkat Kota	Diwakili Kelurahan Belimbing
16	Juara I Lomba UKS Tingkat Kota	SD Alam Baiturrahman

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Ruang Pelayanan yang kurang representatif	Perbaikan Ruang Loker
Gudang penyimpanan arsip tidak ada	Pembangunan Gudang
Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang baru
Kurangnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek atau diklat bagi aparatur
Admin Kelurahan kurang memahami Aplikasi Prodeskel untuk penyusunan profil	Pembinaan dan pelatihan oleh bagian terkait
Belum ada aplikasi pengelolaan surat pertanahan di tingkat kecamatan	Pengadaan aplikasi pertanahan
Tidak ada biaya operasional pengukuran tanah di lapangan	Review Peraturan terkait pungutan biaya operasional Kelurahan dan Kecamatan mengenai Surat Pertanahan. (Kota dan Kabupaten yang lainnya masih memberlakukan pemungutan)
Tidak tersedia kendaraan, perlengkapan dan seragam kegiatan patroli	Pengadaan kendaraan, perlengkapan dan seragam patroli
Tidak adanya biaya operasional bagi lembaga kemasyarakatan seperti Forkohat Kecamatan dan Kelurahan	Mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Forkohat Kecamatan dan Kelurahan
Tidak adanya Gudang Penyimpanan Barang	Segara dibangun Gudang Penyimpanan Barang

7. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang, Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka responsif, Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang serta Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan melalui kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
3. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pengawasan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 4 program penunjang serta 16 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi pengawasan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.2.883.798.650,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.694.834.418,00 atau 92,52% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks	2	3
Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	86.27	87
Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	40	40
Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks	2,5 (CC)	3 (B)
Indeks opini BPK atas LKPD	Indeks	4 (WTP)	4 (WTP)
Indeks RB Kota Bontang	Indeks	B	B
Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	100
Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	3.717	3,717
Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	2

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Pengelolaan sistem pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang belum sepenuhnya berbasis manajemen risiko	1.1 Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Bontang berbasis risiko.
	1.2. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan
	1.3. Menyusun <i>teamate</i> berdasarkan <i>gap competency</i> dan jenis penugasan audit intern
	1.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas audit intern secara berkala
	1.5. Membuat aplikasi SIM Pengawasan terintegrasi



C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 4 urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dengan Meningkatkan Produksi Perikanan, Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, melalui kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perikanan;
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan, Pengoperasian balai benih ikan pantai, serta kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya;
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, Pengoperasian TPI/PPI dan Pembangunan fasilitas TPI.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kelautan dan perikanan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok dan 5(lima) program penunjang yang dilaksanakan melalui 23 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perikanan dan Kelautan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.7.648.186.775,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.395.481.546,00 atau 96,70% dan realisasi fisik sebesar 99,98%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perikanan dan Kelautan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.31.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2017	2018
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	27,164.20	22.323,20

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami penurunan 4.841 ton dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pergantian musim kemarau yang menyebabkan penurunan jumlah tangkapan nelayan. Meskipun mengalami penurunan jumlah di tahun 2018 tetapi indikator ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 21.165,10 ton.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1	Terbatasnya jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap dan kelompok nelayan budi daya ikan yang mendapatkan bantuan	Perlu dikoordinasikan lebih intens lagi data jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada agar dapat terdata secara keseluruhan.

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata serta Penyusun Rencana Induk Pariwisata.

- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata serta Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Urusan Pariwisata ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 5 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.8.993.614.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.8.607.561.980,00 atau 95,71% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.32.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	383,868	384.708
Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata	Lokasi	1	1
Meningkatnya Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Di Bina	Kelompok	8	11

Untuk realisasi Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2018, Khususnya pada Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dari Target 5.843 jumlah kunjungan wisata, ternyata terrealisasi sampai dengan 31 Desember 2018 bertambah menjadi 384.708 orang wisatawan nusantara sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah sebanyak 82 orang.

Sedangkan untuk Jumlah Destinasi Pariwisata tidak mengalami perubahan yaitu satu (1) serta untuk jumlah kelompok sadar wisata sampai dengan 31

Desember 2018 dari Target sebanyak 11 kelompok sampai dengan 31 Desember 2018 telah terrealisasi sebanyak 11 (sebelas) Kelompok.

Pada tahun 2018, terkait dengan pelaksanaan urusan Pariwisata, Kota Bontang mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional, sebagai berikut:

1. Terbaik III Bidang Pariwisata Kategori Kota dalam Penghargaan Keberhasilan Pembangunan HUT Provinsi Kalimantan Timur.
2. Juara Harapan III Lomba Kelompok Sadar Wisata (Darwis) tingkat Provinsi Kaltim, diberikan kepada Kelompok Pokdarwis (Guntung)

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Belum ada tenaga teknis di Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata yang terkait dengan kegiatan fisik, sehingga apabila ada kegiatan yang terkait dengan kegiatan fisik harus berkoordinasi dengan OPD Teknis yang paham akan kegiatan fisik.	1.1 Diusulkan Ke BPKD terkait Staf Tenaga Teknis pekerjaan fisik

3. Urusan Pilihan Pertanian

Pelaksanaan urusan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanian ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pertanian dengan meningkatnya produksi pertanian dan peternakan.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok sebagaimana berikut ini :



- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan;
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), melalui kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan;
- 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan perkebunan serta Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan;
- 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan melalui kegiatan Pembangunan/Penambahan sarana Balai Penyuluhan (adm fisik reguler bidang pertanian)
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak;
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, dan Pendistribusian Ternak kepada masyarakat;
- 8) Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, melalui kegiatan Operasional rumah potong hewan, Pembangunan/renovasi dan fasilitasi peralatan rumah pemotongan hewan Ruminansia (adm fisik reguler bidang pertanian).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan pertanian pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok dan 14 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pertanian pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.2.688.101.900,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp.2.639.410.313,00 atau sekitar 98,19% dari pagu anggaran, realisasi fisik sebesar 99,73%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan pilihan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.33.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2017	2018
Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Ton	274	205,41
Intensifikasi budidaya peternakan, Produksi peternakan	Ekor	1132	1213

Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, keberhasilan kinerja tersebut di dukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai, ada pun faktor penting yaitu cuaca yang mendukung dalam produksi pertanian. sehingga Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura realisasi sama dengan target untuk padi yaitu 274 ton, selain padi ada pun produksi lain yaitu jagung (58 ton), kacang tanah (15 ton), Ubi kayu (346 ton) dan ubi jalar (71 ton).

Intensifikasi budidaya peternakan. Produksi peternakan, keberhasilan kinerja tersebut di dukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai , sehingga produksi peternakan melebihi dari target yaitu realisasi untuk sapi 1.132 ekor melebihi dari target yang ada (1.066 ekor), selain sapi adapun produksi peternakan lain yaitu kuda (2 ekor, kerbau 20 ekor dan sapi perah 13 ekor.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Serangan Hama dan Penyakit Tanaman.	Pengadaan Pestisida dan perangkap hama
2 Bencana (Kekeringan dan banjir)	Perbaikan irigasi dan drainase

4. Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perdagangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan perdagangan antara lain: meningkatkannya Sarana Perdagangan, system distribusi perdagangan, system distribusi perdagangan ekspor dan Meningkatnya perdagangan dan industry.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok sebagaimana berikut ini :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui kegiatan fasilitasi tertib ukur, ukur ulang dan tera ulang;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor melalui kegiatan Sosialisasi regulasi bidang perdagangan luar negeri serta Pameran dagang komoditi ekspor;
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan Fasilitasi pengembangan SDM Bidang perdagangan dalam negeri, Peningkatan kapasitas petugas lapangan pasar tradisional, Peningkatan sarana pasar tradisional, Pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi dan lokal, serta peningkatan sarana prasarana pasar;
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui kegiatan Pelatihan manajemen pedagang eceran dan Pembinaan pedagang kreatif lapangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui kegiatan Pengadaan alat penunjang kebersihan pasar, Pembangunan pasar loktuan, Pembangunan sarana dan prasarana pasar loktuan, Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolagian (Dak fisik regular bidang pasar),

Perencanaan sarana dan prasarana pasar loktuan, serta Pembangunan pasar loktuan.

b) Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perdagangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok dan 16 kegiatan, dengan Alokasi dana untuk tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp. 29.200.514.599,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.435.572.601,00 atau 90,53% dan realisasi fisik sebesar 48,93%. Rendahnya realisasi fisik berbanding keuangan karena adanya 1 kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan yaitu kegiatan Pembangunan Pasar Rawa Indah dimana prosentasi capaian fisik sebesar 15%. Hal disebabkan karena program tersebut merupakan program *multi years* yang saat ini masih berlanjut.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.34.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
	2017	2018
Volume aktifitas pengawasan peredaran barang/ jasa	50	48
Persentase alat UTTP yang berterra	91.65	100
Banyaknya pelaku usaha yang menjual produk dalam dan luar daerah	4	3
Ekspor bersih perdagangan	3,174	2,684
Cakupan bina kelompok perdagangan/ usaha informal	17	11
Optimalisasi pendapatan sektor pasar	85	89
Pembangunan pasar tradisional	-	

Indikator volume aktivitas pengawasan peredaran barang/ jasa ini adalah monitoring stok bahan pokok dan barang strategis lainnya yang dilakukan tiap Minggu. Dari sini bisa diperoleh fluktuasi harga dan jumlah stok barang yang tersedia di Kota Bontang untuk memperlancar distribusi perdagangan. Dari 48 kali monitoring yang ditargetkan dapat terealisasi 50 kali monitoring dengan tambahan 2 kali monitoring menjelang hari- hari besar.

Indikator persentase alat UTTP yang berterra. Indikator ini adalah persentase perbandingan alat UTTP yang sudah berterra dengan jumlah alat UTTP yang ada. Karena urusan alat UTTP ini masih sangat baru di Dinas, maka untuk langkah awal hasil pendataan UTTP masih di 3 pasar tradisional dengan jumlah 1.700 unit alat UTTP dan yang sudah berterra sebanyak 1.558 unit alat UTTP. Dengan terra alat UTTP ini diharapkan menciptakan sistem perdagangan yang sehat karena memperhatikan hak- hak konsumen.

Capaian kinerja tahun 2017 untuk realisasi ekspor yang ada di Kota Bontang sebesar 51,32%. Dari target 6.185 milion \$, telah tercapai sebesar 3.174 milion \$. Nilai ekspor ini bisa naik ataupun turun sesuai dengan permintaan Negara tujuan ekspor itu sendiri.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Untuk indikator kinerja pembangunan daerah <i>Ekspor Bersih Perdagangan</i> Penurunan nilai ekspor dapat dilihat dari jumlah permintaan penerbitan SKA dari perusahaan menurun karena beberapa faktor antara lain: Permintaan SKA terbesar yaitu PT. Badak pada tahun 2017 telah berakhir kontrak ekspor dan masih dalam proses peralihan PT Pertamina, harga jual ekspor yang semakin turun serta menurunnya permintaan ekspor dari negara tujuan ekspor	1.1 Penurunan nilai ekspor ini tidak mengindikasikan penurunan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang karena Seksi Perdagangan Luar Negeri ini hanya memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal yang didalamnya nilai ekspor bisa di hitung.
	1.2 Naik turunnya nilai ekspor ini tergantung pada perusahaan ekspor yang ada di Kota Bontang.



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara serasi, selaras dan seimbang maka pemerintah pusat telah menetapkan 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yakni:

- 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
- 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- 3) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum, pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bontang melaksanakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018, maka dalam bab ini akan diuraikan mengenai realisasi pelaksanaan program-program pembangunan melalui anggaran masing-masing kementerian dimaksud baik yang secara teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Perangkat Daerah teknis maupun yang bersifat bantuan dan diterima langsung oleh kelompok sasaran.



A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.



B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait. Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sampai dengan akhir tahun.

Disamping Tugas Pembantuan, Kota Bontang pada tahun 2018 menerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa program yang bersifat bantuan langsung. Pelaksanaan program ini dilaksanakan langsung oleh kementerian terkait dengan menyalurkan langsung pendanaan pembangunan kepada kelompok sasaran atau kelompok masyarakat penerima bantuan. Peran Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan program ini hanya sebatas membantu proses verifikasi data kelompok yang akan menjadi penerima bantuan program.

C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pelaksanaan tugas pembantuan dan bantuan langsung yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2018, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berdasarkan instansi pemberi tugas pembantuan sebagai berikut :

1) Bantuan Langsung dari Kementerian Pertanian Tahun 2018

Pelaksanaan program yang langsung dilaksanakan oleh kementerian terkait di Kota Bontang pada tahun 2018 disalurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur. Adapun OPD yang melakukan verifikasi kepada kelompok sasaran adalah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penerima manfaat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, adapun kelompok Tani Penerima antara lain :



Kecamatan	Kelompok Tani	
Bontang Selatan	1.	Bersama
	2.	SuksesBersama
	3.	Mario Santana
Bontang Utara	1.	Putri Satu
	2.	KWT. Bontang Kuala
	3.	Karya Manunggal
	4.	Karya bersama
	5.	Suka Makmur
Bontang Barat	1.	Sejahtera
	2.	Karya Mandiri

2. Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Cabai 1 ha

No.	Jenis Barang	Volume
1.	Benih Cabe Keriting (Lado F1)	8 Bungkus
2.	Bibit Cabe Kecil (Dewata F1)	1 Bungkus
3.	Bibit Cabe Besar (Pilar F1)	1 Bungkus
4.	Pupuk NPK (Pelangi)	4 Karung (50 kg)
5.	Pupuk Organik (Nasa)	4 Botol (500 cc)
6.	Insektisida (Aliko)	6 Botol (250 cc)
7.	Cultivator (Honda)	1 Unit

3. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

No.	Kelompok	Kelurahan	Jumlah Sapi/Kerbau (ekor)
1.	Tunas Inti Baru	Bontang Lestari	14
2.	Sabar Menanti		25
3.	Karya Lestari		10
4.	Sumber Usaha		5
5.	Pakkamase		12
6.	Subur Baru		13
7.	Guntung Makmur RT 14	Guntung	7
8.	Guntung Makmur RT 21		11
9.	Amanah	Api-API	5
10.	Jl. Tembus Bersatu	Gunung Elai	2
11.	Bina Tani	Belimbing	27
Total			130

2) Bantuan Langsung dari Kementerian Sosial Tahun 2018

Pelaksanaan program yang langsung dilaksanakan oleh kementerian terkait di Kota Bontang pada tahun 2018 disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun OPD yang melakukan verifikasi kepada kelompok sasaran adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Bantuan Sembako Perintis Kemerdekaan, sebanyak 10 jiwa
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 5.396 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 8.319 KPM, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ PKH : 2.811 KPM
 - ✓ Non PKH : 2.598 KPM
- Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebanyak 28 orang
- Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) sebanyak 9 orang
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 30 Kelompok atau 300 KK
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 36.848 jiwa
- Home Care Lansia (Yayasan Pandu Qulby) sebanyak 94 jiwa
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 3 orang
- Pendamping PKH sebanyak 20 orang
- Pendamping KUBE sebanyak 3 orang

D. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung dari Kementrian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan baik dengan realisasi fisik dan keuangan rata-rata mencapai 99%. Data realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program terkait dapat mencapai target yang ditetapkan dengan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Adapun permasalahan utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah pusat tersebut adalah sebagai berikut:



- 1) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sebagai pelaksana Tugas Pembantuan berbagai kegiatan diberbagai kelurahan, realisasi fisik dan keuangan belum mencapai 100%. Hal itu disebabkan karena :
 - ✓ Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dirasa sangat singkat, dikarenakan keterlambatan dalam proses lelang.
 - ✓ Tingkat kepedulian peternak dalam hal administrasi dan pelaporan perkembangan ternak.
 - ✓ Belum tersedianya SDM yang mencukupi baik secara kuantitas dan kualitas dalam menyalurkan program tersebut.
- 2) Koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan program masih belum maksimal sehingga informasi tentang penyelenggaraan program terkait masih sangat terbatas pada OPD teknis pelaksana.
- 3) Penyampaian laporan progres pelaksanaan program belum secara rutin disampaikan kepada Wali Kota Bontang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan.
- 4) Upaya untuk meningkatkan alokasi program pembangunan melalui sumber-sumber pembiayaan APBN masih perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi beban fiskal daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud telah diupayakan meningkatkan koordinasi dengan masing-masing perangkat daerah terkait melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada setiap triwulan tahun berjalan. Rapat koordinasi ini utamanya dimaksudkan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang didanai APBD Kota, APBD provinsi, dan APBN (DAK, Dekon-TP) dan program-program lainnya yang dilaksanakan di Kota Bontang.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pelaksanaan kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang dioptimalkan dalam upaya mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Kerjasama daerah dinilai memiliki beberapa peran yang strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mensejahterakan masyarakat.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah ini, Pemerintah Kota Bontang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah lainnya melalui berbagai program pembangunan.

Kerjasama antar daerah ini diyakini dapat menjadi salah satu media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, pelayanan lintas daerah, mencegah konflik antar daerah dan menjadi wadah untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Daerah lainnya pada tahun 2018 adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 188.6/35/HUK dan Nomor 134.4/623/OTDA. Adapun kerjasama melalui bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, perikanan, kelautan dan pertanian, sumber daya pengairan dan konservasi, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, penataan ruang dan sosial-budaya.

Selain itu telah dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kutai Kartanegara pada tanggal 17 April 2015, yang meliputi kesepakatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, perumahan, perhubungan, sumber daya pengairan, konservasi dan pemanfaatan ruang.

Di bidang Jaringan Lintas Perkotaan juga telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat melalui perjanjian kerjasama nomor : 188.6/52/Huk dan nomor : 119/351-Bag.KS tanggal 2 September 2016.

Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan perpanjangan MOU kerjasama fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV pada bulan Desember 2016. Terdapat 9 (sembilan) point penting dalam perjanjian kerjasama tersebut, antara lain; (1) Pelayanan jasa tambat; (2) Pelayanan jasa dermaga; (3) Pelayanan jasa penumpukan; (4) Pelayanan jasa bongkar muat; (5) Pelayanan jasa pas pelabuhan; (6) Pelayanan jasa PBM; (7) Pelayanan jasa air; (8)

Pelayanan jasa listrik; (9) Pelayanan jasa lainnya. Dengan adanya 9 (sembilan) item kesepakatan ini, diharapkan akan mempermudah proses kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan Lhoktuan Kota Bontang, serta memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Kepuasan pengguna jasa pelabuhan, fasilitas yang memadai dan proses yang berorientasi pelanggan merupakan faktor penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). MoU ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan ditinjau ulang setiap tahunnya disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal kepelabuhanan.

3. Permasalahan dan Solusi.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur, belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan pembahasan lebih detil dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu telah dilakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar kerjasama daerah tersebut dapat segera direalisasikan.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa sangat diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholders lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak terbentuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, Pemerintah Kota Bontang telah

mengembangkan kerjasama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Kerjasama ini melibatkan Perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta serta pihak perbankan yang tergabung dalam Forum CSR Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 dan SK Walikota Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Badan Usaha Milik Negara maupun swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a) Direktur PT. Pupuk Kaltim
- b) Direktur PT. Badak NGL
- c) Direktur PT. Indominco Mandiri
- d) Direktur G.A PT Kaltim Methanol Industri
- e) Direktur PT. Kaltim Parna Industri
- f) Direktur PT. Black Bear Resources Indonesia
- g) Direktur PT. Kaltim Nitrate Indonesia
- h) Direktur PT. Kaltim Industrial Estate
- i) Direktur PT. Kaltim Daya Mandiri
- j) Direktur PT. Kaltim Nusa Etika
- k) Direktur Rumah Sakit PKT
- l) Direktur PT. Pama Persada Nusantara
- m) Direktur PT. Chevron
- n) Direktur PT. Pertamina Gas
- o) Direktur PT. United Tractor
- p) Direktur PT IKPT
- q) Kepala Telkom Bontang
- r) Kepala PLN Bontang
- s) Bank Indonesia
- t) Kepala Cabang Bank Kaltimtara Bontang
- u) Kepala Cabang Bank Mandiri Bontang

- v) Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bontang
- w) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bontang
- x) Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Bontang
- y) Kepala Cabang Bank Danamon Bontang
- z) Kepala Cabang Bank Muamalat Bontang
- aa) Kepala Cabang Bank Mega Bontang
- bb) Kepala Cabang Bank Dhanarta Bontang
- cc) Kepala Cabang Maybank Bontang
- dd) Kepala Cabang Bank Central Asia (BCA) Bontang

Bentuk kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran pihak perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility Funds (dukungan alokasi dana CSR) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kebijakan ini diharapkan program-program CSR dapat bersinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan tepat sasaran. Sinergi program ini dapat terjadi dengan adanya koordinasi, penyusunan perencanaan bersama dan pelaksanaan program-program CSR dimasing-masing perusahaan.

Disamping itu pada tahun 2017 telah disepakati adanya CSR Kolaborasi, yaitu salah satu bentuk CSR perusahaan yang bentuknya telah disepakati bersama dan dikerjakan secara bersama-sama. Untuk tahun 2017 CSR Kolaborasi telah disepakati berupa penghijauan taman dalam rangka mendukung program "Green City" dengan membuat pot bunga lengkap dengan tanaman bunganya yang ditempatkan pada median-median jalan.

Adapun Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain terdiri dari program:

- a) Program Pengembangan Ecotourism;
- b) Program Budidaya Ikan;
- c) Program Pengembangan UMKM Pesisir;
- d) Program Peningkata Kapasitas (Capacity Building);

- e) Program Pemberdayaan;
- f) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- g) Program Kesehatan;
- h) Program Pendidikan;
- i) Program Sosial dan Keagamaan;
- j) Program Charity (Amal);
- k) Program Infrastruktur dan Lingkungan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan di Kota Bontang untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan diimplementasikan melalui sinergi program CSR perusahaan. Pelaksanaan kegiatan program CSR perusahaan pada tahun 2018 bidang ekonomi, sosial dan Lingkungan antara lain dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Nitrate Indonesia

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penerima Manfaat	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Be A Selencea Star	78.430.000	90	Jl. Sakura, Aula SMA YPK
2	Pembuatan Newsleter Community CSR PT. KNI	10.025.000	20	Jl. Amonia Wisma KIE
3	Sosialisasi Bahaya Kebaaran di RumahTangga dan Pencegahannya	25.905.000	120	Gedung Serba Guna Kel Guntung
4	KUMM Rangkong Pembuatan Furniture Daur Ulang Palet	23.300.000	15	Jl. Tari Japan RT 10 Guntung
5	Penyerahan Bantuan STELR Kits Equipment	10.500.000	35	Ruang Rapat SD YPK2
6	Mitra Taman Nasional Kutai	30.000.000	10	Jl. Cut Nyak Dien, Saleba
7	Asa untuk Selambai	86.487.500	100	Gedung Serba Guna Selambai
8	Paket Lebaran Loktuan Guntung	62.900.000	200	Loktuan dan Guntung
9	Program Santunan Sembako Lansia Yatim & Disabilitas	22.550.000	10	Gedung BPU Loktuan
10	Program Paket Lebaran	16.500.000	13	Gedung BPU Loktuan



11	Buka Puasa TKBM	9.950.000	70	Gedung BPU Loktuan
12	Paket Bingkisan Lebaran Petugas Sampah & Relawan Asa Selambai	14.422.500	37	TPA Bontang Lestari
13	Penyuluhan Narkoba dan Keluarga Berencana	20.850.000	150	Jl Piere Tendean B.Kuala
14	Program Asa Untuk Selambai (lanjuta)	18.920.000	20	Selambai
15	Pelaksanaan Program Kemitraan TNK	17.930.000	44	TNK Telukpandan
16	Pembuatan Kantin Sehat	12.100.000	284	SMPN Guntung
17	Program TMMD ke 110 Sosialisasi Kebangsaan dan Belanegara	17.930.000	65	Gedung BPU Kel Guntung
18	Program SDGs	37.730.000	123	Wisma KIE
19	Program Environment Education TNK	65.025.000	150	TNK
20	Pengembangan Budi Daya Bawang Dayak	53.500.000	10	Guntung
21	Pelaksanaan HUT RI ke 73	36.750.000	50	Loktuan & Guntung
22	Qurban	84.000.000	80	Guntung, Loktuan, Tj. Limau & Tj Laut
23	Pelaksanaan Deteksi & Edukasi Informatif (Detektif Cekatan)	19.244.500	278	SMP 9 Guntung
24	Pelatihan Steir Bandung 2018	38.750.000	3	Bandung
25	Program Lanjuta SDGs (ISDA)	48.200.000	5	Wisma KIE
26	Training of Trainer Stier Stiem	56.750.000	26	Hotel Sintuk Bontang
27	Program Lanjutan Detektif Cekatan & Penilaian Padmamitra Award 2018	85.607.000	98	Kartini Raya No. 57 Jakarta
28	Program Pembauatan Profil CSR PT KNI 2018	41.602.000	98	Jakarta Pusat
29	Program Environment Education II	91.300.000	65	Sanggatta Kutim
30	Program Pelatihan Jurnalistik	30.950.000	2	Hotel Indah Yogyakarta
31	Donasi	575.644.000		Donasi / Karitatif
JUMLAH		.743.753.000	2.271	

Tabel 6.2

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Industrial Estate

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Luas (M2)	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Gedung Serba Guna dan Pujasera	80.500.000	4.025	Guntung
2	Sekolah Luar Biasa Komplek Hotel Equator	57.240.000	2.862	Guntung
3	Water Treatment Plan PDAM	19.500.000	975	Guntung
4	Penggunaan Budidaya Ikan Air Tawar	16.000.000	800	Guntung
5	Penggunaan Lahan Untuk Jalan di Pos 7	20.000.000	1.030	Loktuan
6	Akses Jalan dari Loktuan Menuju RT 51	2.240.000	112	Loktuan
7	Masjid Green Land Temputu RT.52	69.740.000	3.487	Loktuan
8	Pujasera Green Land Temputu RT 52	7.980.000	399	Loktuan
9	Penggunaan untuk Gereja	260.000.000	13.000	Loktuan
10	Mesjid di Bukit Sekatup Damai	39.520.000	1.991	BSD
11	PengelolaSatuan PAUD Sejenis Anyelir XII	2.674.600	134	BSD
12	KelompokHijau Kreatif PKK	2.000.000	100	BSD
13	PengelolaSatuan PAUD Sejenis Anyelir VII	3.400.000	170	BSD
14	Penggunaan untuk SMP Negeri 5	3.713.400	185,67	Loktuan
15	Penyaluran CSR dari Proposal dan Pemberdayaan Masyarakat, selama 12 bulan 2018	316.235.000	150	Bontang
Total		901.643.000		

Tabel 6.3

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Parna Industri

No.	Kegiatan	Jenis Fasilitas
1	2	3
A	Pendidikan dan Alih Teknologi	
1	Internship Program untuk belajar tingkat SMA/STM, Akademi/ perguruan tinggi	1. Perusahaan akan memberikan mentor atau pembimbing dari karyawan sesuai dengan juusannya 2. Perusahaan menyediakan makan siang 3. Perusahaan memberikan asuransi kecelakaan kerja dan kematian dalam kategori bukan penerima upah (BPU) BPJS 4. Setiap Siswa/i Mahasiswa/i akan menerima bantuan pengganti biaya transportasi dari perusahaan 5. Memyediakan Sertifikat

2	Pelestarian budaya dan situs/cagar budaya	1. Penghijauan rumah adat dan sekitarnya 2. Memperbaharui 2 Fasilitas Gajebo yang ada 3. Melakukan perawatan lingkungan 4. Menjaga, merawat dan melestarikan pohon asli Kalimantan dan pemberian nama-nama pohon
3	Student Plant Visit	1. Mengadakan pendidikan dan Alih Teknologi sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan
B	Peduli akan keselamatan, kesehatan dan lingkungan	
1	Hutan Kota Wana Khatulistiwa	1. Luas hutan 8 Ha yang berlokasi di Muara II Bontang Lestari yang merupakan RTH (Ruang Taman Hijau) 2. Pembaharuan kesepakatan antara Pemerintah Kota dan KPI 3. Turut serta mensukseskan Program Pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan hijau melalui gerakan menanam pohon 4. Membangun kesadaran untuk berbudaya dan cinta lingkungan 5. Terbatasnya ruang terbuka hijau untuk menanam pohon 6. Hutan kota dapat menjadi salah satu solusi untuk turut serta berperan untuk menanam serta memelihara lingkungan dan berkelanjutan 7. Untuk Meningkatkan etika kota 8. Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam pelestarian lingkungan 9. Sebagai cadangan untuk turut serta melestarikan sumberdaya alam hayati guna menyelamatkan berbagai spesistumbuhan lokal maupun faunadengan memperhatikan manfaat dan fungsi ekosistemnya Infrastruktur ang tersedia - Area parkir kendaraan - Tandon Penampung Air - Kamar Mandi - Gazebo
2	Sadar Hidup Sehat	1. Melakukan pendekatan kepada generasi muda yang tergabung dalam Asosiasi Pemuda Lembah (APL) 2. Perbaikan dan perawatan sarana olahraga berupa Lapangan Bola 3. Menyelenggarakan Even olahraga bersama APL 4. Menyelenggarakan olahraga bersama pemerintah kota, perusahaan dan pemuda lembah



3	Hijau dan bersih (Green & Clean)	1 Penghijauan dilingkungan SMP-9 Bontang 2 Pengadaan tanaman dan pot bunga di median jalan Kota Bontang 3 Penghijauan lahan kritis di gereja GKII Halleluya Bontang 4 Memberikan materi tentang pengelolaan sampah plastik kepada siswa-siswi pecinta Lingkungan Hidup SMN 2 Bontang di Mangrove Park Bontang 5 Memberikan bantuan tempat sampah untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dalam kehidupan sehari-hari
C	Kontribusi ke masyarakat	
1	Pembinaan petani aren genjah Guntung	1 Mengembangkan penghijauan di daerah guntung untuk memberikan ruang alternative dalam benuk usaha 2 Memperdayakan masyarakat terhadap industri turunan pohon aren 3 Kerjasama dengan kelompok tani dengan memfasilitasi petani mulai dari peyediaan biit pohon aren 4 Pendampingan dan bimbingan dalam memelihara dan merawat pohon aren yang terus berkelanjutan
2	Pembinaan UKM Amplang Revina	1 Melaksanakan pembinaan UKM di daerah Loktuan yang merupakan juga area Buffer zone dari operasional Bisnis PT. KPI 2 Memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada pengusaha UKM Amplang yang di jalankan oleh Ibu-Ibu 3 Memudahkan dalam Pemasaran serta promosi berupa keikutsertaan dalam pameran
3	Pembinaan UKM kompos sutara	1 Meningkatkan Sociel ekonomi masyarakat, melalui kerjasama dengan kelurahan Guntung dan juga membantu usaha kecil perorangan 2 Memberikan bantuan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas peroduksi, pecking dan pemasaran

Tabel 6.4

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pertamina Gas

No.	Program/Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5
1	Smart Club Teluk Kadere	Pemberian Bantuan Pendidikan -Lemari Buku -Buku Pelajaran -Buku Cerita -Alat Peraga Pendidikan	Teluk Kadere	Rp. 28.000.000
2	Posyandu Mandiri	Pemberian Bantuan Peralatan -Timbangan Digital -Timbangan Dacin -Kursi Plastik -Bantuan Makanan -Pendamping Balita	Sidrap	Rp. 9.5000.000
3	Penghijauan Tanaman Penyerap CO2 dan Tanaman Produktif	Penanaman Mangrove sejumlah 10.000 Bibit	Tanjung Laut	Rp. 41.750.000
4	Desa Binaan Peternakan dan Perikanan (tahap 3)	Pelatihan pembuatan pakan ternak, pertanian dan perikanan	Pondok Pesantran Hidayatullah Bontang	Rp. 35.000.000
5	Kelompok Wanita Mandiri Kalimantan (tahap I)	Pelatihan Ecoprinting dan Menjahit kelompok ibu-ibu Guntung RT 01	RT. 01 Guntung	Rp. 108.000.000
JUMLAH				Rp. 22.230.000

Tabel 6. 5

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT Indominco Mandiri

No.	Program/Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5
A	Pendidikan			181.709.000
1	Beasiswa S1	Meningktakan Prestasi Mahasiswa bidang akedemik	Bontang Lestari	16.000.000
2	Mining Goes To School "Indominco Mengajar"	Menambah Wawasan keilmuan tentang tambang	Bontang	16.360.000
3	Pembangunan Halte Bus di SDN 004	Peningkatan Pelayanan anak sekolah	Bontang Lestari	50.000.000
4	Bantuan Fasilitas Belajar SMK Nusantara Mandiri	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Bontang	4.500.000
5	Taman literasi (Program Blue Print Kaltim 2018)	Mengurangi angka lietarasi anak didik	Bontang Lestari	85.000.000
6	Support Pengembangan Skill Siswa dan Mahasiswa	Peningkatan skill extra untuk mahasiswa dan siswa	Bontang, Kukar dan Kutim	9.849.000
B	Kesehatan			189.890.000
1	Pembangunan Toilet Komunal	Peningkatan layanan kesehatan khususnya untuk sanitasi	Bontang Lestari	90.000.000
2	Renovasi Posyandu Tihi Tihi	Peningkatan pelayanan Balita	Bontang Lestari	30.000.000
3	Bantuan acara milad bersama kampung kb bontang lestari	Mendukung program Pemerintah Khususnya KB	Bontang Lestari	4.750.000
4	Pelatihan Kader Posyandu	Peningkatan Skill Bagai Kader Posyandu	Bontang	24.060.000
5	Pelatihan Pengembangan Bidan	Penigkatan Skill Bagi Petugas Bidan Desa	Bontang	20.080.000
6	Pelatihan BTCLS perawat di desa binaan	Peningkatan Kelimuan bagi Perawat berkaitan BTCLS	Bontang	21.000.000
C	'Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan			246.575.000
1	Horticulture (Program Ketahanan Pangan Nasional)	Penigkatan dan pengembangan pertanian untuk petani lombok dan bawang	Bontang Lestari	20.000.000
2	Pengembangan Fasilitas Petani Rumput Laut	Peningkatan Hasil Rumput laut bagi nelayan	Bontang Lestari	183.000.000
3	Pengembangan Pemuda Desa Melalui Training Naker Lokal/ Pelatihan Welder	Peningkatan kapasitas Skill bagi Pemuda Desa	Bontang Lestari	21.975.000



4	Pengembangan Pemuda Desa Melalui Training Naker Lokal/ Pelatihan Mekanik Motor	Peningkatan kapasitas Skill bagi Pemuda Desa	Bontang Lestari	21.600.000
D	Kemandirian Ekonomi			57.000.000
1	Bantuan untuk kelompok nelayan pesisir selambai rt. 07	Pengembangan Usaha nelayan tangkap	Loktuan	15.000.000
2	Permodalan Perbengkelan	Pengembangan bengkel dalam rangka peningkatan pendapatan.	Bontang Lestari	22.000.000
3	Pembinaan Kelompok Nelayan Tangkap	Pengembangan nelayan dalam rangka peningkatan hasil tangkapan	Bontang Lestari	20.000.000
E	Sosial, Budaya dan Agama			200.585.000
1	Hari Raya Idul Adha	Meningkatkan tali silaturahmi antara pihak perusahaan dengan masyarakat.	Bontang	30.000.000
2	Safari Ramadhan dan Idul fitri	Meningkatkan tali silaturahmi antara pihak perusahaan dengan masyarakat.	Bontang	50.000.000
3	Pelatihan Imam Masjid	Peningkatan kapasitas keilmuan bagi Imam masjid	Bontang Lestari	15.000.000
4	Pengadaan Alquran	mendukung program pemerintah Khususnya baca Quran	Bontang Lestari	5.000.000
5	Bantuan Kegiatan MTQ Tingkat, Kecamatan, Kabupaten	mendukung program pemerintah Khususnya baca Quran	Bontang Lestari	2.500.000
6	Program Fardhu Kifayah	Peningkatan kapasitas keilmuan bagi Imam dan masyarakat khususnya sholat janazah	Bontang Lestari	10.000.000
7	Bantuan Kegiatan Keagamaan Lainnya		Bontang	1.253.400
8	Pameran Erau		Bontang	5.000.000
9	Pameran lokal dan Nasional		Jakarta	5.589.000
10	Perayaan Hari Kemerdekaan RI		Bontang	15.000.000
11	Keterlibatan Stakeholder (Memperkuat peran & fungsi FKM / CCC, CMS Kolaborasi, memperkuat hubungan dengan media massa & publikasi	peningkatan keilmuan tentang peran dan fungsi CCC dalam perencanaan program	Bontang Lestari	4.990.000



12	Bantuan Bencana Gempa dan Tsunami Lombok	Partisipasi dan dukungan terhadap dampak bencana alam	Palu dan Lombok	26.000.000
13	Bencana alam Banjir Santan dan Bontang	Partisipasi dan dukungan terhadap dampak bencana alam	Bontang	16.971.000
14	Partisipasi Forum CSR Pertambangan Kaltim	Komitment terhadap Forum CSR	Kalimantan Timur	2.000.000
F	Pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat			262.258.000
1	Komitment Taman Nasional Kutai	Komitment terhadap lingkungan	Bontang	70.000.000
2	Support Fasilitas Pendukung Program Lingkungan)		Bontang	12.497.000
3	Lanjutan Pembuatan Tugu selamat datang di area TNK Bontang		Bontang	29.761.000
4	Pipanisasi Air Bersih	Peningkatan akses air bersih bagi masyarakat	Bontang Lestari	150.000.000
G	Pembentukan kelembagaan komunitas			50.000.000
1	Studi Banding BUMDES/ LPM	Peningkatan kapasitas pemuda dalam pengembangan usaha desa/lura	Bontang	50.000.000
H	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM			471.336.000
1	Normalisasi saluran drainase	Mengurangi area pertanian terdampak banjir	Bontang Lestari	150.645.000
2	Pelebaran jalan dan pembuatan turap di baltim bontang lestari prd.mar'18	Meningkatkan pelayanan masyarakat	Bontang Lestari	151.153.000
3	Pembuatan Sumur Bor Lapas Bontang	Meningkatkan pelayanan Warga Lapas	Bontang Lestari	140.000.000
4	Kegiatan pembangunan gedung (rkb) ma ddi bontang	Membantu sekolah terdampak kebakaran	Bontang	29.538.000
TOTAL (Rp)				1.659.353.000

Tabel 6. 6

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Black Bear Resources Indonesia

No.	Bulan	Realisasi untuk proposal yang masuk	Alokasi Anggaran
1	2	3	4
1	Februari	1 Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlash	500.000,-
2	Maret	1 Dinas Pemadam Kebakaran	500.000,-
		2 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000,-
		3 SD.1 YPK	500.000,-
		4 Komando Daerah Militer VI/Denarhanud-002	1.000.000,-
		5 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Bontang	500.000,-
3	April	1 LPM Loktuan	2.000.000
		2 Pangkalan Utama TNI Al XIII Pangkalan TNI Sangatta	1.000.000,-
		3 Polres Bontang (Sektor Bontang Utara)	2.500.000,-
4	Mei	1 PKTV	500.000,-
		2 IRMA Nurul Muttaqin	500.000,-
		3 Yayasan Jantung Indonesia	1.000.000,-
		4 Kerukunan Keluarga Mamuju	1.000.000,-
		5 GEPAK	1.500.000,-
		6 Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana	1.000.000,-
		7 Mesjid Al Huda	500.000,-
		8 Mesjid Al Mujahidin	500.000,-
		9 Kelurahan Kanaan	500.000,-
		10 Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu	1.500.000,-
		11 Forum Kemitraan Polisi Masyarakat	1.500.000,-
		12 BNN Provinsi Kaltim	500.000,-
		13 IRMA Jami'Al Amin Loktuan	500.000,-
		14 Ikatan Wanita Kalimantan	1.000.000,-
		15 Polres Bontang	7.500.000,-
		16 Koramil 0809-01	1.500.000,-
5	Juni	1 Bontangpost	2.500.000,-
		2 Kerukunan Warga Sulawesi Utara	1.000.000,-
		3 Polres Bontang	1.500.000,-
		4 Bantuan Korban Kebakaran Loktuan	2.000.000,-
6	Juli	1 Kelurahan Loktuan	1.000.000,-
		2 Polres Bontang	1.000.000,-
		3 Kodim 0908 Bontang	7.500.000,-



		4	Lembah Permai Adventure Park	2.000.000,-
		5	Loktuan Rawa Berkarya	1.000.000,-
		6	Ketua RT Loktuan	1.500.000,-
		7	GM FKPPi RAYON 01 Bontang Utara	500.000,-
7	Agustus	1	Polres Bontang	1.500.000,-
		2	Kelurahan Guntung	1.000.000,-
		3	RT 26 Loktuan	1.000.000,-
		4	Gerakan Pemuda Asli Kaltim	1.000.000,-
		5	Kelurahan Loktuan	1.000.000,-
		6	RT 43 Loktuan	1.000.000,-
		7	Forum RT Guntung	1.000.000,-
		8	Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an	1.000.000,-
		9	Panitia Pelaksana Erau Pelas Benua Bontang	1.000.000,-
		10	Panitia Turnamen Bola Voli Kapolres CUP	1.500.000,-
8	September	1	Ikatan PekerjaElektrical & Instrument	500.000,-
		2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XIV 2018	1.000.000,-
		3	DPC Persatuan Purnawirawan & WarakwuriTNI & Polri	500.000,-
		4	Dinas Pendidikan Kaltim	1.000.000,-
		5	Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu	1.500.000,-
9	Oktober	1	Kelurahan Loktuan	1.250.000,-
		2	Bontangpost	1.250.000,-
		3	Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	1.500.000,-
10	November	1	Bontangpost	1.000.000,-
		2	Sempekat Keroan Kutai	500.000,-
		3	Pemuda Pancasila Bontang Utara	500.000,-
		4	PT. PKT	1.000.000,-
		5	Kerukunan Warga Sulawesi Utara	1.000.000,-
		6	Kelurahan Loktuan	1.250.000,-
		7	Polsek Bontang Utara Subsektor Loktuan	1.600.000,-
		8	Panitia HUT Satpam ke 38 2018	1.000.000,-
11	Desember	1	Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu	1.000.000,-
		2	Kelompok Majelis Ta'lim Qalbi Khairina	1.000.000,-
		3	GEPak Korwil Bontang Utara	500.000,-
Total Donasi (Rp)				83.100.000,-

Tabel 6. 7

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Bontang Migas dan Energi

No.	Program/ Kegiatan	Kegiatan	OutPut	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3		4	5	
1	Keagamaan	Memperingati Hari Raya Idhul Adha	1 (satu) ekor sapi	Masjid Alhijrah Bontang	15.000.000	
2	Keagamaan	Memperingati Hari Raya Idhul Adha	1 (satu) ekor sapi	Masjid Alhijrah Bontang	15.000.000	
3	Bantuan Lainnya	Memperingati HUT Bontang Post ke-8	2 (dua) dispenser (doorprize)	Bontang Post	495.000	
4	Bantuan Lainnya	Rakerwil APEKSI di Kota Bontang	Konsumsi paduan suara Bontang Choir	Kantor Walikota Bontang	2480.000	
JUMLAH					32.975.000	

Tabel 6.8

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak NGL

No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi	Biaya
COMMUNITY EMPOWERMENT					2.596.871.917.46
1	PENGEMBANGAN BONTANG KUALA ECOTOURISM				
	a. Infrastruktur - Perbaikan dermaga homestay - Perluasan rute sungai belanda - Pemasangan Photobooth terapung b. Manajemen Organisasi - Pendampingan Kelompok c. Pengembangan Publikasi dan Pemasaran - Peresmian Floating Homestay - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Wisata susur Sungai Belanda - Floating Homestay - Snorkeling di Karang - Adaptasi Magrove - Adopsi terumbu karang	MASKAPEI (Masyarakat Kreatif Pesisir)	Kelurahan Bontang Kuala	
2	PENGEMBANGAN BUDIDAYA KERAPU				
	a. Manajemen Organisasi - Pendampingan Kelompok - Pembuatan paket menu b. Pengembangan, Publikasi dan Pemasaran - Pendampingan kerjasama kelompok dengan Pertamina Mor VI - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Budidaya ikan kerapu - Olahan kuliner ikan laut	Kelompok Kerapu Macan	Kelurahan Berbas Pantai	



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi	Biaya
3	PENGEMBANGAN KAMPUNG ASIMILASI				
	a. Infrastruktur - Pengadaan bibit lele b. Manajemen Organisasi - Pendampingan - Pelatihan budidaya lele c. Pengembangan Publikasi dan Pemasaran - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Ternak Ayam Organik - Kebun buah naga - Kebun Hidroponik - Pemanfaatan limbah nonB3 menjadi <i>Furniture</i> - Budidaya lele - Kerajinan tangan	Warga Binaan Pemasyarakatan kelas III Bontang	Kelurahan Bontang Lestari	
4	PENGEMBANGAN BUDIDAYA KEPITING BAKAU				
	a. Infrastruktur - Perbaikan sarana pembesaran kepiting bakau - Penyediaan bibit kepiting bakau b. Manajemen Organisasi - Pelatihan pembesaran kepiting bakau - Pelatihan pembuatan rakang kepiting bakau - Pendampingan kelompok c. Pengembangan Publikasi dan Pemasaran - Promosi kegiatan melalui media online dan offline - Kerjasama dengan kelompok mitra binaan lain	- Pembibitan kepiting bakau - Pembesaran bibit kepiting bakau	- Kelompok Tani Lestari Indah - Kelompok Bakau Jaya - Kelompok Alam Permai - Kelompok Pantai Harapan Indah	- Kel. Berbas Tengah - Kel. Tanjung laut - Kel. Kel. Tanjung laut Indah - Kel. Bontang Kuala	-
5	PENGEMBANGAN UMUM PESISIR				
	a. Manajemen Organisasi - Pendampingan kelompok b. Pengembangan Publikasi dan Pemasaran - Memperluas jaringan kerjasama	- Peroduk olahan singkong - Peroduk olahan ikan asin - Peroduk olahan Mangrove - Peroduk olahan Rumput Laut - Peroduk olahan hasil pesisir lainnya	- Kelompok Mawar Lestari - Kelompok Mekar Mandiri - Kelompok Tunas Jaya - Kelompok Saputra Snack - Kelompok Karya Bersama - Kelompok Kembang Lusai - Kelompok Daun Harum - Kelompok Thalita Mangrove - Kelompok karya Wanita		



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi	Biaya
6	PENGEMBANGAN KNOWLEDGE HAUSE				
	a. Infrastruktur - Perbaikan Atap - Penambahan materi edukasi - Pemasangan photobooth b. Pengembangan Publikasi dan Pemasaran - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	Pusat informasi kegiatan Badak LNG (operasional, CSR, prestasi dll) yang dapat dilakukan masyarakat umum secara gratis	Masyarakat Kota Bontang		
7	SELANGAN CITY (Program Baru 2018)				
	a. Koordinasi pelaksanaan - Koordinasi program dengan pemerintah dan masyarakat setempat - Sosialisasi program dengan pemerintah dan masyarakat setempat - Koordinasi program dengan kelompok mitra binaan Badak LNG lainnya b. Infrastruktur - Renovasi gapura dan dermaga - Pengecatan fasilitas umum - Penmbangunan pusat informasi wisata - Pembuatan peta wisata, papan informasi dan rambu-rambu petunjuk - Pembuatan konsep atraksi wisata c. Manajemen Organisasi - Pendampingan pembuatan konsep atraksi wisata - Pelatihan manajemen pariwisata d. Pengembangan Publikasi dan Pemasara - Peresmian Program - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Wisata Kampung Terapung - Snorking - Mencari Karang - Wisata Kuliner - Pemanfaatan air hujan melalui elektrolisa air	- Kelompok Pelangi Pesisir - Warga Selangan	- Kel. Bontang Lestari	
8	WISATA DAYAK BONTANG (Program Baru 2018)				
	a. Koordinasi pelaksanaan - Koordinasi program dengan kelompok adat b. Infrastruktur - Peremajaan lamin dayak - Pembuatan gapura - Pembuatan photobooth - Pengadaan alat music dan permainan tradisional c. Manajemen Organisasi - Pembuatan konsep atraksi	- Wisata Budaya - Pengenalan budaya dayak - Pertunjukan seni - Wisata belanja (kerajinan khas dayak)	- Dewan Adat Dayak Bontang		



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi	Biaya
	wisata - Pelatihan manajemen pariwisata c. Manajemen Organisasi - Pendampingan pembuatan konsep atraksi wisata - Pendampingan kelompok d. Pengembangan Publikasi dan Pemasara - Peresmian Program - Promosi kegiatan melalui media online dan offline				
9	KONSERVASI MNGROVE				
	- Pembibitan mangrove - Penanaman mangrove jenis Sanneratia ovate - Pendampingan kelompok - Pengembangan mangrove indormation Center - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Pembibitan Mangrove - Penanaman Mangrove - Wisata Edukasi Mangrove	- Kelompok Tani Lestari Indah - Kelompok Tani Alam Permai - Kelompok Tani Beras basah - Kelompok Tani Bakau Jaya - Kelompok Tani Nelayan Pantai Harapan - Kelompok Tani Nelayan Attirara - Kelompok Bunga Laut	- Kel. Tanjung Laut Indah - Kel. Berebas Tengah - Kel. Bontang Kuala - Kel. Bontang Lestari	
10	PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT				
	- Pencacahan Plastik - Pengolahan sampah organic menjadi kompos - Pengolahan sampah kertas - Pendampingan kelompok - Pengadaan mesin pengepresan kardus - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Pencacahan Plastik - Daur ulang sampah plasrik - Pembuatan Kompos - Pengepresan kardus	- Kelompok Bontang Lestari Peduli - Kelompok Satimpi Berhias - Kelompok Kanaan Bersinar	- - Kel. Bontang Lestari - Kel. Satimpo - Kel. Kanaan	-
11	TATA BUSANA				
	- Pelatihan menjahit - Menjahit pakaian - Membuat sovenir dari bahan kain perca - Menjual peralatan menjahit - Mengelola pusat penjualan produk mitra binaan Badak LNG - Pendampingan kelompok - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Pelatihan menjahit - Jasa menjahit - Penyedia peralatan menjahit - Mengelola pusat penjualan produk mitra binaan Badak LNG	- KOCIBU (Kumpulan Cipta Busana) - KUBE Anggrek	- Kel. Gunung Telihan - Kel. Kanaan	



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi	Biaya
12	TERNAK MANDIRI				
	- Penggemukan dan pengadaan sapi untuk kurban	- Ternak sapi	- Kelompok Ternak Mandiri	- Kel. Api-Api	
13	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR				
	- Sharing knowledge mengenai budidaya lele kepada WBP diprogram kampung asimilasi - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Budidaya lele - Pembuatan abon lele - Pembuatan dendeng lele - Jasa kuliner lele goreng - Pembuatan kerupuk lele - Pembuatan lele asap	- Kelompok Barisan Gotong Royong	- Kel. Gunung Telihan	
14	BUDIDAYA JAMUR				
	- Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Budidaya jamur tiram - Diversifikasi produk olahan jamur (bakso jamur, sate jamur, jamur krispi)	- Kelompok Telihan Indah	- Kel. Gunung Telihan	
15	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TEKASALO				
	- Pendampingan kelompok - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Budidaya jamur tiram - Pembuatan minyak goreng dari VCO	- Kelompok Bunga Laut - Kelompok Attirara - Kelompok Karya Bersama	- Teluk Kadere - Salantuko - Lok Tunggul	
16	MANGROVE ECO MODE				
	- Pendampingan kelompok - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Produksi kain batik berbahan pewarna alami dan sintetis - Produksi pakaian batik - Pelatihan membatik	- Kelompok Batik Etam	- Kel. Gunung Telihan	
17	PEMBIBITA ULIN				
	- Pendampingan kelompok - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Pembibitan ulin - Budidaya tanaman hias - Jasa Indocape untuk acara pesta - Jasa disain taman untuk perkantoran /rumah	- Kelompok Gren Hause Pesona Alam	- Bontang Lestari	



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi	Biaya
18	IKATAN TEKNISI OTOMOTIF BONTANG (ITOB)				
	- Pendampingan kelompok - Promosi kegiatan melalui media online dan offline	- Service renovasi mobil	- Bengkel Aksara Mandiri		
19	ISERTIFIKASI TENAGA AHLI				
	- Sertifikasi welder migas - Sertifikasi operator crane dan rigger	- Jasa pengelasan - Jasa operator crane dan rigger	- IWB (Ikatan Welder Bontang) - IPROC (Ikatan Pekerja Rigger dan Operator Crane)	- Bontang	
CAPACITY BUILDING					1.955.715.784.00
1	BAFCO (Badak Full Scholarship)	- Beasiswa tingkat SMP - Beasiswa SMA - Beasiswa tingkat perguruan tinggi	- Pelajar Kota Bontang	- Bontang	
2	MAGANG LAB, KULTUR JARINGAN DAN OPERATOR DIESEL	- Magang di lab dan EC Badak LNG - Magang di laboratorium kultur jaringan Badak LNG - Magang di biodiesel Badak LNG (seluruh durasi magang adalah 1 tahun)	- Pelajar lulusan SMA Bontang - Pelajar lulusan S1 Bontang	- Bontang	
3	COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM (COOP)	- Kesempatan belajar bekerja di Badak LNG selama 6 bulan	- Pelajar lulusan SMA Bontang - Mahasiswa S1 asal Bontang	- Bontang	
4	PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL	- Kesempatan magang di Badak LNG selama 4 bulan	- Siswa/mahasiswa (diseleksi oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Bontang)	- Bontang	
5	LNG ACADEMY	- Beasiswa D3 bekerjasama dengan Politeknik Negri Jakarta	- Pelajar lulusan SMA	- Nasional	
6	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)	- Kesempatan praktek kerja di Badak LNG selama maksimal 3 bulan	- Pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa	- Nasional	
INFRASTRUKTUR					859.465.250.00
1	ELEKTROLISA AIR (5 unit)			Selangan	



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi	Biaya
2	WC KOMUNAL (10 unit, program CSR kolaborasi)			- Berbas Tengah - Berbas Pantai - Tanjung laut - tanjyng laut Indah	
- CHARITY					928.229.221.00
1	BANTUAN KORBAN KEBAKARAN	- Bantuan pakaian layak pakai - Bantuan obat-obatan - Bantuan kebutuhan bayi - Pembangunan Mushollah - Donasi dari pekerja		- Kelurahan Berbas	
2	BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM NASIONAL	- Bantuan pakaian layak pakai - Bantuan obat-obatan - Bantuan kebutuhan bayi - Pembangunan Mushollah - Donasi dari pekerja		- Lombok - Palu	
3	MITRA TAMAN NASIONAL KUTAI	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
4	DUKUNGAN KEGIATAN KEAGAMAAN	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
5	DUKUNGAN KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN	Sponsorship Kegiatan			
6	DUKUNGAN KEGIATAN BIDANG OLAHRAGA	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
7	DUKUNGAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
8	DUKUNGAN KEGIATAN ORGANISASI MASYARAKAT	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
9	DUKUNGAN KEGIATAN FKPD	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
10	DUKUNGAN KEGIATAN PENGAMANAN OBVITNAS	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
11	RAKOR FKPD	Sponsorship Kegiatan		Bontang	
					6.340.282.172.46

Tabel 6.9

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim

No	Program	Kegiatan	Output	Lokasi	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Better Living In Malahing	Studi banding budidaya rumput laut	Memandirikan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan, mandiri secara social, mandiri secara ekonomi	RT 30 eluKampung Malahing, Kelurahan Tanjung Laut Indah	1. 192.348.240	Sinergi dengan Pemerintah terkait (Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, DKP3, DLH, Disperindakop)
		Replika program olahan dan peningkatan kapasitas ibu-ibu Sukses Mandiri				
		Perluasan kerampa jaring tancap				
		Budidaya teripang				
		Pemanfaatan kerajinan dari hasil laut				
		Pengelola sampah terpadu				
		Penambahan tanaman penghijauan				
		Peningkatan SDM operator untuk maintenance solar cell dan pembuatan power house solar cell				
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				
		Pupuk Kaltim Mengajar				
		Penyempurnaan IPAL warga				
		Penyempurnaan inovasi pengadaan air bersih (Sandfilter)				
2	Inkubator Bisnis Permata Bunda	Pengembangan kapasitas produksi	Mempersiapkan kemandirian hidup Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan fokus kegiatan pengembangan keterampilan kewirausahaan, melalui fase pelatihan, pemagangan, penempatan kerja dan pendampingan wirausaha (Wirausaha ABK yang Mandiri)	Grg. Aren, Kelurahan api-api	891.790.000	Kalaborasi dengan masyarakat sekitar, (Gg. Aren) Voluntir, pemerintah kelurahan, dinas terkait
		Revitalisasi ruang pelatihan dan pertemuan				
		Revitalisasi alat produksi				
		Pelatihan lanjutan dan penerapan peningkatan produksi berbasis QHSE				
		Pengembangan lini usaha baru				



No	Program	Kegiatan	Output	Lokasi	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Kampung berdaya ramah disabilitas				
		Kampanye pembelajaran BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) kesetaraan tuna rungu dan sosialisasi bersama				
		Pelatihan dan pengembangan kapasitas kelompok bersama masyarakat				
3	Budiman Oke (Budidaya Tanaman Obat Keluarga) Kelompok Enggang Herbal	Peningkatan SDM Kelompok Pengembangan dan inovasi penduduk Pengembangan rumah produksi Pusat Edukasi tanaman herbal	Memandirikan masyarakat bufferzone melalui budidaya tanaman obat keluarga serta diversifikasi produk olahan bertahan TOGA (serbuk jamu herbal, simplisia)- Produk unggulan the bawang dayak	Kelurahan Guntung	155.456.500	Melibatkan Pemerintah, Kelurahan, LPM, Puskesmas, BU II, Disperindakop dan instansi Pendidikan di Kota Bontang (TK, SD, SMP, SMA/SMK)
4	Budiman Oke (Budidaya Tanaman Obat Keluarga) Kelompok Enggang Herbal	Peningkatan SDM kelompok Pengembangan dan inovasi penduduk Pengembangan rumah produksi Pusat edukasi tanaman herbal	Memandirikan masyarakat bufferzone melalui budidaya tanaman obat keluarga serta diversifikasi produk olahan bertahan TOGA yang dolah menjadi aneka minyak (minyak urut, minyak rambutan, minyak VCO)	Kelurahan Lektuan	100.500.000	Melibatkan Pemerintah, Kelurahan, LPM, Puskesmas, BU II, Disperindakop dan instansi Pendidikan di Kota Bontang (TK, SD, SMP, SMA/SMK)
5	Program kompos berbasis masyarakat- Kelompok Mekar Sari	Pelatihan pengolahan kompos cair bagi masyarakat Guntung (18 RT) Pelatihan pengolahan kompos cair bagi masyarakat Guntung malahing Demplot edupark Pengembangan dan inovasi produk Pembentukan Koperasi Mekar Sari	Memandirikan masyarakat bufferzone melalui Program Pengelolaan kompos berbasis masyarakat	Kelurahan Guntung	250.000.000	Melibatkan pemerintah kelurahan dan Disperindakop



No	Program	Kegiatan	Output	Lokasi	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
6	Program terumbu buatan di area konservasi terumbu Perairan Tebok Batang	Pembuatan dan penurunan terumbu buatan	Memandirikan masyarakat bufferzone melalui kegiatan konservasi terumbu kegiatan	- Kampung Selambai - Kelurahan Loktuan	450.000.000	Melibatkan pemerintah kelurahan, PKT, DC, DLH dan DKP3
7	Server mag Budi (Konservasi dan Diverifikasi Mangrov) – kelompok Tani Hutan Sumber Cahaya	Konservasi hutan mangrove melalui pembibitan dan penanaman mangrove	Memandirikan masyarakat bufferzone melalui kegiatan konservasi dan diversifikasi mangrove	Kelurahan Loktuan	377.875.000	Melibatkan pemerintah kelurahan, DLH dan DKP3 dan balai TNK
8	Kramba Jaring Apung (KJA)	Pengembangan kapasitas kelompok (pelatihan manajemen, pelatihan BST dan ANKAPIN) Pengadaan bibit ikan dan lobster Pengelolaan keramba jaring apung dan koperasi BEM (Bontang Etam Maritim) Pengembangan infrastruktur KJA Replikasi program keramba jaring apung di pulau gusung	Memandirikan nelayan dipesisir Kota Bontang melalui kegiatan keramba jaring apung berbasis koperasi (Koperasi Bontang Etam Mandiri)	Perairan Tanjung Limau	1.279.600.000	Melibatkan pemerintah kelurahan, DLH dan DKP3
9	Tempat pengolahan sampah terpadu	Pemilahan sampah terpadu dengan system conveyor	Pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam pemeliharaan sampah organik dengan teknologi moderen	Piere Tendean Bontang Kuala	450.118.000	Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dan KSM induk
10	PKT Peduli Kesehatan	a. Indek Kesehatan Masyarakat b. Promosi Kesehatan Mobil Umum c. Pembuatan Jamban Pesisir	Mengetahui perumah tangga dalam menerapkan kategori PHBS Pemeriksaan kesehatan dalam mencegah penyakit tidak menular dan preventife Hyglene kesehatan dan	Kelurahan Guntung dan Loktuan	150.000.000 70.000.000 215.000.000	Sebagai gambaran kondisi di kelurahan tersebut Bekerjasama dengan puskesmas bintang utara 2, masyarakat sadar akan kesehatan dan dilakukan sebulan 2 kali di 2 kelurahan Terpasang 90 rumah dipesisir, target dari



No	Program	Kegiatan	Output	Lokasi	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Sederhana	stop BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)			pemerintah bontang bebas buang air besar sembarangan 2019
		d. Penyuluhan NAPZA	Sosialisasi terkait NAPZA		30.000.000	Peserta siswa SMP dan anggota PIK-R di kelurahan guntung dan loktuan
11	Reintroduksi Anggrek Hitam	Penangkaran Anggrek Hitam	Mengembalikan Anggrek Hitam ke alamx	Hutan Sangkima	75.000.000	Bekerja sama dengan Balai Nasional Kutai
12	Program pengolahan pupuk berbahan baku cangkang kepiting – Kelompok Cangkang Salona	Limbah cangkang kepiting dan lobster diolah menjadi Pupuk Chitosan	Meningkatkan produktivitas ibu-ibu nelayan diwilayah Bufferzone	Kampung Selambai Kelurahan Loktuan	35.000.000	Memberdayakan kelompok ibu-ibu selambai yang menghasilkan limbah cangkang kepiting sehari ± 1 ton
13	Penanaman Barler	Penanaman pohon barler	Penghijauan wilayah area operasi perusahaan yang berdekatan dengan kawasan pemukiman	Kampung Guntung	859.554.000	Memberdayakan kelompok ibu-ibu selambai yang menghasilkan limbah cangkang kepiting sehari ± 1 ton
14	Pupuk KALTIM Peduli Pendidikan	a. Beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi b. Beasiswa untuk tingkat SMP c. Beasiswa untuk tingkat SD	Meningkatkan derajat pendidikan anak yang berprestasi tetapi tidak mampu secara financial dikota Bontang	Bontang	2.500.000.000	Perguruan tinggi ternama di Jawa dan Kalimantan timur Bekerjasama dengan YPK
15	Bantuan Air Bersih	a. Pemasangan jalur air bersih di gereja 6. Pemasangan jalur air bersih dari rumah sakit PKT ke sidrap	Terjaminnya akan kebutuhan dasar akan air bersih untuk konsumsi rumah tangga	Greja Loktuan Kelurahan Guntung	80.463.000 150.000.000	Masyarakat tidak lagi mencari air dengan jrigen dan mengurangi biaya transportasi
16	Mangrove sebagai barrier	Penyulaman Perawatan	Sebagai Penghijauan dan barrier	Kelurahan Guntung	385.000.000	Pemberdayaan masyarakat dalam penyulaman dan perawatan kembali (dikelolah oleh depertemen umum)
17	PKT Peduli K3	a. FRC Rekanan dan JVC b. Lomba Pemadam kebakaran c. Sosialisasi	Kontrktor faham akan safety dan K3 Masyarakat siap dan tanggap menghadapi kebakaran Masyarakat siap	Kontraktor di PKT Perwakilan kelurahan yg ada di Bontang	123.477.486	Pelaksanaan dilakukan dibulan K3



No	Program	Kegiatan	Output	Lokasi	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		tanggap darurat	dan tanggap bila ada kecelakaan pabrik			
		d. Penyuluhan HIV/AIDS	Antisipasi akan bahaya HIV/AIDS dan penularannya			
		e. Kuis K3	Mahasiswa paham tentang safety dan K3	Siswa SMA/ sederajat yang ada di Bontang		
18	Kehumasan Perusahaan	e. Stakeholder Relation (Private, State, Civil Society)	Terjadi hubungan harmonis antar stakeholder (Private, State, Civil Society)	Bontang	2.680.835.000	Meningkatkan citra positif Perusahaan
		b. Supporting dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat				
19	Program Diklat Pupuk Kaltim	e. Program Magang	Peningkatan kapasitas pelajar/mahasiswa sesuai dengan bidang dan programnya	Bontang	1.611.000.000	Peserta magang dan PKL masyarakat Bontang
		b. Program PKL		Bontang	2.33.806.120	
20	Bina Lingkungan	Bencana Alam, Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah, Pelestarian Alam, Bantuan Sosial Kemasyarakatan		Bontang	3.094.438.527	
21	Modal Kerja	Hibah		Bontang	1.445.609.803	
		Modal Kerja		Bontang	9.772.500.000	
Jumlah					28.660.051.676,-	

Tabel 6.10

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Daya Mandiri

No.	Program / Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Anggaran (Rp.)
1.	Prolansia Sehat	Pemberian Bantuan Alat-alat Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lansia	Guntung	2.800.000,-
2.	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD dan TK	a. Pelatihan Guru PAUD dan TK b. Bantuan Biaya SPP Kuliah Guru PAUD	Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD Dalam memberikan pendidikan kepada Anak Usia Dini	Lhoktuan dan Guntung	63.750.000,-
3.	Konservasi Buah Khas Borneo	a. Seminar Hari Konservasi Nasional b. Penanaman Pohon Buah Khas Borneo di Taman Adi Pura	Melestarikan Tanaman Khas Borneo	Bontang Kuala	56.000.000,-
4.	Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove	Penanaman 1000 pohon mangrove	Terlaksananya pola pengelolaan ekosistem mangrove	Guntung	30.700.000,-
5.	Pengembangan Destinasi Wisata	Melengkapi sarana dan prasarana wisata	Pulau Gusung menjadi tujuan wisata	Pulau Gusung	31.000.000,-
Jumlah					214.950.000,-

Tabel.6.11
Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. PLN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Bantuan Renovasi Masjid	Pemasangan keramik dan lantai seluas ±20m ²	Tersedianya sarana ibadah yang nyaman	Masjid Al-Ittihat RT 37 Kel. Api-Api	50.000.000	Sudah dilaksanakan Th 2018
2	Bantuan Renovasi Mushollah	Renovasi pemasangan dinding dalam mushollah, pembuatan Migrab, pemasangan AC serta kerjabhakti bersama masyarakat dalam perbaikan dan kebersihan musholla	Tersedianya sarana ibadah yang nyaman	Mushollah Attaqwa RT 37 Kel. Api-Api	100.000.000	Sudah dilaksanakan Th 2018
3	Sosialisasi P4 GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)	Penyuluhan bahaya narkoba kepada perwakilan siswa sekolah SMP dan SMA sekolah bontang	Menyebarkan informasi terkait P4GN memberikan informasi dan wawasan kepada pelajar dan membentengi lingkungan pendidikan dari pengaruh narkoba	BNN Kota Bontang	100.000.000	Sudah dilaksanakan Th 2018
4	Konservasi Ekowisata Kumuh	Bantuan elektrikal, Bantuan rumah display produk dan renovasi ruang kelas sekolah dasar	Meningkatkan perekonomian masyarakat malahing, tersedianya sarana pendidikan yang memadai serta dan adanya perbaikan sarana penunjang kelistrikan	Malahing	500.000.000	Sudah dilaksanakan Th 2018

Tabel 6.12
Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Methanol Industri

No	Program/Kegiatan	Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi Anggaran	Keterangan
1	Konservasi					
	-Pemeliharaan tugu equator	Pemeliharaan tugu equator	Konservasi Lingkungan	Tugu Equator	56,11%	
	-Pembuatan Methanol Arboretum	Pembuatan Methanol Arboretum		Bontang Lestari		
	-Kemitraan dengan TNK	Aktif sebagai mitra TNK, Sponsorsih dalam mitra		TNK		
		TNK				
	-Pengembangan rumah sayur dan boga	Pelatihan pembuatan saraba isntant, packinh dan budidaya jahe		Kelurahan Guntung		
	-Kementrian lingkungan hidup	Sponsorship untuk sekjen Kementrian Lingkungan Hidup dan hutan	Buku			
		Produksi (Book Publishing)				
2	Infrastruktur dan Comdev di Buffer Zone					
	-Support Bontang bebas BABS	Pembuatan fasilitas BAB Komunal	Fasilitas BAB Komunal	Kelurahan Guntung	22,01%	
	-Support Kegiatan TMMD	Donation for KODIM Activities (TMMD)	TMMD	Bontang		
	-Pengecetan median jalan di Kelurahan Loktuan	Pengecetan median jalan di Kelurahan Loktuan		Kelurahan Loktuan		
	-Pembuatan UMKM	Training For Entrepreneurship	Memberikan wawasan kepada pelaku usaha mengenai digital	Kelurahan Loktuan, Guntung, Sidrap dan Bontang		
3	Pendidikan				8,13%	
		-One day workshop for enhance elementary school teacher competency	Meningkatkan Kopetensi guru SD	Kelurahan Loktuan, Guntung, Sidrap dan Bontang		
		-3 day workshop for enhance	Meningkatkan Kopetensi guru SD	Kelurahan Loktuan, Guntu		



No	Program/Kegiatan	Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi Anggaran	Keterangan
		elementary school teacher competency via writing Programs		ng, Sidrap dan Bontang		
			-Scholarship For Kel. Guntung	Beasiswa		
			-Scholarship For Kel. Loktuan	Beasiswa		
4	Kesehatan				4,04%	
		-Khitanan Massal	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Kelurahan Loktuan, Guntung dan Sidrap		
5	Donasi				9.71%	
	-Donasi Non Rutin	-Sponsorship Seminar Nasional dan Rapat Kerja FOKOM		UGM Jogjakarta		
		-Sponsorship For Kongres Pancasila X		UGM Jogjakarta		
		-Sponsorship For Industrial Workshop 2018		UGM Jogjakarta		
		-Indonesia Independence Day Celebration at Kel. Loktuan		Loktuan		
		-Donation for Pastor Convention Toraja Church		Kaltim		
		-Donation for Erau Pelas Benua Kel. Guntung		Guntung		
	-Donasi Tunai	-Donasi rutin untuk proposal dan stake holder dilingkungan pabrik, sekolah dan NGO		Bontang		



Tabel 6.13

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pamapersada Nusantara

No	Perubahan	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran kegiatan	Jumlah Dana	Lokasi		Rencana Kerja	Realisasi	Capaian Kerja	Keterangan
						Kecamatan	Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIDANG EKONOMI				212.900.000					85.600.000		
1	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Perikanan dan Kelautan	1 Pelatihan Pembibitan Rumput Laut	Kel. Tani/ Kel, Nelayan	12.900.000	Bon. Utara, Bon Selatan	Tihi-tihi Bontang Lestari	Opservasi Implementasi Evaluasi	12.550.000	100%	Program Kerjasama dengan LPB Pama Bessai Berinta
			2 Pelatihan Pembibitan Rumput Laut (nata de seaweed)						12.550.000	100%	
			3 Pendampingan Pembinaan Rumput Laut						4.800.000	100%	
2		Usaha Kecil dan Menengah	1 Pelatihan Menejemem Pemasaran	Kelompok Usaha/ pengusaha Kecil	200.000.000	Bon. Selatan Bon. Utara Bon. Barat	Bonles Btg. Baru Loktuan Tg.Laut Telihan Api-API Belimbing	Observasi Implementasi Evaluasi	14.500.000	100%	
			2 Pelatihan Basic Mentality						21.200.000	100%	
			3 Pendampingan Digital Marketing							100%	
			4 Pameran BONTANG EXPO 2018						15.000.000	100%	
			5 Temu Pasar UKM dengan Giant Samarinda						3.000.000	100%	
			6 Fasilitasi pemerolehan pembayaran dariLKB/KNB (BPD, Bank Kaltim, BRI)						2.000.000	100%	
BIDANG LINGKUNGAN				80.000.000					758.755.000		
3	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Lingkungan	1 Kontribusi mitra TNK Th 2018	TNK	40.000.000	Bon Utara Bon Barat	All Kelurahan	Observasi Implementasi Evaluasi	30.000.000	100%	Balai TNK
			2 Studi Konservasi Lingkungan (SURIU) 2018			Bontang Selatan	Bontang Lestari		5.000.000	100%	Balai TNK
			3 Festival taman nasional dan taman wisata alam Indonesia Th 2018			Bontang Selatan	Bontang Lestari		6.500.000	100%	Balai TNK
			4 Penanaman bibit Mangrov			Bontang Utara	Bontang Lestari		6.500.000	100%	Pelestarian Hutan Magrove Bontang
			5 Ruang Terbuka Hijau	RTH Bontang Lestari Persada	Bontang Selatan	Bontang Lestari	700.000.000		100%	RTH Bon LestariPersada	
			6 Peningkatan kwalitas lingkungan (Pama Go Green)	Masyarakat Bontang dan Sekolah	40.000.000	Bontang Selatan	Bontang Lestari		17.255.000	100%	SMPN 6 Bontang dan SMAN Bontang



No	Perubahan	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran kegiatan	Jumlah Dana	Lokasi		Rencana Kerja	Realisasi	Capaian Kerja	Keterangan
						Kecamatan	Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIDANG SOSIAL				270.000.000					628.562.700		
4	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Pengobatan missal dan PMT Balita	Masyara- kat Bontang	20.000.000	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Observasi Implement asi Evaluasi	5.330.000	100%	Bontang Lestari
			2 Khitanan Massal			All Kecamatan	All Kelurahan		11.225.000	100%	Kodim dan Kel Berbas
			3 Donor Darah		10.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan		20.812.700	100%	PMI
			4 Green Fun Bike		10.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan		10.000.000	100%	Tang, HUT PPNI, MTQ Paregesit, Stitek dan Arhanud Rudal
			5 pelatihan BTCL untuk Perawat			Bontang Selatan	Bontang Lestari		10.000.000	100%	Kontribusi Pelatihan untuk perawat desa ring I
5	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Sarana Kesehatan	1 Gerakan Masyarakat Sehat	RT/RW	10.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan	Observasi Implement asi Evaluasi	3.000.000	100%	Launcing Jantung Sehat se Bontang dan Sosialisasi Pirt
6		Peningkatan Kwalitas SDM	1 Beasiswa Prestasi	Guru/Si swa/Sek olah	20.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan	Observasi Implement asi Evaluasi		100%	
			2 Bantuan operasional sekolah (peningkatan kopetensi guru, uji kopetensi siswa SMK, bantuan alat praktek)						1.750.000	100%	SMKN 3 Bontang, SMK YPTK Rigomasi, SMK Nusantara dan SMK Putra Bangsa
7		Peningkatan Keterampil an	Praktek Kerja Perusahaan/mag ang Sekolah	Siswa/ masyar akat Umum	70.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan	Observasi Implement asi Evaluasi	75.395.000	100%	75 Siswa
8		Kegiatan pendidikan Pemuda, Olahraga dan Seni	1. Kegiatan pendidikan Pemuda, Olahraga Stekholder	Siswa/ masyar akat Umum	40.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan	Observasi Implement asi Evaluasi	36.750.000	100%	Peringatan HUT RI, Bontang FC, Ontel Comonity, Gala Tua
9			1. Pembinaan dan kompetisi badminton Pama Cup IV						95.700.000	100%	Pelaksanaa n Kompetisi Badminton Pama Cup IV diarea Bontang, Kutim dan Kukar
10		Sosial	1. Kegiatan Sosial	Masyar akat Umum	30.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan	Observasi Implement asi Evaluasi	64.375.000	100%	Kegiatan sosial kerjasama Kodim, Polrae, Instansi, Arhanud dll



No	Perubahan	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran kegiatan	Jumlah Dana	Lokasi		Rencana Kerja	Realisasi	Capaian Kerja	Keterangan
						Kecamatan	Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Bantuan Bencana Nasional						24.500.000	100%	Bantuan Palu, Donggala, Banten dan Lampung
			3. Santunan Anak Yatim Piatu						49.350.000	100%	Santunan Anak Yatim di Bontang Lestari
11		Keagamaan	1. Hari Raya Keagamaan	Masyarakat Umum	40.000.000	All Kecamatan	All Kelurahan	Observasi Implementasi Evaluasi	22.000.000	100%	Perayaan hari Kemerdekaan
			2. Safari Ramadhan						122.079.000	100%	Masjid Bontang Lestari, Ponpes Subulana, Yayasan Dakwah Center Bontang
			4. Kegiatan Agamaan Stekholder						17.400.000	100%	Maulid Nabi Sekendis, Perayaan natal Bontang, Upacara Pujawadi
			5. Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha						36.900.000	100%	Kurban PT. Pama Elie Indo
12											
13		Infrastruktur	Perbaikan Fisik Sarana Umum	Pengerasan Jalan Bontang Lestari	20.000.000	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Observasi Implementasi Evaluasi	22.000.000	100%	Pengerasan Jalan Bontang Lestari dan Bantuan Batu Gunung

Tabel 6.14

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari Bankaltimtara

No.	Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Jumlah Sasaran	Lokasi
1	Bankaltimtara peduli kasih orang tua	Pensiunan PNS, Nasabah	30 orang	Bankaltimtara kantor cabang Bontang
2	Bankaltimtara Edukasi-Literisasi Civitas Akademika Universitas Mulawarman (Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Keluarga, menabung untuk masa depan sejahtera)	Masyarakat RT. 21 Kel. APi-Api - pembuatan Aquaponik - Rumah Cerdas	Masyarakat RT 21	Autis Center Bontang
		Masyarakat Kelurahan Belimbing - Belimbing Care To Share (Perbaikan Plang Program PKK) - Perawatan lapangan Volly	68 Peserta, Ibu PKK	Kantor Kel Belimbing RT. 18
		Masyarakat Kelurahan Gn. Teliha - Perbaikan Polisi Tidur	66 Peserta, Ibu dan bapak	Gedung srba guna Kel. Gn teliha
3	Pot bunga median jalan	Pengguna Jalan		Jl. MT Haryono dan Jl. Bhayangkara
4	Tenda UMKM 15 Unit	Pelaku usaha UMKM	15 Pedagang	Kel. Berbas Pantai
5	Tenda UMKM 10 Unit	Pelaku usaha UMKM	10 Pedagang	Stadion Lang-Lang

Tabel 6.15

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT.KMU (Rumah Sakit PKT)

No.	Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Besar Anggaran
1	Bantuan dana sponsorship serta penyuluhan di sekolah-sekolah di Kota Bontang	200 Peserta	Bontang	15.000.000/Th
2	Kuliah subuh materi kesehatan di Masjid Fahrul Khoir	100 Peserta	Bontang	3.600.000/Th
3	Bantuan dana sponsorship serta penyuluhan di sekolah-sekolah di Kota Bontang	975 Peserta	Bontang	6.600.000/Th
4	Senam jantung sehat dan aerobik di Rumah Sakit PKT dan klinik-klinik RSPKT, senam pro lansia diklinik duaafa	939 Peserta	Bontang	80.000.000/Th
5	Pengelolaan sampah medis (Dinkes, Dinas Lingkungan Hidup, Puskesmas di Kota Bontang		Bontang	45..000.000/Th
6	Kemitraan sekolah Adwiyata SMAN 2 Bontang		Bontang	15.000.000/Th
7	Seminar awam penyakit Difteri dan Pencegahannya	52 Peserta	Bontang	9.350.000/Th
8	Famili Ghatering dan Edukasi Pasien Hemodialisa	300 Peserta	Bontang	24.000.000/Th
9	PKL dan Magang	53 Peserta	Bontang	40.550.000/Th
10	Pengecetan Tugu Equator (tugu Selamat Datang)		Bontang	15.000.000/Th
11	Khitanan Massal	100 Peserta	RS PKT Bontang	18.500.000/Th
12	Penyuluhan kesehatan terhadap pasien dan pengunjung rehab medic	300 Peserta	Bontang	4.500.000/Th
13	Outbond Rehab Medik Pasien Rehabilitasi medis	100 Peserta	Bontang	25.000.000/Th
14	Lokus Kota Sehat		Bontang	15.000.000/Th
15	Seminar jantung mengatasi aritmia mencegah kematian mendadak untuk para dokter di Kota Bontang	37 Orang	Bontang	11.000.000/Th
16	Penyerahan bibit dan kompos ke Dinas Pertamanan Kota Bontang		Bontang	10.000.000/Th
17	Seminar KB untuk bidan Bontang	43 Orang	Bontang	7.350.000/Th
18	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kantin RS (Pelatihn Permodalan dan Distribusi Omset Pedagang)	21 Orang	Bontang	1.300..000.000/Th
19	Even P3K Perusahaan		Bontang	10.000.000/Th
20	Seminar Ibu Cerdas dalam rangka Pekan Hari Ibu	77 Orang	Bontang	20.000.000/Th
21	Mempersiapkan kehamilan sehat sejak dini		Bontang	15.900.000/Th
				1.691.350.000/Th

Tabel 6.16

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. UNITED TRACTORS

No.	Program/ Kegiatan	Kegiatan	Output	Lokasi	Lokasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan	SOBAT (MoU, Magang UKK)	Pendampingan pembelajaran (guru dan siswi) terhadap sekolah binaan UT dalam bidang jurusan teknik alat berat	- SMK Nusantara Mandiri - SMK N 3 Bontang - SMK Putra Bangsa	469.005.200	- Bantuan komponen alat praktek - Pelatihan basic mechamic corse - Kunjungan Industri
		Safety Colture Goes to School	Memberikan wawasan pada siswa tentang inplementasi budaya K3 didunia kerja/industri	- SMK Rigomasi - SMK YKPP Bontang		- Pelatihan OTJ dengan materi basic maintenance dan product knowledgfe
		Safety Colture Goes to School	Mengenalkan sejak dini kepada siswa/I tentang lalulintas, kerja sama dengan POLRES Bontang			- Uji Kompetensi - On the jon Training - Seat in kurikulum
		Bantuan Alat Praktek	Memberikan bantuan alat peraktek untuk implementasi proses belajar mengajar			
2	Kesehatan	Posyandu Binaan	Pendampingan dan pemberian bantuan makanan tambahan untuk Posyandu Binaan UT	Posyandu RT 24 Tanjung Laut Bontang	6.000.000	- Bantuan PMT setiap bulan kepada Posyandu binaan UT
		Bantuan Sarana Posyandu	Bantuan sarana infrastruktur penunjang Posyandu Binaan UT	Posyandu RT 24 Tanjung Laut Bontang	2.200.000	- bantuan Pengecetan bangunan luar Posyandu Binaan
		Sosialisasi DBD	Kekerjasama dengan puskesmas, keliling RT gotong royong dengan pemberian abate	Warga sekitar Mess UT Tanjung Laut	1.200.000	- Sosialisasi DBD dan Bantuan fogging disekitar Mess UT Tanjung Laut

		Donor Darah	Kontribusi karyawan UT dalam tanggap darurat	Mess UT Tanjung Laut	3.000.000	- Diklat setiap 3 bulan sekali
3	Donatur	Safari Ramadhan	Menunjukan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di area sekitar (Ring I- Mess dan Office)	Darul Qurrah Panti Jompo Magfiroh TPQ Assalam Suka Damai Panti Asuhan Nurul Jannah	10.0008.800	- Bantuan Alat Tulis Buku dll
		Proposal	Menjaga kondusitifitas atas situasi yang sudah terjaga dengan perangkat pemerintah dan organisasi masyarakat/LPM	Wilayah Ring I Mess UT Tanjung Laut	8.000.000	- Bantuan Sembako - Bantuan Peralatan Sholat (Sarung, Sajadah, Mukenah)
4	Lingkungan	UTRESS (penanaman Pohon)	Kontribusi perusahaan dalam bidang lingkungan	SMK Nusantara Mandiri	3.500.000	Dilakukan saat memperingati HLHD

3. Permasalahan dan Solusi

Kebijakan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan perusahaan dan perbankan baik BUMN maupun swasta melalui forum CSR Kota Bontang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan antara lain:

- Masih ditemukan beberapa kegiatan perusahaan dalam program penanggulangan kemiskinan belum mengarah pada data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang, untuk itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bontang (Bapelitbang) telah menyiapkan data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang sebagai data sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang nantinya digunakan dalam program dan kegiatan CSR.

- b) Masih adanya program dan kegiatan CSR perusahaan yang bersifat karikatif (bersifat pemberian langsung yang habis pakai). Untuk itu Program dan kegiatan CSR diharapkan lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat serta dilakukan pendampingan dan pemberdayaan sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi
- c) Khusus CSR perbankan masih ditentukan oleh keputusan manajemen pusat sehingga dari sisi waktu dan realisasi pelaksanaan lebih lama, untuk itu diharapkan ada kebijakan dalam dunia perbankan untuk menentukan program dan kegiatan CSR agar dapat disusun sendiri dilevel daerah secara langsung.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah keterpaduan gerak yang dilaksanakan baik oleh segenap unsur daerah, maupun dengan Instansi Vertikal yang ada di daerah.

Keberadaan instansi vertikal di dalam proses pembangunan di daerah juga memiliki peran yang cukup besar dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat serta sasaran yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sejalan hal tersebut, pada tahun 2018 sebagai upaya optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, telah dilakukan koordinasi dan kerjasama oleh Pemerintah Kota Bontang dengan instansi vertikal yang ada di Kota Bontang yaitu :

- a. Kodim 0908 Kota Bontang
- b. Den Arhanud Rudal

- c. Polres Kota Bontang
- d. Kantor Kementerian Agama Kota Bontang
- e. Kantor Pengadilan Agama Kota Bontang
- f. Kejaksaan Negeri Kota Bontang
- g. Pengadilan Negeri Kota Bontang
- h. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang
- i. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Kota Bontang
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang
- k. Balai Taman Nasional Kutai
- l. Badan Pusat Statistik Kota Bontang
- m. Pos TNI Angkatan Laut

2. Bantuan Terhadap Instansi Vertikal

Pemerintah Kota Bontang juga memberikan bantuan terhadap instansi vertikal. Adapun bantuan–bantuan yang diberikan kepada Instansi Vertikal pada tahun 2018 adalah antara lain:

- a. Pinjam pakai kendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasional untuk beberapa instansi vertikal.
- b. Rehabilitasi Kantor POLRES Rumah Jabatan Kapolres Bontang, Sarana dan Prasarana Pendukung POLRES, Pengadaan Meubelair dan Rehabilitasi Jalan lingkungan POLRES Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.7.036.678.600,00.
- c. Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kantor Kejaksaan Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.2.448.496.000,00.
- d. Pengadaan Meubelair Lembaga Permasyarakatan Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000,00
- e. Belanja Pengadaan Partisi Kodim Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.800.000.000,00
- f. Pembangunan Gudang Senjata Rudal Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000,00

- g. Pengadaan Sofa Dempom Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.203.936.000,00
- h. Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00

3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai perwujudan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan Instansi Vertikal, pada tahun 2018 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui OPD/Unit Kerja Terkait Pemerintah Kota Bontang yang meliputi:

- a. Kerjasama dalam hal SABER PUNGLI dan TP4D dalam rangka menekan dan membersihkan segala bentuk pungutan liar dan segala bentuk korupsi.
- b. Kerjasama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peringatan seperti Peringatan Hari Kemerdekaan, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota, Peringatan hari Keluarga Nasional, Hari Anti Narkoba Internasional, Penyelenggaraan MTQ, dan lain-lain.
- c. Kerjasama penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri sebagai pengacara pemerintah untuk kasus gugatan tanah,
- d. Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum dan Sosial di Kawasan Hutan Lindung Kota Bontang dalam Tim Terpadu yang melibatkan Polresta Kota Bontang, Kodim 0908 Kota Bontang, Kejaksaan Negeri Kota Bontang, Den Arhanud Rudal dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
- e. Kerjasama pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (MTsN dan MAN) dan Pembinaan Keluarga Sakinah dengan Kantor Kementrian Agama Kota Bontang,
- f. Peningkatan ketertiban umum dengan Kepolisian Resort Kota Bontang,
- g. Kerjasama penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah dengan Badan Pusat Statistik.

4. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah selama tahun 2018 berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan dan kendala yang berarti. Mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dan dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas. Demikian pula berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 disebutkan penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Sejalan hal tersebut pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang melakukan penataan batas wilayah baik batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur, maupun batas wilayah kelurahan di Kota Bontang.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahun 2018 pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang yaitu Kegiatan Penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan

Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Kegiatan ini berupa Monitoring dan Penataan Patok Batas Daerah.

3. Permasalahan dan Solusi

Pembinaan batas wilayah di Kota Bontang khususnya kegiatan penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Selain potensi bencana yang terjadi di wilayah Kota Bontang yang disebabkan oleh faktor alam pada umumnya, meliputi bencana banjir, pasang ombak yang menyebabkan kapal rusak dan angin kencang serta bencana kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian manusia terlebih lagi jumlah penduduk yang semakin padat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang dan tercatat dalam kurun waktu tahun 2018 di Kota Bontang terjadi Banjir sebanyak 3 (tiga) Kejadian, Tanah Longsor terdapat 3 (tiga) kejadian, Kebakaran Hutan dan Lahan 9 (sembilan) Kejadian, Kebakaran Lahan di pemukiman 5 (lima) Kejadian dan kebakaran rumah tempat tinggal sebanyak 7 (tujuh) kejadian.

Tabel 6.17

Jenis dan jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2018

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya		Status Bencana	sumber dan jumlah anggaran	
Bencana	Penanggulangannya		Sumber	Anggaran
Angin Puting Beliung	Melakukan evakuasi korban dan pendataan data korban	Lokal/Kota	APBD/ Swasta / Mandiri	dana berasal dari OPD yang terkait
	melakukan koordinasi dengan OPD terkait, untuk kebutuhan dasar langsung berkoordinasi dengan dinas sosial			



Bencana yang terjadi dan penanggulangannya		Status Bencana	sumber dan jumlah anggaran	
Bencana	Penanggulangannya		Sumber	Anggaran
	data dilapangan terkait rehabilitasi rumah dan harta benda langsung dikoordinasikan dengan OPD terkait			
Banjir	Melakukan evakuasi korban dan pendataan data korban		APBD/ Swasta / Mandiri	dana berasal dari OPD yang terkait
	menurunkan perahu karet untuk korban yang terluka maupun yang tidak mampu berjalan			
	melakukan koordinasi dengan OPD terkait, untuk kebutuhan dasar langsung berkoordinasi dengan dinas sosial			
	data dilapangan terkait rehabilitasi rumah dan harta benda langsung dikoordinasikan dengan OPD terkait			
Evakuasi dan Pencarian Korban kapal rusak	menurunkan tim water rescue guna melakukan pencarian korban		APBD	Anggaran berasal dari BPBD Kota Bontang
	tim dibagi dua di darat dan di laut, didarat bertugas membuat laporan di kepolisian yaitu polair dan mendatangi rumah korban guna mendapatkan informasi yang akurat terkait lokasi terakhir korban			
	data yang didapat di darat langsung di koordinasikan dengan tim yang di laut guna melakukan pencarian lebih lanjut			
	tim yang didarat juga bertugas untuk menemani keluarga korban dan memberikan informasi yang akurat terkait			

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya		Status Bencana	sumber dan jumlah anggaran	
Bencana	Penanggulangannya		Sumber	Anggaran
	pencarian korban sehingga keluarga korban menjadi lebih tenang			
	pencarian korban di lakukan selama 7 hari, dan dapat di perpanjang selama 7 hari lagi jika mendapat petunjuk terkait lokasi korban			

Sumber: - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018

Dalam menanggulangi kejadian bencana di atas, mulai dari tahap pra bencana hingga pasca bencana, untuk meminimalisir dampak kerugian materil maupun immateril yang ditimbulkan, Pemerintah Kota Bontang melalui Perangkat Daerah terkait mengambil langkah-langkah strategis antara lain :

- Melakukan Klarifikasi Data dilapangan melalui patroli pemantauan daerah rawan bencana per RT pada setiap Kelurahan
- Membuat peta rawan bencana Per RT untuk setiap kelurahan
- Memberikan Peta Rawan Bencana per RT pada setiap keluarahan yang sudah dilakukan pendataan
- Melakukan Sosialisasi dan penyuluhan Antisipasi Bencana pada setiap kelurahan berdasarkan potensi bencana yang ada pada wilayah tersebut dengan peserta dari Instasi Pemerintah, Organisasi, Masyarakat umum maupun pelajar dan Mahasiswa
- Melakukan Pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana dengan peserta dari Instasi Pemerintah, Organisasi, Masyarakat umum maupun pelajar dan Mahasiswa

Meskipun menghadapi beberapa kendala, keseluruhan tindakan di atas dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien untuk menyelamatkan dan mengurangi penderitaan korban bencana, mengurangi dampak bencana

dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pada fase pra dan pasca bencana, kebutuhan sarana/fasilitas penunjang untuk penanggulangan bencana baik dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana, diperlukan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai. Terlebih pada masa tanggap darurat kebutuhan peralatan yang memadai dengan jumlah dan spesifikasi yang tepat, dapat tersedia dan termobilisasi dengan cepat ke lokasi bencana untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, memegang peranan kunci untuk tujuan penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban secara efektif dan efisien.

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di wilayah Kota Bontang dikategorikan sebagai bencana lokal/bencana kota sehingga penanganannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan lembaga/instansi terkait lainnya.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan dana pada APBD Kota Bontang sebesar Rp.8.366.528.180,00 untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Anggaran dialokasikan kepada BPBD Kota Bontang dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut :

- a. BPBD Kota Bontang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.451.586.400,00.
- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.914.941.780,00.

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di wilayah Kota Bontang, maka Pemerintah Kota Bontang melalui BPBD Kota Bontang mengambil langkah-langkah antisipasi bencana sebagai berikut :

Tabel 6.18

Potensi Bencana, Penyebab dan Solusi Penanganan Bencana di Kota Bontang
Tahun 2018

Potensi bencana	Penyebab	Solusi
Banjir ROB	Air Laut Pasang	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Daerah Pesisir (Dataran rendah)	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Banjir Kiriman	Curah Hujan tinggi di daerah Hulu (Kutim dan Kukar)	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	drainase yang buruk	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
	pendangkalan dan penyempitan sungai	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
	terhalangnya arus sungai yang disebabkan bangunanyang berada di bantaran sungai, konstruksi jembatan dan tumpukan sampah	BPBD berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait untuk mendirikan posko siaga bencana
Banjir Tadah Hujan	Curah Hujan tinggi	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Dataran rendah	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
	drainase yang buruk	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Tanah Longsor	Mendirikan Bangunan tanpa memiliki IMB	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Mendirikan bangunan di lokasi yang rawan longsor	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
	Curah hujan tinggi	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi

Potensi bencana	Penyebab	Solusi
Kegagalan teknologi (PT.Badak, PKT)	Kesalahan Manusia dalam mengoperasikan perangkat teknologi	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
		menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
		membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Bencana sosial (kerusuhan)	Sengketa Tanah	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Transportasi Laut	Kondisi perahu yang tidak layak berlaut	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	kurangnya peralatan dan perlengkapan keselamatan diri (Life Jacket, Lifebouy)	membantu pencarian korban yang membutuhkan bantuan evakuasi
	Cuaca ekstrem	
Kekeringan	Cuaca ekstrem (Kemarau Panjang)	Melakukan pendataan daerah yang terdampak kekeringan
	Kurangnya daerah resapan air	mendistribusikan air bersih ke daerah terdampak
Rumah Roboh	kelebihan beban	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Konstruksi bangunan yang kurang baik	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
		membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Selama tahun 2018, stabilitas keamanan Wilayah Kota Bontang secara umum relatif baik dan terkendali. Secara politik, ekonomi, sosial dan budaya relatif tidak ada masalah yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun 2018, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi masih didominasi oleh gangguan kriminal seperti Kasus Penganiayaan, Kasus Narkoba serta pencurian. Dibandingkan dengan tahun 2017, angka gangguan kriminalitas pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 145 kasus menjadi 160 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kurang keamanan terutama pada kasus narkoba, ketentraman dan

ketertiban umum di Kota Bontang secara umum mengalami perbaikan, seiring dengan meningkatnya kinerja aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Bontang.

Tabel 6.19

Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Bontang
Tahun 2017-2018

No.	Jenis Gangguan Kriminal	2017	2018
1	Jumlah Kasus Narkoba	62	86.
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	-
3	Jumlah Kasus Seksual	n/a	1
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	10	6
5	Jumlah Kasus Pencurian	62	58
6	Jumlah Kasus Penipuan	6	9
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	4	-

2. Perangkat Daerah yang Menangani

Perangkat Daerah (PD) yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Non PNS
102	S2 : 5	Pembina Utama Muda (IV / c) : 1	Eselon II / b : 1	12	58
	S1 : 15	Pembina (IV / a) : 3	Eselon III/ b : 3		
	D3 : 3	Penata Tingkat I (III / d) : 5	Eselon IV/a : 6		
	SMA/SMK/MA/Paket C : 72	Penata (III / c) : 2	Non Eselon : 22		
	SMP/MTs/Paket B : 5	Penata Muda Tingkat I (III / b) : 1			
	SD/MI/Paket A : 2	Penata Muda (III / a) : 4			
		Pengatur Tingkat I (II / d) : 7			
		Pengatur (II / c) : 6			
		Pengatur Muda TK I (II / b) : 4			
		Pengatur Muda (II / a) : 8			
		Juru (I / c) : 3			
		- : 58			

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Anggaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bontang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan pada Perangkat Daerah terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.787.507.900,00.

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, perumusan, pembinaan, pelayanan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai berikut :

- ✓ Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan, Pengadministrasian urusan Ketata usahaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- ✓ Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan.
- ✓ Belum optimalnya pembagian zona dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran perda.
- ✓ Rendahnya wawasan pengetahuan tentang pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
- ✓ Rendahnya Pengetahuan, kesiapan pelaksanaan Penegakan Keamanan, Ketertiban dalam pelaksanaan PILEG, PILPRES, PILKADA

Setelah mengetahui permasalahan utama dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yang telah diuraikan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang menetapkan 5 (lima) Kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan sosialisasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya.
- b) Meningkatkan kegiatan operasional dan pelaksanaan yustisi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan terkendali.
- c) Meningkatkan kegiatan penanganan PSK, gepeng/anjol yang meresahkan masyarakat dan terbinanya suasana yang tertib dan tentram.
- d) Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengaturan PKL untuk mewujudkan Kota yang aman, nyaman, tertib, indah dan bersih.
- e) Meningkatkan kegiatan pengawasan THM dan peredaran miras sehingga terwujudnya kondisi ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang pada tahun 2018 terlaksana dengan baik tanpa terjadi adanya gangguan yang signifikan. Hal ini dapat terwujud karena adanya kesadaran dan koordinasi serta kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Hal ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa semakin baiknya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu menjaga situasi yang kondusif.

Dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Linmas dan Polisi Pamong Praja melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan kesiapan dan keahlian pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dalam upaya mencapai sasaran Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat tersebut, kebijakan yang ditetapkan adalah:

- ❖ Peningkatan Penataan terhadap produk hukum daerah (Perda);
- ❖ Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- ❖ Mendorong Terciptanya kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara;

- ❖ Melakukan penyuluhan lewat sosialisasi dan bekerjasama dengan aparat dan instansi terkait dalam rangka terciptanya rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang, pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan yaitu :

- a) Penataan peraturan perundang-undangan
- b) Peningkatan kesadaran hukum dan HAM
- c) Pelayanan dan Bantuan Hukum
- d) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- f) Penanggulangan Dampak Bencana
- g) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- h) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- i) Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
- j) Fasilitas Pemantapan Multikultur dan Umat Beragama

Pemerintah Kota Bontang menyadari bahwa heterogenitas penduduk di daerah ini, selain merupakan potensi dalam pengelolaan keragaman budaya namun juga dapat menjadi potensi terjadinya konflik horizontal jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu pemerintah melalui perangkat daerah terkait selalu melaksanakan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan. Pembinaan dilaksanakan kepada organisasi masyarakat seperti paguyuban-paguyuban, organisasi kepemudaan dan juga organisasi politik serta keagamaan.



BAB VII

PENUTUP

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2018, merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bontang merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang selama Tahun 2018 yang memuat tentang capaian kinerja pembangunan, serta disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2018 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 3 dari RPJMD Kota Bontang 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kota Bontang.

Sejalan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, semua pihak perlu memahami bahwa Laporan Keterangan Petanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2018 ini bukan semata hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka, namun



lebih dari itu dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya secara umum dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD Kota Bontang selama tahun 2018 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari kinerja pengelolaan APBD Kota Bontang maupun kinerja pelaksanaan program selama tahun 2018 yang diindikasikan dari tingkat realisasi APBD maupun tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Namun demikian perlu disadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus disikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif, inovatif dan solutif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dicapai bukanlah karena tekad dan usaha Pemerintah Kota semata. Namun semua itu dapat dicapai berkat dukungan semua pihak di Kota Bontang yang telah ikut mengambil peran aktif dalam pembangunan di Kota ini. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam membangun Kota Bontang, pada tahun 2018 Pemerintah dan Masyarakat Kota Bontang berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik skala regional maupun nasional, antara lain:

- Terbaik I Bidang Perputakaan dan Minat Baca (Panci Keberhasilan Pembangunan)
- Terbaik II Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kategori Kota
- Terbaik II Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Terbaik II Bidang Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik
- Terbaik II Bidang Koperasi
- Terbaik II Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- Terbaik II Bidang Kesejahteraan Sosial
- Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah



- Terbaik II Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Terbaik II Bidang Kondusifitas Daerah
- Terbaik II Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kota
- Terbaik III Bidang Kelautan dan Perikanan
- Terbaik III Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- Terbaik III Bidang Perhubungan
- Terbaik III Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Terbaik III Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi
- Terbaik III Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Terbaik III Bidang Pariwisata Kategori Kota
- Terbaik III Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota
- Penghargaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Penghargaan Opini WTP BPK RI
- Penghargaan Universal Health Coverage 2018
- Penghargaan Opini WTP dari Menteri Keuangan RI
- Penghargaan Smart Sanitation Award 2018 CSS XVIII
- Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2018
- Penghargaan Adipura 2018

Meskipun telah cukup banyak yang telah dicapai pada pembangunan Tahun Anggaran 2018, namun masih banyak lagi yang harus menjadi perhatian untuk segera kita wujudkan bersama. Dalam kaitan ini kebersamaan serta partisipasi semua pihak dan seluruh elemen masyarakat senantiasa dibutuhkan. Dengan terus memupuk rasa kebersamaan, memiliki tekad dan komitmen yang sama, Insya Allah Visi Kota Bontang dapat segera terwujud. Amiin.

**LAMPIRAN MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KOTA BONTANG TAHUN 2018**

A. URUSAN WAJIB

A.4.1 URUSAN PENDIDIKAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		9.474.530.500,00	95,04	7.433.469.370,00	78,46	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Layanan Komunikasi	1 Tahun	118.200.000,00	100,00	103.478.278,00	87,55	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	37 Unit	16.000.000,00	100,00	15.095.200,00	94,35	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35 item	199.727.500,00	100,00	178.111.000,00	89,18	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	391.968.000,00	100,00	336.306.775,00	85,80	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	9 Jenis	1.631.820.000,00	71,20	763.341.660,00	46,78	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	3 Jenis	342.300.000,00	100,00	301.627.900,00	88,12	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	3 paket	311.250.000,00	100,00	188.490.500,00	60,56	Dinas Pendidikan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang Melaksanakan	157 orang	1.186.200.000,00	100,00	922.990.057,00	77,81	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	186 org	5.277.065.000,00	100,00	4.624.028.000,00	87,62	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pendidikan		586.176.000,00	100,00	418.870.460,00	71,46	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	37 unit	420.580.000,00	100,00	413.207.460,00	98,25	Dinas Pendidikan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	45 unit	165.596.000,00	100,00	5.663.000,00	3,42	Dinas Pendidikan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pendidikan		584.325.000,00	100,00	530.959.500,00	90,87	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah PNS penerima TKTT	126 Orang	584.325.000,00	100,00	530.959.500,00	90,87	Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Aparatur		1.868.755.510,00	75,67	1.328.539.000,00	71,09	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan untuk pegawai	45 orang	428.755.510,00	77,93	334.100.000,00	77,92	Dinas Pendidikan
	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Terlaksananya pelatihan character building	100 Orang	1.440.000.000,00	75,00	994.439.000,00	69,06	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menyemarakkan HUT Kota Bontang		428.470.000,00	100,00	402.244.000,00	93,88	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	2 Kegiatan	428.470.000,00	100,00	402.244.000,00	93,88	Dinas Pendidikan
6	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Meningkatnya Manajemen Pendidikan Sekolah PAUD		2.705.000.000,00	94,45	2.348.771.767,00	86,83	
	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Siswa PAUD yang mendapatkan seragam olah raga	10068 Siswa	1.513.000.000,00	100,00	1.420.374.400,00	93,88	Dinas Pendidikan
	Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang terlatih	150 org	577.000.000,00	100,00	485.472.200,00	84,14	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Belajar PAUD	Tersedianya sarana/prasarana PAUD	1 Sekolah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah gedung yang terpelihara	1 paket	465.000.000,00	100,00	442.925.167,00	95,25	Dinas Pendidikan
7	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		49.067.523.754,00	86,81	36.810.893.878,00	75,02	
	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Perencanaan RKB Yang akan Terbangun	9 sekolah	656.680.000,00	100,00	654.220.500,00	99,63	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terbangunnya perpustakaan baru	2 unit	1.194.260.000,00	100,00	1.094.513.223,00	91,65	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Meubelair Sekolah	Tersedianya Meubelair untuk sekolah SD dan SMP Negeri	2354 Unit	2.200.000.000,00	100,00	1.928.065.000,00	87,64	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terehabnya bangunan Sekolah Dasar dan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar	6 Sekolah	10.678.913.000,00	98,80	7.606.935.432,00	71,23	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket A Setara SD	16 Kejar	153.885.000,00	100,00	133.161.400,00	86,53	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket B dan Paket C	42 PKBM	647.720.000,00	100,00	496.131.000,00	76,60	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Mental Siswa	400 Siswa	1.560.000.000,00	100,00	725.112.200,00	46,48	Dinas Pendidikan
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Walikota 19.00 - 21.00 dan Bimbel WAJAR 19.00 - 21.00 dan Sosialisasi HIV Untuk Siswa/Siswi SMP	15 Kelurahan dan 100 Siswa	539.462.000,00	100,00	315.474.660,00	58,48	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	8 sekolah	7.868.700.000,00	94,61	6.371.192.786,00	80,97	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)	16 Sekolah	801.500.000,00	100,00	760.517.600,00	94,89	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	560 siswa	524.256.178,00	87,28	418.009.353,00	79,73	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah Penerima BOS APBN Sekolah Negeri	515 Siswa	435.253.674,00	97,19	419.974.263,00	96,49	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah penerimaan Dana BOS APBN bagi sekolah negeri	675 siswa	570.898.620,00	97,67	549.937.930,00	96,33	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah penerimaan Dana BOS APBN bagi sekolah negeri	513 siswa	441.708.019,00	87,09	380.381.586,00	86,12	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah Penerimaan Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	607 Siswa	500.235.423,00	96,15	480.969.002,00	96,15	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah Penerima BOS APBN Sekolah Negeri	406 Siswa	357.768.752,00	94,25	334.012.252,00	93,36	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah penerima dana BOS APBN bagi sekolah negeri	534 siswa	539.464.636,00	94,19	504.479.811,00	93,51	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	547 Siswa	484.720.816,00	96,12	460.157.950,00	94,93	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah Penerima BOS APBN Sekolah Negeri	442 siswa	380.055.416,00	96,77	367.546.220,00	96,71	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	382 siswa	306.010.528,00	82,67	247.502.180,00	80,88	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	61 siswa	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	519 siswa	499.126.914,00	81,77	406.188.959,00	81,38	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	597 siswa	485.248.046,00	96,57	468.424.002,00	96,53	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	449 siswa	408.736.888,00	94,24	383.774.140,00	93,89	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingat Pendidikan Dasar	364 Siswa	306.364.317,00	94,44	295.149.724,00	96,34	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah penerima BOS APBN sekolah Negeri	394 Siswa	321.900.000,00	91,74	307.481.050,00	95,52	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	405 siswa	328.210.231,00	97,25	317.581.762,00	96,76	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	210 siswa	165.581.000,00	99,62	164.854.091,00	99,56	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah Penerima BOSNAS APBN di Sekolah Negeri	554 siswa	532.921.288,00	89,00	472.138.272,00	88,59	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah penerimaan BOS APBN sekolah negeri	410 Siswa	349.842.515,00	97,25	340.073.227,00	97,21	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	470 Siswa	369.600.000,00	98,82	360.480.000,00	97,53	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	424 Siswa	405.081.702,00	80,21	321.015.550,00	79,25	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	442 siswa	360.019.357,00	96,91	344.696.164,00	95,74	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN bagi Sekolah Negeri	36 Siswa	38.081.244,00	65,79	24.985.250,00	65,61	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN bagi Sekolah Negeri	15 siswa	23.159.686,00	99,74	22.957.515,00	99,13	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN bagi Sekolah Negeri	45 siswa	36.219.084,00	97,59	35.347.950,00	97,59	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	370 siswa	288.559.688,00	99,06	285.331.628,00	98,88	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	276 siswa	241.747.777,00	92,34	221.379.400,00	91,57	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah Penerima BOS APBD bagi sekolah negeri	401 siswa	322.658.605,00	98,74	318.605.000,00	98,74	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	699 siswa	721.901.522,00	86,08	618.413.492,00	85,66	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	478 Siswa	587.924.746,00	89,04	516.347.665,00	87,83	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah penerima dana BOS APBN Sekolah Negeri	702 Siswa	803.083.809,00	86,45	687.765.259,00	85,64	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN bagi Sekolah Negeri	588 Siswa	678.399.481,00	88,68	597.645.794,00	88,10	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	484 Siswa	595.052.523,00	84,39	496.298.515,00	83,40	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN bagi Sekolah Negeri	604 siswa	676.492.092,00	85,18	570.828.593,00	84,38	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa	225 Siswa	240.474.815,00	95,04	228.057.868,00	94,84	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	330 Siswa	404.041.497,00	83,54	331.710.969,00	82,10	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	335 Siswa	375.907.025,00	80,70	302.793.491,00	80,55	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	275 Siswa	386.195.840,00	92,53	354.364.200,00	91,76	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya SD Negeri 006 Bontang Utara (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Terbangunnya RKB SDN 006 BU beserta Perabotnya (DAK Bidang Pendidikan)	2 ruang	426.400.000,00	100,00	426.400.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Ruang Guru SD Negeri 003 Bontang Utara (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 003 BU (DAK Bidang Pendidikan)	4 ruang	255.835.000,00	100,00	255.835.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru dan Ruang Perpustakaan SD Negeri 005 Bontang Utara (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Terehabnya Ruang Guru dan Ruang Perpustakaan SDN 005 BU (DAK Bidang Pendidikan)	2 ruang	161.865.000,00	100,00	161.865.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SD Negeri 003 Bontang Selatan (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Terehabnya Ruang Perpustakaan SDN 003 BS (DAK Bidang Pendidikan)	1 Ruang	73.400.000,00	100,00	73.400.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Lainnya SMP Negeri 1 Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Terehabnya Ruang Belajar dan Ruang Penunjang lainnya SMPN 1 Bontang (DAK Bidang Pendidikan)	10 Ruang	723.992.536,00	100,00	721.447.536,00	99,65	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya SMP Negeri 6 Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Terbangunnya RKB beserta isi perabotnya di SMPN 6 Bontang (DAK Bidang Pendidikan)	2 ruang	632.430.345,00	100,00	632.385.345,00	99,99	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Perpustakaan Baru beserta Perabotnya SMP Negeri 9 Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Terbangunnya Perpustakaan Beserta isi perabotnya SMPN 9 Bontang (DAK Bidang Pendidikan)	1 ruang	448.577.119,00	100,00	448.577.119,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah Tanah Yang tersedia untuk Pembangunan Sekolah	1 Bidang tanah	4.503.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
8	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Meningkatnya Capaian Program Pendidikan Menengah		10.753.244.781,00	100,00	10.446.127.821,00	97,14	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terbayarnya sisa kegiatan revitalisasi SMAN 1 Bontang	1 Kegiatan	10.553.244.781,00	100,00	10.252.016.966,00	97,15	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah	Terehabnya tempat ibadah sekolah madrasah aliyah negeri	1 sekolah	200.000.000,00	100,00	194.110.855,00	97,06	Dinas Pendidikan
9	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Meningkatnya Pelayanan Satuan Pendidikan Non Formal		194.000.000,00	100,00	184.050.872,00	94,87	
	Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional kantor Satuan Pendidikan Non Formal SKB	1 Tahun	194.000.000,00	100,00	184.050.872,00	94,87	Dinas Pendidikan
10	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan		23.389.471.328,00	96,88	22.537.599.946,00	96,36	
	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Profesional	24 orang	462.000.000,00	0,13	600.000,00	0,13	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	100 orang	421.230.000,00	36,16	152.317.200,00	36,16	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Meningkatnya Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1823 orang	20.148.806.328,00	100,00	20.085.449.746,00	99,69	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan laptop	466 Guru	2.357.435.000,00	100,00	2.299.233.000,00	97,53	Dinas Pendidikan
11	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan		1.834.380.000,00	73,87	1.026.770.475,00	55,97	
	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan	8 Kegiatan	1.334.825.000,00	64,09	741.037.975,00	55,52	Dinas Pendidikan
	Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan	Terlaksananya Perayaan Hari Besar Bidang Pendidikan (Hardiknas, HUT PGRI, dan Hari Guru)	3 Kegiatan	292.230.000,00	100,00	157.874.000,00	54,02	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) APBN	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP-PAUD (Dana APBN)	2760 Siswa	100.000.000,00	100,00	98.740.000,00	98,74	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana Pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) APBN	Terlaksananya sosialisasi penyaluran dana Program Indonesia Pintar	1 Kegiatan	107.325.000,00	100,00	29.118.500,00	27,13	Dinas Pendidikan
12	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan		9.306.650.000,00	81,05	7.492.818.549,00	80,51	
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan anak usia dini	255 siswa	102.000.000,00	91,31	93.018.562,00	91,19	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan PAUD	80 siswa	32.000.000,00	95,31	30.497.958,00	95,31	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siwa seluruh tingkat pendidikan anak usia dini	64 siswa	25.600.000,00	100,00	25.600.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	560 Siswa	280.000.000,00	59,06	163.851.077,00	58,52	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	515 siswa	248.900.000,00	81,20	200.703.386,00	80,64	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	672 Siswa	336.000.000,00	93,35	307.679.301,00	91,57	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	513 siswa	256.500.000,00	70,75	181.450.819,00	70,74	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	608 siswa	304.000.000,00	74,83	225.451.408,00	74,16	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	405 siswa	202.500.000,00	88,80	179.192.452,00	88,49	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	546 siswa	273.000.000,00	45,04	120.283.300,00	44,06	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	547 Siswa	273.500.000,00	98,47	266.972.622,00	97,61	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	446 siswa	223.000.000,00	53,54	119.388.441,00	53,54	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	380 siswa	190.000.000,00	78,18	146.719.939,00	77,22	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Beban Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	61 siswa	122.000.000,00	96,95	118.279.855,00	96,95	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	519 siswa	259.500.000,00	73,39	190.144.200,00	73,27	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	604 siswa	302.000.000,00	97,34	292.917.914,00	96,99	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	449 siswa	224.500.000,00	87,70	195.926.500,00	87,27	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	362 Siswa	181.000.000,00	86,22	154.043.650,00	85,11	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	398 siswa	199.000.000,00	100,00	198.332.906,00	99,66	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	406 siswa	203.000.000,00	92,03	186.353.168,00	91,80	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	210 Siswa	105.000.000,00	99,14	104.100.000,00	99,14	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	564 Siswa	282.000.000,00	55,70	157.066.000,00	55,70	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	430 siswa	215.000.000,00	93,61	198.156.591,00	92,17	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	470 siswa	235.000.000,00	96,98	227.174.752,00	96,67	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	419 siswa	209.500.000,00	62,12	130.075.675,00	62,09	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	444 siswa	222.000.000,00	75,89	167.602.944,00	75,50	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	36 Siswa	72.000.000,00	51,60	36.671.750,00	50,93	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	15 siswa	30.000.000,00	94,17	28.250.000,00	94,17	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	45 Siswa	90.000.000,00	99,45	89.505.627,00	99,45	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	370 siswa	185.000.000,00	89,76	165.020.000,00	89,20	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	267 siswa	133.500.000,00	71,99	96.010.380,00	71,92	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	401 siswa	200.500.000,00	18,19	36.480.850,00	18,19	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	699 siswa	349.500.000,00	77,19	269.596.113,00	77,14	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan menengah pertama	478 siswa	286.800.000,00	86,23	246.081.590,00	85,80	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah Pertama	703 siswa	421.800.000,00	88,74	369.097.600,00	87,51	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan menengah pertama	595 siswa	357.000.000,00	88,41	312.917.221,00	87,65	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah Pertama	483 siswa	289.800.000,00	89,68	259.025.335,00	89,38	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan menengah pertama	604 siswa	362.400.000,00	85,37	307.652.161,00	84,89	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan menengah pertama	225 Siswa	135.000.000,00	91,06	122.797.006,00	90,96	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan menengah pertama	331 Siswa	193.850.000,00	98,82	191.734.520,00	98,91	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah Pertama	336 Siswa	201.600.000,00	94,84	190.271.901,00	94,38	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan menengah pertama	279 siswa	167.400.000,00	97,46	160.575.185,00	95,92	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	254 siswa	180.800.000,00	82,21	144.708.350,00	80,04	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina II Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	80 Anak	76.400.000,00	62,83	47.363.420,00	61,99	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	64 siswa	66.800.000,00	57,49	38.076.120,00	57,00	Dinas Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	Meningkatnya Manajemen Pendidikan Sekolah		36.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam	10156 Siswa	36.360.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
14	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pendidikan Inklusif		792.106.000,00	94,75	728.036.434,00	91,91	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Jumlah sarana dan prasarana autis center yang dibangun	5 Paket	605.260.000,00	100,00	596.116.232,00	98,49	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre	Tersedianya biaya operasional Lembaga Autis Center	1 Tahun	186.846.000,00	77,76	131.920.202,00	70,60	Dinas Pendidikan
14 Program; 135 Kegiatan				111.020.992.873,00	90,46	91.689.152.072,00	82,59	

A.4.2 URUSAN KESEHATAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		8.088.221.000,00	99,48	7.964.447.802,00	84,83	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai & jasa pengiriman surat	1 Tahun	6.500.000,00	69,20	4.500.000,00	69,23	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Operasional Kantor (Listrik,Air,Telepon)	1 Tahun	549.360.000,00	94,75	394.181.447,00	71,75	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Perizinan Kendaraan Operasional Kantor (Roda 2 dan Roda 4)	1 Tahun	65.000.000,00	100,00	41.194.900,00	63,38	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	1 Tahun	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	1 Tahun	105.300.000,00	91,29	105.012.317,00	99,73	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggadaan dan Percetakan Kantor	1 Tahun	83.815.000,00	100,00	60.865.000,00	72,62	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Listrik Kantor	1 Tahun	7.280.000,00	91,72	7.280.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	603.800.000,00	100,00	526.719.000,00	87,23	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Kantor (Surat Kabar, Majalah dll)	1 Tahun	82.600.000,00	98,41	81.070.000,00	98,15	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makanan dan Minuman (Rapat dan Makan Minum Tamu)	1 Tahun	66.000.000,00	100,00	64.206.640,00	97,28	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	995.461.000,00	99,98	993.807.287,00	99,83	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	1 Tahun	5.498.105.000,00	100,00	5.660.611.211,00	102,96	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		1.774.464.000,00	68,42	1.208.027.735,00	68,08	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	263.000.000,00	100,00	262.970.000,00	99,99	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor (Roda 4)	24 unit	752.464.000,00	100,00	752.274.685,00	99,97	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	209.000.000,00	95,00	192.783.050,00	92,24	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		1.230.480.000,00	95,00	1.158.963.000,00	94,19	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Pembayaran TKTT	1 Tahun	1.230.480.000,00	95,00	1.158.963.000,00	94,19	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		375.780.000,00	99,20	372.500.517,00	99,13	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan SDM Kesehatan	1 Tahun	344.180.000,00	100,00	343.900.517,00	99,92	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Pembinaan Metal Fisik (Kegiatan Hari Besar Agama)	4 Kali	31.600.000,00	90,51	28.600.000,00	90,51	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Meningatkan Kinerja Aparatur		24.250.000,00	100,00	24.250.000,00	100,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	20 Buku	7.700.000,00	100,00	7.700.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Capaian Kinerja Keuangan Per Semester (Prognosis)	20 Buku	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	14.550.000,00	100,00	14.550.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.400.000,00	99,95	25.387.000,00	99,95	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.400.000,00	99,95	25.387.000,00	99,95	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
7	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan		3.560.345.000,00	97,43	3.468.732.887,00	97,43	
	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pembelian Obat dan BHP	1 Paket	1.500.000.000,00	97,48	1.462.156.900,00	97,48	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Kalibrasi Alkes dan Pemusnahan Obat	1 Tahun	106.000.000,00	99,59	105.562.206,00	99,59	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)	Tersedianya bahan obat-obatan	1000 jenis	1.954.345.000,00	97,27	1.901.013.781,00	97,27	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan BPJS (%)		30.121.370.400,00	96,36	28.733.728.477,00	95,39	
	Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Tenaga Puskesmas (Akreditasi)	1 Tahun	19.950.000,00	89,22	17.800.000,00	89,22	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Manajemen Puskesmas	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	6 FTKP	24.300.000,00	50,93	12.375.000,00	50,93	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Kesehatan Khusus dan Olahraga	Workshop Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	40 orang	21.500.000,00	74,67	16.055.000,00	74,67	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan UKS	Cetak Buku	2000 buku	40.000.000,00	99,78	39.913.000,00	99,78	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan P3K Kegiatan Tertentu	Pelayanan P3K	85 Kali	121.141.000,00	94,30	114.240.212,00	94,30	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	15.150.000,00	100,00	15.150.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK dan Posbindu	1 Tahun	16.080.000,00	100,00	16.080.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	21.862.500,00	30,65	6.700.000,00	30,65	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu Balita, Posyandu Usila, Pos UKK, Posbindu, Sekolah dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 Tahun	13.875.000,00	100,00	13.875.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	19.000.000,00	100,00	19.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	16.625.000,00	87,06	14.473.100,00	87,06	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Masyarakat	1 Tahun	23.650.000.000,00	99,50	23.368.077.863,00	98,81	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Operasional Jamkesda	1 Tahun	85.000.000,00	93,05	79.095.255,00	93,05	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Tenaga Kesehatan	Pemilihan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	1 Tahun	28.687.500,00	100,00	28.687.500,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kesehatan (Perizinan Sarana Kesehatan)	1 Tahun	18.500.000,00	93,51	17.300.000,00	93,51	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Tunjangan Pelayanan Shift Puskesmas 24 Jam	1 Tahun	63.000.000,00	87,30	55.000.000,00	87,30	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	1 Tahun	532.973.500,00	98,06	522.649.599,00	98,06	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	1 Tahun	526.000.000,00	87,50	460.243.280,00	87,50	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	1 Tahun	512.806.800,00	95,95	445.396.751,00	86,85	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	1 Tahun	706.057.000,00	100,00	699.961.220,00	99,14	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	1 Tahun	526.828.500,00	97,00	461.109.350,00	87,53	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	1 Tahun	635.012.500,00	98,97	623.436.650,00	98,18	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)	Terlaksananya kegiatan jampersal dengan baik	1 tahun	61.048.350,00	100,00	55.255.684,00	90,51	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)	jaminan persalinan yang tdk ditanggung BPJS	100 %	1.159.918.650,00	31,25	362.578.850,00	31,26	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pendistribusian Obat dan Dukungan Manajemen E-logistik Obat	1 tahun	74.451.000,00	100,00	65.439.301,00	87,90	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Alat Kesehatan	tersedianya alat kesehatan UTDC PMI	1 paket	1.000.000.000,00	100,00	999.334.370,00	99,93	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota	1 Tahun	30.567.400,00	92,67	27.116.000,00	88,71	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya Dukungan Manajemen BOK Puskesmas	1 Tahun	181.035.700,00	100,00	177.385.492,00	97,98	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
9	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Obat Layak (%)		26.500.000,00	100,00	25.995.000,00	98,09	
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Pembinaan PIRT, Toko Obat	1 Tahun	26.500.000,00	100,00	25.995.000,00	98,09	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
10	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat		688.322.000,00	86,17	532.022.026,00	77,29	
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Promosi Kesehatan	1 Tahun	246.800.000,00	100,00	216.489.250,00	87,72	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan kesehatan remaja	Pelaksanaan Seminar Kesehatan Remaja	1 kali	7.850.000,00	100,00	7.850.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	indeks kelurahan sehat pada satu kelurahan per PKM	60 %	97.500.000,00	87,00	74.261.250,00	76,17	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Terlaksananya Peringatan HKN	1 Kali	110.050.000,00	100,00	107.334.500,00	97,53	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Kegiatan Upaya Promosi Kesehatan	50 kali	9.320.000,00	97,00	8.120.000,00	87,12	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (KRR dan MMD)	2 Kegiatan	11.025.000,00	100,00	11.025.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (Publikasi/Cetak Promkes)	1 Tahun	10.000.000,00	100,00	9.088.050,00	90,88	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 Tahun	10.008.000,00	100,00	9.987.000,00	99,79	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (Cetak Spanduk Promkes)	25 Buah	8.494.000,00	100,00	8.488.676,00	99,94	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	1 Paket	7.500.000,00	100,00	7.397.500,00	98,63	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pameran Pelayanan Publik	Jumlah Pameran Kesehatan Hari-Hari Tertentu yang Diikuti	2 Kegiatan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	workshop promkes	1 kali	50.000.000,00	95,00	38.900.000,00	77,80	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Keluarga Sehat	Pendataan Keluarga Sehat	1 Tahun	22.825.000,00	73,00	12.657.500,00	55,45	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Promosi dan Regulasi Perda Rokok	1 Tahun	51.950.000,00	45,00	20.423.300,00	39,31	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
11	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi		228.715.600,00	98,03	220.589.200,00	96,45	
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	PMT Balita Dan Anak Non Balita	35 orang	57.250.000,00	100,00	57.021.480,00	99,60	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelaksanaan kegiatan gizi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Surveillance gizi kurang dan gizi buruk dan PMT)	2 Kegiatan	10.000.000,00	100,00	9.980.000,00	99,80	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Sweeping Vitamin A	150 kali	9.900.000,00	100,00	7.650.000,00	77,27	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Pembinaan Kader Posyandu	10 Posyandu	10.000.000,00	90,00	9.999.420,00	99,99	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Kegiatan Program Gizi	1 Tahun	10.035.000,00	100,00	10.035.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Sweeping Vit.A	2 Kali	10.000.000,00	100,00	5.200.000,00	52,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Pembinaan/ Pertemuan Kader Motivator ASI	2 Kali	10.000.000,00	65,00	9.943.500,00	99,44	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Penunjang Kegiatan Gizi Masyarakat Dan Gizi Institusi	1 paket	31.000.000,00	100,00	30.259.000,00	97,61	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	petugas mendapat peningkatan kapasitas	23 orang	25.780.600,00	100,00	25.775.800,00	99,98	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif	Workshop IMD dan ASI Eksklusif	1 kali	27.850.000,00	100,00	27.850.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi	Pelatihan PosyanduQu Bagi Petugas Puskesmas	1 Tahun	26.900.000,00	100,00	26.875.000,00	99,91	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
12	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Kelurahan melaksanakan STBM		527.908.500,00	98,24	506.365.881,00	95,92	
	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Workshop Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas	1 kali	18.653.500,00	100,00	18.403.500,00	98,66	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengawasan Sarana Air Bersih	Kursus hygiene dan sanitasi DAM	1 kali	48.340.000,00	100,00	46.276.000,00	95,73	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di TPM	1 Tahun	80.200.000,00	100,00	78.590.000,00	97,99	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Pemeriksaan Sampel Limbah Cair Sarana Kesehatan dan Sampe Usap Alat TTU	59 Sampel	62.035.000,00	100,00	61.949.500,00	99,86	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	sosialisasi Keamanan Pangan	45 orng	9.500.000,00	100,00	9.275.000,00	97,63	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Jasa Pemeriksaan Lab sampel makanan dan minuman	1 paket	10.000.000,00	100,00	9.847.100,00	98,47	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pemeriksaan Sampel Air (Kimia dan bakteri)	6 Sampel	10.810.000,00	56,00	3.625.000,00	33,53	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	Transport Petugas Pembinaan dan Pengawasan TPM yang Buka Malam Hari	80 Orang	10.070.000,00	100,00	10.070.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	12 Paket	10.200.000,00	60,00	3.927.000,00	38,50	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	Plastik Abate	1 Paket	9.000.000,00	95,00	7.848.000,00	87,20	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	pelaksana kegiatan Forum Kota sehat	1 Tahun	169.500.000,00	100,00	168.234.981,00	99,25	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Pasar Sehat	monev pasar sehat	1 kali	19.600.000,00	100,00	18.900.000,00	96,43	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyehatan Lingkungan Permukiman (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Terlaksananya Verifikasi dan pemecuan STBM	100 %	70.000.000,00	100,00	69.419.800,00	99,17	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
13	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insidensi Rate DBD		1.067.814.000,00	83,27	779.653.800,00	73,01	
	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Fogging fokus dan fogging endemisitas tinggi	1 Tahun	172.400.000,00	100,00	171.900.000,00	99,71	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan dan penanganan penderita DBD	100 %	76.830.000,00	95,00	66.338.385,00	86,34	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Imunisasi	Pertemuan Imunisasi	15 Kelurahan	405.959.000,00	67,00	218.016.680,00	53,70	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kelengkapan Laporan Surveilans DBD (Pengendalian Vektor)	1 Tahun	175.900.000,00	85,00	117.905.160,00	67,03	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 Tahun	8.875.000,00	95,00	7.535.000,00	84,90	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 Tahun	8.050.000,00	87,00	6.250.000,00	77,64	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 Tahun	9.900.000,00	75,00	5.849.775,00	59,09	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 Tahun	7.750.000,00	100,00	7.750.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 Tahun	10.800.000,00	100,00	10.653.000,00	98,64	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 Tahun	6.600.000,00	100,00	6.554.000,00	99,30	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pembinaan Pencegahan Penyakit Menular	1 Tahun	69.750.000,00	85,00	49.691.800,00	71,24	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Sosialisai Kegiatan Imunisasi Vaksin MR	1 Tahun	115.000.000,00	100,00	111.210.000,00	96,70	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
14	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Persentase pasien penderita gangguan jiwa yang terlayani		30.000.000,00	100,00	29.400.000,00	98,00	
	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pelatihan IPWL dan deteksi dini masalah kejiwaan/Napza	100 orang	30.000.000,00	100,00	29.400.000,00	98,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan		19.575.063.786,00	66,58	10.289.227.921,00	52,56	
	Pembangunan Posyandu	Rehab Posyandu RT. 39 BSD Kel Gunung Elai	1 Unit	479.380.000,00	100,00	478.680.392,00	99,85	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	Tersedianya dana operasional puskesmas	1 Tahun	133.478.000,00	82,00	88.969.450,00	66,65	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Tersedianya dana operasional puskesmas	1 Tahun	143.518.000,00	100,00	134.745.882,00	93,89	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	Tersedianya dana operasional puskesmas	1 Tahun	567.344.000,00	95,00	412.543.321,00	72,71	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	Tersedianya dana operasional puskesmas	1 Tahun	133.250.000,00	97,00	110.064.986,00	82,60	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	Tersedianya dana operasional puskesmas	1 Tahun	197.000.000,00	100,00	185.261.546,00	94,04	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	Tersedianya dana operasional puskesmas	1 Tahun	170.160.000,00	97,00	148.355.129,00	87,19	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS	Tersedia Jasa pelayanan kesehatan	1 Tahun	1.571.359.488,00	75,00	902.710.567,00	57,45	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1	Operasional dan Jasa Pelayanan	1 Tahun	2.853.551.420,00	55,00	884.975.408,00	31,01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2	Operasional dan jasa Pelayanan	1 Tahun	1.887.922.949,00	59,00	707.611.240,00	37,48	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Lestari	Operasional dan jasa Pelayanan	1 Tahun	626.710.666,00	45,00	189.321.241,00	30,21	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 1	Operasional dan jasa Pelayanan	1 Tahun	3.002.921.153,00	38,00	732.396.213,00	24,39	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional dan jasa Pelayanan	1 Tahun	1.960.253.411,00	55,00	917.859.369,00	46,82	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Barat	Operasional dan jasa Pelayanan	1 Tahun	1.843.574.699,00	49,00	577.574.049,00	31,33	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	6 Puskesmas	1.574.644.000,00	100,00	1.477.095.140,00	93,81	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	Penyediaan Prasarana Penunjang Puskesmas dan PSC 119	1 Tahun	429.996.000,00	100,00	415.741.585,00	96,68	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembangunan Gedung Public Service Center 119 (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	terbangunya gedung PSC	1 paket	2.000.000.000,00	100,00	1.925.322.403,00	96,27	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
16	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase capaian indikator Kota Sehat		522.715.000,00	93,68	414.041.307,00	79,21	
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	Pelayanan Penyakit Jantung	1 Tahun	300.935.000,00	97,00	244.072.471,00	81,10	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	Sosialisasi HIV	1 Tahun	29.595.000,00	100,00	29.475.000,00	99,59	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	Pelayanan Penyakit Kanker	1 Tahun	152.185.000,00	85,00	108.329.486,00	71,18	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Penyakit TB	1 Tahun	40.000.000,00	97,00	32.164.350,00	80,41	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
17	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Angka Kematian Ibu (AKI)		324.567.500,00	83,73	271.769.000,00	83,73	
	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	Cakupan persalinan nakes (%)	1 Tahun	62.080.000,00	99,00	61.459.500,00	99,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	pertemuan refresing kelas ibu hamil	1 kali	57.700.000,00	66,27	38.235.000,00	66,27	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 Tahun	11.097.500,00	98,18	10.895.500,00	98,18	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	1 Tahun	9.720.000,00	100,00	9.720.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	1 Tahun	10.780.000,00	96,24	10.374.500,00	96,24	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 Tahun	9.950.000,00	81,41	8.100.000,00	81,41	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	1 Tahun	10.000.000,00	99,28	9.928.500,00	99,29	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	1 Tahun	3.240.000,00	91,67	2.970.000,00	91,67	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja	1 Tahun	150.000.000,00	80,06	120.086.000,00	80,06	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN	Meningkatkan Kinerja Aparatur		680.569.400,00	78,14	531.839.157,00	78,15	
	Penyusunan Regulasi Kesehatan	Dokumen Puskesmas BLUD & Kajian RS	7 UPT	436.069.400,00	73,66	321.218.157,00	73,66	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	Pelatihan SIK	1 kali	239.500.000,00	85,85	205.621.000,00	85,85	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Profil Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	25 Buku	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)	Terlaksananya pelayanan UPTD Labkesda		239.640.000,00	98,53	236.117.395,00	98,53	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Tersedianya Bahan Kimia	1 Tahun	100.000.000,00	98,26	98.260.118,00	98,26	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Tersedianya Operasional Labkesda	1 Tahun	139.640.000,00	98,72	137.857.277,00	98,72	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN MASALAH KEJIWAAN	Prevalensi Hipertensi		125.745.000,00	82,06	103.180.000,00	82,05	
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan PTM	1 Tahun	55.495.000,00	71,02	39.410.000,00	71,02	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bahan habis pakai pemeriksaan pandu PTM	170 paket	70.250.000,00	90,78	63.770.000,00	90,78	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (8 Sarkes Pemerintah dan 6 Klinik Swasta)		126.840.000,00	94,65	120.053.445,00	94,65	
	Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL	Forum Akreditasi FKTP	7 Sarkes	126.840.000,00	94,65	120.053.445,00	94,65	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
22	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA	Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam		58.015.000,00	67,22	38.995.000,00	67,22	
	Pelayanan Penanggulangan Wabah	Penangann dan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	20.400.000,00	86,74	17.695.000,00	86,74	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Penanganan Pelayanan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	37.615.000,00	56,63	21.300.000,00	56,63	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
23	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar		134.100.000,00	99,87	133.930.000,00	99,87	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	30 Orang	134.100.000,00	99,87	133.930.000,00	99,87	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
24	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		4.422.282.000,00	100,00	4.137.014.877,00	93,55	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air, Listrik	12 Bulan	3.130.772.000,00	100,00	2.921.281.177,00	93,31	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	58 Unit	64.310.000,00	100,00	42.076.100,00	65,43	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	4000 kotak	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	66 kali	440.000.000,00	100,00	438.981.522,00	99,77	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	202 orang	697.200.000,00	100,00	644.676.078,00	92,47	Rumah Sakit Umum Daerah
25	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		2.015.597.900,00	83,45	1.798.389.137,00	89,22	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	1 tahun	534.897.900,00	100,00	454.788.700,00	85,02	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	1.480.700.000,00	77,47	1.343.600.437,00	90,74	Rumah Sakit Umum Daerah
26	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		215.000.000,00		213.926.500,00	99,50	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.931.500,00	99,73	Rumah Sakit Umum Daerah
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Informasi Pelayanan RSUD	1 Kegiatan	190.000.000,00	100,00	188.995.000,00	99,47	Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Tingkat Pemenuhahan sarana prasarana Rumah Sakit		33.986.338.000,00	100,00	31.989.934.937,00	94,13	
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	 Tercapai	13.000.000.000,00	100,00	12.886.584.862,00	99,13	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pembangunan Klinik Rawat Jalan RSUD Taman Husada	Pembangunan klinik	 Tercapai	14.021.000.000,00	100,00	12.270.248.264,00	87,51	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	18 Unit	6.965.338.000,00	100,00	6.833.101.811,00	98,10	Rumah Sakit Umum Daerah
28	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Prosentase Pencapaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		971.600.000,00	100,00	804.169.510,00	82,77	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Terpeliharanya Instalasi Pengelolaan Limbah	100 %	971.600.000,00	100,00	804.169.510,00	82,77	Rumah Sakit Umum Daerah
29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD	Prosentase Pencapaian Program Pelayanan RS BLUD		63.644.219.507,00	100,00	50.405.201.005,00	79,20	
	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Terselenggaranya Pelayana Kesehatan RS	100 %	63.644.219.507,00	100,00	50.405.201.005,00	79,20	Rumah Sakit Umum Daerah
29 Program; 161 Kegiatan				174.811.863.593,00	94,55	146.537.852.516,00	83,83	

A.4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	4	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran		3.097.338.500,00	100,00	2.758.617.806,00	89,06	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 & 3000 dan biaya pengiriman	450 lembar	2.950.000,00	100,00	2.739.000,00	92,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 bulan	293.880.000,00	100,00	152.131.532,00	51,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang terlaksana	KIR 3 unit & STNK Roda 2 (17 Unit) Roda 4 (11 unit)	24.850.000,00	100,00	10.679.500,00	42,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis kantor	67 Jenis	170.487.500,00	100,00	168.373.500,00	98,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	15 jenis barang cetakan	89.139.000,00	100,00	66.183.140,00	74,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan instalasi Listrik yang Tersedia	9 jenis	12.975.000,00	100,00	12.830.000,00	98,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan,buku & Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	4 jenis media	54.899.000,00	100,00	30.848.000,00	56,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan dan Alat Kebersihan Kantor dan sembako Yang Tersedia	26 jenis	54.865.000,00	100,00	54.502.000,00	99,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	12 bulan	56.175.000,00	100,00	15.645.000,00	27,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia	Dinas dalam daerah (104 kali), Luar daerah (94 kali)	1.448.018.000,00	100,00	1.437.737.134,00	99,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang tersedia	26 pegawai Non PNS	889.100.000,00	100,00	806.949.000,00	90,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		36.905.576.082,00	100,00	32.863.470.993,00	89,05	
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor Pemerintah Kota Bontang	14 unit	20.557.868.082,00	100,00	17.209.114.595,00	83,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	3 jenis	119.807.000,00	100,00	117.465.000,00	98,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Yang Tersedia	18 jenis	301.825.000,00	100,00	249.238.200,00	82,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Renovasi pendopo	1 unit	5.300.000.000,00	100,00	5.082.547.584,00	95,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan Roda 2, Roda 4, alat berat	Roda 2 (17 unit) Roda 4 (11 unit) alat berat (2 Unit)	318.196.000,00	100,00	302.443.900,00	95,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	4 kegiatan	77.940.000,00	100,00	75.820.000,00	97,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	Pemeliharaan bangunan milik negara	45 unit	10.229.940.000,00	100,00	9.826.841.714,00	96,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kinerja aparatur PNS		511.015.000,00	100,00	474.469.500,00	92,85	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian kerja PNS dan Non PNS	92 Stell	176.890.000,00	100,00	166.740.000,00	94,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Pembayaran tunjangan kinerja pegawai	100 %	334.125.000,00	100,00	307.729.500,00	92,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya SDM bidang teknis dan non teknis		109.100.000,00	100,00	48.177.000,00	44,16	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	12 kali	109.100.000,00	100,00	48.177.000,00	44,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Masyarakat Lebih memahami tentang pembangunan infrastruktur Kota Bontang		25.000.000,00	100,00	24.650.000,00	98,60	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.650.000,00	98,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
6	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik		1.763.192.400,00	100,00	1.703.991.000,00	96,64	
	Pembangunan Jalan Satya Lencana	Box Culvert yang dibangun, Jalan yang dibangun	14 meter	232.248.000,00	100,00	223.395.500,00	96,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Jembatan Kelurahan Gunung Telihan	Jembatan yang dibangun	25 m	1.452.778.400,00	100,00	1.409.722.000,00	97,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 1 Kel. Gunung Telihan	Perencanaan Teknis	1 dokumen	78.166.000,00	100,00	70.873.500,00	90,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
7	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Meningkatnya kondisi saluran dalam kondisi baik		21.855.730.000,00	99,97	16.243.793.865,00	74,32	
	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.112.000,00	99,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.605.000,00	99,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.715.000,00	99,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Saluran drainase yang dibangun	250 meter	17.000.000.000,00	100,00	11.913.346.000,00	70,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Perbatasan Wilayah PT. Badak NGL.	Saluran drainase yang dibangun	208 meter	449.700.000,00	98,64	391.384.826,00	87,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi)	Saluran drainase yang ditingkatkan	170 meter	1.500.000.000,00	100,00	1.442.155.139,00	96,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru (Bantuan Keuangan Provinsi)	Saluran drainase yang ditingkatkan	306 meter	1.500.000.000,00	100,00	1.135.048.800,00	75,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Arief Rahman Hakim Kecamatan Bontang Barat	Saluran drainase yang dibangun	100 meter	308.850.000,00	100,00	273.400.100,00	88,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	75.000.000,00	100,00	73.986.000,00	98,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.112.000,00	99,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.123.000,00	99,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-Api	Dokumen perencanaan teknis	2 dokumen	200.000.000,00	100,00	198.714.000,00	99,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	Perencanaan teknis, saluran drainase yang dibangun	1 dokumen, 20 meter drainase	322.180.000,00	100,00	319.092.000,00	99,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
8	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Berkurangnya wilayah aliran sungai rawan longsor		22.075.752.000,00	94,79	21.737.101.425,00	98,47	
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api	Dokumen perencanaan teknis	3 Dokumen	300.000.000,00	100,00	297.472.000,00	99,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	98.953.000,00	98,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penanganan Longsor Jalan Soekarno-Hatta	Longsor yang ditangani	30 m	3.828.750.000,00	100,00	3.647.519.000,00	95,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penanganan Longsor Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang	Longsor yang ditangani	25 m	16.433.054.000,00	93,00	16.415.500.000,00	99,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Bontang di RT. 8, 22, 28, 29 dan 35 Kelurahan Api-Api	Turap sungai yang dibangun	60 meter	566.540.000,00	100,00	511.749.400,00	90,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Bontang di RT. 09 Kelurahan Kanaan	Turap sungai yang dibangun	36 meter	400.000.000,00	100,00	331.816.025,00	82,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai di Kota Bontang	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	98.428.000,00	98,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Guntung	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.112.000,00	99,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Turap RT. 37 Kelurahan Api-api	Turap sungai yang dibangun	50 meter	247.408.000,00	100,00	236.552.000,00	95,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
9	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	Meningkatkan proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik		6.301.606.750,00	100,00	6.049.641.200,00	96,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara	Jalan yang Terpelihara	370 m	1.163.747.000,00	100,00	1.103.959.500,00	94,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan	Jalan yang Terpelihara	750 m	3.668.971.000,00	100,00	3.532.509.700,00	96,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat	Jalan yang Terpelihara	75 m	591.874.000,00	100,00	537.272.250,00	90,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert Jalan HM. Ardans	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	62.162.000,00	100,00	61.067.000,00	98,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari	Jalan yang Terpelihara	2800 meter	814.852.750,00	100,00	814.832.750,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN	Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi		2.261.000.000,00	100,00	2.193.584.493,00	97,02	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri (DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Pendukung Kedaulatan Pangan)	Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Saluran 2270 meter, pintu air 20 buah, bangunan sadap 1 buah, bangunan bagi 4 buah, tanggul 2000 meter, bendung 1 buah	2.161.000.000,00	100,00	2.095.021.493,00	96,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Pendukung Kedaulatan Pangan Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri	Dokumen review design perencanaan teknis, dan pengawasan	2 dokumen	100.000.000,00	100,00	98.563.000,00	98,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
11	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Terbangunnya daerah tangkapan air		100.000.000,00	100,00	99.291.000,00	99,29	
	Normalisasi Danau Kanaan	Dokumen review design perencanaan teknis, dan pengawasan	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.291.000,00	99,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
12	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Berkurangnya daerah luasan banjir		14.810.876.000,00	49,33	6.894.105.385,00	46,55	
	Normalisasi Sungai Bontang	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.192.000,00	99,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Saluran-saluran yang terpelihara di Kecamatan Bontang Utara	550 meter saluran dan 6 dokumen perencanaan	11.539.421.000,00	34,97	3.732.017.210,00	32,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Saluran-saluran yang terpelihara di Kecamatan Bontang Selatan	350 meter saluran dan dokumen perencanaan	1.114.933.000,00	100,00	1.042.265.600,00	93,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	Saluran-saluran yang terpelihara di Kecamatan Bontang Barat	580 meter saluran dan 5 dokumen perencanaan	1.881.522.000,00	100,00	1.847.606.575,00	98,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru	Review design perencanaan teknis	1 dokumen	75.000.000,00	100,00	73.986.000,00	98,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Instalasi Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Bontang Kuala	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	100.000.000,00	100,00	99.038.000,00	99,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya prasarana pendukung pemerintah daerah yang representatif		2.797.124.000,00	100,00	2.620.089.305,00	93,67	
	Rehabilitas Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan)	Masjid Nurul Ittihad	100 m2	1.500.000.000,00	100,00	1.434.590.505,00	95,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi Masjid Nurul Hikmah (Lanjutan)	Masjid Nurul Hikmah	50 m2	250.000.000,00	100,00	245.318.000,00	98,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	Perencanaan Teknis Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	1 dokumen	1.047.124.000,00	100,00	940.180.800,00	89,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya prasarana pendukung pemerintah daerah yang representatif		15.814.186.000,00	92,19	13.563.717.003,00	85,77	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan	Bangunan tempat ibadah	42 paket dan 2 dokumen perencanaan teknis	11.957.186.000,00	97,70	10.934.523.218,00	91,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Revitalisasi Asrama Putri Mahasiswa Kota Bontang	Revitalisasi Asrama Putri Mahasiswa Kota Bontang	737 m2	3.857.000.000,00	75,09	2.629.193.785,00	68,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
15	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik		19.940.927.000,00	100,00	19.004.654.550,00	95,30	
	Peningkatan Jalan Mulawarman	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	95.000.000,00	100,00	90.505.000,00	95,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Ks. Tubun	Jalan yang ditingkatkan	100 m	229.066.000,00	100,00	223.769.000,00	97,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Menuju Mangrove BSD	Jalan yang ditingkatkan / Pematangan lahan	100 m	335.630.000,00	100,00	111.800.000,00	33,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Menuju Kantor Kelurahan Bontang Kuala	Jalan yang ditingkatkan	500 meter	1.267.752.000,00	100,00	1.113.706.250,00	87,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Habibon (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Jalan yang ditingkatkan	762 m	3.738.298.000,00	100,00	3.687.316.600,00	98,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan Habibon	Jalan yang ditingkatkan	762 m	37.218.000,00	100,00	23.176.500,00	62,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan BSD (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Jalan yang ditingkatkan	2284 m	2.215.900.000,00	100,00	2.166.787.000,00	97,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan BSD	Jalan yang ditingkatkan	2284 m	33.766.000,00	100,00	22.507.500,00	66,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan HOP (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Jalan yang ditingkatkan	2094 m	3.170.202.000,00	100,00	3.047.678.000,00	96,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan HOP	Jalan yang ditingkatkan	2094 m	37.638.000,00	100,00	23.606.000,00	62,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Jalan yang ditingkatkan	1387 m	5.348.600.000,00	100,00	5.285.145.000,00	98,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan Soekarno Hatta	Jalan yang ditingkatkan	1387 m	40.644.000,00	100,00	24.870.000,00	61,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Awang Long	Jalan yang ditingkatkan	250 meter	498.722.000,00	100,00	488.839.600,00	98,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Kartini	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	50.000.000,00	100,00	46.290.000,00	92,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Otto Iskandar Dinata	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	50.000.000,00	100,00	46.520.500,00	93,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Jalan Cut Nyak Dien	Jalan yang ditingkatkan	650 meter	1.455.381.000,00	100,00	1.387.504.800,00	95,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Dewi Sartika	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	50.000.000,00	100,00	6.509.750,00	13,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Paus	Jalan yang ditingkatkan	50 meter	245.823.000,00	100,00	241.503.700,00	98,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Jet Ski	Jalan yang ditingkatkan	50 meter	245.823.000,00	100,00	216.728.800,00	88,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Kakap Merah	Jalan yang ditingkatkan	50 meter	245.823.000,00	100,00	237.899.950,00	96,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	57.995.000,00	100,00	52.405.000,00	90,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Madura Kelurahan Api-Api	Jalan yang ditingkatkan	118 meter	245.823.000,00	100,00	241.508.100,00	98,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Anggar Kelurahan Api-Api	Jalan yang ditingkatkan	100 meter	245.823.000,00	100,00	218.077.500,00	88,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
16	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tertatanya kawasan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi		545.376.800,00	100,00	528.001.000,00	96,81	
	Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota Bontang	Jumlah peserta	75 Orang	36.640.000,00	100,00	25.775.000,00	70,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyusunan Raperda Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	Perda Perizinan Insentif dan Disentif Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	508.736.800,00	100,00	502.226.000,00	98,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
17	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Tertatanya kawasan di Kota Bontang		181.040.000,00	100,00	173.691.000,00	95,94	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	71.810.000,00	100,00	66.825.000,00	93,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	Dokumen Site Plan Kawasan Non Perumahan dan dokumen Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	2 dokumen	109.230.000,00	100,00	106.866.000,00	97,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
18	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terkenadalnya pemanfaatan ruang kota		197.720.000,00	100,00	180.220.000,00	91,15	
	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan IMB	Peralatan operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung	9 jenis alat ukur dan 1 unit drone	197.720.000,00	100,00	180.220.000,00	91,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
19	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Berkurangnya daerah luasan banjir		480.072.000,00	100,00	477.640.000,00	99,49	
	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Gunung Telihan	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	106.996.000,00	100,00	106.486.000,00	99,52	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Gunung Elai	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	91.996.000,00	100,00	91.581.000,00	99,55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Kanaan	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	106.996.000,00	100,00	106.519.000,00	99,55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Api-api	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	102.088.000,00	100,00	101.493.000,00	99,42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Satimpo	Dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	71.996.000,00	100,00	71.561.000,00	99,40	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Meningkatnya prasarana dan sarana dasar permukiman		50.827.955.650,00	82,07	39.377.148.800,00	77,47	
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	770 meter	2.196.950.000,00	100,00	2.131.343.000,00	97,01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	450 meter	920.076.000,00	98,00	514.693.000,00	55,94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	770 meter	1.276.788.000,00	100,00	1.095.938.000,00	85,84	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	420 Meter	1.482.068.000,00	87,00	1.275.141.000,00	86,04	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	2100 Meter	4.408.658.250,00	88,00	4.017.747.000,00	91,13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	820 Meter	1.393.356.000,00	72,00	991.881.000,00	71,19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	390 Meter	1.854.150.000,00	68,00	1.232.776.000,00	66,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	390 Meter	751.990.000,00	100,00	746.010.000,00	99,20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	560 Meter	2.265.502.000,00	57,00	1.278.576.000,00	56,44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	120 Meter	403.216.000,00	100,00	393.987.000,00	97,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	550 Meter	2.243.462.000,00	57,00	1.270.541.000,00	56,63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	1870 Meter	3.469.613.200,00	89,00	3.053.384.000,00	88,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	120 Meter	1.171.744.000,00	94,00	880.705.000,00	75,16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	970 Meter	1.696.348.000,00	69,00	1.150.650.000,00	67,83	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	1160 Meter	2.142.624.000,00	82,00	1.719.618.000,00	80,26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	620 Meter	1.994.741.600,00	100,00	1.230.419.000,00	61,68	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	80 Meter	1.525.212.000,00	61,00	918.813.000,00	60,24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	120 Meter	807.648.000,00	100,00	806.867.000,00	99,90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	530 Meter	1.127.945.000,00	69,00	764.405.000,00	67,77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	640 meter	1.276.308.000,00	72,00	536.468.000,00	42,03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	580 meter	1.701.931.600,00	91,00	1.533.503.000,00	90,10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	240 meter	590.588.000,00	69,00	402.976.000,00	68,23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	320 meter	903.276.000,00	78,00	699.836.000,00	77,48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	520 meter	1.714.404.000,00	100,00	1.703.273.000,00	99,35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	400 meter	564.570.000,00	65,00	359.156.000,00	63,62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	430 meter	1.230.408.000,00	72,00	867.357.000,00	70,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	800 meter	4.080.352.000,00	78,00	3.101.668.000,00	76,01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	320 meter	889.388.000,00	100,00	878.426.000,00	98,77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	980 meter	2.211.096.000,00	81,00	1.699.398.000,00	76,86	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Jalan dan drainase yang ditingkatkan	1190 meter	1.953.542.000,00	80,00	1.556.035.000,00	79,65	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Utara	Dokumen perencanaan teknis	6 dokumen	215.000.000,00	100,00	210.991.800,00	98,14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Selatan	Dokumen perencanaan teknis	6 dokumen	215.000.000,00	100,00	206.555.000,00	96,07	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Barat	Dokumen perencanaan teknis	3 dokumen	150.000.000,00	100,00	148.012.000,00	98,67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	Terpeliharanya sistem kelistrikan dan penerangan jalan		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala PLTS Komunal Kota Bontang	Pemeliharaan PLTS Komunal	4 lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21 Program; 133 Kegiatan				200.800.588.182,00	90,43	167.016.055.325,00	83,18	

A.4.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.368.915.000,00	98,67	2.132.277.301,00	90,01	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan paket pengiriman	1000 lbr	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Internet Yang Terpenuhi	1 Tahun	62.400.000,00	80,00	19.603.779,00	31,42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	32 unit	29.150.000,00	81,00	10.819.300,00	37,12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	63 item	106.965.000,00	100,00	106.388.000,00	99,46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	58.800.000,00	100,00	58.135.000,00	98,87	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Laptop dan printer	12 Jenis(6 laptop & 6 printer)	210.500.000,00	94,00	196.850.500,00	93,52	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 media	27.000.000,00	100,00	26.850.000,00	99,44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	10 item	8.240.000,00	89,00	7.274.000,00	88,28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman Rapat dan Tamu	2000 kotak	131.250.000,00	100,00	124.033.500,00	94,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	121 kali	1.343.710.000,00	100,00	1.218.280.222,00	90,67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	15 Orang	384.900.000,00	100,00	358.043.000,00	93,02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		1.235.177.050,00	99,62	1.204.592.000,00	97,52	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	244.912.500,00	100,00	222.010.000,00	90,65	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bahan bakar dan Pelumas	1 Tahun	895.764.550,00	100,00	893.753.000,00	99,78	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4 item	94.500.000,00	95,00	88.829.000,00	94,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		204.142.500,00	100,00	202.430.250,00	99,16	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah PNS	36 Orang	204.142.500,00	100,00	202.430.250,00	99,16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		198.000.000,00	40,00	69.000.000,00	34,85	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61 kali	198.000.000,00	40,00	69.000.000,00	34,85	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.600.000,00	98,40	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.600.000,00	98,40	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Sarana dan prasarana Perkotaan		466.264.000,00	99,00	441.556.096,00	94,70	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Fasilitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Infrastruktur Permukiman	100 %	466.264.000,00	99,00	441.556.096,00	94,70	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni		4.407.750,00	50,00	219.638,00	4,98	
	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Layak Hun	8 Rumah	4.407.750,00	50,00	219.638,00	4,98	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN	Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun		5.160.730.000,00	99,05	4.506.667.825,00	87,33	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Terbangunannya Sarana dan Prasarana	1 paket	4.908.818.000,00	99,00	4.257.854.825,00	86,74	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Kumuh Loktuan Kelurahan Loktuan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 dokumen	164.416.000,00	100,00	163.631.000,00	99,52	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Eks Kebakaran Kelurahan Berbas Pantai	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 dokumen	87.496.000,00	100,00	85.182.000,00	97,36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Pengoptimalan Kinerja Pengelolaan Air Limbah		15.849.320.000,00	98,81	14.698.798.049,00	92,74	
	Kelistrikan WTP Kelurahan Guntung	Kelistrikan WTP Guntung	1 unit	700.890.000,00	99,58	696.824.000,00	99,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Optimalisasi IPAL Bontang Kuala	Peningkatan SR IPAL Bontang Kuala	80 SR	900.000.000,00	99,12	887.554.050,00	98,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Optimalisasi IPAL Guntung	Peningkatan SR IPAL Guntung	30 SR	300.000.000,00	92,29	264.129.000,00	88,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Optimalisasi IPAL Loktuan	Peningkatan SR IPAL Loktuan	30 SR	300.000.000,00	98,10	289.588.000,00	96,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Optimalisasi IPAL Berbas Pantai	Peningkatan SR IPAL Berbas Pantai	30 SR	300.000.000,00	92,81	272.539.000,00	90,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Kelurahan Berbas Tengah	Pendampingan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Kelurahan Berbas Tengah	800 meter	380.000.000,00	98,11	367.698.000,00	96,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Operasional dan Perawatan IPAL Kota Bontang	Peningkatan IPAL Kota Bontang	1 kegiatan	135.000.000,00	100,00	81.621.000,00	60,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penambahan Jaringan IPAL dan SR Kelurahan Api-Api	Peningkatan IPAL Kota Bontang	35 SR	350.000.000,00	98,37	326.888.000,00	93,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 09 Kelurahan Kanaan	Jaringan Air bersih yang ditingkatkan	60 meter	75.000.000,00	96,90	71.748.000,00	95,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 17, 18, dan 20 Kelurahan Loktuan	Pipa Induk Air Bersih di Kelurahan Loktuan yang terpasang	1 paket	200.000.000,00	97,48	189.066.000,00	94,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum)	Jaringan Air Bersih yang ditingkatkan	150 SR (5000 m)	2.802.000.000,00	97,73	2.521.329.699,00	89,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal	Jaringan SPAM yang dibangun	2 paket	194.000.000,00	100,00	190.052.500,00	97,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum)	Jaringan Air Bersih yang ditingkatkan	1500 meter	608.000.000,00	97,81	551.518.500,00	90,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal	Jaringan SPAM yang terbangun	2 Dokumen	55.000.000,00	100,00	54.318.000,00	98,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)	Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan Kota Bontang	5 unit	2.533.000.000,00	100,00	2.532.770.000,00	99,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Perbaikan Instalasi Jaringan Pipa Asrama Rudal	Perbaikan Instalasi Jaringan Pipa Asrama Rudal	1 keg	200.000.000,00	97,03	191.004.000,00	95,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang	Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan Kota Bontang	1 Dokumen	61.510.000,00	59,66	39.325.000,00	63,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Sumur Bor LAPAS Kota Bontang	Sumur Bor di Lapas Kota Bontang	1 paket	250.000.000,00	100,00	212.446.000,00	84,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembuatan Sumur Dalam (Deep Well) Kapasitas 40 Liter/detik Kelurahan Gunung Telihan	Terbangunnya Sumur Dalam (Deep Well) Kapasitas 40 Liter/detik	1 unit	2.590.230.000,00	100,00	2.183.921.300,00	84,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengadaan dan Pemasangan Reverse Osmosis (RO) di Pulau Gusung	Reserve Osmosis (RO) pada Pulau Gusung	1 unit	2.914.690.000,00	100,00	2.774.458.000,00	95,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
9 Program; 42 Kegiatan				25.511.956.300,00	98,43	23.280.141.159,00	91,25	

A.4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Rp	%	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.180.275.000,00	100,00	1.088.717.199,00	92,24	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan jasa pengiriman	300 buah	2.750.000,00	100,00	1.632.000,00	59,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian telepon air dan listrik	10 bln	12.000.000,00	100,00	464.500,00	3,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan STNK	12 bulan	9.990.000,00	100,00	8.355.100,00	83,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK kantor	12 bulan	25.000.000,00	100,00	24.729.510,00	98,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	39.485.000,00	100,00	35.439.975,00	89,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	200.000.000,00	100,00	176.765.000,00	88,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman Badan Kesbangpol	12 bulan	52.000.000,00	100,00	50.684.750,00	97,47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai	33 org	502.250.000,00	100,00	478.036.364,00	95,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga administrasi/teknis perkantoran	14 orang	336.800.000,00	100,00	312.610.000,00	92,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		139.540.000,00	100,00	137.804.900,00	98,76	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	13 kendaraan	139.540.000,00	100,00	137.804.900,00	98,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		130.080.000,00	100,00	127.965.000,00	98,37	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	100 %	130.080.000,00	100,00	127.965.000,00	98,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		17.755.000,00	100,00	16.565.000,00	93,30	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan semesteran dan prognosis	1 laporan	3.065.000,00	100,00	1.875.000,00	61,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan akhir tahun	1 laporan	4.762.500,00	100,00	4.762.500,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Renja SKPD	Laporan renja	1 laporan	7.125.000,00	100,00	7.125.000,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan LKIP	1 laporan	2.802.500,00	100,00	2.802.500,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan pelayanan publik		6.300.000,00	100,00	5.958.750,00	94,58	
	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Proposal yang terverifikasi	30 proposal	6.300.000,00	100,00	5.958.750,00	94,58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.985.000,00	100,00	22.600.000,00	86,97	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.985.000,00	100,00	22.600.000,00	86,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Peningkatan kemitraan pengembangan kebangsaan		797.645.000,00	100,00	721.642.580,00	90,47	
	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Kegiatan sekretariat FKUB dan Pakem	12 bulan	179.520.000,00	100,00	161.994.250,00	90,24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Tim Koordinasi Kominda dan PKS	12 bulan	166.150.000,00	100,00	125.964.950,00	75,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	Monitoring TKA dan Pelaporan	3 kecamatan	6.050.000,00	100,00	5.750.000,00	95,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Fasilitasi FPK	1 tahun	243.715.000,00	100,00	232.211.620,00	95,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Upacara Hari-hari besar nasional	4 upacara	130.100.000,00	100,00	124.816.000,00	95,94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi kegiatan TMMD	1 Kegiatan	72.110.000,00	100,00	70.905.760,00	98,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat		558.806.000,00	100,00	464.660.634,00	83,15	
	Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Fasilitasi BNK	12 bulan	558.806.000,00	100,00	464.660.634,00	83,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Peningkatan Pelayanan Masyarakat terkait SKT		1.976.239.500,00	100,00	1.518.306.990,00	87,32	
	Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Proposal banpol dan monitoring	13 parpol	6.050.000,00	100,00	6.050.000,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Verifikasi Data Orkemas	Monitoring dan Up data Orkemas	3 Kecamatan	8.550.000,00	100,00	5.550.000,00	64,91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Desk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Bantuan Keuangan Provinsi)	Penyelenggaraan Fasilitasi Desk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur	6 Kegiatan	750.000.000,00	100,00	583.598.090,00	77,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	Sosialisasi	250 peserta	53.460.000,00	100,00	44.194.000,00	82,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Fasilitasi persiapan Pemilu, KPU dan Panwas	3 Keg	423.745.000,00	100,00	404.277.400,00	95,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Fasilitasi Pendidikan Politik	Sosialisasi Politik	1 keg	33.562.500,00	100,00	29.112.500,00	86,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Capacity Buliding Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kegiatan peningkatan karakter building	2 Kegiatan	463.500.000,00	100,00	445.525.000,00	96,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Jumlah lembaga penyelenggara pilkada yang difasilitasi	3 lembaga	84.110.000,00	100,00	83.346.925,00	99,09	Kecamatan Bontang Utara
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada	1 Kegiatan	82.892.000,00	100,00	82.792.000,00	99,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Persiapan Pilgub	1 Kegiatan	70.370.000,00	100,00	68.396.000,00	97,19	Kecamatan Bontang Barat
13	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.740.679.000,00	99,80	2.628.278.107,00	95,90	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	400 Lembar	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	100,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon air, listrik, internet dan TV kabel	1 Tahun	85.570.000,00	99,58	79.364.907,00	92,75	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan Pajak STNK kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	20.420.000,00	100,00	12.301.600,00	60,24	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	74.240.000,00	100,00	69.498.000,00	93,61	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa penjiilidan barang cetakan dan fotocopy	1 Tahun	52.370.000,00	90,26	46.506.300,00	88,80	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	26 buah	73.400.000,00	100,00	67.064.800,00	91,37	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	5.210.000,00	100,00	5.195.960,00	99,73	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman tamu dan kegiatan	1 Tahun	59.075.000,00	100,00	54.672.750,00	92,55	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP	1 Tahun	723.394.000,00	100,00	685.797.790,00	94,80	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Menyediakan Tenaga Non PNS di Lingkungan Satpol PP	1 Tahun	1.644.900.000,00	100,00	1.605.776.000,00	97,62	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		444.100.000,00	100,00	423.086.500,00	95,27	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	396.000.000,00	100,00	388.970.000,00	98,22	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan/Servis TV, AC, Komputer, Notebook/Laptop dan Printer	1 Tahun	48.100.000,00	100,00	34.116.500,00	70,93	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
15	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		547.895.000,00	100,00	531.240.250,00	96,96	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah PDH dan PDL yang diadakan	103 Stel	330.050.000,00	100,00	328.718.500,00	99,60	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	217.845.000,00	100,00	202.521.750,00	92,97	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
16	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		29.000.000,00	100,00	28.712.475,00	99,01	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	29.000.000,00	100,00	28.712.475,00	99,01	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
17	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah kota bontang		223.073.900,00	100,00	171.748.800,00	76,99	
	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya keamanan dan ketertiban aset pemerintah/rumah jabatan dan acara-acara penting	1 Tahun	50.900.000,00	100,00	47.190.000,00	92,71	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penegakan Produk Hukum Daerah	Taatnya masyarakat terhadap produk hukum daerah yang berlaku di kota bontang	3 Kec	163.900.000,00	100,00	116.886.300,00	71,32	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi	Jumlah Pakaian Olah Raga	14 Stel	8.273.900,00	100,00	7.672.500,00	92,73	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
18	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Dapat mendektisi secara dini gangguan trantibum di kota bontang		522.710.000,00	76,32	287.613.625,00	55,02	
	Monitoring Wilayah	Data daerah-daerah rawan yang berpotensi rawan gangguan trantibum di kota bontang	1 Tahun	128.200.000,00	100,00	102.290.400,00	79,79	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Tahun	22.640.000,00	100,00	20.150.400,00	89,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Pelatihan Dasar Satpol PP	Jumlah peserta pelatihan anggota satpol pp	75 Orang	371.870.000,00	66,71	165.172.825,00	44,42	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
19	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.709.631.400,00	100,00	1.542.729.426,00	90,24	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000	600 lembar	3.900.000,00	100,00	3.900.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening telepon,air, listrik, tv kabel dan internet	1 tahun	114.300.000,00	100,00	75.720.416,00	66,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan pajak kendaraan dinas/ops Roda 4 ; roda 2 dan roda 6	1 tahun	63.500.000,00	100,00	31.827.365,00	50,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan dan bahan kebersihan	17 jenis	6.015.000,00	100,00	5.870.000,00	97,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Mencukupi Alat Tulis Kantor	53 jenis	29.345.500,00	100,00	29.052.045,00	99,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jilid laporan	20 buku	19.705.900,00	100,00	19.205.750,00	97,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik dan Elektronika	9 jenis	5.616.000,00	100,00	5.616.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	117.200.000,00	100,00	116.299.850,00	99,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	air minum isi ulang	1200 galon	48.000.000,00	100,00	45.316.000,00	94,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat, tamu, dan kebencanaan,	3 paket	197.326.000,00	100,00	152.680.150,00	77,37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat koordinasi dan konsultasi	66 kali	394.623.000,00	100,00	394.514.850,00	99,97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Menyediakan Tenaga Non PNS di Lingkungan BPBD	24 orang	710.100.000,00	100,00	662.727.000,00	93,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		449.190.000,00	100,00	444.586.062,00	98,98	
	Pengadaan Meubelair	jumlah loker yang tersedia	6 unit	37.500.000,00	100,00	35.892.862,00	95,71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor	1 unit	10.000.000,00	100,00	9.900.000,00	99,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	belanja BBM	34 unit	379.694.000,00	100,00	376.968.200,00	99,28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	isi ulang tabung apar	9 kali	21.996.000,00	100,00	21.825.000,00	99,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		268.855.000,00	100,00	268.424.650,00	99,84	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pakaian dinas dan perlengkapannya	84 stel	89.775.000,00	100,00	89.400.900,00	99,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	81 Pasang	89.170.000,00	100,00	89.170.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	89.910.000,00	100,00	89.853.750,00	99,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000,00	100,00	9.500.000,00	23,75	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelaksanaan Program Kerja BPBD	1 tahun	40.000.000,00	100,00	9.500.000,00	23,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.805.000,00	99,22	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.805.000,00	99,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.416.863.100,00	100,00	2.283.192.085,00	94,47	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000	50 buah	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi listrik,internet,dan Air yang disediakan	12 bulan	139.200.000,00	100,00	114.724.695,00	82,42	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional tangki dan motor	20 unit	25.700.000,00	100,00	20.428.500,00	79,49	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan tempat kerja	1 org	14.400.000,00	100,00	9.600.000,00	66,67	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Jenis	62.956.600,00	100,00	60.853.290,00	96,66	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	55.170.000,00	100,00	53.339.200,00	96,68	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	21 jenis	250.720.000,00	100,00	250.058.750,00	99,74	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	18 Jenis	55.302.500,00	100,00	54.954.400,00	99,37	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman untuk tamu dan hari hari tertentu	325 kotak	25.974.000,00	100,00	21.244.050,00	81,79	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 kali	417.020.000,00	100,00	411.094.400,00	98,58	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Menyediakan Tenaga Non PNS di Lingkungan PMK	42 Org	1.369.670.000,00	100,00	1.286.144.800,00	93,90	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		741.807.635,00	100,00	730.563.376,00	98,48	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	250.000.000,00	100,00	240.454.000,00	96,18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	202.820.000,00	100,00	201.825.476,00	99,51	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia bahan Bakar Minyak dan Pelumas	13 unit	235.237.635,00	100,00	234.898.700,00	99,86	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	53.750.000,00	100,00	53.385.200,00	99,32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
26	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		275.220.000,00	100,00	272.878.000,00	99,15	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	86 stel	91.320.000,00	100,00	89.564.500,00	98,08	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	12 bulan	183.900.000,00	100,00	183.313.500,00	99,68	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
27	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		37.360.000,00	100,00	30.009.450,00	80,33	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang disertakan dalam Kursus/Pelatihan/bimtek/workshop	2 orang	25.920.000,00	100,00	18.584.300,00	71,70	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Perayaan Hari Ulang Tahun SKPD	Jumlah makan minum yang trsedia	500 kotak	11.440.000,00	100,00	11.425.150,00	99,87	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
28	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.800.000,00	99,20	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.800.000,00	99,20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
28 Program; 96 Kegiatan				15.329.010.535,00	99,16	14.040.923.784,00	91,60	

A.4.6 URUSAN SOSIAL

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.225.537.140,00	100,00	1.979.690.551,00	88,95	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan materai yang tersedia	1 Tahun	8.100.000,00	100,00	7.747.623,00	95,65	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan Jenis Jasa Komunikasi yang terpakai	3 Jenis	8.193.500,00	100,00	4.859.500,00	59,31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang Perizinannya	40 unit	44.024.000,00	100,00	17.157.100,00	38,97	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan Tempat Kerja	1 Tahun	16.346.000,00	100,00	16.110.820,00	98,56	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	97.623.000,00	100,00	95.783.130,00	98,12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	65.756.000,00	100,00	63.855.193,00	97,11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	117.000.000,00	100,00	102.400.400,00	87,52	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman	1 Tahun	72.101.000,00	100,00	53.620.000,00	74,37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	761.193.640,00	100,00	674.181.785,00	88,57	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	60 orang	1.035.200.000,00	100,00	943.975.000,00	91,19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		270.924.900,00	100,00	240.683.000,00	88,84	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	29 unit	250.924.900,00	100,00	238.263.000,00	94,95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	3 bulan	20.000.000,00	100,00	2.420.000,00	12,10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		191.058.000,00	100,00	191.058.000,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	191.058.000,00	100,00	191.058.000,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.000.000,00	100,00	46.000.000,00	83,64	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan untuk pegawai	11 pegawai	55.000.000,00	100,00	46.000.000,00	83,64	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		145.000.000,00	100,00	143.330.000,00	98,85	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.255.000,00	97,02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi informasi pembangunan	1 Tahun	120.000.000,00	100,00	119.075.000,00	99,23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Saprass Kessos bagi PMKS		1.626.974.500,00	100,00	1.362.837.980,00	83,77	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani melalui LK3	50 PMKS	131.282.000,00	100,00	120.640.500,00	91,89	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penanganan Korban Bencana	Jumlah penanganan korban bencana	1 Tahun	323.791.400,00	100,00	174.428.000,00	53,87	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Jumlah warga Bontang yang menerima santunan kematian	600 orang	603.300.000,00	100,00	578.300.000,00	95,86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Operasional Rumah Singgah	Jumlah Klien yang terlayani	35 orang	559.601.100,00	100,00	480.469.480,00	85,86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyaluran Beras Rastra	Jumlah KPM pesisir yang diangkut ke e-warung	152 KPM	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN	HUT Pahlawan dan Bantuan Bagi Veteran		83.175.000,00	100,00	74.520.000,00	89,59	
	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran/piveri penerima bantuan kebutuhan dasar dan Peringatan Hari Pahlawan	12 orang	83.175.000,00	100,00	74.520.000,00	89,59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penanganan PMKS		126.322.700,00	100,00	116.156.400,00	91,95	
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang terbina	2853 KPM	50.460.200,00	100,00	45.942.900,00	91,05	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Sosialisasi dan Fasilitasi Pencegahan Bencana Sosial	Jumlah peserta sosialisasi	150 orang	75.862.500,00	100,00	70.213.500,00	92,55	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin		469.133.500,00	91,73	401.796.385,00	85,65	
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah pendamping KUBE dan TKSK dalam pendampingan 252 KUBE (2.520	18 Penda	256.050.000,00	100,00	256.050.000,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan	Jumlah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang di Verivali	5725 KPM	213.083.500,00	81,79	145.746.385,00	68,40	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
9 Program; 26 Kegiatan				5.193.125.740,00	99,25	4.556.072.316,00	87,73	

A.4.7 URUSAN TENAGA KERJA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang dilatih		200.000.000,00	100,00	183.312.500,00	91,66	
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	kegiatan pelatihan	1 Kegiatan	200.000.000,00	100,00	183.312.500,00	91,66	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Meminimalisasi masalah pengupahan di Kota Bontang		284.037.500,00	100,00	259.042.136,00	91,20	
	Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	2 rekomendasi	142.165.000,00	100,00	130.816.145,00	92,02	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dewan Pengupahan Kota Bontang	Jumlah saran dan pertimbangan	2 Saran	141.872.500,00	100,00	128.225.991,00	90,38	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Program; 3 Kegiatan				484.037.500,00	100,00	442.354.636,00	91,39	

A.4.8 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Bontang menuju Kota Layak Anak		249.080.560,00	100,00	233.900.049,00	93,91	
	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	Jumlah peserta	60 orang	29.577.000,00	100,00	27.611.000,00	93,35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak & Jumlah SDM terlatih menangani anak disabilitas korban kekerasan	85 orang	219.503.560,00	100,00	206.289.049,00	93,98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan		203.584.000,00	100,00	185.078.616,00	90,91	
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pendampingan/Fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan	230 kali	203.584.000,00	100,00	185.078.616,00	90,91	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan angka KDRT dan anak		200.000.000,00	95,63	177.737.708,00	88,87	
	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Jumlah DWP yang berperan	1 Tahun	200.000.000,00	95,63	177.737.708,00	88,87	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender		186.240.000,00	100,00	167.061.575,00	89,70	
	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Jumlah anggota GOW	1 Tahun	186.240.000,00	100,00	167.061.575,00	89,70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
4 Program; 5 Kegiatan				838.904.560,00	98,96	763.777.948,00	91,04	

A.4.9 URUSAN PANGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan		279.439.000,00	100,00	276.134.374,00	98,82	
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	kegiatan penanekaragaman Konsumsi Pangan	5 Kegiatan	60.570.000,00	100,00	57.466.425,00	94,88	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Tersedianya bangunan lumbung pangan	1 Dokumen	218.869.000,00	100,00	218.667.949,00	99,91	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Program; 2 Kegiatan				279.439.000,00	100,00	276.134.374,00	98,82	

A.4.10 PERTANAHAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	Terselenggaranya administrasi pemerintahan		571.903.596,00	86,00	337.364.782,00	58,99	
	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Sertifikat tanah pemerintah kota Bontang	40 Bidang	571.903.596,00	86,00	337.364.782,00	58,99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	Tersedianya Lahan Untuk sarana dan Prasarana Publik		4.525.930.590,00	99,06	3.251.140.937,00	71,83	
	Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Luas lahan TPU yang dilaksanakan	1,3 Ha	4.260.400.590,00	99,00	2.986.160.937,00	70,09	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Inventarisasi Permasalahan Pertanahan	Inventarisasi yang diselesaikan	400 Bidang	265.530.000,00	100,00	264.980.000,00	99,79	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 Program; 3 Kegiatan				5.097.834.186,00	97,59	3.588.505.719,00	70,39	

A.4.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.464.302.529,00	100,00	1.321.637.601,00	90,26	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	556 lembar	2.949.000,00	100,00	2.949.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telpon	12 bulan	87.340.000,00	100,00	56.896.670,00	65,14	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelaksanaan KIR	1 tahun	62.924.000,00	100,00	43.204.500,00	68,66	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	14 jenis	100.559.000,00	100,00	100.559.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penjiilidan	1 jenis	9.944.000,00	100,00	9.944.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	8 jenis	50.898.979,00	100,00	50.047.600,00	98,33	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan	62.815.000,00	100,00	57.800.600,00	92,02	Dinas Lingkungan Hidup
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	58 kali	591.345.000,00	100,00	564.976.231,00	95,54	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	19 orang	495.527.550,00	100,00	435.260.000,00	87,84	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		2.538.124.460,00	100,00	2.533.197.177,00	99,81	
	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang disediakan	2 jenis	67.779.000,00	100,00	67.779.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	1 tahun	2.445.045.460,00	100,00	2.442.026.177,00	99,88	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	3 jenis	25.300.000,00	100,00	23.392.000,00	92,46	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		247.851.000,00	100,00	247.851.000,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	247.851.000,00	100,00	247.851.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.682.900,00	98,73	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.682.900,00	98,73	Dinas Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	Menurunnya sampah yang diangkut ke TPA		11.722.507.720,00	100,00	11.227.503.418,00	95,78	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Paket	302.177.900,00	100,00	276.626.050,00	91,54	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Pekerja Harian Lepas (PHL) yang tersedia	275 orang	8.566.414.570,00	100,00	8.108.838.615,00	94,66	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	82,44 %	194.680.000,00	100,00	186.242.400,00	95,67	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Konstruksi landasan lapangan pembuangan sampah	1 paket	2.283.560.250,00	100,00	2.282.667.150,00	99,96	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Jumlah sarana penunjang bank sampah	1 paket	350.000.000,00	100,00	348.498.700,00	99,57	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang hadir	50 orang	25.675.000,00	100,00	24.630.503,00	95,93	Kecamatan Bontang Utara
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN	Jumlah dokumen hasil evaluasi		867.560.630,00	100,00	741.492.992,00	85,47	
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Nilai pemantauan Adipura	77 Point	53.650.000,00	100,00	45.014.250,00	83,90	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau air sungai	9 titik pantau	117.240.080,00	100,00	100.348.112,00	85,59	Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Frekuensi kegiatan pembersihan sungai	12 kali	140.797.450,00	100,00	89.229.780,00	63,37	Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan hidup	4 kegiatan	282.751.100,00	100,00	281.238.850,00	99,47	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Pemeliharaan alat-alat laboratorium	1 paket	73.122.000,00	100,00	72.432.000,00	99,06	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Jumlah alat-alat laboratorium uji kualitas air	1 paket	200.000.000,00	100,00	153.230.000,00	76,62	Dinas Lingkungan Hidup
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah lokasi yang dilakukan audit energi		246.905.000,00	100,00	184.187.000,00	74,60	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Pemeliharaan sumur pantau	1 Paket	246.905.000,00	100,00	184.187.000,00	74,60	Dinas Lingkungan Hidup
8	PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam		448.992.000,00	100,00	439.584.670,00	97,90	
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Jumlah stasiun pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun	10 stasiun	448.992.000,00	100,00	439.584.670,00	97,90	Dinas Lingkungan Hidup
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Efektifitas penegakan hukum lingkungan		118.592.500,00	100,00	78.988.650,00	66,61	
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah Adiwiyata	3 sekolah	62.295.000,00	100,00	53.535.000,00	85,94	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah laporan SLHD	10 set	19.697.500,00	100,00	15.158.000,00	76,95	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Penanganan kasus lingkungan hidup	1 tahun	36.600.000,00	100,00	10.295.650,00	28,13	Dinas Lingkungan Hidup
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Jumlah kendaraan yang diuji emisinya		171.000.000,00	100,00	168.820.405,00	98,73	
	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang dapat Menimbulkan Polusi (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Jumlah IPAL Tahu/Tempe yang dibangun	1 paket	171.000.000,00	100,00	168.820.405,00	98,73	Dinas Lingkungan Hidup
11	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau		8.904.155.589,00	100,00	8.198.129.085,00	92,07	
	Penataan RTH	Pengadaan Tanaman Peneduh	1 Tahun	1.986.665.000,00	100,00	1.967.235.125,00	99,02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan RTH	Taman Kota Terpelihara Dengan Baik	6 Lokasi	6.917.490.589,00	100,00	6.230.893.960,00	90,07	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana PJU		10.522.828.300,00	100,00	9.268.049.860,00	88,08	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Terpeliharanya utilitas lampu penerangan jalan umum dan lampu taman	1 Tahun	6.393.906.000,00	100,00	5.255.038.160,00	82,19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Bertambahnya jumlah unit lampu penerangan jalan umum	1 Tahun	4.128.922.300,00	100,00	4.013.011.700,00	97,19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Cakupan Pengelolaan Pemakaman Umum		1.136.842.760,00	100,00	1.060.694.717,00	93,30	
	Penataan Areal Pemakaman	Pembangunan Paga TPU Baru RT. 22 Loktuan	1 Tahun	518.000.000,00	100,00	508.968.350,00	98,26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan TPU	9 TPU	618.842.760,00	100,00	551.726.367,00	89,15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Tercapainya waktu tanggap sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimum)		1.418.691.045,00	100,00	1.405.311.700,00	99,06	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dini Bahaya Kebakaran	105 orang	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	tersedianya makan minum kebakaran	1171 kotak	102.045.000,00	100,00	101.852.000,00	99,81	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	24 unit	139.981.045,00	100,00	139.383.500,00	99,57	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pembinaan Kesiapsiagaan Linmas dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	jumlah anggota LINMAS yang mengikuti pembinaan	672 orang	882.945.000,00	100,00	872.953.100,00	98,87	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Kebakaran	Jumlah SOP dan RISPK penanggulangan dan pencegahan	1 dokumen	253.720.000,00	100,00	251.123.100,00	98,98	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14 Program; 43 Kegiatan				39.833.353.533,00	100,00	36.900.131.175,00	92,64	

A.4.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.974.331.090,00	100,00	1.804.489.419,00	91,40	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya matrai dan biaya pengiriman surat	700 lembar	7.450.000,00	100,00	4.755.000,00	60,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya tagihan belanja jasa kantor	12 Bulan	192.978.000,00	100,00	160.178.017,00	83,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	surat-surat kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2	19 unit	20.500.000,00	100,00	9.894.740,00	38,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga kebersihannya	3 Gedung	90.762.190,00	100,00	90.293.060,00	91,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK yang memadai	1 tahun	64.024.000,00	100,00	63.250.460,00	98,79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	85.428.750,00	100,00	74.423.315,00	82,87	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 tahun	736.320.150,00	100,00	677.575.000,00	91,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	3 paket	44.780.000,00	100,00	33.350.900,00	54,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	optimalisasi dalam penguatan wawasan konsultasi teknis orientasi koodinasi	40 kali	272.288.000,00	100,00	269.691.927,00	90,29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya kebutuhan tenaga kerja non PNS	1 Tahun	459.800.000,00	100,00	421.077.000,00	83,72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		242.547.288,00	100,00	224.236.350,00	92,45	
	Pengadaan Meubelair	tersedianya meja kursi lemari dan rak	1 tahun	20.000.000,00	100,00	19.605.300,00	98,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	19 unit	126.413.600,00	100,00	125.230.000,00	95,52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja yang memadai	1 tahun	96.133.688,00	100,00	79.401.050,00	68,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		214.582.500,00	100,00	190.087.500,00	88,58	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	214.582.500,00	100,00	190.087.500,00	88,58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.707.650,00	98,83	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.707.650,00	78,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan		797.080.000,00	100,00	791.428.936,00	99,29	
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	4 lokasi	54.425.000,00	100,00	53.904.750,00	99,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan	3 kecamatan	111.120.000,00	100,00	109.067.150,00	98,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Penerbitan Dokumen Kependudukan	100 %	489.415.000,00	100,00	488.592.000,00	99,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	28.400.000,00	100,00	27.742.000,00	97,68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %	113.720.000,00	100,00	112.123.036,00	98,60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5 Program; 20 Kegiatan				3.253.540.878,00	100,00	3.034.949.855,00	93,28	

A.4.13 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Melalui PKK		447.000.000,00	100,00	380.874.400,00	85,21	
	Pembinaan dan Pelatihan PKK	Pembinaan dan Pelatihan PKK	1 Paket	447.000.000,00	100,00	380.874.400,00	85,21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Persentase keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam musrembang (berbasis profesi, geografi, gender, dan lainnya)		294.100.000,00	100,00	221.902.000,00	75,45	
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODTA (Program 200 Juta Per-RT)	jumlah kelurahan yang didampingi	100 %	294.100.000,00	100,00	221.902.000,00	75,45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Program; 2 Kegiatan				741.100.000,00	100,00	602.776.400,00	81,34	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.14 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Peserta KB Aktif		1.699.765.000,00	98,78	1.409.477.184,00	75,86	
	Harganas Tingkat Kota	Jumlah peserta yang mengikuti lomba hari keluarga nasional serta jumlah peserta yang hadir pada kegiatan peringatan hari keluarga nasional tingkat kota Bontang	350 orang	48.550.000,00	94,42	45.530.000,00	93,57	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Sosialisasi KB	Jumlah media yang digunakan untuk menyampaikan Informasi program keluarga berencana melalui media cetak dan elektronik	195 Media	49.925.000,00	100,00	42.875.000,00	39,11	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang mendapat pembinaan berupa pelatihan , pertemuan, serta fasilitasi gelar dagang Kelompok UPPKS	57 orang	37.500.000,00	97,00	36.476.382,00	92,67	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembangunan Balai Penyuluh KKB Tingkat Kecamatan (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)	Terbangunnya Balai Penyuluh KB Kec Btg Barat	1 Paket	481.450.000,00	100,00	472.870.492,00	98,22	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)	Terlaksananya Kegiatan BOKB	1 Tahun	572.790.000,00	99,83	353.773.000,00	45,21	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)	Sarana dan Prasarana Penyuluh KB	1 Tahun	509.550.000,00	96,86	457.952.310,00	89,87	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Cakupan Peserta KB Aktif		139.095.000,00	100,00	132.575.840,00	29,37	
	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	3 Jenis	10.000.000,00	100,00	9.956.650,00	0,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani	10 orang	41.000.000,00	100,00	36.101.690,00	0,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile	300 orang	51.970.000,00	100,00	50.967.500,00	10,21	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Manunggal KB KES	Jumlah peserta kb yang mendapat Pelayanan KB	150 orang	36.125.000,00	100,00	35.550.000,00	98,41	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera 1		409.925.000,00	100,00	369.801.250,00	61,44	
	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi mengenai Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di kampung KB	150 orang	15.635.000,00	100,00	7.210.000,00	0,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana	Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Review tingkat kota Bontang	200 orang	107.710.000,00	100,00	82.781.250,00	35,08	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Tersedianya Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru	12 database	13.330.000,00	100,00	12.570.000,00	89,80	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan IMP KB	jumlah kader sub PPKBK (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) yang mengikuti pelatihan	100 orang	236.260.000,00	100,00	232.945.000,00	75,21	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan pendataan KB dan fasilitasi Pelaporan Pelayanan KB	50 Orang	11.080.000,00	100,00	9.752.500,00	88,02	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Program SIDUGA	jumlah keluarga yang telah masuk pendataan ke dalam Database KB	1 Aplikasi	25.910.000,00	100,00	24.542.500,00	56,51	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	Meningkatnya presentase cakupan peserta KB aktif		75.280.000,00	100,00	70.851.500,00	84,38	
	Penyediaan Informasi TRIAD KRR	jumlah remaja yang menerima Informasi TRIAD KRR (kesehatan reproduksi remaja) melalui pemilihan duta genre, kemah bakhti saka kencana, penyuluhan triad kesehatan reproduksi remaja, jambore pik r (pusat informasi dan konseling remaja)	100 orang	53.500.000,00	100,00	51.707.500,00	96,65	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja	jumlah pengelola PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia	90 orang	21.780.000,00	100,00	19.144.000,00	54,24	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Rasio rata - rata jumlah anak dalam keluarga		20.275.000,00	100,00	15.025.000,00	0,00	
	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	terlaksananya musyawarah besar dan pembinaan kader tribina	245 orang	20.275.000,00	100,00	15.025.000,00	0,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
6	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Rasio rata - rata jumlah anak dalam keluarga		28.605.000,00	100,00	27.755.000,00	78,15	
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	jumlah kader yang mengikuti Pelatihan kader Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	60 orang	28.605.000,00	100,00	27.755.000,00	78,15	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
6 Program; 20 Kegiatan				2.372.945.000,00	99,12	2.025.485.774,00	85,36	

A.4.15 URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.616.608.600,00	100,00	2.456.981.605,00	93,90	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	150 Materai	1.500.000,00	100,00	1.134.500,00	75,63	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, penerangan, air dan internet	6 Kegiatan	121.734.100,00	100,00	95.106.192,00	78,13	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	28 Unit	27.400.000,00	100,00	18.517.200,00	67,58	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	59 Pengadaan	67.765.000,00	100,00	66.828.850,00	98,62	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	24 Pengadaan	144.860.000,00	100,00	103.487.370,00	71,44	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	19 Pengadaan	274.220.000,00	100,00	271.669.500,00	99,07	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar	1584 eks	9.504.000,00	100,00	3.841.000,00	40,41	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan kebersihan kantor	37 Jenis	35.607.000,00	100,00	33.228.000,00	93,32	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	665 snack dan nasi kotak	34.912.500,00	100,00	30.456.750,00	87,24	Dinas Perhubungan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	65 Kali	701.784.000,00	100,00	680.219.243,00	96,93	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa administrasi perkantoran	35 orang	1.197.322.000,00	100,00	1.152.493.000,00	96,26	Dinas Perhubungan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		1.577.500.500,00	100,00	1.452.458.900,00	92,07	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional roda 4	1 unit	450.000.000,00	100,00	432.080.000,00	96,02	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan BBM kendaraan operasional	12 kendaraan	579.509.000,00	100,00	555.979.900,00	95,94	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	6 Kegiatan	246.666.500,00	100,00	197.618.400,00	80,12	Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	301.325.000,00	100,00	266.780.600,00	88,54	Dinas Perhubungan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		418.280.000,00	100,00	376.279.550,00	89,96	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian kerja lapangan	15 buah	170.015.000,00	100,00	167.634.800,00	98,60	Dinas Perhubungan
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	248.265.000,00	100,00	208.644.750,00	84,04	Dinas Perhubungan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		323.730.000,00	100,00	220.785.249,00	68,20	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Belanja Kontribusi	21 kali	323.730.000,00	100,00	220.785.249,00	68,20	Dinas Perhubungan
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.492.500,00	97,97	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.492.500,00	97,97	Dinas Perhubungan
6	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut		3.731.895.000,00	35,69	891.641.200,00	23,89	
	Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan	Belanja review DED	1 dokumen	102.180.000,00	100,00	100.415.000,00	98,27	Dinas Perhubungan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ganti Rugi Bangunan di Area Pelabuhan Loktuan	Jumlah Bangunan Yang di Bebaskan	20 Rumah	3.000.000.000,00	20,00	169.784.500,00	5,66	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Fasilitas Pelabuhan Loktuan	Pembangunan sarana pelabuhan loktuan	8 kegiatan	577.000.000,00	100,00	571.914.200,00	99,12	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Landasan Dermaga Kapal RO-RO	Pembangunan landasan dermaga kapal RO-RO	1 Dokumen	52.715.000,00	100,00	49.527.500,00	93,95	Dinas Perhubungan
7	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Terpeliharanya fasilitas lalu lintas jalan		1.609.800.000,00	100,00	1.535.465.548,00	95,38	
	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Pemeliharaan traffic light dan Rambu lalu lintas	10 lokasi	1.609.800.000,00	100,00	1.535.465.548,00	95,38	Dinas Perhubungan
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya keselamatan pelayaran dan ketertiban pelabuhan umum Loktuan		374.080.000,00	100,00	337.777.940,00	90,30	
	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas	60 Personil	33.850.000,00	100,00	33.850.000,00	100,00	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Kegiatan Lomba AKUT dan Lomba WTN	2 Kegiatan	54.800.000,00	100,00	23.545.000,00	42,97	Dinas Perhubungan
	Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan	Pengamanan dan pengendalian embarkasi dan debarkasi	2 kegiatan	111.480.000,00	100,00	110.591.940,00	99,20	Dinas Perhubungan
	Studi Evaluasi Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Jalan (Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum)	tersedianya dokumen evaluasi penyelenggaraan transportasi berbasis jalan	1 dokumen	82.000.000,00	100,00	81.000.000,00	98,78	Dinas Perhubungan
	Pengamanan dan Pengendalian Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019	terciptanya ketertiban lalu lintas jalan dan pelabuhan	2 Kali	56.800.000,00	100,00	56.000.000,00	98,59	Dinas Perhubungan
	Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kapal Penyeberangan	tertibnya Kespel	25 Personil	35.150.000,00	100,00	32.791.000,00	93,29	Dinas Perhubungan
9	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara		2.065.910.000,00	100,00	2.027.962.625,00	98,16	
	Koordinasi Pembukaan Rute Penerbangan Perintis	Terpenuhinya rute penerbangan perintis di Kota Bontang	1 dokumen	65.910.000,00	100,00	60.590.000,00	91,93	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Jalan Menuju Bandara Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi)	Pembangunan turap badan jalan	567 M3	2.000.000.000,00	100,00	1.967.372.625,00	98,37	Dinas Perhubungan
9 Program; 32 Kegiatan				12.742.804.100,00	81,17	9.323.845.117,00	73,17	

A.4.16 URUSAN KOMUNIKASI

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.823.941.000,00	100,00	1.783.391.951,00	97,78	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	700 lembar	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13 Kendaraan	11.850.000,00	100,00	6.357.100,00	53,65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	50 Jenis	111.500.000,00	100,00	111.432.000,00	99,94	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	43.632.000,00	100,00	43.511.175,00	99,72	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	6 Item	10.700.000,00	100,00	10.692.000,00	99,93	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 item	255.235.000,00	100,00	254.330.800,00	99,65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	3 Koran Lokal	14.640.000,00	100,00	14.640.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	9 Item	30.980.000,00	100,00	30.796.700,00	99,41	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Snack yang tersedia	2900 kotak	97.970.000,00	100,00	97.948.120,00	99,98	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	91 kali	666.684.000,00	100,00	664.595.056,00	99,69	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang mendapatkan gaji	23 orang	576.700.000,00	100,00	545.039.000,00	94,51	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		283.392.000,00	100,00	282.188.500,00	99,58	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala	13 Unit	180.372.000,00	100,00	179.450.500,00	99,49	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor	12 kali	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	94.020.000,00	100,00	93.738.000,00	99,70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		227.626.900,00	100,00	227.196.000,00	99,81	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian, Khusus dan Hari-Hari Tertentu Aparatur	60 Pcs	67.680.000,00	100,00	67.410.000,00	99,60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Tunjangan Kinerja Aparatur	3 bulan	159.946.900,00	100,00	159.786.000,00	99,90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70.050.000,00	100,00	70.046.400,00	99,99	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat yang di ikuti	9 kali	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional	Peningkatan Kinerja Organisasi Secara Berkesinambungan Bagi Jabatan Fungsional	28 orang	25.050.000,00	100,00	25.046.400,00	99,99	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)		55.480.000,00	100,00	47.951.004,00	86,43	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	10 Laporan	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	10 Laporan	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang disusun	10 Buku	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Review Renstra SKPD	Hasil Evaluasi Tim Ahli sebagai bahan Review Renstra	1 Dokumen	53.230.000,00	100,00	45.701.004,00	85,86	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		31.450.000,00	100,00	31.447.170,00	99,99	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.997.170,00	99,99	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari Kebangkitan Nasional	1 Kali	6.450.000,00	100,00	6.450.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi bidang TIK		885.785.000,00	100,00	865.636.350,00	97,73	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Diklat yang di ikuti	5 kali	35.000.000,00	100,00	32.850.000,00	93,86	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Publik	1 Tahun	80.207.500,00	100,00	78.728.750,00	98,16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Aparat masing-masing OPD yang Memahami UU KIP dan Melaksanakan Ketentuan Yang Ada	120 orang	23.577.500,00	100,00	22.597.500,00	95,84	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	200 orang	71.460.000,00	100,00	63.297.100,00	88,58	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pengelolaan Media Center	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Jurnalistik dan Fotografi	100 orang	234.400.000,00	100,00	231.335.000,00	98,69	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Kemitraan dengan Media Massa	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Kota Bontang	12 Bulan	441.140.000,00	100,00	436.828.000,00	99,02	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi		2.725.817.100,00	100,00	2.632.708.420,00	96,58	
	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center)	12 Bulan	1.321.326.600,00	100,00	1.321.326.600,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pelaksanaan e-Procurement	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Aplikasi LPSE	600 orang	66.389.500,00	100,00	55.107.500,00	83,01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pengembangan e-Government	Terfasilitasinya Kegiatan Dewan IT Kota Bontang	12 Bulan	406.720.000,00	100,00	348.037.900,00	85,57	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpeliharanya jaringan infrastruktur	12 bulan	288.213.000,00	100,00	287.372.900,00	99,71	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Terkelolanya Domain Kota Bontang	12 Bulan	74.953.000,00	100,00	70.926.520,00	94,63	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Tersedianya Peralatan Jaringan Komputer	6 Jenis	200.000.000,00	100,00	199.507.900,00	99,75	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)	Tersedianya Hasil Audit Keamanan Informasi	1 Dokumen	41.970.000,00	100,00	33.312.500,00	79,37	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pemeliharaan Data Center	Terpeliharanya Peralatan di Data Center Kota Bontang	7 Jenis	174.780.000,00	100,00	172.651.800,00	98,78	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pengembangan Versi Sistem	Terpeliharanya sistem informasi/software	2 Jenis	116.020.000,00	100,00	115.169.800,00	99,27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Pelaksanaan Self Assesment RKCI (Rating Kota Cerdas Indonesia)	Laporah hasil self assesment RKCI	20 Buku	35.445.000,00	100,00	29.295.000,00	82,65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keterbukaan informasi publik		174.220.000,00	100,00	162.611.750,00	93,34	
	Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik	Terpublikasinya kebijakan Pemerintah kepada masyarakat melalui media elektronik (Radio Praja FM)	126 kali	101.700.000,00	100,00	92.025.250,00	90,49	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak	Terselenggaranya Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak	600 eks	72.520.000,00	100,00	70.586.500,00	97,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpublikasinya informasi melalui mass media		3.880.335.000,00	97,91	3.794.526.520,00	97,79	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah media	80 Dokumen	3.880.335.000,00	97,91	3.794.526.520,00	97,79	Sekretariat Daerah
10 Program; 43 Kegiatan				10.158.097.000,00	99,20	9.897.704.065,00	97,44	

A.4.17 URUSAN KOPERASI

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		5.284.192.200,00	99,94	5.064.928.734,00	95,85	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	51.200.000,00	100,00	26.867.252,00	52,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin	38 Kendaraan	23.900.000,00	100,00	11.559.000,00	48,36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 Jenis	136.783.200,00	100,00	134.758.200,00	98,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	3 Jenis	13.000.000,00	100,00	13.000.000,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	92.380.000,00	100,00	92.027.500,00	99,62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	15 Jenis	12.149.000,00	100,00	12.149.000,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	12 Bulan	76.470.000,00	100,00	76.470.000,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Dinas yang Dilakukan Aparatur	12 Bulan	1.260.910.000,00	99,73	1.242.373.233,00	98,53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	144 orang	3.617.400.000,00	100,00	3.455.724.549,00	95,53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		209.970.000,00	100,00	208.996.900,00	99,54	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	129.700.000,00	100,00	129.497.400,00	99,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	80.270.000,00	100,00	79.499.500,00	99,04	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		323.977.500,00	89,21	289.024.500,00	89,21	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	100 %	323.977.500,00	89,21	289.024.500,00	89,21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		155.186.000,00	87,13	112.584.400,00	72,55	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Dilakukan Aparatur	9 org	155.186.000,00	87,13	112.584.400,00	72,55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		76.020.000,00	100,00	75.520.000,00	99,34	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Media Publikasi	1 Paket	51.020.000,00	100,00	50.520.000,00	99,02	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
6	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Terlaksananya fasilitasi sosialisasi IUMK bagi pelaku usaha mikro		206.113.500,00	100,00	205.713.500,00	99,81	
	Sosialisasi IUMK	Jumlah Peserta Sosialisasi IUMK dan Jumlah Alat Pendukung Pendataan KUKM	500 Pelaku usaha	56.113.500,00	100,00	56.033.500,00	99,86	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyusunan Kajian Penyertaan Modal Dana Bergulir	Jumlah Dokumen Kajian Penyertaan Modal Dana Bergulir	1 Dokumen	150.000.000,00	100,00	149.680.000,00	99,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya wawasan SDM pelaku UKM dalam pengembangan usaha		70.772.000,00	100,00	70.772.000,00	100,00	
	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Wirausaha Baru	30 Orang	70.772.000,00	100,00	70.772.000,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Berkurangnya tunggakan pokok dan bunga pada pitang dana bergulir 10 % per tahun		163.755.600,00	100,00	163.002.000,00	99,54	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir	1 Dokumen	63.859.600,00	100,00	63.798.000,00	99,90	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Dana Bergulir	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Modal	1400 Pelaku usaha	44.876.000,00	100,00	44.456.000,00	99,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Fasilitasi Pengadaan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Tersedianya outlet Produksi Usaha Mkro Kecil disetiap Toko Modern	1 outlet	55.020.000,00	100,00	54.748.000,00	99,51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Mengukur dan Menganalisa tingkat capaian kinerja usaha simpan pinjam oleh koperasi		45.554.800,00	100,00	38.434.800,00	84,37	
	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dilakukan Penilaian	40 KSP/USP	4.818.200,00	100,00	4.328.200,00	89,83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Revitalisasi Koperasi	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Koperasi Dalam Perbaikan Kinerja Koperasi	30 koperasi	25.330.000,00	100,00	24.610.000,00	97,16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi	Teridentifikasinya Permasalahan dan Kondisi Usaha Koperasi di Kota Bontang	10 Koperasi	15.406.600,00	100,00	9.496.600,00	61,64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
10	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Kapasitas Industri Kecil dan Menengah		775.365.000,00	95,00	701.161.635,00	90,43	
	Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM	Terlatihnya Pelaku Usaha Dalam Peningkatan SDM	100 Pelaku usaha	250.000.000,00	87,62	198.875.335,00	79,55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Terpenuhinya Pameran, Rakernas, Pelatihan 2 kali, Bimbel 2 kali dan Pengadaan peralatan	7 Kegiatan	196.500.000,00	100,00	192.346.300,00	97,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM	Perlindungan sertifikasi halal bagi produk IKM	10 IKM	61.000.000,00	100,00	47.600.000,00	78,03	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM)	Jumlah Data IKM Pada Setiap Kelurahan	15 Kelurahan	49.675.000,00	100,00	49.675.000,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pembuatan Buku Profil IKM	Jumlah Dokumen	500 buku	157.270.000,00	95,04	151.970.000,00	96,63	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran IKM	Jumlah Sarana Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran IKM	2 unit	60.920.000,00	100,00	60.695.000,00	99,63	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
11	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Meningkatnya Kapasitas Industri Kecil dan Menengah		355.040.000,00	76,00	184.620.000,00	52,00	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan	Terfasilitasinya desain kemasan bag pelaku IKM	2 unit	188.905.000,00	54,89	18.485.000,00	9,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumput Laut	Terdidikna pelaku usaha dalam pengembangan industri rumput laut	20 Pelaku usaha	166.135.000,00	100,00	166.135.000,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
11 Program; 32 Kegiatan				7.665.946.600,00	97,62	7.114.758.469,00	92,81	

A.4.18 URUSAN PENANAMAN MODAL

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.462.346.160,00	100,00	2.403.826.813,00	97,62	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	816 lembar	5.498.400,00	100,00	5.129.500,00	93,29	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	73.500.000,00	100,00	58.892.816,00	80,13	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	28 unit	15.700.000,00	100,00	15.323.400,00	97,60	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan Tempat Kerja	1 tahun	131.703.000,00	100,00	130.014.350,00	98,72	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	314.921.600,00	100,00	299.707.640,00	95,17	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	3 unit	191.350.160,00	100,00	189.835.000,00	99,21	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Tamu	1 tahun	101.125.000,00	100,00	100.551.750,00	99,43	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi yang di hadiri	67 kali	1.037.224.000,00	100,00	1.037.171.357,00	99,99	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	24 orang	591.324.000,00	100,00	567.201.000,00	95,92	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		656.698.140,00	100,00	650.297.980,00	99,03	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	28 unit	311.396.000,00	100,00	310.637.000,00	99,76	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	 jenis	345.302.140,00	100,00	339.660.980,00	98,37	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		274.736.250,00	100,00	274.736.250,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	274.736.250,00	100,00	274.736.250,00	100,00	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		36.000.000,00	100,00	33.200.000,00	92,22	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	8 peserta	36.000.000,00	100,00	33.200.000,00	92,22	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		449.440.000,00	100,00	447.450.100,00	99,56	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival	2 Kegiatan	449.440.000,00	100,00	447.450.100,00	99,56	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan		296.602.500,00	100,00	275.710.000,00	92,96	
	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	296.602.500,00	100,00	275.710.000,00	92,96	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pengendalian investasi		331.708.500,00	100,00	298.752.700,00	90,06	
	Pengembangan Promosi Potensi Daerah	Partisipasi pada Indonesia City Expo 2018 dan Kaltim Fair 2018	2 Pameran	300.382.500,00	100,00	276.126.550,00	91,92	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Dokumen hasil sosialisasi	1 buku	31.326.000,00	100,00	22.626.150,00	72,23	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Peningkatan PAD dari retribusi perizinan 5% per tahun		34.416.000,00	100,00	19.474.600,00	56,59	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Dokumen hasil sosialisasi	1 buku	34.416.000,00	100,00	19.474.600,00	56,59	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8 Program; 18 Kegiatan				4.541.947.550,00	100,00	4.403.448.443,00	96,95	

A.4.19 KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		3.986.591.900,00	99,99	3.584.295.288,00	89,91	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket yang terkirim	5 paket	7.150.000,00	96,50	6.900.000,00	96,50	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air, telepon, Internet Dan TV Kabel	1 Tahun	582.835.000,00	100,00	351.753.252,00	60,35	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran STNK kendaraan operasional	19 unit	13.450.000,00	100,00	7.876.740,00	58,56	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	46 jenis	47.919.200,00	100,00	46.694.500,00	97,44	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan publikasi	7 Jenis	265.420.000,00	100,00	256.733.500,00	96,73	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kelengkapan peralatan pendukung pekerjaan	10 jenis	732.611.500,00	100,00	723.874.060,00	98,81	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar	1 jenis	10.800.000,00	100,00	7.075.000,00	65,51	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik	20 Jenis	35.610.000,00	100,00	31.680.000,00	88,96	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk pegawai, tamu, rapat dan Kerjabakti	1 Tahun	83.225.000,00	100,00	79.271.000,00	95,25	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi, konsultasi baik dalam maupun luar daerah	1 Tahun	959.356.000,00	100,00	912.520.421,00	95,12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya tenaga administrasi/teknis perkantoran / Tenaga Non PNS	1 Tahun	1.248.215.200,00	100,00	1.159.916.815,00	92,93	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		691.696.800,00	100,00	671.191.650,00	97,04	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Gedung	435.256.000,00	100,00	430.852.250,00	98,99	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional dinas sejumlah 7 unit mobil dan 12 unit motor	1 Tahun	207.440.800,00	100,00	204.965.600,00	98,81	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	1 Tahun	49.000.000,00	100,00	35.373.800,00	72,19	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		207.880.500,00	100,00	207.880.500,00	100,00	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian dinas bagi Aparatur	100 %	31.575.000,00	100,00	31.575.000,00	100,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	176.305.500,00	100,00	176.305.500,00	100,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	50 orang	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	21.975.000,00	87,90	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	21.975.000,00	87,90	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkat jumlah organisasi kepemudaan		1.816.425.000,00	100,00	1.793.377.150,00	98,73	
	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya Hari Sumpah Pemuda	3 Kegiatan	115.400.000,00	100,00	114.638.500,00	99,34	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Terlaksananya Kegiatan pelatihan dan pembinaan Anggota Paskibraka Kota Bontang	41 Orang	741.520.000,00	100,00	730.010.200,00	98,45	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Jumlah peserta Yang mengikuti seleksi PPAP	5 orang	42.200.000,00	100,00	36.000.000,00	85,31	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	Terlaksananya Studi orientasi keluar daerah bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang	76 Orang	387.600.000,00	100,00	387.600.000,00	100,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Jumlah pelajar kota bontang yang mengikuti seleksi paskibraka	1000 orang	529.705.000,00	100,00	525.128.450,00	99,14	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatnya prestasi olahraga		6.108.336.000,00	100,00	5.502.183.525,00	90,08	
	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	pelaksanaan PORPROV	1 Kegiatan	4.052.360.000,00	100,00	3.593.137.500,00	88,67	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Peringatan Hari Olahraga Nasional	Terbinanya Semangat Jiwa Untuk Berolahraga Di Kota Bontang	1 Kegiatan	771.197.000,00	100,00	663.287.078,00	86,01	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) Kalimantan Timur	Jumlah kontingen kota bontang yang mengikuti POPPROV kalimantan timur di samarinda	200 orang	1.057.175.000,00	100,00	1.019.559.847,00	96,44	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Terselenggaranya kompetisi sepak bola usia dini U12 dan U14 Tingkat kota	2 Turnamen	227.604.000,00	100,00	226.199.100,00	99,38	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Porsentase tercapainya pemeliharaan sportcenter		5.893.428.000,00	91,52	5.292.902.520,00	89,81	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 Bangunan	370.630.000,00	100,00	362.404.800,00	97,78	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Sarana dan prasarana Olahraga yang terpelihara dan terbangun	4 Bangunan	2.193.788.000,00	77,21	1.620.965.961,00	73,89	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Jumlah bangunan yang tersedia	1 Bangunan	245.120.000,00	100,00	241.307.800,00	98,44	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Olahraga	80 %	228.400.000,00	100,00	221.069.000,00	96,79	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Jumlah Bangunan yang terpelihara	1 Bangunan	135.020.000,00	100,00	132.422.400,00	98,08	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pembangunan Lapangan Sepakbola Kelurahan Berbas Pantai	Sarana Olahraga Yang terbangun	1 Lokasi	449.880.000,00	100,00	448.354.040,00	99,66	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Revitalisasi Stadion Bessai Berinta	Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga	1 Lokasi	2.270.590.000,00	100,00	2.266.378.519,00	99,81	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
8 Program; 34 Kegiatan				18.789.358.200,00	97,02	17.073.805.633,00	90,87	

A.4.20 URUSAN STATISTIK

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK	Ketersediaan Data dan Informasi Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		277.425.000,00	100,00	277.160.280,00	99,90	
	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	Tersedianya data/informasi/ststistik daerah	1 dokumen	84.975.000,00	100,00	84.975.000,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang	Tersedianya data/informasi/ststistik daerah	1 dokumen	84.975.000,00	100,00	84.816.390,00	99,81	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang	Tersedianya data/informasi/ststistik daerah	1 dokumen	107.475.000,00	100,00	107.368.890,00	99,90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1 Pogram; 3 Kegiatan				277.425.000,00	100,00	277.160.280,00	99,90	

A.4.21 URUSAN KEBUDAYAAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya Kota Bontang		557.540.000,00	100,00	529.337.071,00	94,94	
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya Erau Guntung dan Pesta Laut Bontang	2 Kegiatan	338.540.000,00	100,00	311.993.500,00	92,16	Dinas Pendidikan
	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya	Bangunan yang direnovasi/direhab	1 bangunan	219.000.000,00	100,00	217.343.571,00	99,24	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terpromosinya seni dan budaya Kota Bontang		1.174.810.000,00	100,00	430.377.800,00	36,63	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kesenian Tari	1 Kegiatan	287.860.000,00	100,00	212.007.800,00	73,65	Dinas Pendidikan
	Festival Seni Budaya	Terselenggaranya even Festival Seni Budaya Pelajar, Seni Drama Kolosal, dan even akhir tahun Kota Bontang	3 Kegiatan	886.950.000,00	100,00	218.370.000,00	24,62	Dinas Pendidikan
2 Program; 4 Kegiatan				1.732.350.000,00	100,00	959.714.871,00	55,40	

A.4.22 URUSAN PERPUSTAKAAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.311.695.500,00	100,00	2.246.388.802,00	97,17	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pelayanan jasa kantor selama satu tahun	12 bulan	313.490.000,00	100,00	289.138.219,00	92,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya perizinan kendaraan dinas/operasional (2 unit roda 6, 6 unit roda 4, 5 unit roda 2)	12 bulan	18.500.000,00	100,00	7.248.300,00	39,18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya data petugas kebersihan kantor (6 orang) dan petugas keamanan kantor (3 orang)	12 bulan (6 org CS, 3 org Security)	184.740.000,00	100,00	182.904.000,00	99,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam setahun	84 jenis	61.994.000,00	100,00	61.662.100,00	99,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam setahun	12 bulan (15 jenis)	40.540.500,00	100,00	29.379.120,00	72,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam setahun	26 jenis	367.370.000,00	100,00	365.066.000,00	99,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya 8 bahan bacaan perpustakaan selama setahun	12 bulan (8 bahan bacaan)	27.972.000,00	100,00	26.598.500,00	95,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama setahun	12 bulan (34 jenis)	16.481.500,00	100,00	16.034.650,00	97,29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat selama setahun	2 paket (tamu dan rapat) / 955 box	27.737.500,00	100,00	27.702.500,00	99,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun	2 jenis (Dalam daerah dan luar daerah) / 49 kali	370.272.000,00	100,00	363.413.413,00	98,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran selama setahun	37 orang Non PNS	882.598.000,00	100,00	877.242.000,00	99,39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		226.531.600,00	97,35	196.034.500,00	86,54	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung dan taman kantor	22 jenis	36.140.000,00	100,00	35.605.000,00	98,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor selama setahun (5 unit mobil dan 4 unit motor)	12 bulan (2 jenis)	124.841.600,00	100,00	124.245.000,00	99,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor dalam satu tahun	9 jenis belanja pemeliharaan	65.550.000,00	90,85	36.184.500,00	55,20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		159.637.500,00	100,00	137.105.250,00	85,89	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Tersedianya daftar penerima penghasilan berbasis kinerja (27 orang)	12 bulan	159.637.500,00	100,00	137.105.250,00	85,89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.987.500,00	99,95	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 event	25.000.000,00	100,00	24.987.500,00	99,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka		1.046.824.000,00	100,00	1.005.384.018,00	96,04	
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Meningkatnya jumlah kunjungan dan anggota perpustakaan	228.982 orang	337.300.000,00	100,00	307.296.700,00	91,10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya bahan pustaka di perpustakaan daerah	10 paket bahan bacaan	90.020.000,00	100,00	88.708.260,00	98,54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan	Tersedianya rak buku dan bahan pustaka untuk 2 RT	2 RT	30.020.000,00	100,00	28.164.428,00	93,82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan	48 jenis	589.484.000,00	100,00	581.214.630,00	98,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5 Program; 20 Kegiatan				3.769.688.600,00	99,84	3.609.900.070,00	95,76	

A.4.23 URUSAN KEARSIPAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Database arsip SKPD yang tersedia		33.470.000,00	100,00	26.295.000,00	78,56	
	Sosialisasi Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Pemahaman pokok-pokok kearsipan kepada peserta sosialisasi kearsipan sebanyak 27 OPD (70 orang peserta)	27 PD	33.470.000,00	100,00	26.295.000,00	78,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		133.126.000,00	100,00	124.545.000,00	93,55	
	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	2 jenis (300 box arsip dan konsultasi perencanaan pembangunan depo arsip)	124.576.000,00	100,00	115.995.000,00	93,11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Tertatanya dokumen arsip daerah sesuai dengan tata kearsipan	29 OPD	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Terduplikasinya arsip penting ke dalam media elektromagnetik	100 keping DVD	5.450.000,00	100,00	5.450.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Pemeliharaan arsip daerah		39.497.000,00	22,22	8.775.000,00	22,22	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan arsip daerah	100 %	30.722.000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah dokumen	3 buku	8.775.000,00	100,00	8.775.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3 Program; 6 Kegiatan				206.093.000,00	85,09	159.615.000,00	77,45	

A.4.24 URUSAN PENUNJANG

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		28.929.780.985,00	100,00	26.326.169.368,00	91,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia materai 6000 dan 3000	2000 lembar	9.999.000,00	100,00	9.900.000,00	99,01	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	5 jenis	4.960.578.400,00	100,00	4.565.773.121,00	92,04	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	90 unit	156.683.900,00	100,00	126.773.600,00	80,91	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	86 orang	7.389.088.000,00	100,00	6.298.254.400,00	85,24	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	100 jenis	178.466.460,00	100,00	176.685.720,00	99,00	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	30 jenis	216.910.750,00	100,00	213.160.000,00	98,27	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	40 jenis	257.044.000,00	100,00	231.283.270,00	89,98	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12575 eksamplar	99.904.000,00	100,00	90.350.500,00	90,44	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	4 jenis	50.000.000,00	100,00	32.830.000,00	65,66	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	2.791.355.000,00	100,00	2.576.495.840,00	92,30	Sekretariat Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	593 kali	5.140.484.275,00	100,00	4.995.025.435,00	97,17	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai dan tenaga administrasi/ tekhnis perkantoran	106 orang	2.830.350.000,00	100,00	2.635.893.500,00	93,13	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Transportasi dan akomodasi tamu pemerintah kota bontang	65 org	348.920.000,00	100,00	320.788.982,00	91,94	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Terlaksananya pengamanan kantor baru Walikota Bontang dan Gedung Taman	44 org	4.499.997.200,00	100,00	4.052.955.000,00	90,07	Sekretariat Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		28.832.964.500,00	97,74	25.169.128.525,00	87,29	
	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil yang disediakan	3 unit	3.138.825.000,00	100,00	2.996.145.000,00	95,45	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/ operasional	21 Unit	3.891.375.000,00	100,00	3.266.995.000,00	83,95	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Meubelair	Meningkatnya kecukupan dan kualitas meubelair kantor walikota	50 unit	4.493.723.600,00	100,00	4.341.917.106,00	96,62	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya gudang penyimpanan, mess pemkot, desk pilkada, dan rumah jabatan/dinas	4 unit	320.080.000,00	100,00	320.080.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 unit	1.743.517.000,00	100,00	1.689.128.886,00	96,88	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 gedung	2.275.520.000,00	100,00	2.046.367.956,00	89,93	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH Secara Rutin/Berkala	2 unit	236.140.000,00	100,00	231.233.000,00	97,92	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	225 jenis	1.655.000.000,00	100,00	1.168.290.540,00	70,59	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	2 unit	330.102.000,00	100,00	186.021.700,00	56,35	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantoryang dipelihara secara rutin	2 jenis	175.000.000,00	100,00	171.837.950,00	98,19	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dipelihara	3 jenis	116.080.000,00	100,00	57.375.100,00	49,43	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/ berkala	27 jenis	1.648.775.000,00	100,00	1.442.762.305,00	87,51	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan sewa peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	533.400.000,00	96,25	361.127.000,00	67,70	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Sarana umum yang dipelihara	6 unit	628.830.000,00	100,00	623.734.694,00	99,19	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	59 jenis	2.259.954.500,00	100,00	2.150.701.185,00	95,17	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Gorden/Tirai Kantor	Tersedianya gorden/ tirai kantor	3 Ruang	226.080.000,00	100,00	224.099.500,00	99,12	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya bahan bakar dan pelumas genset/ kendaraan dinas/ operasional/jabatan	253000 liter	1.335.000.000,00	100,00	1.306.968.500,00	97,90	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	3.594.382.400,00	82,43	2.353.699.603,00	65,48	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	Pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan	1 unit	231.180.000,00	100,00	230.643.500,00	99,77	Sekretariat Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		801.165.000,00	100,00	676.301.500,00	84,41	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian	1 paket	120.000.000,00	100,00	113.410.000,00	94,51	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	681.165.000,00	100,00	562.891.500,00	82,64	Sekretariat Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		291.200.000,00	100,00	179.209.460,00	61,54	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	36 orang	250.000.000,00	100,00	138.009.460,00	55,20	Sekretariat Daerah
	Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang	29 dokumen	21.800.000,00	100,00	21.800.000,00	100,00	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Evaluasi Tupoksi	Jumlah Raperkada Tentang Evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	29 Raperkada	19.400.000,00	100,00	19.400.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1.090.382.500,00	100,00	1.059.025.824,00	97,12	
	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Jumlah barang yang disediakan	3 jenis media	954.357.500,00	100,00	934.500.824,00	97,92	Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bontang	Laporan Hibah dan Bansos	27 Dokumen	14.975.000,00	100,00	7.975.000,00	53,26	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	121.050.000,00	100,00	116.550.000,00	96,28	Sekretariat Daerah
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.750.000,00	99,00	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 paket	25.000.000,00	100,00	24.750.000,00	99,00	Sekretariat Daerah
7	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan		25.000.000,00	100,00	24.750.000,00	99,00	
	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan	Jumlah aplikasi SIM kearsipan	1 aplikai	25.000.000,00	100,00	24.750.000,00	99,00	Sekretariat Daerah
8	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	TERwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah		43.300.000,00	100,00	39.940.000,00	92,24	
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Pemkot /swasta/KL dan pihak ke tiga lainnya	10 MOU	43.300.000,00	100,00	39.940.000,00	92,24	Sekretariat Daerah
9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Hubungan Komunikasi yang Sinergis antara Pemerintah dengan masyarakat		2.382.598.000,00	100,00	1.878.311.301,00	78,83	
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial	4 kali	193.540.000,00	100,00	188.256.000,00	97,27	Sekretariat Daerah
	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Stakeholder	Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 rakor	279.058.000,00	100,00	175.905.679,00	63,04	Sekretariat Daerah
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	145 koordinasi	1.910.000.000,00	100,00	1.514.149.622,00	79,27	Sekretariat Daerah
10	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Kepesertaan pada pelaksanaan Rakerwil dan Rakernas APEKSI		477.700.000,00	100,00	384.487.750,00	80,49	
	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	Aktifnya peran pemerintah Kota Bontang dalam Apeksi	4 kali	477.700.000,00	100,00	384.487.750,00	80,49	Sekretariat Daerah
11	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya data dan informasi peraturan		1.462.487.800,00	100,00	1.213.581.713,00	82,98	
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasikan	146 buku	141.282.800,00	100,00	137.919.280,00	97,62	Sekretariat Daerah
	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengatur	42 Raperda & Raperwali	207.060.000,00	100,00	206.734.321,00	99,84	Sekretariat Daerah
	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah rakor dan perkara yang ditangani	3 perkara	983.585.000,00	100,00	750.978.462,00	76,35	Sekretariat Daerah
	Penyuluhan Hukum dan HAM	kegiatan sosialisasi	1 Sosialisasi	68.160.000,00	100,00	56.336.900,00	82,65	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan & Evaluasi Peraturan serta Pelimpahan Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan	Revisi SK Walikota	1 dokumen	12.000.000,00	100,00	11.412.750,00	95,11	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah PROPEMPERDA TAHUN 2019	1 dokumen	13.800.000,00	100,00	13.600.000,00	98,55	Sekretariat Daerah
	Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan	Penyempurnaan dokumen ketatalaksanaan	1 Dokumen	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	Jumlah Raperda dan Raperkada Restrukturisasi Perangkat Daerah	4 Raperda &Raperkada	19.400.000,00	100,00	19.400.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah Pedoman Ketatalaksanaan	1 Perwali	12.200.000,00	100,00	12.200.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
12	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Penyusunan LPPD Tahun 2018 Terhadap EPPD 2017		100.665.000,00	100,00	86.367.350,00	85,80	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2018 dan Peserta Workshop Penyusunan LPPD	1 dokumen	88.665.000,00	100,00	74.588.000,00	84,12	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	12.000.000,00	100,00	11.779.350,00	98,16	Sekretariat Daerah
13	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Penyusunan profil dan monografiserta Simdeshan		17.125.000,00	100,00	16.886.650,00	98,61	
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Laporan Monografi, dan Simdeshan	2 Dokumen	17.125.000,00	100,00	16.886.650,00	98,61	Sekretariat Daerah
14	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Berkembangnya usaha Mikro Kecil dan Menengah		16.904.790.000,00	96,17	15.734.724.846,00	93,08	
	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah Mesjid yang dikunjungi	15 mesjid	248.985.000,00	100,00	217.132.000,00	87,21	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah Peserta MTQ pelajar dan MTQ tingkat Kota	345 org	2.974.920.000,00	100,00	2.847.329.448,00	95,71	Sekretariat Daerah
	Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pembina Tilawatil Quran	50 org	413.550.000,00	100,00	391.575.168,00	94,69	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	Jumlah ibadah haji	145 jemaah	150.775.000,00	100,00	131.381.500,00	87,14	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mubaligh	205 orang	1.230.000.000,00	100,00	1.230.000.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Jumlah guru ngaji	980 org	6.052.357.500,00	100,00	6.011.142.090,00	99,32	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah Guru Sekolah Minggu - Pendeta - Paspawari - sirkumsisi	641 orang	1.846.325.000,00	100,00	1.802.901.320,00	97,65	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	Jumlah Imam Mesjid/Musholla dan Penjaga Mesjid	338 orang	2.090.172.500,00	100,00	2.059.410.140,00	98,53	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25 orang	227.665.000,00	100,00	215.757.960,00	94,77	Sekretariat Daerah
	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Jumlah kegiatan Perayaan Besar Umat Kristiani	2 kegiatan	191.085.000,00	100,00	143.640.680,00	75,17	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah Perayaan Hari Besar Islam di Kota Bontang	7 kegiatan	682.625.000,00	100,00	648.774.580,00	95,04	Sekretariat Daerah
	Intensitas Komunikasi Dan Ketertiban Umat Beragama	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan serta pelayanan kegiatan BAZ	345 orang	796.330.000,00	18,79	35.679.960,00	4,48	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan		231.207.500,00	100,00	184.518.525,00	79,81	
	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Profil rupa bumi Kota Bontang	1 kali	75.000.000,00	100,00	67.591.900,00	90,12	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	1 dokumen	47.550.000,00	100,00	36.645.000,00	77,07	Sekretariat Daerah
	Pemekaran Dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan	Dokumen kajian	1 dokumen	4.970.000,00	100,00	3.465.000,00	69,72	Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	Terlaksananya grat pembina PATEN	2 kegiatan	19.125.000,00	100,00	2.598.750,00	13,59	Sekretariat Daerah
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya rakor penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	19.962.500,00	100,00	19.521.875,00	97,79	Sekretariat Daerah
	Pemilihan Camat dan Lurah Berprestasi	Jumlah Camat dan Lurah Berprestasi	3 kecamatan	44.850.000,00	100,00	37.946.000,00	84,61	Sekretariat Daerah
	Persiapan dan Monitoring Pemilu Gubernur 2018	Pelaksanaan monitoring pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018	1 kegiatan	4.750.000,00	100,00	1.750.000,00	36,84	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan perUU lainnya	1 kegiatan	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
16	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Bahan bahan komoditas yang mengalami inflasi		606.361.250,00	100,00	501.941.530,00	82,78	
	Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Kajian kerjasama antar lembaga bidang perekonomian	1 Dokumen	4.574.650,00	100,00	3.414.000,00	74,63	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	Terlaksananya penyusunan kajian peningkatan PAD Kota Bontang	1 dokumen	161.116.600,00	100,00	126.021.600,00	78,22	Sekretariat Daerah
	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah)	Terlaksananya pengendalian inflasi daerah Kota Bontang	1 dokumen	20.215.000,00	100,00	17.181.750,00	85,00	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	100 %	420.455.000,00	100,00	355.324.180,00	84,51	Sekretariat Daerah
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Cakupan pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		3.136.180.000,00	100,00	2.939.882.430,00	93,74	
	Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat	Tenaga Administrasi dan Komisiioner	6 orang	183.000.000,00	100,00	180.600.000,00	98,69	Sekretariat Daerah
	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Data verifikasi pemohon hibah/bansos	27 dokumen	39.975.000,00	100,00	36.778.680,00	92,00	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah Asrama mahasiswa yang di fasilitasi	13 asrama	1.335.105.000,00	100,00	1.158.045.500,00	86,74	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	700 orang	1.500.000.000,00	100,00	1.497.000.000,00	99,80	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	Jumlah sekolah yang terbina	40 Sekolah	78.100.000,00	100,00	67.458.250,00	86,37	Sekretariat Daerah
18	PROGRAM PENGUATAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Peringatan HUT ke 19 Kota Bontang		1.104.490.000,00	100,00	1.043.152.700,00	94,45	
	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	HUT Kota Bontang	1 kegiatan	354.540.000,00	100,00	340.082.100,00	95,92	Sekretariat Daerah
	Peryaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah	Pelaksanaan HUT Propinsi Kaltim dan HUT Otda	2 kegiatan	85.150.000,00	100,00	76.130.000,00	89,41	Sekretariat Daerah
	Perayaan HUT RI	Pelaksanaan peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia	1 kali	664.800.000,00	100,00	626.940.600,00	94,31	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp0,00		358.277.000,00	98,93	329.537.941,00	91,98	
	Fasilitas Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Tersedianya fasilitas mess Kota Bontang	1 mess	358.277.000,00	98,93	329.537.941,00	91,98	Sekretariat Daerah
20	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pembinaan Konsultansi dan Jasa Lainnya		648.440.000,00	100,00	590.603.969,00	91,08	
	Pembinaan Pengadaan Barang	Pembinaan Pengadaan Barang	1 dokumen	94.500.000,00	100,00	90.721.219,00	96,00	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Pengadaan Konstruksi	Pembinaan pengadaan konstruksi	1 dokumen	153.000.000,00	100,00	132.419.552,00	86,55	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Pengadaan Konsultansi dan Jasa Lainnya	Pembinaan Pengadaan Konsultansi dan Jasa Lainnya	1 dokumen	94.500.000,00	100,00	77.615.940,00	82,13	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota Bontang	Penunjang Fasilitas ULP	1 dokumen	306.440.000,00	100,00	289.847.258,00	94,59	Sekretariat Daerah
21	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		16.134.712.000,00	99,41	15.060.913.078,00	93,34	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	6120 Lembar	18.720.000,00	100,00	18.720.000,00	100,00	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1.073.900.000,00	94,90	831.650.484,00	77,44	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	42 unit	88.000.000,00	100,00	33.349.500,00	37,90	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1.457.359.500,00	100,00	1.416.153.698,00	97,17	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	2 jenis	280.093.500,00	100,00	275.749.050,00	98,45	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan	5 paket	1.039.250.000,00	100,00	1.025.342.500,00	98,66	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan yang disediakan	28 jenis	2.843.587.500,00	98,59	2.695.846.540,00	94,80	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis barang yang disediakan	2 jenis	62.501.500,00	100,00	61.923.100,00	99,07	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Media	1.927.800.000,00	100,00	1.873.819.500,00	97,20	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis	231.455.000,00	100,00	205.783.250,00	88,91	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum Tamu	1 paket	496.040.000,00	100,00	354.052.500,00	71,38	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	614 Kali (339 Luar ; 275 dalam)	4.046.505.000,00	100,00	3.812.155.956,00	94,21	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga administrasi yang siap kerja	101 Orang	2.569.500.000,00	100,00	2.456.367.000,00	95,60	Sekretariat DPRD
22	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		11.767.305.000,00	99,31	9.181.260.681,00	78,02	
	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD yang disediakan	1 Unit	1.502.975.000,00	100,00	1.492.555.000,00	99,31	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	3 unit	287.728.000,00	100,00	266.783.500,00	92,72	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	41 unit	757.512.000,00	100,00	667.125.400,00	88,07	Sekretariat DPRD

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan BBM genset	12 Bulan	629.285.000,00	87,80	454.193.200,00	72,18	Sekretariat DPRD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	1 Unit	4.704.295.000,00	99,91	2.793.714.000,00	59,39	Sekretariat DPRD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	12 Bulan	3.585.840.000,00	100,00	3.221.694.581,00	89,84	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	299.670.000,00	100,00	285.195.000,00	95,17	Sekretariat DPRD
23	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		340.607.500,00	100,00	317.816.750,00	93,31	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian	130 pasang	170.080.000,00	100,00	163.580.000,00	96,18	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	170.527.500,00	100,00	154.236.750,00	90,45	Sekretariat DPRD
24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		210.360.000,00	74,87	102.350.000,00	48,65	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan formal	32 Kali	210.360.000,00	74,87	102.350.000,00	48,65	Sekretariat DPRD
25	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		24.987.500,00	100,00	24.987.500,00	100,00	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	24.987.500,00	100,00	24.987.500,00	100,00	Sekretariat DPRD
26	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah		22.070.885.500,00	97,37	18.013.130.795,00	81,61	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	13 Raperda	679.030.000,00	92,09	286.020.000,00	42,12	Sekretariat DPRD
	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Rapat dengar pendapat dan koordinasi	150 Rapat	316.080.000,00	100,00	316.080.000,00	100,00	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	154 Rapat	1.131.700.000,00	97,57	669.675.000,00	59,17	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Paripurna	Rapat-rapat Paripurna	36 Rapat	503.070.000,00	100,00	503.070.000,00	100,00	Sekretariat DPRD
	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses DPRD	3 Kali	2.421.140.000,00	100,00	2.230.058.750,00	92,11	Sekretariat DPRD
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	70 Kali	98.300.000,00	100,00	75.109.000,00	76,41	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan dan frekuensi pelatihan	25 Orang	400.420.000,00	20,17	79.920.000,00	19,96	Sekretariat DPRD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media publikasi	1 Media	174.760.000,00	72,53	37.960.000,00	21,72	Sekretariat DPRD
	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda inisiatif DPRD	3 Raperda	1.062.015.000,00	96,29	1.021.800.000,00	96,21	Sekretariat DPRD
	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Dokumen Hasil pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah	1 paket	253.970.000,00	67,10	170.420.000,00	67,10	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Hasil Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang	64.300.000,00	85,07	38.370.000,00	59,67	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Anggota DPRD	150 pasang	370.790.000,00	100,00	355.790.000,00	95,95	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Fraksi	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 Orang	390.420.000,00	100,00	390.420.000,00	100,00	Sekretariat DPRD
	Penyusunan Produk DPRD	Produk-produk DPRD	12 Bulan	144.808.000,00	100,00	120.808.000,00	83,43	Sekretariat DPRD

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, studi banding dan pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan	936 Kali (336 dalam ;600 luar)	13.796.105.000,00	100,00	11.609.715.045,00	84,15	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	Dokumen Rekomendasi Perda P2APBD	1 Perda	46.957.500,00	100,00	45.820.000,00	97,58	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	jumlah dokumen risalah pembahasan RAPBD	2 Dokumen	217.020.000,00	100,00	62.095.000,00	28,61	Sekretariat DPRD
27	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		606.375.400,00	100,00	589.415.068,00	97,20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang diselesaikan	21 unit	14.750.000,00	100,00	9.769.900,00	66,24	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bidang Inspektorat yang dilayani kebutuhan ATK	4 Bidang	61.659.500,00	100,00	58.393.700,00	94,70	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bidang Inspektorat yang dipenuhi kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	4 bidang	25.870.000,00	100,00	23.531.000,00	90,96	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bidang yang dilayani kebutuhan peralatan kantor sesuai standar	4 Bidang	29.230.000,00	100,00	29.191.850,00	99,87	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi tamu dan rapat yang dipenuhi	1 tahun	87.985.000,00	100,00	87.112.500,00	99,01	Inspektorat Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Bontang dan urusan internal perkantoran yang diikuti	10 IP	329.030.900,00	100,00	328.428.118,00	99,82	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah kebutuhan tenaga administrasi Non PNS yang dipenuhi	2 orang	57.850.000,00	100,00	52.988.000,00	91,60	Inspektorat Daerah
28	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		286.150.000,00	100,00	282.470.790,00	98,71	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin	21 unit	270.150.000,00	100,00	269.754.700,00	99,85	Inspektorat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan Bidang yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar	4 Bidang	16.000.000,00	100,00	12.716.090,00	79,48	Inspektorat Daerah
29	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		201.878.250,00	100,00	201.878.250,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	201.878.250,00	100,00	201.878.250,00	100,00	Inspektorat Daerah
30	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.523.400,00	98,09	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.523.400,00	98,09	Inspektorat Daerah
31	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Indeks RB Kota Bontang		1.033.195.000,00	100,00	1.020.337.666,00	98,76	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah penyelesaian pengawasan Teknis dan pengawasan Perangkat Daerah	138 obrik	814.000.000,00	100,00	807.859.666,00	99,25	Inspektorat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang	12 laporan	219.195.000,00	100,00	212.478.000,00	96,94	Inspektorat Daerah
32	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase jumlah pegawai inspektorat daerah yang mengikuti Diklat minimal 5 % dari waktu kerja setahun		680.200.000,00	100,00	527.923.744,00	77,61	
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang telah selesai mengikuti diklat penjenjangan	3 orang	680.200.000,00	100,00	527.923.744,00	77,61	Inspektorat Daerah
33	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat		30.400.000,00	100,00	30.380.000,00	99,93	
	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	30.400.000,00	100,00	30.380.000,00	99,93	Inspektorat Daerah
34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase penyelesaian penilaian angka kredit JF APIP secara tepat waktu		20.600.000,00	100,00	17.905.500,00	86,92	
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit JF APIP	18 JFAPIP	20.600.000,00	100,00	17.905.500,00	86,92	Inspektorat Daerah
35	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.981.209.270,00	100,00	1.924.575.432,00	97,14	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	22 unit	31.130.000,00	100,00	13.462.720,00	43,25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor; kelengkapan printer	36 Jenis	47.585.400,00	100,00	46.650.100,00	98,03	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	48.952.500,00	100,00	47.629.950,00	97,30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor	7 Jenis	141.020.000,00	100,00	137.137.000,00	97,25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat ,kegiatan dan tamu	12 bulan	104.482.500,00	100,00	104.272.500,00	99,80	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan	186 kali	1.325.441.870,00	100,00	1.297.732.162,00	97,91	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	11 Non PNS	282.597.000,00	100,00	277.691.000,00	98,26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		935.302.000,00	100,00	870.580.166,00	93,08	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan operasional	7 Unit	561.920.000,00	100,00	522.575.000,00	93,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	27 unit	358.382.000,00	100,00	333.205.166,00	92,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin peralatan kantor	1 peralatan	15.000.000,00	100,00	14.800.000,00	98,67	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
37	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		230.738.000,00	100,00	228.146.100,00	98,88	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian	52 pasang	34.520.000,00	100,00	31.928.100,00	92,49	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	196.218.000,00	100,00	196.218.000,00	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000,00	100,00	25.100.000,00	50,20	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	10 org	50.000.000,00	100,00	25.100.000,00	50,20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
39	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		85.000.000,00	100,00	73.900.000,00	86,94	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.000.000,00	96,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi di media massa	1 tahun	60.000.000,00	100,00	49.900.000,00	83,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
40	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	meningkatkan aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		383.365.200,00	100,00	352.873.845,00	92,05	
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Buku Database 8 Kelompok Data Informasi Pemabangunan Daerah	1 Dokumen	19.750.000,00	100,00	18.750.000,00	94,94	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	1 dokumen	17.225.000,00	100,00	12.877.500,00	74,76	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SiDa)	dokumen roadmap sistem inovasi daerah (SiDa)	1 dokumen	243.265.000,00	100,00	233.731.145,00	96,08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi	1 kegiatan	103.125.200,00	100,00	87.515.200,00	84,86	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
41	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ketersediaan dokumen perencanaan		747.825.000,00	100,00	386.156.120,00	51,64	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	laporan pelaksanaan kegiatan musrenbang tk kota	1 dokumen	66.150.000,00	100,00	64.389.750,00	97,34	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penetapan RKPD	Dokumen Peraturan Walikota tentang RKPD 2019	1 Dokumen	59.575.000,00	100,00	49.475.000,00	83,05	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Review RPJMD	Dokumen Review RPJMD	1 Dokumen	385.750.000,00	100,00	56.875.000,00	14,74	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	laporan Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan pemprov Kaltim	1 Dokumen	19.000.000,00	100,00	18.062.500,00	95,07	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Laporan kegiatan koordinasi	1 Dokumen	15.950.000,00	100,00	15.400.000,00	96,55	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	58.300.000,00	100,00	42.900.000,00	73,58	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim	Laporan Pelaksanaan Keiatan Rakor Perencanaan Se-Kaltim	1 Dokumen	143.100.000,00	100,00	139.053.870,00	97,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
42	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah		239.750.000,00	100,00	230.679.250,00	96,22	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	1 dokumen	8.000.000,00	100,00	5.197.500,00	64,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang	dokumen kajian potensi bidang ekonomi kota bontang	1 dokumen	206.625.000,00	100,00	206.625.000,00	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil monitoeing	1 laporan	25.125.000,00	100,00	18.856.750,00	75,05	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
43	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Akurasi data keluarga penerima manfaat		404.210.500,00	100,00	397.633.634,00	98,37	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Dokumen Monev Pengembangan SDM	1 Dokumen	41.755.000,00	100,00	41.089.750,00	98,41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	8 tatanan	217.878.000,00	100,00	214.182.134,00	98,30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan evaluasi penanggulangan kemiskinan	1 laporan	12.850.000,00	100,00	10.837.500,00	84,34	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	1 dokumen	10.647.500,00	100,00	10.444.250,00	98,09	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 dokumen	121.080.000,00	100,00	121.080.000,00	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
44	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah		321.507.500,00	100,00	318.187.500,00	98,97	
	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	dokumen lkpj	1 dokumen	26.950.000,00	100,00	26.900.000,00	99,81	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Monev	2 dokumen	38.270.000,00	100,00	37.550.000,00	98,12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi TEPPA Kota Bontang	Informasi Penyerapan Penyelenggaraan APBD TEPPA Pusat	100 %	256.287.500,00	100,00	253.737.500,00	99,01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
45	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	ketersediaan pranata tata ruang dan wilayah		418.700.000,00	100,00	395.045.000,00	94,35	
	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Pelatihan teknis, laporan	60 orang	91.020.000,00	100,00	82.100.000,00	90,20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	laporan BKPRD Kota Bontang; bahan sosialisasi rencana tata ruang; dokumen Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kota Bontang	3 dokumen	327.680.000,00	100,00	312.945.000,00	95,50	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
46	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	ketersediaan		142.550.000,00	100,00	137.087.500,00	96,17	
	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Review rencana program inventasi jangka menengah (RPIJM) bidang cipta karya	1 dokumen	45.625.000,00	100,00	45.625.000,00	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Evaluasi Strategis Sanitasi Kota (SSK)	1 Dokumen	17.550.000,00	100,00	17.550.000,00	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	dokumen pojka urban LEDS	1 DOKUMEN	25.275.000,00	100,00	24.600.000,00	97,33	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	ICM plice forum, baseline assessment report, risk/vulnerability assessment repport, state of cost report, ICM monitoring dan evaluasi report	100 ORG	32.875.000,00	100,00	28.875.000,00	87,83	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	Dokumen pokja GNKPA	1 DOKUMEN	21.225.000,00	100,00	20.437.500,00	96,29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
47	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.719.462.838,00	100,00	1.346.031.329,00	78,28	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim; Jumlah materai yang tersedia	150 surat	8.900.000,00	100,00	8.836.050,00	99,28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 bulan	108.300.000,00	100,00	108.300.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	16 unit	9.820.000,00	100,00	7.042.300,00	71,71	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibutuhkan	29 jenis	45.959.000,00	100,00	45.956.950,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	13 jenis	124.774.200,00	100,00	122.809.525,00	98,43	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibutuhkan	3 jenis	9.128.000,00	100,00	9.128.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan kantor yang dibutuhkan	12 bulan	20.460.000,00	100,00	16.537.100,00	80,83	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang dibutuhkan	43 jenis	26.098.700,00	100,00	25.626.700,00	98,19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan yang dibutuhkan	3 paket	115.460.000,00	100,00	93.781.900,00	81,22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	252 kali	1.147.967.938,00	100,00	805.417.804,00	70,16	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibutuhkan	4 orang	102.595.000,00	100,00	102.595.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
48	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		670.272.500,00	100,00	656.476.720,00	97,94	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	2 kali	5.000.000,00	100,00	4.950.000,00	99,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	16 unit	213.822.000,00	100,00	213.111.300,00	99,67	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	11 jenis	150.907.000,00	100,00	142.205.990,00	94,23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah barang inventaris	11 Jenis	300.543.500,00	100,00	296.209.430,00	98,56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
49	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		197.884.500,00	100,00	197.884.500,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	47 orang	197.884.500,00	100,00	197.884.500,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
50	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		851.787.000,00	91,56	679.231.800,00	79,74	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bimtek	15 kali	72.700.000,00	100,00	50.050.000,00	68,84	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	285 orang	200.000.000,00	100,00	199.500.000,00	99,75	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Kajian Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan kajian	5 PD	143.860.000,00	50,00	950.000,00	0,66	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah	Jumlah peserta diklat struktural bagi PNS daerah	16 orang	362.261.000,00	100,00	356.431.000,00	98,39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Perhitungan Angka Kredit JFT	Jumlah peserta diklat Perhitungan Angka Kredit JFT	40 Orang	72.966.000,00	100,00	72.300.800,00	99,09	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
51	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		25.000.000,00	100,00	24.786.818,00	99,15	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.786.818,00	99,15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
52	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		721.309.668,00	100,00	481.715.697,00	66,78	
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar dan ikatan dinas	25 Orang	681.809.668,00	100,00	442.215.697,00	64,86	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta diklat jabatan fungsional	3 orang	39.500.000,00	100,00	39.500.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
53	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase aparatur yang mengikuti diklat sesuai kompetensi		2.285.520.500,00	99,08	1.686.824.670,00	73,80	
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah peserta seleksi penerimaan CPNS	2500 orang	364.540.000,00	100,00	304.222.358,00	83,45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari Perangkat Daerah	3 kali	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring/sidak kehadiran PNS	2 kali	11.500.000,00	100,00	11.498.000,00	99,98	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah penerima penghargaan SLKS	150 PNS	20.600.000,00	100,00	20.600.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat	650 berkas	33.900.000,00	100,00	32.400.000,00	95,58	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi	1 dokumen	25.525.000,00	100,00	24.636.000,00	96,52	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Jumlah pegawai yang mengisi jabatan struktural dan fungsional	250 orang	394.490.000,00	100,00	209.960.042,00	53,22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS	Jumlah NIP dan SK CPNS yang keluar	80 SK	21.100.000,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan informasi kepegawaian dalam bentuk cetak	1 Jenis	39.830.500,00	100,00	39.800.500,00	99,92	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Proses Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima SK pemindahan dan penempatan pegawai	20 pegawai	8.650.000,00	100,00	8.650.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengusulan Kartu Status Pegawai	Jumlah kartu status pegawai yang selesai	100 Kartu	15.300.000,00	100,00	15.300.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pelaksanaan Assesment Pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	110 orang	787.860.000,00	100,00	513.932.200,00	65,23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 Kali	70.155.000,00	100,00	69.636.500,00	99,26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengusulan Pemberhentian PNS	Jumlah usulan berkas pemberhentian PNS	30 berkas	11.850.000,00	100,00	11.850.000,00	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Peremajaan Data SAPK	Jumlah rekonsiliasi data kepegawaian	2 periode	56.550.000,00	100,00	38.688.920,00	68,42	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan absensi online	30 PD	51.020.000,00	100,00	45.570.000,00	89,32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai	1 dokumen	348.650.000,00	100,00	316.080.150,00	90,66	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
54	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Rp0,00		41.600.000,00	100,00	41.445.200,00	99,63	
	Perayaan HUT KORPRI	Terlaksananya kegiatan HUT KORPRI	100 %	41.600.000,00	100,00	41.445.200,00	99,63	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
55	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		8.747.766.802,00	98,59	7.959.248.311,00	90,99	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	12 Bulan	6.500.000,00	99,08	5.310.000,00	81,69	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik selama 1 Tahun	12 Bulan	681.000.000,00	99,89	406.339.540,00	59,67	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	43 Unit	96.070.180,00	99,75	49.684.400,00	51,72	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor yang memadai	12 Bulan	395.160.000,00	100,00	365.116.000,00	92,40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	14 Item	391.496.000,00	100,00	376.303.000,00	96,12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	3 Item	679.859.032,00	97,06	645.138.236,00	94,89	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	26 Item	151.198.000,00	100,00	147.811.000,00	97,76	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1.080.280.000,00	99,44	1.032.503.250,00	95,58	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	5 jenis	48.510.000,00	88,00	39.195.600,00	80,80	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tertib bahan logistik kantor	10 Item	206.210.000,00	100,00	200.545.500,00	97,25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	3 Item	746.580.000,00	98,55	716.967.500,00	96,03	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	125 Kali	3.033.851.602,00	99,08	2.802.395.277,00	92,37	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	1.061.301.988,00	95,09	1.009.139.008,00	95,09	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	2 Item	169.750.000,00	100,00	162.800.000,00	95,91	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
56	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		3.439.991.609,00	98,97	3.160.296.100,00	91,87	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang disediakan	2 Unit	1.232.220.000,00	100,00	1.231.900.000,00	99,97	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair	100 %	130.080.000,00	86,16	87.152.700,00	67,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 gedung	559.330.000,00	100,00	401.695.400,00	71,82	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	43 Unit	859.281.609,00	100,00	842.912.700,00	98,10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	12 Bulan	659.080.000,00	97,36	596.635.300,00	90,53	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
57	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		1.173.140.000,00	90,38	476.552.250,00	40,62	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian kerja Pegawai	120 Pasang	232.350.000,00	100,00	225.810.000,00	97,19	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	940.790.000,00	88,00	250.742.250,00	26,65	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
58	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		155.500.000,00	25,47	7.900.000,00	5,08	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	45.000.000,00	88,00	7.900.000,00	17,56	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Workshop Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	75 Orang	110.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
59	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		111.000.000,00	81,98	88.352.500,00	79,60	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	50.000.000,00	100,00	48.752.500,00	97,51	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	61.000.000,00	67,21	39.600.000,00	64,92	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
60	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Data Realisasi Penerimaan dan pengeluaran yang akurat		5.363.867.000,00	96,06	4.607.855.160,00	85,91	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya data harga barang/jasa Pemerintah Kota Bontang	 dokumen	58.000.000,00	100,00	52.656.000,00	90,79	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA)	5 dokumen	216.335.000,00	100,00	143.400.000,00	66,29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5 dokumen	220.735.000,00	100,00	148.300.000,00	67,18	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	5 dokumen	251.235.000,00	100,00	244.975.000,00	97,51	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Penyusunan PPAS Perubahan	5 dokumen	256.835.000,00	100,00	251.775.000,00	98,03	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	2 dokumen	742.830.000,00	100,00	685.607.500,00	92,30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	208.500.000,00	100,00	200.600.000,00	96,21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	5 dokumen	505.175.000,00	100,00	481.176.500,00	95,25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	203.750.000,00	100,00	203.250.000,00	99,75	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 buku	194.400.000,00	100,00	185.176.250,00	95,26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 buku	127.500.000,00	100,00	127.459.000,00	99,97	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Pergeseran APBD	Dokumen Pergeseran APBD	2 dokumen	105.400.000,00	100,00	102.450.000,00	97,20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Pemerintah Kota akurat dan tepat waktu	1 Dokumen	103.400.000,00	100,00	103.370.000,00	99,97	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	ditetapkan bendahara penerima dan pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	10.550.000,00	55,38	5.250.000,00	49,76	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Bimtek Tatacara Pemotongan dan Penyetoran PPN dan PPh	Bimtek tatacara pemotongan dan penyetoran PPN dan PPh	43 orang	28.536.000,00	100,00	25.286.000,00	88,61	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai	Jumlah Sistem penggajian Pegawai yang dipelihara	1 Aplikasi	76.080.000,00	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semester I barang Milik Daerah	1 Dokumen	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi	29 OPD	275.000.000,00	98,85	189.199.560,00	68,80	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data barang milik daerah di lingkungan pemerintah kota bontang	1 Dokumen	34.426.000,00	100,00	33.826.000,00	98,26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD	Jumlah BA Pengeluaran perbulan	29 Berita acara	129.900.000,00	100,00	129.876.000,00	99,98	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta bimtek	50 orang	189.000.000,00	100,00	187.500.000,00	99,21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengembangan efinance untuk Implementasi Transaksi Non Tunai	Pengembangan aplikasi efinance	4 paket	676.660.000,00	99,48	502.700.000,00	74,29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Aplikasi Efinance	Keikutsertaan peserta pendampingan	45 orang	138.000.000,00	56,27	69.683.800,00	50,50	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan SOP Penerbitan SPD dan Pengakuan Hutang	Terlaksananya SOP penerbitan SPD dan pengakuan hutang	1 dokumen	145.240.000,00	66,66	96.811.400,00	66,66	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Kajian Akademis Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	90,00	125.618.250,00	83,75	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengadaan Aplikasi Eplanning yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	302.880.000,00	100,00	298.408.900,00	98,52	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
61	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD)		1.206.789.250,00	87,90	1.035.647.412,00	85,82	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	49,93 %	315.419.250,00	100,00	310.579.250,00	98,47	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SP PDT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	38000 lbr	148.000.000,00	80,17	123.204.000,00	83,25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	51.870.000,00	100,00	50.410.000,00	97,19	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	1 Tahun	297.212.500,00	60,73	162.706.662,00	54,74	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan SISMIOP PBB	Terawatnya SISMIOP PBB	1 Aplikasi	226.230.000,00	100,00	224.710.000,00	99,33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Kenaikan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan	3232000000 0 Rp	168.057.500,00	100,00	164.037.500,00	97,61	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
62	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	Pelaksanaan kegiatan sensus barang milik negara		1.969.664.650,00	79,40	1.460.704.000,00	74,16	
	Sensus Barang Milik Daerah	Dokumen kegiatan sensus BMD	1 dokumen	709.460.000,00	100,00	689.600.000,00	97,20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Bimtek BMD	75 orang	337.500.000,00	100,00	306.000.000,00	90,67	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Data Pengelolaan barang milik daerah secara maksimal	1 Dokumen	102.720.000,00	100,00	98.869.000,00	96,25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan barang Milik Daerah secara maksimal	50 buku	54.030.000,00	100,00	54.030.000,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Pengelolaan BMD secara Maksimal	1 Dokumen	155.880.000,00	100,00	127.736.000,00	81,95	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD)	Jumlah dokumen data RKBMD dan RKPBMMD	1 Dokumen	23.470.000,00	100,00	23.320.000,00	99,36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Jumlah dokumen Pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	63.024.650,00	100,00	63.020.000,00	99,99	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	117.880.000,00	100,00	98.129.000,00	83,24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengembangan Aplikasi Aset/Barang Daerah yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance	Jumlah Aplikasi	1 aplikasi	202.880.000,00	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengembangan Aplikasi Persediaan Barang yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance	Jumlah Aplikasi	1 aplikasi	202.820.000,00	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
63	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		6.103.877.500,00	99,21	5.691.769.909,00	93,25	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan operasional Kecamatan	12 bulan	149.100.000,00	98,99	127.283.926,00	85,37	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah surat Kendaraan Yang diurus	15 unit	6.525.000,00	100,00	2.438.400,00	37,37	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	40 jenis	75.888.500,00	100,00	74.769.300,00	98,53	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	27 jenis	45.073.600,00	89,13	39.661.700,00	87,99	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar langganan	2 Surat kabar	5.016.000,00	100,00	5.016.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis kebersihan dan sembako	27 jenis	24.529.600,00	100,00	24.425.100,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	12 bulan	50.452.500,00	100,00	49.894.020,00	98,89	Kecamatan Bontang Utara
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	85 kali	602.980.000,00	93,90	566.185.437,00	93,90	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah non ASN Yang Digaji	63 orang	1.874.840.000,00	100,00	1.633.042.000,00	87,10	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Website Kecamatan Bontang Utara	Website yang diadakan	1 Website	60.000.000,00	100,00	59.408.000,00	99,01	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang dilayani	42 RT	228.430.000,00	100,00	203.426.288,00	89,05	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah cakupan RT yang dilayani	20 RT	580.157.750,00	100,00	566.061.185,00	97,57	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Baru	Jumlah cakupan RT yang dilayani	28 RT	1.099.745.000,00	100,00	1.069.597.952,00	97,26	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Guntung	jumlah RT yang dilayani	18 RT	219.065.000,00	97,68	203.908.895,00	93,08	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang dilayani	52 RT	684.796.000,00	100,00	677.442.508,00	98,93	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT Yang Dilayani	45 RT	397.278.550,00	100,00	389.209.198,00	97,97	Kecamatan Bontang Utara
64	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		877.492.000,00	97,59	839.663.440,00	95,69	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	6 jenis	193.740.000,00	100,00	184.020.000,00	94,98	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan jenis Meubelair	2 jenis	85.750.000,00	100,00	85.525.000,00	99,74	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan Perlengkapannya	7 jenis	138.040.000,00	100,00	136.158.000,00	98,64	Kecamatan Bontang Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 bangunan	181.180.000,00	94,48	168.380.000,00	92,94	Kecamatan Bontang Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	12 unit	103.098.000,00	89,19	91.950.440,00	89,19	Kecamatan Bontang Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis Peralatan Kantor Yang dirawat	4 jenis	19.874.000,00	100,00	17.820.000,00	89,66	Kecamatan Bontang Utara
	Pembangunan Gudang Aset	Gudang yang dibangun	1 unit	155.810.000,00	100,00	155.810.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
65	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		580.333.500,00	100,00	580.333.500,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	TKTT ASN	130 ASN	580.333.500,00	100,00	580.333.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
66	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		281.862.500,00	90,72	255.700.836,00	90,72	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kali pelatihan yang diikuti	18 kali	276.000.000,00	91,61	252.838.336,00	91,61	Kecamatan Bontang Utara
	Pendidikan dan Parenting Skill	Jumlah pegawai yang hadir sosialisasi parenting skill	45 orang	5.862.500,00	48,83	2.862.500,00	48,83	Kecamatan Bontang Utara
67	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daaerah		3.475.000,00	100,00	3.475.000,00	100,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capain kinerja yang disusun	10 laporan	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan yang disusun	10 laporan	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Laporan Akuntabilitas	10 laporan	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	7 laporan	1.225.000,00	100,00	1.225.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah buku yang disusun	7 buku	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
68	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		30.387.500,00	98,35	28.339.500,00	93,26	
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya indeks kepuasan kepada masyarakat	2 laporan	30.387.500,00	98,35	28.339.500,00	93,26	Kecamatan Bontang Utara
69	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		175.000.000,00	100,00	76.741.335,00	43,85	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.271.335,00	97,09	Kecamatan Bontang Utara
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	pemberitaan advertorial	3 media online	150.000.000,00	100,00	52.470.000,00	34,98	Kecamatan Bontang Utara
70	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		151.144.500,00	98,37	148.173.400,00	98,03	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir	100 orang	39.462.000,00	100,00	39.173.400,00	99,27	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Patroli	3 kali	41.080.000,00	100,00	41.063.000,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Jumlah SPMHT Yang terselesaikan	10 SPMHT	9.290.000,00	73,43	6.822.000,00	73,43	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku Profil dan Penduduk Kecamatan	3 buku	360.000,00	100,00	360.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Laporan e KTP	12 laporan	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Api-Api	jumlah peserta yang hadir	85 orang	10.362.500,00	100,00	10.201.000,00	98,44	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah masyarakat yang hadir	100 orang	10.500.000,00	100,00	10.480.000,00	99,81	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Baru	Jumlah masyarakat yang hadir	100 orang	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Guntung	Jumlah masyarakat yang hadir	50 orang	10.000.000,00	100,00	9.984.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Loktuan	Jumlah masyarakat yang hadir	50 orang	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Elai	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	70 orang	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
71	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan		2.928.351.800,00	98,47	2.879.678.040,00	98,34	
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	jumlah kerja bakti yang dilaksanakan	12 bulan	7.528.500,00	100,00	7.453.840,00	99,01	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	jumlah warga yang hadir sosialisasi	60 orang	8.350.000,00	85,63	7.150.000,00	85,63	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah cabang yang dilombakan tingkat kecamatan	7 cabang	252.200.000,00	100,00	250.911.700,00	99,49	Kecamatan Bontang Utara
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS yang aktif	20 UKS	19.878.000,00	100,00	19.835.000,00	99,78	Kecamatan Bontang Utara
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah warga yang hadir	75 orang	10.250.000,00	100,00	10.250.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta	100 Nilai	17.914.500,00	100,00	17.914.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Terlaksananya lomba	7 lomba	252.067.800,00	96,38	242.952.050,00	96,38	Kecamatan Bontang Utara
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Skor lomba FORKOHAT Tingkat Kecamatan	1 Kali	17.800.500,00	100,00	17.696.800,00	99,42	Kecamatan Bontang Utara
	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tingkat Kecamatan	4 laporan	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODTA (Program 200 Juta Per-RT)	jumlah kelurahan yang didampingi	6 kelurahan	1.205.400.000,00	99,07	1.194.163.840,00	99,07	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Api-Api	Kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 kegiatan	48.400.000,00	100,00	47.072.500,00	97,26	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Kuala	kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 kegiatan	49.500.000,00	100,00	49.225.000,00	99,44	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Guntung	Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	50.000.000,00	91,16	45.580.000,00	91,16	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Loktuan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	250.000.000,00	97,68	244.197.730,00	97,68	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 kegiatan	77.962.500,00	100,00	77.962.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Api-Api	Jumlah lembaga yang difasilitasi	4 lembaga	48.800.000,00	100,00	48.329.250,00	99,04	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	5 lembaga	50.000.000,00	87,74	43.870.880,00	87,74	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	2 lembaga	50.010.000,00	100,00	50.010.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	3 lembaga	135.590.000,00	95,22	129.111.050,00	95,22	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	4 lembaga	275.600.000,00	99,89	274.891.400,00	99,74	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	5 lembaga	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat		5.097.600.000,00	99,71	4.843.098.375,00	95,01	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Api-Api	Jumlah kader yang diberdayakan	1 tahun	146.400.000,00	100,00	146.400.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Baru	Jumlah kader yang diberdayakan	78 orang	289.400.000,00	99,48	286.808.000,00	99,10	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah kader yang diberdayakan	58 kader	68.400.000,00	100,00	65.100.000,00	95,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Guntung	Jumlah kader yang diberdayakan	34 kader	99.100.000,00	100,00	69.300.000,00	69,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Loktuan	Jumlah kader yang diberdayakan	73 orang	240.600.000,00	100,00	153.270.000,00	63,70	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Elai	Jumlah kader yang diberdayakan	106 orang	149.100.000,00	100,00	123.300.000,00	82,70	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Api-Api	pemberdayaan RT	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.043.000,00	97,42	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.010.000,00	97,27	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.010.000,00	97,27	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan`	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.301.500,00	98,62	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.384.000,00	99,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.199.300,00	93,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.036.400,00	97,39	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.515.000,00	94,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.290.500,00	98,57	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.184.900,00	98,08	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang dberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.120.000,00	97,78	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.384.000,00	99,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT Yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.384.000,00	99,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.350.000,00	94,21	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.199.300,00	93,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.236.600,00	98,32	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	19.420.500,00	89,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.199.300,00	93,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.702.000,00	95,84	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.199.300,00	93,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.065.000,00	97,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.337.800,00	98,79	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.087.100,00	93,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.526.000,00	95,03	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.384.000,00	99,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.199.300,00	93,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.010.000,00	97,27	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.384.000,00	99,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.287.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	17.410.800,00	80,61	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	15.040.300,00	69,63	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.010.000,00	97,27	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.340.000,00	98,80	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.541.650,00	99,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.593.350,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.517.450,00	99,62	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.551.550,00	99,78	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	76,37	16.494.850,00	76,37	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.558.150,00	99,81	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 Rt	21.600.000,00	100,00	21.541.650,00	99,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.562.110,00	99,82	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.562.110,00	99,82	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.448.150,00	99,30	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.541.650,00	99,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.551.550,00	99,78	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.415.150,00	99,14	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.536.150,00	99,70	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.448.150,00	99,30	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.562.110,00	99,82	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.185.763,00	93,45	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.541.650,00	99,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.593.350,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.426.150,00	99,20	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.401.600,00	99,08	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.516.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.401.875,00	99,08	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.430.200,00	99,21	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.406.000,00	99,10	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.403.250,00	99,09	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.410.400,00	99,12	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.401.600,00	99,08	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.414.800,00	99,14	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.401.600,00	99,08	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.422.500,00	99,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.399.400,00	99,07	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.422.500,00	99,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.535.000,00	100,00	21.384.220,00	99,30	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.340.000,00	98,80	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.410.400,00	99,12	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.422.500,00	99,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.422.500,00	99,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.410.400,00	99,12	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.450.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.422.500,00	99,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	100 %	21.600.000,00	100,00	21.516.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	16.881.830,00	78,16	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.497.210,00	99,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.446.830,00	99,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.446.830,00	99,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.665.000,00	100,00	21.448.425,00	99,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.694.100,00	95,81	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	19.285.110,00	89,28	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	17.906.150,00	82,90	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.469.600,00	99,40	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.326.600,00	98,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	19.624.460,00	90,85	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	20.726.990,00	95,96	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.480.600,00	99,45	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.540.000,00	99,72	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.414.600,00	99,14	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.540.000,00	99,72	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.497.980,00	99,53	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.497.980,00	99,53	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.974.870,00	99,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Loktuan	jumlah rt yang diberdayakan	1 rt	15.000.000,00	100,00	14.974.430,00	99,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.974.430,00	99,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.995.770,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.994.120,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.995.770,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.993.240,00	99,95	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.980.920,00	99,87	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.987.630,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.936.150,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.990.270,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.974.870,00	99,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.983.450,00	99,89	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.979.380,00	99,86	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.969.920,00	99,80	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.936.150,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.579.710,00	99,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.936.150,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.976.630,00	99,84	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.990.270,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.583.670,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.989.940,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.990.270,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.995.770,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.970.580,00	99,80	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.969.920,00	99,80	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.979.820,00	99,87	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.994.450,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.936.150,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.985.100,00	99,90	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.025.570,00	93,50	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.990.600,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.936.150,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.981.800,00	99,88	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.030.410,00	93,54	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.984.330,00	99,90	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.559.290,00	97,06	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.936.150,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.989.500,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.996.870,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.974.430,00	99,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	43,98	6.597.300,00	43,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	15.000.000,00	100,00	14.991.480,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 52 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.578.500,00	99,90	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	19.256.538,00	89,15	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	19.256.538,00	89,15	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	19.256.538,00	89,15	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	18.459.725,00	85,46	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.105.225,00	97,71	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	19.256.538,00	89,15	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.014.475,00	97,29	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	21.600.000,00	100,00	21.334.850,00	98,77	Kecamatan Bontang Utara
73	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		4.492.479.700,00	100,00	4.253.711.346,00	94,69	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai	700 lbr	3.450.000,00	100,00	3.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 kelurahan	115.200.000,00	100,00	91.771.819,00	79,66	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	13 unit	6.350.000,00	100,00	3.121.900,00	49,16	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan tempat kerja	12 org	237.700.000,00	100,00	220.030.000,00	92,57	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	46 item	66.065.000,00	100,00	66.065.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 item	84.010.200,00	100,00	78.900.500,00	93,92	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 item	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 item	275.890.000,00	100,00	263.075.500,00	95,36	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan referensi perpustakaan dan peraturan perundang undangan	3 surat kabar	21.005.000,00	100,00	18.578.000,00	88,45	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor kecamatan Bontang Selatan	21 item	17.500.000,00	100,00	15.383.000,00	87,90	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum Kecamatan Bontang Selatan	6 kelurahan	54.270.000,00	100,00	54.212.000,00	99,89	Kecamatan Bontang Selatan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33 Org	715.648.000,00	100,00	711.567.285,00	99,43	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	49 org	1.090.414.200,00	100,00	1.009.043.000,00	92,54	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil survey IKM	1 dok	25.000.000,00	100,00	24.820.000,00	99,28	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	24 RT	386.701.500,00	100,00	371.467.672,00	96,06	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	62 RT	271.883.800,00	100,00	257.894.260,00	94,85	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	19 RT	283.170.000,00	100,00	274.453.965,00	96,92	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo	25 RT	282.637.000,00	100,00	273.242.728,00	96,68	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	38 RT	277.670.000,00	100,00	251.530.488,00	90,59	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	33 RT	269.915.000,00	100,00	257.104.229,00	95,25	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		263.532.000,00	100,00	253.561.461,00	96,22	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Ikendaraan dinas yang disediakan	2 Unit	40.000.000,00	100,00	37.670.000,00	94,18	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7 gedung	40.000.000,00	100,00	36.463.750,00	91,16	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Volume kendaraan dinas / operasional yang di Pemeliharaan rutin	13 unti	159.032.000,00	100,00	158.822.200,00	99,87	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	20 kali	4.500.000,00	100,00	3.250.000,00	72,22	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	32 unit	20.000.000,00	100,00	17.355.511,00	86,78	Kecamatan Bontang Selatan
75	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		583.368.000,00	100,00	583.368.000,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	583.368.000,00	100,00	583.368.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		153.000.000,00	100,00	149.400.000,00	97,65	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai	32 org	153.000.000,00	100,00	149.400.000,00	97,65	Kecamatan Bontang Selatan
77	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pelaporan keuangan SKPD		7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Keuangan SKPD Semesteran	1 dok	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	1 dok	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	LAKIP SKPD	1 dok	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
78	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		145.000.000,00	99,90	144.850.000,00	99,90	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival	1 Kegiatan	25.000.000,00	99,40	24.850.000,00	99,40	Kecamatan Bontang Selatan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah media	2 Media	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
79	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkanya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		186.682.500,00	97,86	182.682.350,00	97,86	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	100 orang	19.162.500,00	100,00	19.162.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kelurahan	Terlaksananya lomba Kelurahan terbaik se-Kecamatan Bontang Selatan	6 kel	12.650.000,00	100,00	12.650.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring kamtibmas	60 orang	19.800.000,00	100,00	19.800.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Tersedianya SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan	1 dok	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku Profil dan Monografi Kecamatan	1 dok	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah data penduduk pemegang KTP elektronik	1 dok	7.300.000,00	100,00	7.300.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Patroli Keamanan dan Ketertiban	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah	6 kel	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sistem pelayanan terpadu satu meja	43 org	47.300.000,00	91,54	43.300.000,00	91,54	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	24 RT	9.967.500,00	100,00	9.967.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	62 RT	10.650.000,00	100,00	10.650.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	19 RT	10.000.000,00	100,00	9.999.850,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	25 RT	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	33 RT	10.050.000,00	100,00	10.050.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	38 RT	10.002.500,00	100,00	10.002.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
80	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan		1.659.506.425,00	96,90	1.602.126.875,00	96,54	
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi FKDM	50 org	8.375.000,00	100,00	8.375.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya kegiatan keagamaan di kecamatan Bontang Selatan	6 kel	334.132.925,00	88,66	296.232.925,00	88,66	Kecamatan Bontang Selatan
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan	70 orang	23.537.500,00	100,00	23.537.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi FPK	60 org	8.375.000,00	100,00	8.375.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Terlaksananya sosialisasi dan lomba GSI	50 orang	11.875.000,00	100,00	11.875.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Terlaksananya kegiatan PKK	6 kel	37.686.000,00	89,60	33.767.000,00	89,60	Kecamatan Bontang Selatan
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan	60 orang	25.937.500,00	95,18	24.687.500,00	95,18	Kecamatan Bontang Selatan
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pembangunan	50 org	8.350.000,00	99,40	8.300.000,00	99,40	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODDUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Terdampingnya masyarakat dalam pelaksanaan produta	201 RT	594.000.000,00	99,04	588.300.000,00	99,04	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	24 RT	41.900.000,00	100,00	41.900.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	62 RT	51.027.500,00	100,00	51.027.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	19 RT	51.020.000,00	100,00	51.017.200,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	25 RT	51.032.500,00	100,00	50.896.950,00	99,73	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	33 RT	56.045.000,00	100,00	53.499.500,00	95,46	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	38 RT	51.020.000,00	100,00	51.020.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	24 RT	34.150.000,00	100,00	32.950.000,00	96,49	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	62 RT	64.270.000,00	100,00	64.270.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	19 RT	51.020.000,00	99,99	51.019.300,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	25 RT	51.032.500,00	99,73	50.607.500,00	99,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	33 RT	53.700.000,00	95,46	51.405.000,00	95,73	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	38 RT	51.020.000,00	100,00	49.064.000,00	96,17	Kecamatan Bontang Selatan
81	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatkan efektifitas sarana/prasarana dan lingkungan		1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tersedianya laporan monev pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	4 dok	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
82	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat		5.520.050.000,00	98,63	5.325.191.215,00	96,47	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	24 RT	92.600.000,00	100,00	90.900.000,00	98,16	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	62 RT	164.400.000,00	100,00	159.775.000,00	97,19	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	19 RT	81.400.000,00	100,00	75.300.000,00	92,51	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	25 RT	65.900.000,00	100,00	61.800.000,00	93,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	38 RT	108.600.000,00	100,00	105.600.000,00	97,24	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	33 RT	92.700.000,00	100,00	87.300.000,00	94,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.866.875,00	97,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	38,87	9.450.000,00	38,65	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.796.750,00	97,33	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.123.375,00	98,66	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.415.000,00	99,86	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.415.000,00	99,86	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.449.600,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.866.875,00	97,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.450.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.405.000,00	99,82	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.080.000,00	98,49	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.135.000,00	98,71	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.417.700,00	99,87	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.970.000,00	98,04	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.980.000,00	93,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.377.000,00	99,70	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.245.000,00	99,16	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.410.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.385.800,00	99,74	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.369.300,00	99,67	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.939.025,00	97,91	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.301.800,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.395.000,00	99,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.239.500,00	99,14	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.311.000,00	99,43	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.301.100,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.366.000,00	99,66	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.390.200,00	99,76	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.410.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.322.000,00	99,48	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.228.500,00	99,09	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.346.200,00	99,58	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.421.110,00	99,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 52 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 53 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.384.920,00	99,73	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 54 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.118.500,00	98,64	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 55 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 56 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 57 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 58 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 59 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 60 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.866.875,00	97,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 61 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.289.000,00	99,34	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 62 Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	20.488.500,00	83,80	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	20.488.500,00	83,80	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.105.500,00	90,41	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.547.370,00	92,22	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.475.880,00	96,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	20.354.520,00	83,25	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.426.170,00	99,90	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	21.590.700,00	88,31	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	21.707.960,00	88,79	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.980.000,00	93,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.475.880,00	96,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.848.000,00	93,45	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.780.800,00	97,26	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.426.170,00	99,90	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	19.446.800,00	79,54	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	18.723.000,00	76,58	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	21.550.000,00	88,14	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.475.880,00	96,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.143.020,00	94,65	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.090.000,00	98,53	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.215.200,00	99,04	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	38,87	9.447.000,00	38,64	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	38,87	9.449.000,00	38,65	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	21.970.000,00	89,86	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	38,87	9.450.000,00	38,65	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.190.000,00	98,94	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.190.000,00	98,94	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	34,97	8.550.000,00	34,97	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.910.000,00	97,79	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.307.680,00	99,42	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.184.000,00	98,91	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.301.100,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.299.400,00	99,38	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.363.100,00	99,64	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.317.000,00	99,46	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.226.800,00	99,09	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Satimpo	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.904.400,00	97,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.238.200,00	99,13	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	19.221.100,00	78,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.001.700,00	98,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.225.000,00	99,08	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.196.400,00	98,96	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.029.475,00	98,28	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.534.200,00	96,25	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.073.200,00	98,46	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.908.200,00	97,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.157.900,00	98,81	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.375.700,00	99,70	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.111.700,00	98,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.281.200,00	95,22	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.375.700,00	99,70	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.375.700,00	99,70	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.225.000,00	99,08	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.277.900,00	95,21	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.205.200,00	99,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.226.100,00	99,08	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.646.500,00	92,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.225.000,00	99,08	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.128.200,00	98,68	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.247.200,00	90,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.237.100,00	99,13	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	22.237.300,00	90,95	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.179.900,00	98,90	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.242.600,00	99,15	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.220.600,00	99,06	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.259.200,00	95,13	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.375.700,00	99,70	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.375.700,00	99,70	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.193.100,00	98,95	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.161.200,00	98,82	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.940,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.429.800,00	99,92	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.420.780,00	99,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.431.890,00	99,93	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.410.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.410.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.396.800,00	99,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.415.940,00	99,86	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.447.180,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	16.946.500,00	69,31	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.443.000,00	99,97	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.446.630,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.417.370,00	99,87	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.417.370,00	99,87	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.410.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.375.900,00	99,70	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.448.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.309.900,00	99,43	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.447.290,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.416.875,00	99,86	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.420.340,00	99,88	Kecamatan Bontang Selatan
83	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		3.256.786.645,00	100,00	3.064.212.133,00	94,09	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Bulan	106.800.000,00	100,00	88.476.700,00	82,84	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK Mobil/Kendaraan Dinas	13 unit	6.000.000,00	100,00	4.158.900,00	69,32	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 Paket	29.549.100,00	100,00	29.463.547,00	99,71	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	22.759.600,00	100,00	22.759.360,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC, mikrofon, sound system, laptop, kamera, kulkas	100 %	178.580.000,00	100,00	174.220.000,00	97,56	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	7.454.000,00	100,00	7.454.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Pawai	3 Paket	61.165.000,00	100,00	61.130.000,00	99,94	Kecamatan Bontang Barat
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	422.250.000,00	100,00	413.075.991,00	97,83	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi	41 Orang	1.121.900.000,00	100,00	1.003.912.000,00	89,48	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	Jumlah Paket Kegiatan	51 RT	604.515.320,00	100,00	590.111.803,00	97,62	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Jumlah Paket Kegiatan	12 RT	310.608.625,00	100,00	293.424.276,00	94,47	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Paket	23 Paket	385.205.000,00	100,00	376.025.556,00	97,62	Kecamatan Bontang Barat
84	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		509.763.073,00	100,00	498.870.400,00	97,86	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Ikendaraan dinas yang disediakan	4 unit	282.140.000,00	100,00	277.965.000,00	98,52	Kecamatan Bontang Barat
	Pengadaan Meubelair	meja, kursi	10 unit	65.409.073,00	100,00	65.153.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Pengadaan Komputer	Laptop dan Printer	10 unit	76.860.000,00	100,00	75.284.000,00	97,95	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Kantor	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan 2	16 Unit	62.004.000,00	100,00	60.708.400,00	97,91	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	6.300.000,00	100,00	3.230.000,00	51,27	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	32 unit	14.050.000,00	100,00	13.530.000,00	96,30	Kecamatan Bontang Barat
85	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		375.315.000,00	100,00	349.822.750,00	93,21	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian	2 stel	6.000.000,00	100,00	5.830.000,00	97,17	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	369.315.000,00	100,00	343.992.750,00	93,14	Kecamatan Bontang Barat
86	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		99.000.000,00	100,00	90.472.700,00	91,39	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat/kursus	12 bulan	99.000.000,00	100,00	90.472.700,00	91,39	Kecamatan Bontang Barat
87	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		70.000.000,00	100,00	69.435.000,00	99,19	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnaval	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.885.000,00	99,54	Kecamatan Bontang Barat
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Infomasi Pembangunan	1 paket	45.000.000,00	100,00	44.550.000,00	99,00	Kecamatan Bontang Barat
88	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		102.350.000,00	100,00	102.038.800,00	99,70	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Laporan Musrenbang	1 Dokumen	18.812.500,00	100,00	18.812.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan kamtibmas, penyuluhan bahaya narkoba, patroli wilayah	3 Kegiatan	27.387.500,00	100,00	27.362.500,00	99,91	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Tersedianya Data Profil dan Monografi	2 buku	500.000,00	100,00	441.600,00	88,32	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	100 orang	2.250.000,00	100,00	2.250.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PATEN di Kecamatan Bontang Barat	1 Kegiatan	18.750.000,00	100,00	18.522.200,00	98,79	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	Jumlah Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	14.100.000,00	100,00	14.100.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah Usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 kegiatan	9.950.000,00	100,00	9.950.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	50 Kegiatan	10.600.000,00	100,00	10.600.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
89	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		950.145.000,00	100,00	899.058.300,00	94,62	
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Sosialisasi	100 orang	12.850.000,00	100,00	12.850.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Lomba MTQ - Kegiatan Natal	2 Kegiatan	280.190.000,00	100,00	253.631.300,00	90,52	Kecamatan Bontang Barat
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya kunjungan/supervisi kesekolah	3 Kelurahan	37.350.000,00	100,00	37.350.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya kegiatan forum pembaruan kebangsaan	75 orang	10.625.000,00	100,00	10.625.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Terlaksananya Forum Kota Sehat Kecamatan	100 %	6.510.000,00	100,00	6.510.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Terdampinginya masyarakat dalam melaksanakan Produta	100 %	280.025.000,00	100,00	274.625.000,00	98,07	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	51 RT	39.300.000,00	100,00	28.130.000,00	71,58	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan	88.795.000,00	100,00	88.309.500,00	99,45	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	49.700.000,00	100,00	49.662.500,00	99,92	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	51 RT	42.850.000,00	100,00	42.000.000,00	98,02	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 Kegiatan	52.000.000,00	100,00	51.950.000,00	99,90	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 Kegiatan	49.950.000,00	100,00	43.415.000,00	86,92	Kecamatan Bontang Barat
90	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat		2.653.350.000,00	100,00	2.581.343.864,00	97,29	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	51 RT	185.400.000,00	100,00	185.400.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	1 Kelurahan	93.600.000,00	100,00	37.800.000,00	40,38	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	1 Kelurahan	100.500.000,00	100,00	99.000.000,00	98,51	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat

[illegible]

[illegible]

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.887.500,00	97,70	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.355.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	21.825.000,00	89,26	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.151.500,00	98,78	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.151.500,00	98,78	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.437.174,00	99,95	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	23.970.000,00	98,04	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.245.000,00	99,16	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.285.040,00	99,33	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.289.550,00	99,34	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.289.000,00	99,34	Kecamatan Bontang Barat

[illegible]

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	24.450.000,00	100,00	24.300.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Barat
91	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		84.497.673,00	100,00	84.495.773,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK	5 unit	2.036.100,00	100,00	2.036.100,00	100,00	Sekretariat Korpri
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	15 jenis	9.700.700,00	100,00	9.699.800,00	99,99	Sekretariat Korpri
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat	1606 kotak	10.624.100,00	100,00	10.623.100,00	99,99	Sekretariat Korpri
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kali	62.136.773,00	100,00	62.136.773,00	100,00	Sekretariat Korpri
92	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		34.807.500,00	100,00	34.807.500,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	34.807.500,00	100,00	34.807.500,00	100,00	Sekretariat Korpri
93	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	ASN yang menangani fardu kifayah anggota KORPRI dan Keluarga		59.400.000,00	100,00	59.350.000,00	99,92	
	Halal Bi Halal	Kegiatan Halal bi halal	1000 peserta	53.900.000,00	100,00	53.900.000,00	100,00	Sekretariat Korpri
	Pembinaan Tim Fardu Kifayah Bagi Anggota Korpri dan Keluarga	Tim Fardu Kifayah anggota KORPRI	2 Tim	5.500.000,00	100,00	5.450.000,00	99,09	Sekretariat Korpri
94	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Ormas yang terfasilitasi		203.745.000,00	100,00	190.559.400,00	93,53	
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Fasilitasi pemberdayaan FKDM	1 Tahun	203.745.000,00	100,00	190.559.400,00	93,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
95	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)		280.050.000,00	100,00	264.912.000,00	94,59	
	Pembinaan Korps Musik Anggota KORPRI dan Keluarga	Jumlah Anggota Korsik	50 orang	280.050.000,00	100,00	264.912.000,00	94,59	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
96	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Terlaksananya pemantauan daerah rawan bencana		958.910.000,00	100,00	841.904.000,00	87,80	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat Koordinasi Kebencanaan	Rapat Koordinasi	4 laporan	10.850.000,00	100,00	10.850.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan	1445 orang	86.995.000,00	100,00	86.995.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	laporan keadaan potensi bencana	265 kegiatan	268.635.000,00	100,00	181.515.000,00	67,57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	2 paket	592.430.000,00	100,00	562.544.000,00	94,96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
96 Program; 1.015 Kegiatan				214.402.247.288,00	98,29	190.031.128.820,00	88,63	

B. URUSAN PILIHAN

B.4.1 URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		3.206.917.775,00	100,00	3.037.675.404,00	94,72	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan akan kelancaran komunikasi, air dan listrik	12 bulan	27.000.000,00	100,00	26.256.625,00	97,25	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya surat ijin akan kendaraan dinas dan operasional	60 kendaraan	25.393.000,00	100,00	25.144.700,00	99,02	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya sarana alat tulis kantor	52 Jenis	103.395.000,00	100,00	103.328.500,00	99,94	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya administrasi OPD	15 Jenis	114.750.000,00	100,00	113.844.530,00	99,21	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	11 Jenis	10.000.000,00	100,00	9.994.450,00	99,94	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan	6 jenis	61.000.000,00	100,00	59.569.400,00	97,65	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya sarana kebutuhan kebersihan	9 Jenis	48.075.000,00	100,00	42.997.600,00	89,44	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat	1 Tahun	165.750.000,00	100,00	165.481.500,00	99,84	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi baik dalam maupun luar daerah	133 orang	978.049.775,00	100,00	954.775.099,00	97,62	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya tenaga administrasi/teknis perkantoran	70 Non PNS	1.673.505.000,00	100,00	1.536.283.000,00	91,80	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		650.784.000,00	100,00	644.589.000,00	99,05	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional dinas	63 Unit	615.784.000,00	100,00	609.755.000,00	99,02	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Persentase Komputer PC, Laptop dan Printer dalam kondisi Baik	100 %	35.000.000,00	100,00	34.834.000,00	99,53	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		373.635.000,00	100,00	334.332.750,00	89,48	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	373.635.000,00	100,00	334.332.750,00	89,48	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		150.942.000,00	100,00	144.519.293,00	95,74	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS	10 orang	150.942.000,00	100,00	144.519.293,00	95,74	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		305.000.000,00	100,00	304.627.950,00	99,88	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival	1 Kegiatan	25.000.000,00	100,00	24.996.950,00	99,99	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi informasi pembangunan	2 paket	280.000.000,00	100,00	279.631.000,00	99,87	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Meningkatnya perekonomian masyarakat pesisir		1.325.000.000,00	100,00	1.318.901.210,00	99,54	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan	Tersedianya bantuan nelayan	60 Kelompok	1.325.000.000,00	100,00	1.318.901.210,00	99,54	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
7	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Beroperasinya BBIP		590.010.000,00	99,69	567.426.227,00	96,17	
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan	10 kelompok	145.150.000,00	100,00	136.525.000,00	94,06	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah Produksi	1000000 benur	420.860.000,00	99,56	406.901.227,00	96,68	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Terlaksananya pendataan statistik perikanan budidaya	4 Dokumen	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Beroperasinya PPI bagi nelayan tangkap		1.045.898.000,00	100,00	1.043.409.712,00	99,76	
	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan	70 Nelayan	693.550.000,00	100,00	692.580.000,00	99,86	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengoperasian PPI/TPI	Tersedianya operasional PPI/TPI	1 Tahun	105.348.000,00	100,00	105.089.800,00	99,75	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pembangunan Fasilitas TPI	Dokumen perencanaan	2 Dokumen (1 Tempat pembongkaran ikan)	247.000.000,00	100,00	245.739.912,00	99,49	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
8 Program; 23 Kegiatan				7.648.186.775,00	99,98	7.395.481.546,00	96,70	

B.4.2 URUSAN PARIWISATA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Pameran dalam daerah dan luar daerah		617.660.000,00	100,00	464.488.700,00	75,20	
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Pemeran dalam dan luar daerah	3 Kegiatan	138.340.000,00	100,00	48.096.000,00	34,77	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	10 Kelompok	224.400.000,00	100,00	168.472.700,00	75,08	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata	Tersusunnya Dokumen RIPPAR	1 Dok	254.920.000,00	100,00	247.920.000,00	97,25	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Optimalisasi Objek Daya Tarik Wisata		8.375.954.000,00	100,00	8.143.073.280,00	97,22	
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Sarana prasarana wisata dan perencanaan pariwisata	8 ODTW	6.685.700.000,00	100,00	6.490.800.548,00	97,08	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata)	Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang terbangun	2 Bangunan	1.690.254.000,00	100,00	1.652.272.732,00	97,75	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2 Program; 5 Kegiatan				8.993.614.000,00	100,00	8.607.561.980,00	95,71	

B.4.3 URUSAN PERTANIAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya kelancaran kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian		298.425.000,00	97,93	288.785.390,00	96,77	
	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya pelatihan bagi petani	60 kelompok	276.875.000,00	97,77	270.447.900,00	97,68	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	Tersedianya operasional sarana dan prasarana Balai Penyuluh Pertanian	12 Bulan	21.550.000,00	100,00	18.337.490,00	85,09	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Persentase Kesediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan		15.444.200,00	95,14	12.294.000,00	79,60	
	Pengawasan Keamanan Pangan		2 jenis	15.444.200,00	95,14	12.294.000,00	79,60	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi Pertanian/Perkebunan		50.000.000,00	100,00	46.664.500,00	93,33	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Alkon Air dan Perengkapannya	5 Unit	50.000.000,00	100,00	46.664.500,00	93,33	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
4	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya hasil produksi pertanian		240.000.000,00	100,00	235.662.000,00	98,19	
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	bibit unggul pertanian dan perkebunan bagi kelompok masyarakat	30 kelompok	200.000.000,00	100,00	197.010.000,00	98,51	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Tersedianya bibit tanaman, pupuk dan obat-obatan bagi masyarakat	15 Kelompok	40.000.000,00	100,00	38.652.000,00	96,63	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Rp0,00		273.380.000,00	100,00	269.088.721,00	98,43	
	Pembangunan/Penambahan Sarana Balai Penyuluhan (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)	Tersedianya jaringan listrik Balai Penyuluh	1 unit	273.380.000,00	100,00	269.088.721,00	98,43	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkatnya kesehatan ternak dan keamanan produk ternak		56.547.700,00	99,47	52.437.700,00	92,73	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan peternakan	5 kelompok	56.547.700,00	99,47	52.437.700,00	92,73	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya kesehatan ternak		363.365.000,00	100,00	360.010.000,00	99,08	
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya bantuan pakan ternak untuk Kelompok Ternak	30 Kelompok	53.365.000,00	100,00	53.230.000,00	99,75	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat	Tersedianya hasil produksi peternakan	15 ternak	310.000.000,00	100,00	306.780.000,00	98,96	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
8	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya sarana dan prasarana RPH		1.390.940.000,00	100,00	1.374.468.002,00	98,82	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya fasilitasi Lantai Potong dan Gantungan Daging Hewan	1 Unit	672.115.000,00	100,00	671.306.953,00	99,88	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Usaha	5 Usaha	37.525.000,00	100,00	30.225.000,00	80,55	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Operasional Rumah Potong Hewan	Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	1 Unit	132.680.000,00	100,00	127.832.500,00	96,35	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pembangunan/Renovasi dan Fasilitasi Peralatan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)	Terpeliharanya Sarana Rumah Potong Hewan (RPH)	3 unit	548.620.000,00	100,00	545.103.549,00	99,36	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
8 Program; 14 Kegiatan				2.688.101.900,00	99,73	2.639.410.313,00	98,19	

B.4.4 URUSAN PERDAGANGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Meningkatnya efektifitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		229.145.000,00	100,00	209.192.000,00	91,29	
	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP Yang Ditera / Tera Ulang	750 alat UTTP	229.145.000,00	100,00	209.192.000,00	91,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkanya penyelenggara promosi pameran dagang komoditi ekspor yang semakin luas		211.231.500,00	100,00	198.017.393,00	93,74	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri	25 Peserta	31.841.500,00	100,00	29.697.683,00	93,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Jumlah Pelaku usaha	9 Pelaku usaha	179.390.000,00	100,00	168.319.710,00	93,83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatkatnya efektifitas dan efesien perdagangan dalam negeri		1.407.196.000,00	98,15	1.302.467.800,00	92,56	
	Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha	20 Pelaku usaha	126.080.000,00	100,00	117.835.000,00	93,46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	Terlatihnya Kapasitas SDM Petugas Lapangan	68 org	411.800.000,00	100,00	368.366.800,00	89,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Peningkatan Sarana Pasar Tradisional	Tertatanya Fasilitas Sarana Pasar	3 pasar	611.276.000,00	95,75	568.743.000,00	93,04	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Provinsi dan Lokal	Jumlah Pameran	2 Pameran	207.020.000,00	100,00	198.248.000,00	95,76	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Pasar	3 Pasar	51.020.000,00	100,00	49.275.000,00	96,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
4	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Tersedianya Data Pedagang Kaki Lima		193.377.500,00	100,00	188.457.500,00	97,46	
	Pelatihan Manajemen Pedagang eceran	Terdidiknya Kapasitas SDM Pedagang Eceran	3 Pasar	50.385.000,00	100,00	49.435.000,00	98,11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	Jumlah Sarana Pedagang Kreatif Lapangan	44 unit	142.992.500,00	100,00	139.022.500,00	97,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Kebersihan Pasar		27.159.564.599,00	45,18	24.537.437.908,00	90,35	
	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Jumlah Alat Penunjang Kebersihan Pasar	11 jenis	66.700.000,00	100,00	66.032.800,00	99,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pembangunan Pasar Loktuan	Dokumen perencanaan	1 Dokumen	101.980.000,00	100,00	100.801.000,00	98,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	1 Paket	9.733.381.599,00	90,56	8.775.048.583,00	90,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian (DAK Fisik Reguler Bidang Pasar)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kemetrolagian	22 Alat	720.733.000,00	100,00	685.180.000,00	95,07	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Dokumen perencanaan	1 Dokumen	101.020.000,00	100,00	100.597.500,00	99,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pembangunan Pasar Rawa Indah	Pasar Rawa Indah	2000 m2	16.435.750.000,00	15,01	14.809.778.025,00	90,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
5 Program; 16 Kegiatan				29.200.514.599,00	48,93	26.435.572.601,00	90,53	